



Katalog: 2204009
ISSN 2714-8458

PROFIL MIGRAN

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2024

Volume 7, 2025



BADAN PUSAT STATISTIK

PROFIL MIGRAN

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2024

Volume 7, 2025

<https://www.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK

PROFIL MIGRAN HASIL SURVEI SOSIAL EKONOMI NASIONAL 2024 VOLUME 7, 2025

Katalog : 2204009

ISSN : 2714-8548

Nomor Publikasi : 04100.25014

Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm

Jumlah Halaman : xxx+193 halaman

Penyusun Naskah : Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Penyunting : Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Pembuat Kover : Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Penerbit : ©Badan Pusat Statistik

Dicetak oleh : Badan Pusat Statistik

Sumber Ilustrasi : freepik, canva, flaticon,
Image Creator Microsoft Designer.

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

TIM PENYUSUN
PROFIL MIGRAN HASIL SURVEI SOSIAL EKONOMI NASIONAL 2024
VOLUME 7, 2025

Pengarah

Ateng Hartono

Penanggung Jawab

Ali Said

Penyunting

Mariet Tetty Nuryetty – Parwoto – Winida Albertha – Arnold Alfreddy
Heru Irawan – Monica Windi Triasturi – Nurhalimah – Erie Sadewo
Fajar Santoso Putra – Putri Ilhami Firdaus – Desta Febriana Indriyantika

Penulis Naskah

Raissa Samantha Hutajulu – Desta Febriana Indriyantika – Erie Sadewo
Monica Windi Triasturi – Nurhalimah – Putri Ilhami Firdaus
Suryo Adi Rakhmawan – Arnold Alfreddy – Fajar Santoso Putra
Heru Irawan – Hamim Tsalis Soblia

Pengolah Data

Hamim Tsalis Soblia – F. Tri Ayuningrum – Farakh Khoirotun Nasida
Fajar Santoso Putra – Heru Irawan

Penata Letak

Suryo Adi Rakhmawan – Nurhalimah

Pembuat Infografis

Desta Febriana Indriyantika – Monica Windi Triasturi – Putri Ilhami Firdaus

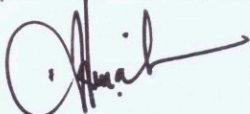
KATA PENGANTAR

Migrasi penduduk merupakan salah satu komponen utama dalam dinamika sosial ekonomi suatu wilayah. Perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain tidak hanya berdampak pada perubahan jumlah dan struktur penduduk, tetapi juga memengaruhi pola urbanisasi, perkembangan sosial ekonomi, tingkat kesejahteraan masyarakat, serta ketersediaan layanan publik baik di wilayah asal maupun tujuan. Ketersediaan data migrasi menjadi kebutuhan penting bagi pemerintah maupun pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan berbasis bukti. Data migrasi yang akurat dan komprehensif berperan strategis dalam mendukung perencanaan pembangunan wilayah yang berkelanjutan.

Badan Pusat Statistik (BPS) kembali menerbitkan Publikasi Profil Migran Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Edisi Ketujuh dengan tahun data 2024. Publikasi ini menyajikan informasi mengenai migrasi risen dan migrasi seumur hidup, yang mencakup besaran, arus, serta karakteristik individu dan rumah tangga, dilengkapi dengan kondisi sosial ekonomi di seluruh provinsi di Indonesia. Melalui publikasi ini, diharapkan pengguna data dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai pola dan dinamika migrasi di Indonesia, sehingga dapat dimanfaatkan dalam penyusunan strategi pembangunan yang inklusif serta penanganan isu-isu kependudukan lintas sektor.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan publikasi ini. Umpan balik, kritik, dan saran dari para pembaca akan menjadi masukan berharga bagi perbaikan dan penyempurnaan publikasi di masa mendatang.

Jakarta, Oktober 2025
Kepala Badan Pusat Statistik



Amalia Adininggar Widyasanti

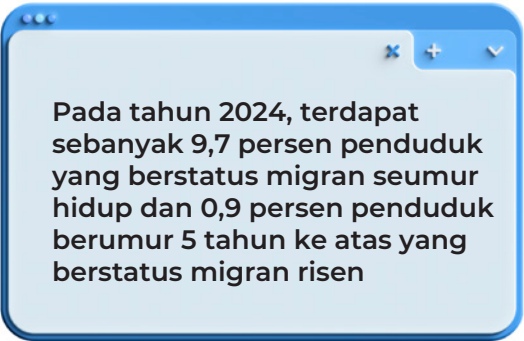


RINGKASAN EKSEKUTIF

Migrasi merupakan salah satu dari tiga faktor utama yang memengaruhi pertumbuhan populasi dan keseimbangan demografi suatu wilayah. Di Indonesia, disparitas ekonomi, ketersediaan lapangan kerja, dan akses terhadap fasilitas dasar antarwilayah menjadi pemicu utama terjadinya perpindahan penduduk. Arus migrasi ini, yang sebagian besar mengalir dari daerah pedesaan ke pusat perkotaan, tidak hanya menciptakan ketimpangan distribusi penduduk yang signifikan, tetapi juga memicu berbagai tantangan keberlanjutan. Di satu sisi, kota-kota besar menghadapi beban infrastruktur yang berat, kemacetan, dan peningkatan polusi. Di sisi lain, daerah asal migran berisiko mengalami *brain drain* dan kekurangan tenaga produktif yang penting untuk pembangunan lokal. Oleh karena itu, data migrasi yang akurat dan terperinci sangatlah vital. Informasi ini memungkinkan pemerintah untuk merancang strategi pembangunan yang lebih holistik, seperti mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di daerah terpencil, meningkatkan ketahanan pangan di daerah asal migran, serta menyusun kebijakan transportasi dan permukiman yang tidak hanya mengatasi kepadatan, tetapi juga mempromosikan pembangunan wilayah yang lebih merata dan berkelanjutan di masa depan.

Publikasi Profil Migran Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024 bertujuan untuk menggambarkan besaran, tingkat, pola, dan arus migrasi, baik seumur hidup maupun risen, serta menganalisis perbedaan karakteristik individu dan rumah tangga antara yang berstatus migran dengan nonmigran, khususnya untuk migrasi risen.

Susenas 2024 menunjukkan bahwa 9,7 persen penduduk Indonesia merupakan migran seumur hidup antarprovinsi, sedangkan 0,9 persen penduduk berumur 5 tahun ke atas merupakan migran risen antarprovinsi. Persentase tersebut menurun sedikit dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu masing-masing 9,8 persen untuk migran seumur hidup dan 1,0 persen untuk migran risen, yang mencerminkan dinamika ekonomi makro pascapandemi COVID-19. Kepulauan Riau memiliki migran masuk seumur hidup tertinggi dengan lebih dari dua dari lima penduduknya (42,0 persen) lahir di luar provinsi, diikuti oleh Kalimantan Timur (30,5 persen), DKI Jakarta (30,3 persen), Kalimantan Utara (29,2 persen), Riau (26,7 persen).



Pada tahun 2024, terdapat sebanyak 9,7 persen penduduk yang berstatus migran seumur hidup dan 0,9 persen penduduk berumur 5 tahun ke atas yang berstatus migran risen

Selain memiliki persentase migran masuk seumur hidup tertinggi, Kepulauan Riau juga memiliki persentase migran masuk risen tertinggi, dengan 3,7 persen penduduknya tinggal di provinsi lain pada lima tahun lalu. Posisi ini diikuti oleh DI Yogyakarta (2,8 persen), Papua Barat (1,7 persen), Sumatera Barat (1,6 persen) serta Nusa Tenggara Barat (1,5 persen).

Provinsi-provinsi di Pulau Jawa menjadi provinsi asal dan tujuan migran seumur hidup. Jawa Tengah dan Jawa Timur masuk ke dalam lima besar provinsi asal migran seumur hidup di hampir semua provinsi di Indonesia. Sementara itu, Jawa Barat dan DKI Jakarta masuk ke dalam lima besar provinsi tujuan migran seumur hidup dari separuh lebih provinsi di Indonesia.

Berdasarkan migrasi neto seumur hidup, seluruh provinsi di Kalimantan dan Papua serta sebagian besar provinsi di Sumatera dan Sulawesi, memiliki nilai positif, menunjukkan lebih banyak migran masuk dibandingkan dengan migran keluar. Provinsi dengan nilai neto positif tertinggi adalah Kepulauan Riau (48,4 persen), Kalimantan Timur (31,5 persen), dan Papua Selatan (26,8 persen). Sebaliknya, provinsi dengan nilai

migrasi seumur hidup neto negatif tertinggi, yang menandakan lebih banyak migran keluar daripada migran masuk, adalah Jawa Tengah (-16,6 persen), Sumatera Barat (-12,7 persen), dan Sulawesi Selatan (-12,3 persen).

Kepulauan Riau merupakan provinsi tujuan utama migrasi, baik migrasi seumur hidup (42,0 persen) maupun migrasi risen (3,7 persen)

Jawa Timur masuk ke dalam lima besar provinsi asal migran risen di 20 provinsi, Jawa Barat di 16 provinsi, Jawa Tengah di 15 provinsi, sedangkan Sulawesi Selatan dan DKI Jakarta masing-masing di 12 dan

11 provinsi. Sementara itu tiga provinsi besar di Jawa menjadi tujuan migran risen. Jawa Timur masuk ke dalam lima besar provinsi tujuan migran risen dari 20 provinsi di Indonesia. Jawa Tengah menduduki lima besar provinsi penerima migran risen dari 19 provinsi, sedangkan Jawa Barat dari 16 provinsi.

Berdasarkan migrasi neto risen, hampir seluruh provinsi di Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Kepulauan Maluku memiliki nilai positif, menunjukkan lebih banyak migran masuk (*In-migration*). Provinsi dengan nilai migrasi neto risen positif tertinggi adalah Kepulauan Riau (2,1 persen), kemudian DI Yogyakarta dan Nusa Tenggara Barat (masing-masing 1,3 persen), dan Papua Selatan (1,1 persen). Sebaliknya, provinsi dengan nilai migrasi neto risen negatif tertinggi adalah DKI Jakarta dan Papua (masing-masing -2,5 persen), Papua Barat Daya (-1,6 persen), dan Kalimantan Utara (-1,2 persen), yang menunjukkan lebih banyak migran keluar daripada masuk (*out-migration*).

Selanjutnya analisis profil migran difokuskan hanya kepada migrasi risen, yaitu individu migran risen dan rumah tangga migran risen, karena ia menggambarkan data migrasi dan dinamika sosial yang lebih aktual. data Survei Sosial Ekonomi Nasional

(Susenas) 2024 menunjukkan migran terdiri dari 51,2 persen laki-laki dan 48,8 persen perempuan, menunjukkan kesenjangan yang kecil, yang kemungkinan disebabkan semakin setaranya akses pendidikan dan karier antara laki-laki dan perempuan. Beberapa wilayah seperti Papua Barat Daya, Banten, dan DI Yogyakarta mencatat migran perempuan lebih tinggi, hal ini dapat dipicu oleh faktor ekonomi, pendidikan, dan perbaikan kualitas hidup.

Provinsi-provinsi di Pulau Jawa masih menjadi penyumbang besar arus asal dan tujuan migrasi seumur hidup dan risen

Sebaran umur migran dan nonmigran di Indonesia menunjukkan perbedaan signifikan. Lebih dari separuh migran berada di kelompok usia produktif awal 20-39 tahun, dengan puncak pada usia 20-29 tahun (31,0 persen), yang diduga didorong oleh keinginan yang tinggi untuk mencari penghasilan dan peluang hidup yang lebih baik pada rentang usia tersebut. Sebaliknya, sebaran umur nonmigran lebih merata di semua kelompok umur, dengan puncak pada usia 10-19 tahun (17,4 persen). Kepulauan Riau memiliki persentase migran muda usia 20-29 tahun tertinggi (55,2 persen), yang dapat dipicu oleh tingginya permintaan tenaga kerja di sektor industri dan jasa serta urbanisasi yang pesat.

Beberapa karakteristik migran dan nonmigran terbilang hampir sama. Kemampuan membaca dan menulis hanya sedikit lebih tinggi di kalangan migran dibandingkan nonmigran, dengan 97,1 persen migran mampu membaca dan menulis huruf latin dibandingkan dengan nonmigran sebesar 95,2 persen. Kemampuan membaca dan menulis huruf Arab mempunyai persentase yang hampir sama besar antara migran dan nonmigran yaitu masing-masing sebesar 52,2 persen dan 53,4 persen, sedangkan untuk huruf lainnya, migran hanya unggul sedikit yakni sebesar 9,9 persen dibanding 9,8 persen pada nonmigran.

Distribusi umur migran risen menunjukkan pola U terbalik, yakni cenderung tinggi di usia produktif awal tahun 20-29 tahun, dengan nilai sebesar 31,0 persen.

Sebesar 10,1 persen migran dan 11,4 persen nonmigran mengalami keluhan kesehatan yang mengganggu kegiatan sehari-hari dalam sebulan terakhir.

Karakteristik lain yang terbilang hampir mirip antara migran dengan nonmigran adalah pengalaman menjadi korban tindak kejahatan pada 1 Januari-31 Desember 2023 yakni sebesar 0,9 persen pada migran dan 0,5 persen pada nonmigran.

Sebesar 69,1 persen migran berumur 10 tahun ke atas menyatakan diri pernah kawin (kawin, cerai hidup, cerai mati), lebih tinggi daripada nonmigran (66,3 persen). Dari migran yang pernah kawin, sebesar 44,7 persen melaksanakan perkawinan

pertamanya pada umur 25 tahun ke atas, lebih tinggi daripada nonmigran sebesar 32,6 persen. Sebanyak 60,8 persen migran Wanita Pernah Kawin (WPK) berumur 10-54 tahun pernah/ sedang menggunakan alat/cara Keluarga Berencana (KB), lebih rendah daripada nonmigran sebesar 70,0 persen. Jenis KB yang paling banyak digunakan

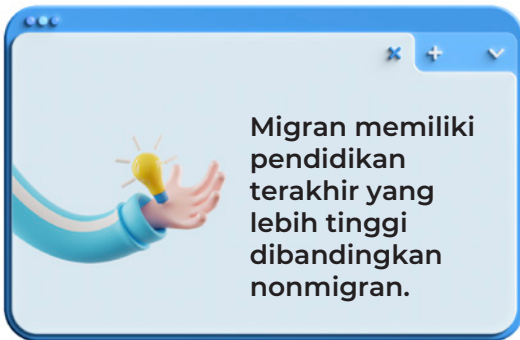
migran WPK usia 10-54 tahun adalah suntikan (45,5 persen), intrauterine device (IUD)/Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)/spiral (15,6 persen), dan pil (14,6 persen). Pada WPK nonmigran, tiga besar jenis KB yang digunakan adalah suntikan (52,3 persen), pil (18,4 persen), dan susuk KB/implan (11,6 persen).

Kebanyakan migran merupakan tamatan SMA/MA atau sederajat, dengan

persentase sebesar 34,8 persen. Sama halnya dengan migran, kebanyakan nonmigran juga menamatkan jenjang yang sama dengan persentase lebih rendah sebesar 25,4 persen. Namun, proporsi migran yang memiliki ijazah minimal SD/MI/Sederajat (83,3 persen) lebih tinggi dibandingkan nonmigran (76,2 persen). Fakta ini menegaskan bahwa migrasi merupakan fenomena yang didominasi oleh individu yang relatif lebih terdidik. Dengan bekal pendidikan yang memadai, mereka memiliki kepercayaan diri dan kesempatan lebih besar untuk merantau demi mencari peluang karier, pendidikan lanjutan, atau perbaikan kualitas hidup di tempat lain. Data juga menunjukkan bahwa 38,3 persen migran yang mengalami keluhan kesehatan memilih berobat jalan, sedikit lebih rendah dari nonmigran (37,2 persen), dengan praktik dokter atau bidan sebagai fasilitas yang paling banyak digunakan.

Pada tahun 2024, tren akses internet di Indonesia terus meningkat dengan persentase migran yang mengakses internet dalam tiga bulan terakhir mencapai 87,8 persen, meningkat 2,6 persen poin dibanding tahun 2023 sebesar 85,2 persen. Adapun akses internet migran lebih tinggi dibandingkan nonmigran sebesar 72,6 persen, yang mungkin disebabkan oleh kebutuhan migran untuk tetap terhubung dengan daerah asal, beradaptasi dengan lingkungan baru, dan mengakses informasi. *Handphone* (HP)/ponsel menjadi alat utama yang digunakan migran (98,9 persen), diikuti oleh laptop/notebook (15,3 persen).

Selain individu migran, publikasi ini juga membahas profil rumah tangga migran. Di Indonesia, 2,0 persen rumah tangga termasuk kategori rumah tangga migran, yaitu rumah tangga di mana setidaknya satu anggotanya tinggal di provinsi lain pada lima tahun sebelum survei. Kepulauan Riau memiliki persentase rumah tangga migran

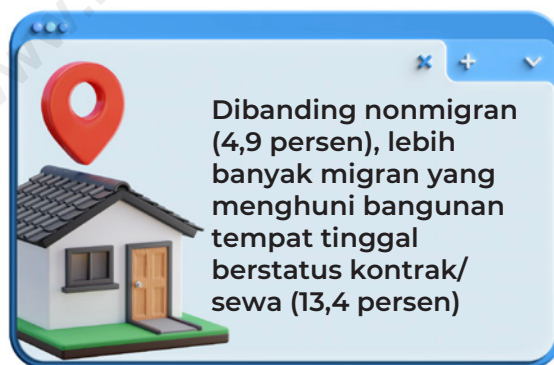


terbesar, yaitu 8,1 persen. Posisi Kepulauan Riau diikuti DI Yogyakarta (7,2 persen), Papua Barat (4,4 persen), Nusa Tenggara Barat (3,9 persen) dan Nusa Tenggara Timur (3,5 persen).

Proporsi rumah tangga migran yang mengontrak/menyewa rumah (13,4 persen) lebih tinggi dibandingkan rumah tangga nonmigran (4,9 persen). Meski demikian, proporsi rumah tangga dengan minimal satu anggota yang memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) relatif sama antara migran dan nonmigran yaitu masing-masing sebesar 70,1 persen dan 68,3 persen.

Meskipun persentase rumah tangga migran yang tinggal di rumah kontrak/sewa lebih tinggi, beberapa karakteristik perumahan antara migran dan nonmigran tidak berbeda jauh. Sebanyak 6,1 persen rumah tangga migran menempati hunian dengan luas per kapita kurang dari 7,2 m², sedikit lebih tinggi dibandingkan 5,7 persen pada rumah tangga nonmigran. Selain luas lantai per kapita, karakteristik lain yang hampir sama (berselisih kurang dari 4 persen poin) meliputi keberadaan fasilitas tempat buang air besar, sumber penerangan, penggunaan elpiji/gas untuk memasak, penerimaan kredit, serta sumber terbesar pembiayaan rumah tangga.

Sementara itu, rumah tangga migran menunjukkan beberapa karakteristik yang berbeda dibandingkan rumah tangga nonmigran. Sebesar 86,3 persen rumah tangga migran menempati hunian ber dinding tembok, lebih tinggi dari rumah tangga nonmigran (81,1 persen). Keramik merupakan bahan bangunan utama lantai rumah terluas bagi 65,3 persen rumah tangga migran, lebih tinggi dibanding rumah tangga nonmigran (59,8 persen). Selain itu, 83,5 persen rumah tangga migran menggunakan sumber air minum bersih, lebih tinggi dibandingkan nonmigran (78,6 persen), dan 94,6 persen menggunakan sumber air minum layak, lebih tinggi daripada nonmigran (92,6 persen).



Persentase rumah tangga migran memiliki berbagai jenis aset lebih tinggi daripada nonmigran, kecuali untuk jenis aset seperti tanah/lahan dan perahu. Sebesar 87,7 persen rumah tangga migran memiliki sepeda motor, lebih tinggi dibandingkan dengan rumah tangga nonmigran (84,2 persen). Persentase rumah tangga migran yang memiliki televisi layar datar minimal 30 inci (30,4 persen), komputer/laptop/tablet (30,3 persen), AC (19 persen), tabung gas minimal 5,5 kg atau lebih (13,1 persen), lebih tinggi minimal lima persen poin dari nonmigran. Sebaliknya, sebesar 70,3 persen rumah tangga migran memiliki aset tanah/lahan, lebih rendah dari nonmigran sebesar 76,9 persen.

Penggunaan alat komunikasi dan informasi dalam tiga bulan terakhir lebih masif di rumah tangga migran. Sebesar 99,0 persen rumah tangga migran menggunakan

telepon seluler, lebih tinggi daripada rumah tangga nonmigran (92,8 persen). Sebesar 97,7 persen rumah tangga migran mengakses internet, lebih tinggi secara signifikan daripada rumah tangga nonmigran (89,6 persen).

Rumah tangga migran lebih cenderung tidak menerima bantuan pangan nontunai dan program pemerintah seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dan Program Keluarga Harapan (PKH) daripada rumah tangga nonmigran. Sebesar 15,8 persen rumah tangga migran menerima bantuan pangan nontunai/program sembako selama 4 bulan terakhir, lebih rendah daripada rumah tangga nonmigran sebesar 20,4 persen. Sebesar 10,7 persen rumah tangga migran menerima PIP, lebih rendah daripada rumah tangga nonmigran sebesar 12,4 persen. Sebanyak 14,2 persen rumah tangga migran menerima KKS dan 11,5 persen rumah tangga migran menerima PKH, lebih rendah daripada rumah tangga nonmigran sebesar secara berurutan 16,3 persen dan 15,6 persen.

Adapun untuk jaminan sosial, persentase rumah tangga migran yang memiliki atau menerimanya dalam setahun terakhir (21,6 persen) lebih tinggi daripada rumah tangga nonmigran (15,8 persen).

PROFIL MIGRAN

Hasil SUSENAS 2024

Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) merupakan survei rumah tangga berskala nasional yang menyediakan data pembangunan di bidang sosial ekonomi. Survei ini dilaksanakan dua kali setahun di Indonesia, yang dapat menghasilkan besaran, arus, pola migrasi, serta informasi karakteristik migran lainnya

PROVINSI TEMPAT LAHIR **BERBEDA**
PROVINSI TINGGAL SAAT PENDATAAN

9,7%

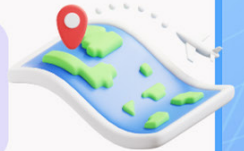
Penduduk Indonesia merupakan migran seumur hidup



PROVINSI TINGGAL LIMA TAHUN LALU
BERBEDA PROVINSI TINGGAL SAAT
PENDATAAN

0,9%

Penduduk Indonesia berumur lima tahun ke atas merupakan migran risen



MIGRASI SEUMUR HIDUP

42,0%

Persentase **migran masuk** seumur hidup tertinggi se-Indonesia di **Kepulauan Riau**



MIGRASI RISEN

3,7%

Persentase **migran masuk** risen tertinggi se-Indonesia di **Kepulauan Riau**



30,0%

Persentase **migran keluar** seumur hidup tertinggi se-Indonesia di **DKI Jakarta**



3,8%

Persentase **migran keluar** risen tertinggi se-Indonesia di **DKI Jakarta**



Gambar 0.1 Infografis Profil Migran Hasil Susenas 2024

KARAKTERISTIK MIGRAN RISEN

HASIL

SUSENAS 2024

USIA PRODUKTIF MUDA

54,5 %
20-39 Tahun

JENIS KELAMIN

51,2 %
Laki-Laki

Menggunakan Internet

87,8 %

98,9% akses internet dengan HP

Lebih melek internet
dibanding nonmigran
(72,6%)

Lulusan
Pendidikan
Menengah-Tinggi

50,5 %

Minimal SMA/MA sederajat

Lebih banyak dari nonmigran (33,8%)

MIGRAN RISEN (10+ TAHUN)

Menikah di Usia
≥19 Tahun

89,7 %

Menikah di usia lebih dewasa
dibanding nonmigran (79,6%)

63,1 %

Berstatus
Kawin

Lebih banyak dari
nonmigran (58,4%)

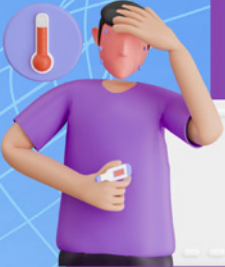
Gambar 0.2 Infografis Karakteristik Migran Hasil Susenas 2024



KARAKTERISTIK MIGRAN RISEN

HASIL

SUSENAS 2024



10,1 %

Mengalami Keluhan Kesehatan yang Mengganggu Kegiatan Sehari-hari

relatif lebih sedikit dari nonmigran (11,4%)

38,3 %



Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir lebih tinggi dibanding 37,2% nonmigran



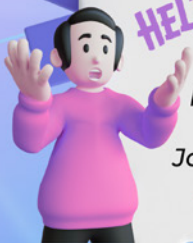
HELP!

0,9 %



Pernah Menjadi Korban Kejahatan Selama 1 Januari–31 Desember 2023

sedikit lebih rentan dari nonmigran (0,5%)



6 dari 10



adalah KRT atau anak dalam rumah tangga

Kepala Rumah Tangga: 28,8%; Anak Kandung/Tiri: 28,1%

MIGRAN RISEN WANITA
PERNAH KAWIN (10–54 TAHUN)

60,8 %

Pernah/Sedang Menggunakan Alat/Cara KB

relatif kurang terjangkau dibanding 70,0% nonmigran



95,4 %

sedang menggunakan Alat KB Modern

(Sterilisasi, IUD, Suntikan, Implan, Pil, Kondom)
lebih sedikit dari nonmigran (98,0%)



KARAKTERISTIK RUMAH TANGGA MIGRAN RISEN

HASIL SUSENAS MARET 2024



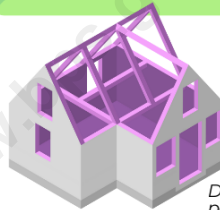
Rumah tangga migran (ruta migran) adalah rumah tangga biasa yang salah satu anggota rumah tangganya berstatus migran (bermigrasi dalam jangka waktu lima tahun terakhir)



Terdapat 2,0% rumah tangga migran risen di Indonesia



Kepulauan Riau merupakan provinsi dengan persentase rumah tangga migran **terbesar yaitu 8,1 persen**



Sebanyak **13,4 persen** **ruta migran** tinggal di bangunan **kontrak/sewa**

Dibanding ruta nonmigran, persentase ruta migran yang tinggal di bangunan kontrak/sewa lebih besar



Ruta migran lebih banyak **memiliki komputer/laptop/tablet (30,3 persen)** dibanding ruta nonmigran (18,3 persen)



Dibanding nonmigran (89,6 persen), **migran** lebih banyak **menggunakan internet dalam 3 bulan terakhir (97,7 persen)**



Ada **15 sampai 16** dari **100 ruta migran** yang menerima **bantuan pangan selama 4 bulan terakhir**



Terdapat **21,6 persen** ruta migran **memiliki atau menerima jaminan sosial**

Lebih tinggi dibanding pada ruta nonmigran (15,8 persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Tahun 2024
Ilustrasi: canva.com

Gambar 0.3 Infografis Karakteristik Rumah Tangga Migran Risen Hasil Susenas 2024

DAFTAR ISI
PROFIL MIGRAN HASIL SURVEI SOSIAL EKONOMI NASIONAL 2024
VOLUME 7, 2025

	Halaman
Kata Pengantar	v
Ringkasan Eksekutif	vii
Daftar Isi	xvii
Daftar Tabel	xix
Daftar Gambar	xxi
Daftar Lampiran	xxv
Penjelasan Umum	xxix
 BAB 1 Pendahuluan	 1
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tujuan Penulisan	4
1.3 Sistematika Penulisan	5
 BAB 2 Metodologi	 7
2.1 Sumber Data	9
2.2 Kerangka Sampel	9
2.3 Prosedur Penarikan Sampel	9
2.4 Pengumpulan Data	10
2.5 Pengolahan Data	10
2.6 Beberapa Konsep Definisi Operasional	10
 BAB 3 Penduduk Migran Indonesia	 23
3.1 Penduduk Migran	26
3.2 Migran Seumur Hidup	27
3.2.1 Migran Masuk Seumur Hidup	28
3.2.2 Migran Keluar Seumur Hidup	34
3.3 Migran Risen	38
3.3.1 Migran Masuk Risen	39
3.3.2 Migran Keluar Risen	43
3.4 Migran Neto	47
3.4.1 Migran Neto Seumur Hidup	47
3.4.2 Migran Neto Risen	49

	Halaman
BAB 4 Profil Migran Risen	51
4.1 Komposisi Migran dan Nonmigran Risen	53
4.1.1 Jenis Kelamin	53
4.1.2 Struktur Umur	55
4.1.3 Status Perkawinan	56
4.2 Pendidikan Migran dan Nonmigran Risen	58
4.2.1 Kemampuan Membaca dan Menulis	58
4.2.2 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	59
4.3 Kesehatan	62
4.4 Umur Kawin Pertama	65
4.5 Alat/Cara KB	67
4.6 Mengalami Tindak Kejahatan	70
4.7 Akses Internet	71
4.8 Perumahan	73
4.8.1 Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal	74
4.8.2 Luas Lantai per Kapita Tempat Tinggal	76
4.8.3 Jenis Dinding, Lantai dan Atap Rumah Terluas	77
4.8.4 Sanitasi	80
4.8.5 Sumber Air Minum	82
4.8.6 Bahan Bakar Utama Memasak	85
4.8.7 Sumber Penerangan	87
4.9 Keadaan Sosial Ekonomi Lainnya	88
4.9.1 Kepemilikan Aset	88
4.9.2 Jenis Alat Komunikasi dan Informasi	90
4.9.3 Penerimaan Bantuan Pangan Non Tunai/Program Sembako	92
4.9.4 Menerima Program Indonesia Pintar (PIP)	93
4.9.5 Memiliki/Menerima Jaminan Sosial	95
4.9.6 Menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Program Keluarga Harapan (PKH)	96
4.9.7 Menerima Kredit	97
4.9.8 Sumber Terbesar Pembiayaan Rumah Tangga	98
Daftar Pustaka	99
Lampiran	105

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Lima Besar Provinsi Asal Migran Seumur Hidup Antarprovinsi di Setiap Provinsi, 2024	31
Tabel 3.2 Lima Besar Provinsi Tujuan Migran Seumur Hidup Antarprovinsi dari Provinsi Tempat Lahir, 2024	35
Tabel 3.3 Lima Besar Provinsi Asal Migran Risen Antarprovinsi di Setiap Provinsi, 2024	40
Tabel 3.4 Lima Besar Provinsi Tujuan Migran Risen Antarprovinsi dari Provinsi Tempat Tinggal 5 (lima) Tahun yang Lalu, 2024	44

<https://www.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 0.1	Infografis Profil Migran Hasil Susenas 2024 xiii
Gambar 0.2	Infografis Karakteristik Migran Hasil Susenas 2024 xiv
Gambar 0.3	Infografis Karakteristik Rumah Tangga Migran Risen Hasil Susenas 2024 xvi
Gambar 3.1	Persentase Penduduk Migran Menurut Jenis Migrasi, 2020–2024 27
Gambar 3.2	Arus Migrasi Masuk dan Migrasi Keluar Seumur Hidup, 2024 28
Gambar 3.3	Lima Provinsi dengan Persentase Migran Masuk Seumur Hidup Terbesar di Indonesia, 2024 29
Gambar 3.4	Lima Provinsi dengan Persentase Migran Keluar Seumur Hidup Terbesar di Indonesia, 2024 34
Gambar 3.5	Arus Migrasi Masuk dan Migrasi Keluar Risen, 2024 38
Gambar 3.6	Lima Provinsi dengan Persentase Migran Masuk Risen Terbesar di Indonesia, 2024 39
Gambar 3.7	Lima Provinsi dengan Persentase Migran Keluar Risen Terbesar di Indonesia, 2024 43
Gambar 3.8	Persentase Migran Neto Seumur Hidup Menurut Provinsi, 2024 48
Gambar 3.9	Persentase Migran Neto Risen Menurut Provinsi, 2024 50
Gambar 4.1	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Status Migrasi Risen dan Jenis Kelamin, 2024 54
Gambar 4.2	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Status Migrasi Risen dan Kelompok Umur, 2024 56
Gambar 4.3	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Status Migrasi Risen dan Status Perkawinan, 2024 57
Gambar 4.4	Persentase Penduduk 5 Tahun ke Atas yang Dapat Membaca dan Menulis Menurut Status Migrasi Risen, 2024 58
Gambar 4.5	Persentase Penduduk 5 Tahun ke Atas Menurut Status Migrasi Risen dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2024 60
Gambar 4.6	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Status Migrasi Risen dan Keluhan Kesehatan yang Mengganggu Kegiatan Sehari-hari Selama 1 Bulan Terakhir, 2024 63
Gambar 4.7	Persentase Migran Risen Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Mengganggu Kegiatan Sehari-hari Selama 1 Bulan Terakhir Menurut Provinsi, 2024 64

	Halaman
Gambar 4.8	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan dalam 1 Bulan Terakhir Menurut Status Migrasi Risen dan Tiga Fasilitas Pengobatan yang Paling Banyak Dikunjungi, 2024 65
Gambar 4.9	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Status Migrasi Risen dan Umur Kawin Pertama, 2024 66
Gambar 4.10	Persentase Wanita yang Berumur 10–54 Tahun Pernah Kawin Menurut Status Migrasi Risen dan Penggunaan Alat/Cara KB, 2024 68
Gambar 4.11	Persentase Wanita yang Berumur 10–54 Tahun yang Sedang Menggunakan Alat/Cara KB Menurut Status Migrasi Risen dan Alat/Cara KB yang Digunakan, 2024 69
Gambar 4.12	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Status Migrasi Risen dan Kondisi Pernah Mengalami Tindak Kejahatan selama 1 Januari–31 Desember 2023 70
Gambar 4.13	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet dalam Tiga Bulan Terakhir Menurut Status Migrasi Risen, 2024 72
Gambar 4.14	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Alat yang Digunakan untuk Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir dan Status Migrasi Risen, 2024 73
Gambar 4.15	Persentase Rumah Tangga Menurut Status Migrasi Risen dan Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal, 2024 75
Gambar 4.16	Persentase Rumah Tangga Menurut Status Migrasi Risen dan Luas Lantai Bangunan Tempat Tinggal, 2024 77
Gambar 4.17	Persentase Rumah Tangga Menurut Status Migrasi Risen dan Kualitas Bahan Bangunan Tempat Tinggal Yang Digunakan, 2024 78
Gambar 4.18	Persentase Rumah Tangga Menurut Status Migrasi Risen dan Fasilitas Pengelolaan Limbah yang Digunakan, 2024 81
Gambar 4.19	Persentase Rumah Tangga Menurut Status Migrasi Risen yang Menggunakan Sumber Air Minum Utama Menurut Provinsi, 2024 84
Gambar 4.20	Persentase Rumah Tangga Menurut Status Migrasi Risen dan Empat Terbesar Bahan Bakar Utama untuk Memasak, 2024 86
Gambar 4.21	Persentase Rumah Tangga Menurut Status Migrasi Risen dan Sumber Penerangan yang Digunakan, 2024 88
Gambar 4.22	Persentase Rumah Tangga Menurut Status Migrasi Risen dan Kepemilikan Aset Rumah Tangga, 2024 89
Gambar 4.23	Persentase Rumah Tangga Menurut Status Migrasi Risen dan Jenis Alat Komunikasi dan Informasi yang Digunakan dalam 3 Bulan Terakhir, 2024 91

	Halaman
Gambar 4.24 Persentase Rumah Tangga yang Menerima Bantuan Pangan Nontunai/ Program Sembako Selama 4 Bulan Terakhir Menurut Status Migrasi Risen, 2024	93
Gambar 4.25 Persentase Rumah Tangga yang Menerima Program Indonesia Pintar (PIP) dalam Setahun Terakhir Menurut Status Migrasi Risen, 2024	94
Gambar 4.26 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki atau Menerima Jaminan Sosial dalam Setahun Terakhir Menurut Status Migrasi Risen dan Jenisnya, 2024	95
Gambar 4.27 Persentase Rumah Tangga yang Menerima Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Program Keluarga Harapan (PKH) Menurut Status Migrasi Risen, 2024	96
Gambar 4.28 Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit Menurut Status Migrasi Risen dan Jenis Kredit, 2024	97
Gambar 4.29 Persentase Rumah Tangga Menurut Status Migrasi Risen dan Sumber Terbesar Pembiayaan Rumah Tangga, 2024	98

DAFTAR LAMPIRAN

		Halaman
Lampiran 1	Persentase Penduduk Menurut Provinsi dan Status Migrasi Seumur Hidup Antarprovinsi, 2024	107
Lampiran 2	Persentase Penduduk berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Provinsi dan Status Migrasi Risen Antarprovinsi, 2024	108
Lampiran 3	Persentase Migran Masuk Seumur Hidup, Migran Keluar Seumur Hidup, dan Migran Neto Seumur Hidup Antarprovinsi Menurut Provinsi, 2024	109
Lampiran 4	Persentase Migran Masuk Risen, Migran Keluar Risen, dan Migran Neto Risen Antarprovinsi Menurut Provinsi, 2024	110
Lampiran 5	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Provinsi, Status Migrasi Risen Antarprovinsi, dan Jenis Kelamin, 2024	111
Lampiran 6	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Provinsi, Status Migrasi Risen Antarprovinsi, dan Kelompok Umur, 2024	112
Lampiran 7	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Provinsi, Status Migrasi Risen Antarprovinsi, dan Status Perkawinan, 2024	114
Lampiran 8	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Provinsi, Status Migrasi Risen Antarprovinsi, dan Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga (KRT), 2024	115
Lampiran 9	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Provinsi, Status Migrasi Risen Antarprovinsi, dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2024	116
Lampiran 10	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Provinsi, Status Migrasi Risen Antarprovinsi, dan Kemampuan Membaca dan Menulis, 2024	118
Lampiran 11	Persentase Penduduk 5 Tahun ke Atas Menurut Provinsi, Status Migrasi Risen Antarprovinsi, dan Status Keluhan Kesehatan Selama 1 Bulan Terakhir, 2024	120
Lampiran 12	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Provinsi, Status Migrasi Risen Antarprovinsi, dan Fasilitas Pengobatan, 2024	122
Lampiran 13	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Pernah Kawin Menurut Provinsi, Status Migrasi Risen Antarprovinsi, Jenis Kelamin, dan Umur Perkawinan Pertama, 2024	124

	Halaman
Lampiran 14	Persentase Wanita Berumur 10–54 Tahun yang Berstatus Pernah Kawin Menurut Provinsi, Status Migrasi Risen Antarprovinsi, dan Penggunaan Alat/ Cara KB, 2024 127
Lampiran 15	Persentase Wanita Pernah Kawin Berumur 10–54 Tahun yang Sedang Menggunakan Alat/Cara KB Menurut Provinsi, Status Migrasi Risen Antarprovinsi, dan Alat/Cara KB yang Digunakan, 2024 128
Lampiran 16	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Provinsi, Status Migrasi Risen Antarprovinsi, dan Kondisi Pernah/Tidak Mengalami Tindak Kejahatan Selama 1 Januari–31 Desember 2023 130
Lampiran 17	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Provinsi, Status Migrasi Risen Antarprovinsi, dan Alat yang Digunakan untuk Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir, 2024 131
Lampiran 18	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Provinsi, Status Migrasi Risen Antarprovinsi, dan Lokasi Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir, 2024 133
Lampiran 19	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Status Migrasi Risen Antarprovinsi, 2024 135
Lampiran 20	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi, Status Migrasi Risen Antarprovinsi, dan Status Kepemilikan Tanah Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati, 2024 136
Lampiran 21	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi, Status Migrasi Risen Antarprovinsi, dan Bukti Kepemilikan Bangunan Tinggal Milik Sendiri, 2024 138
Lampiran 22	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi, Status Migrasi Risen Antarprovinsi, dan Rata-Rata Luas Lantai Tempat Tinggal per Kapita, 2024 140
Lampiran 23	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi, Status Migrasi Risen Antarprovinsi, dan Bahan Bangunan Utama Dinding Rumah Terluas, 2024 141
Lampiran 24	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi, Status Migrasi Risen Antarprovinsi, dan Bahan Bangunan Utama Lantai Rumah Terluas, 2024 143
Lampiran 25	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi, Status Migrasi Risen Antarprovinsi, dan Bahan Bangunan Utama Atap Rumah Terluas, 2024 145
Lampiran 26	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi, Status Migrasi Risen Antarprovinsi, dan Sumber Air Utama Minum Rumah Tangga, 2024 147
Lampiran 27	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi, Status Migrasi Risen Antarprovinsi, dan Bahan Bakar Utama untuk Memasak, 2024 148

	Halaman
Lampiran 28	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi, Status Migrasi Risen Antarprovinsi, dan Fasilitas Tempat Buang Air Besar, 2024 150
Lampiran 29	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi, Status Migrasi Risen Antarprovinsi, dan Jenis Kloset yang Digunakan, 2024 152
Lampiran 30	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi, Status Migrasi Risen Antarprovinsi, dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja, 2024 153
Lampiran 31	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi, Status Migrasi Risen Antarprovinsi, dan Sumber Penerangan yang Digunakan, 2024 154
Lampiran 32	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi, Status Migrasi Risen Antarprovinsi, dan Kepemilikan Asset Rumah Tangga, 2024 155
Lampiran 33	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi, Status Migrasi Risen Antarprovinsi, dan Jenis Alat Komunikasi dan Informasi yang Digunakan dalam 3 Bulan Terakhir, 2024 159
Lampiran 34	Persentase Rumah Tangga yang Menerima Bantuan Pangan Nontunai/ Program Sembako Selama 4 Bulan Terakhir Menurut Provinsi, Status Migrasi Risen Antarprovinsi, dan Jumlah Bulan Penerimaan Bantuan, 2024 160
Lampiran 35	Persentase Rumah Tangga yang Menerima Program Indonesia Pintar (PIP) dalam Setahun Terakhir Menurut Provinsi dan Status Migrasi Risen Antarprovinsi, 2024 162
Lampiran 36	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki atau Menerima Jaminan Sosial dalam Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Status Migrasi Risen Antarprovinsi, dan Jenis Jaminan Sosial, 2024 163
Lampiran 37	Persentase Rumah Tangga Penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Program Keluarga Harapan (PKH) Menurut Provinsi dan Status Migrasi Risen Antarprovinsi, 2024 165
Lampiran 38	Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit Menurut Provinsi, Status Migrasi Risen Antarprovinsi, dan Jenis Kredit, 2024 166
Lampiran 39	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi, Status Migrasi Risen Antarprovinsi, dan Sumber Terbesar Pembiayaan Rumah Tangga, 2024 170
Lampiran 40	Kesalahan <i>Sampling</i> Migran Seumur Hidup Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2024 Berdasarkan Provinsi 171
Lampiran 41	Kesalahan <i>Sampling</i> Migran Risen Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2024 Berdasarkan Provinsi 173
Lampiran 42	Kesalahan <i>Sampling</i> Migran Risen Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2024 Berdasarkan Karakteristik Demografi 175

	Halaman
Lampiran 43	Kesalahan <i>Sampling</i> Migran Risen Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2024 Berdasarkan Karakteristik Lainnya 177
Lampiran 44	Kesalahan <i>Sampling</i> Rumah Tangga Migran Risen Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2024 Berdasarkan Provinsi 178
Lampiran 45	Kesalahan <i>Sampling</i> Rumah Tangga Migran Risen Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2024 Berdasarkan Karakteristik Perumahan 179
Lampiran 46	Kesalahan <i>Sampling</i> Rumah Tangga Migran Risen Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2024 Berdasarkan Karakteristik Perumahan 180
Lampiran 47	Kuesioner Survei Sosial Ekonomi Nasional 2024 181

PENJELASAN UMUM

Tanda-tanda yang digunakan dalam publikasi ini adalah sebagai berikut:

Tanda	Penjelasan
[–]	: Tidak ada atau nol mutlak
[~0]	: Data sangat kecil atau mendekati nol
[,]	: Tanda desimal
[.]	: Tanda pemisah ribuan

Perbedaan angka di belakang koma disebabkan oleh pembulatan angka.



BAB 1

PENDAHULUAN

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perubahan dinamika kependudukan di suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh faktor fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Dalam hal ini migrasi merupakan salah satu faktor yang dapat menambah atau mengurangi jumlah penduduk. Fertilitas dan migrasi masuk akan menjadi penambah jumlah penduduk, sedangkan mortalitas dan migrasi keluar akan mengurangi jumlah penduduk.

Keragaman kondisi, kesenjangan dan potensi antarwilayah di Indonesia merupakan situasi yang mendukung terjadinya migrasi. Selain itu, pada situasi yang berbeda, peluang dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan hidup juga akan berbeda. Ketidakpuasan secara fisik maupun nonfisik, baik yang disebabkan oleh masalah pribadi maupun lingkungan luar membuat sejumlah penduduk terdorong untuk melakukan migrasi. Mereka pindah ke tempat tinggal yang baru sebagai migran karena adanya berbagai faktor, Sumantri (2013) menyatakan beberapa alasan yang mendasari seseorang bermigrasi antara lain untuk melanjutkan pendidikan, mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, penghasilan yang lebih tinggi, mengikuti orang tua, mengikuti suami/istri atau keluarga, menikmati lingkungan yang lebih nyaman, atau menghindari diri dari beberapa hal yang tidak menyenangkan di daerah asal. Dengan harapan di tempat tinggal yang baru akan memperoleh hal-hal yang lebih baik.

Masalah migrasi di Indonesia berkaitan dengan kepadatan dan distribusi penduduk yang tidak merata. Hasil Sensus Penduduk 2020 (SP 2020) memperlihatkan bahwa 56,1 persen penduduk tinggal di Pulau Jawa yang luasnya hanya sekitar 6,9 persen dari seluruh luas wilayah Indonesia (BPS, 2021). Banyaknya penduduk yang tinggal di Pulau Jawa disebabkan karena besarnya kontribusi ekonomi pulau ini terhadap Indonesia. Di tahun 2024, kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pulau Jawa terhadap perekonomian Indonesia mencapai 57,02 persen (BPS, 2024 Triwulan IV). Selain itu, sarana pendidikan, kesehatan, dan hiburan yang relatif lengkap dibanding pulau-pulau lainnya menyebabkan banyaknya penduduk yang bertempat tinggal di Pulau Jawa.

Meskipun demikian, arus migrasi yang terjadi di Pulau Jawa berbeda antarwilayah. Hasil Sensus Penduduk memperlihatkan beberapa provinsi seperti Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur memiliki nilai positif untuk migrasi risen neto atau sebagai provinsi penerima migran, artinya jumlah migran masuk lebih besar daripada jumlah migran keluar. Berbeda dengan ketiga provinsi tersebut, DKI Jakarta, Papua, dan Bali memiliki nilai negatif untuk migrasi risen neto yang cukup besar atau sebagai provinsi pengirim migran, yang artinya jumlah migran keluar lebih besar daripada jumlah migran masuk.

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan program redistribusi penduduk sejak tahun 1950. Program yang disebut transmigrasi tersebut bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan kepadatan penduduk di Pulau Jawa, memberikan kesempatan bagi orang yang mau bekerja, dan untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja untuk mengolah sumber daya di pulau-pulau lain seperti Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Transmigrasi bukan hanya program untuk memindahkan penduduk, tetapi juga upaya pengembangan wilayah. Transmigrasi pertama kali dilakukan dengan memindahkan 23 keluarga dari Jawa Tengah menuju Lampung. Meskipun upaya pemerataan penduduk telah dilakukan, namun sampai saat ini masalah ketimpangan persebaran penduduk belum dapat teratasi sepenuhnya.

Sumber data migrasi awalnya hanya dari Sensus Penduduk (SP) dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS). Dengan kata lain, data migrasi hanya tersedia 5 tahun sekali. Untuk menjembatani kelangkaan data migrasi, sejak tahun 2011, BPS mulai mengumpulkan informasi migrasi melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Selain dapat menghasilkan besaran, arus, dan pola migrasi, data Susenas juga dapat menghasilkan informasi mengenai karakteristik migran seperti pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, fertilitas, perumahan dan karakteristik sosial lainnya. Penulisan profil migran pada buku ini menggunakan data Susenas Maret 2024 dan fokus pada migran risen, yaitu penduduk yang provinsi tempat tinggalnya saat pendataan berbeda dengan provinsi tempat tinggalnya lima tahun yang lalu.

1.2 TUJUAN PENULISAN

Penulisan publikasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pola dan arus migrasi antarprovinsi di Indonesia, khususnya migrasi risen. Selain itu akan diuraikan mengenai karakteristik penduduk pendatang (migran) beserta karakteristik rumah tangganya.

Publikasi ini bermanfaat untuk memperkaya informasi terkait mobilitas penduduk dan tenaga kerja. Selain itu, publikasi ini dapat dijadikan bahan masukan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan perencanaan pembangunan terkait masalah migrasi seperti kebijakan dan perencanaan dalam bidang transportasi, upaya pengendalian penduduk, dan yang terkait dengan kesenjangan pembangunan wilayah.

Bagi BPS sebagai penyelenggara survei, profil migran ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi kegiatan dan rujukan untuk survei berikutnya. Berbagai temuan yang berkaitan dengan hasil survei dapat dijadikan rekomendasi untuk memperbaiki dan membentuk pertanyaan-pertanyaan baru yang berkaitan dengan migrasi.

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan publikasi ini dibagi menjadi 4 bagian berikut ini:

1. Bab pertama menguraikan secara singkat latar belakang serta tujuan penulisan serta sistematika penulisan guna mengantarkan pembaca pada topik yang akan dibahas lebih lanjut.
2. Bab kedua menjelaskan metodologi pengumpulan data Susenas Maret 2024 sebagai sumber utama dalam publikasi ini yang meliputi kerangka sampel, prosedur penarikan sampel, serta mekanisme pengumpulan, dan pengolahan data. Selain itu, disajikan pula konsep dan definisi operasional yang menjadi acuan dalam penyusunan dan interpretasi data sehingga pembaca dapat memahami konteks serta keterbatasan data yang digunakan.
3. Bab ketiga membahas mengenai komposisi penduduk migran, arus migrasi seumur hidup dan migrasi risen serta persentase migran seumur hidup dan migran risen antarprovinsi di Indonesia.
4. Bab keempat membahas karakteristik migran risen meliputi pendidikan, kesehatan, umur perkawinan pertama, penggunaan alat/cara KB, pengalaman tindak kejahatan, akses internet, perumahan, dan keadaan sosial ekonomi lainnya.



BAB 2

METODOLOGI

BAB 2. METODOLOGI

2.1 SUMBER DATA

Sumber data utama dalam publikasi ini adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024. Data perpindahan penduduk yang dihasilkan Susenas diperoleh dari pertanyaan tempat lahir dan tempat tinggal lima tahun yang lalu dalam daftar pertanyaan Susenas Kor. Kedua pertanyaan ini ditanyakan untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Publikasi ini akan menganalisis lebih lanjut fenomena perpindahan penduduk, khususnya dari tempat tinggal lima tahun yang lalu ke tempat tinggal sekarang (pada saat survei) atau yang biasa disebut sebagai migrasi risen.

2.2 KERANGKA SAMPEL

Pembentukan kerangka sampel Susenas Maret 2024 dilakukan melalui dua tahap. Pada tahap pertama, kerangka sampel meliputi: (a) daftar populasi blok sensus biasa 2020 yang dilengkapi dengan informasi klasifikasi perkotaan/perdesaan; (b) daftar 40 persen blok sensus 2020 yang terpilih sebagai *Master Sampling Frame*; dan (c) daftar blok sensus terpilih Susenas Maret 2023. Selanjutnya, kerangka sampel tahap kedua adalah daftar populasi rumah tangga yang dilengkapi informasi tingkat pendidikan kepala rumah tangga hasil pemutakhiran Susenas Maret 2024 di setiap blok sensus terpilih. Susenas Maret 2024 dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia (34 provinsi) dengan ukuran sampel 345.000 rumah tangga yang tersebar di 514 kabupaten/kota di Indonesia. Sampel tidak termasuk rumah tangga yang tinggal dalam blok sensus khusus dan rumah tangga khusus seperti asrama, penjara, dan sejenisnya tetapi rumah tangga yang berada di blok sensus biasa.

2.3 PROSEDUR PENARIKAN SAMPEL

Pemilihan sampel Susenas Maret 2024 dilakukan dengan dua tahap. Tahap pertama adalah memilih 40 persen blok sensus populasi secara *Probability Proportional to Size* (PPS), dengan *size* jumlah Kepala Keluarga (KK) hasil Rekap Daftar Penduduk SP2020 di setiap strata di kabupaten/kota. Kemudian memilih sejumlah n blok sensus sesuai alokasi secara sistematis di setiap strata *urban/rural* per kabupaten/kota. Blok sensus yang digunakan pada Susenas Maret 2024 sama dengan blok sensus yang digunakan Susenas Maret 2023.

Tahap kedua adalah memilih 10 rumah tangga hasil pendaftaran (*listing*) secara *systematic sampling* dengan daftar populasi rumah tangga yang dilengkapi informasi tingkat pendidikan kepala rumah tangga hasil pemutakhiran di setiap blok sensus

terpilih *implicit stratification* menurut pendidikan kepala rumah tangga (KRT). Rumah tangga sampel Susenas Maret 2024 sama dengan rumah tangga sampel yang digunakan pada Susenas Maret 2023.

2.4 PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data dari rumah tangga terpilih dilakukan dengan cara wawancara langsung antara petugas pencacah dengan responden. Keterangan rumah tangga dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala rumah tangga, suami/istri kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga yang mengetahui karakteristik yang ditanyakan.

2.5 PENGOLAHAN DATA

Pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan. Proses pengolahan dimulai di BPS Kabupaten/Kota dengan kegiatan *receiving/batching*, *editing/coding*, entri data, dan validasi sederhana. Setelah terbentuk raw data, di BPS Provinsi dilakukan validasi sederhana. Tahap terakhir pengolahan dilakukan di BPS Pusat yaitu proses validasi lengkap untuk menghasilkan data yang bersih (*clean data*). Hasil akhir yang disajikan adalah data berbentuk tabel. Tabel-tabel pada publikasi ini dihasilkan dengan program tabulasi yang dibuat khusus.

2.6 BEBERAPA KONSEP DEFINISI OPERASIONAL

Konsep definisi operasional yang disajikan merupakan gabungan dari penjelasan pada buku Konsep dan Definisi Susenas Maret 2024 serta buku pedoman lainnya yang relevan. Beberapa konsep dan definisi kunci diuraikan sebagai berikut:

Penduduk

Warga Negara Indonesia (WNI) dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Bertempat tinggal artinya telah menetap satu tahun atau lebih, atau menetap kurang dari satu tahun tetapi bermaksud/berencana menetap selama minimal satu tahun, atau mereka yang sedang bepergian ke wilayah lain kurang dari satu tahun dan tidak bermaksud menetap di wilayah tujuan.

Penduduk yang bertempat tinggal tetap, dicacah di mana mereka biasanya bertempat tinggal. Penduduk, yang sedang bepergian satu tahun atau lebih, atau yang telah berada pada suatu



tempat tinggal selama satu tahun atau lebih, dicacah di mana mereka tinggal pada saat pencacahan. Penduduk yang menempati rumah kontrak/sewa (tahunan/ bulanan) dianggap sebagai penduduk yang bertempat tinggal tetap.

Migran

Penduduk yang melakukan perpindahan tempat tinggal melewati batas wilayah administrasi seperti provinsi atau kabupaten/kota.

Migran Seumur Hidup (*Lifetime Migrant*)

Penduduk yang tempat tinggalnya sekarang/saat pencacahan berbeda dengan wilayah administrasi (provinsi atau kabupaten/ kota) tempat lahirnya.

Migran Risen (*Recent Migrant*)

Penduduk yang tempat tinggalnya sekarang/saat pencacahan berbeda dengan wilayah administrasi (provinsi atau kabupaten/ kota) tempat tinggalnya pada lima tahun sebelum pencacahan.

Migrasi Masuk

Ukuran yang menunjukkan banyaknya migran yang masuk ke suatu wilayah selama periode pengamatan untuk setiap 100 atau 1.000 orang penduduk.

$$m_i = \frac{M_i}{p_{i,t+n}} k$$

Migrasi Keluar

Ukuran yang menunjukkan banyaknya migran yang keluar dari suatu wilayah selama periode pengamatan untuk setiap 100 atau 1.000 orang penduduk.

$$m_{(i-i)} = \frac{M_i - M_{i.}}{p_{i,t+n} - 0.5(M_i + M_{i.})} k$$

Migrasi Neto

Selisih antara peristiwa migrasi masuk dengan migrasi keluar. Angka tersebut menunjukkan gambaran suatu wilayah merupakan pengirim atau penerima migran.

$$m_i = \frac{M_i}{p_{i,t+n} - M_i + M_{i.}} k$$



Kawin

Status seseorang yang pada saat pencacahan hidup sebagai suami atau istri berdasarkan peraturan hukum/adat/agama, baik yang mendapatkan surat nikah maupun tidak, namun sah menurut hukum/adat/agama.

Termasuk kategori kawin yaitu mereka yang mempunyai pasangan perempuan (bagi laki-laki) atau pasangan laki-laki (bagi perempuan) tanpa terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum (adat, agama, negara), namun memiliki hubungan layaknya suami istri, baik tinggal bersama dalam satu rumah maupun tidak.

Cerai Hidup

Status seseorang yang pada saat pencacahan telah berpisah sebagai suami-istri karena bercerai dan belum kawin lagi.

Termasuk cerai hidup yaitu mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum; mereka yang pernah hidup bersama, tetapi pada saat pencacahan sudah berpisah (tidak hidup bersama lagi); perempuan yang mengaku belum pernah menikah/kawin/hidup bersama, tetapi mempunyai anak (hamil di luar nikah), baik anak yang masih hidup maupun yang sudah meninggal.

Tidak termasuk cerai hidup yaitu mereka yang hidup terpisah, tetapi masih berstatus kawin, misalnya suami/istri ke tempat lain karena sekolah, bekerja, mencari pekerjaan, atau untuk keperluan lain.

Cerai Mati

Status seseorang yang ditinggal mati oleh suami atau istrinya dan belum kawin lagi.

Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga

Kepala Rumah Tangga yaitu salah seorang dari Anggota Rumah Tangga (ART) yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga. Istri/Suami yaitu pasangan dari Kepala Rumah Tangga (KRT).

Anak Kandung adalah anak yang lahir dari perkawinan KRT dengan pasangannya; anak sendiri (bukan anak tiri atau anak angkat). Sedangkan Anak Tiri adalah anak bawaan suami/istri yang bukan hasil perkawinan dengan istri/ suami sekarang. Selanjutnya, Anak Angkat adalah anak orang lain yang diambil (dipelihara) serta disahkan secara hukum sebagai anak

sendiri. Dalam hal ini, termasuk anak angkat yang disahkan oleh pemangku adat. Jika seorang anak hanya diakui sebagai anak angkat tanpa ada pengangkatan anak secara legal formal (di catatan sipil atau pengadilan agama) atau disahkan oleh pemangku adat, maka tidak dicatat sebagai anak angkat.

Menantu merupakan suami/istri dari anak kandung, anak tiri, atau anak angkat. **Cucu** adalah anak dari anak kandung, anak tiri, atau anak angkat. Dan **Orang Tua/Mertua** adalah bapak/ibu dari KRT atau bapak/ibu dari istri/suami KRT.

Berikutnya, **Pembantu** adalah orang yang bekerja sebagai pembantu yang menginap di rumah tangga dan menerima upah/gaji, baik berupa uang ataupun barang. **Termasuk pembantu** adalah famili yang dipekerjakan sebagai pembantu (menerima upah/gaji); tukang kebun yang menjadi ART majikan (makan dan menginap di rumah majikan); anak pembantu yang ikut tinggal di dalam rumah tangga yang diperlakukan sebagai pembantu. Sedangkan **Sopir** adalah orang yang bekerja untuk mengemudikan kendaraan bermotor yang menginap di rumah tangga dan menerima upah/gaji baik berupa uang ataupun barang.

Orang yang tidak ada hubungan famili dengan KRT atau istri/suami KRT yang berada di rumah tangga 1 tahun atau lebih, seperti tamu, teman, dan orang yang mondok dengan makan (indekos), termasuk anak pembantu yang juga tinggal dan makan di rumah tangga majikannya disebut sebagai **Lainnya**. **Termasuk famili lain:** orang yang ada hubungan famili dengan KRT atau dengan istri/suami KRT, seperti adik, kakak, bibi, paman, dan lainnya, serta mantan menantu yang tidak ada hubungan famili dengan kepala rumah tangga.

Dapat Membaca dan Menulis

Jika seseorang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, atau huruf lainnya. Sementara, kalimat sederhana adalah kalimat yang mengandung kata-kata yang umum dipakai dalam kehidupan sehari-hari dan setidaknya mengandung subjek dan predikat, misalnya "Saya membaca".

Ijazah/STTB

Lembaran atau tanda bukti kelulusan yang diberikan kepada seseorang yang sudah menyelesaikan semua persyaratan akademik pada suatu jenjang pendidikan tertentu.



Keluhan Kesehatan

Keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena gangguan/penyakit yang sering dialami, seperti: panas, batuk, pilek, diare, sakit kepala, maupun karena penyakit akut, penyakit kronis (meskipun selama sebulan terakhir tidak mempunyai keluhan), karena kecelakaan, kriminalitas atau keluhan kesehatan lainnya. Keluhan yang dimaksud adalah keluhan fisik maupun psikis.

Rawat Jalan

Upaya ART yang mempunyai keluhan kesehatan untuk memeriksakan diri dan mendapatkan pengobatan dengan mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan modern atau tradisional tanpa menginap, termasuk mendatangi petugas kesehatan ke rumah ART.

Umur Perkawinan Pertama

Umur pertama kali seseorang melakukan hubungan suami istri.

Keluarga Berencana

Tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang diinginkan, mengatur interval antarkelahiran, mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan suami istri dan menentukan jumlah anak dalam keluarga.

Kontrasepsi

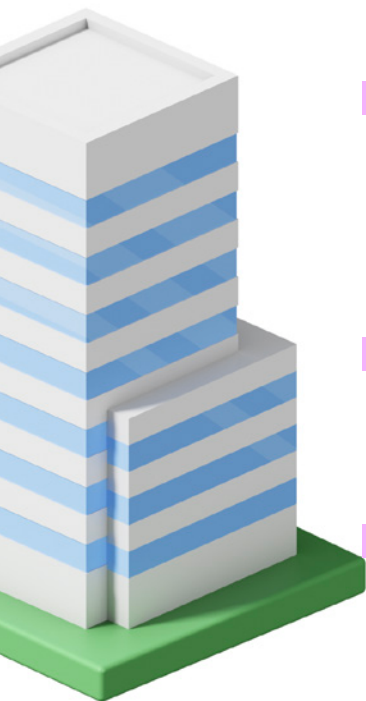
Cara mencegah kehamilan dengan menggunakan alat/obat pencegah kehamilan seperti spiral, kondom, pil anti hamil, dll. atau dengan metode alami yang dipercaya dapat mencegah kehamilan seperti pantang berkala, senggama terputus, metode menyusui alami, dll .

Korban Kejahatan

Seseorang yang diri atau harta bendanya selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/ percobaan tindak kejahatan.

Luas Lantai

Luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari (sebatas atap rumah). Bagian-bagian yang digunakan bukan untuk keperluan sehari-hari tidak dimasukkan dalam



penghitungan luas lantai seperti lumbung padi, kandang ternak, lantai jemur (hamparan semen), dan ruangan khusus untuk usaha (misalnya warung). Taman yang memiliki atap menyatu dengan atap rumah (berada di dalam rumah) maupun taman yang berada di samping rumah, namun berada di bawah atap rumah dan merupakan satu kesatuan struktur maka taman dihitung luas lantainya.

Dinding, Lantai, dan Atap

Dinding adalah sisi luar/batas dari suatu bangunan atau penyekat dengan bangunan fisik lain. **Lantai** merupakan bagian bawah/dasar/alas suatu ruangan, baik terbuat dari marmer/keramik/granit, tegel/traso, semen, kayu, tanah, dan lainnya. Sedangkan **Atap** yaitu penutup bagian atas suatu bangunan sehingga kepala ruta/anggota ruta yang mendiaminya terlindung dari terik matahari, hujan dan sebagainya. Pada bangunan bertingkat, atap adalah bagian teratas dari bangunan tersebut.

Menggunakan Internet

Apabila seseorang meluangkan waktu untuk menggunakan internet, sehingga ia dapat memanfaatkan atau menikmati fasilitas internet, seperti mencari literatur/referensi, mencari/mengirim informasi/berita, komunikasi, *e-mail*, *chatting*, media sosial, *online games*, dll.

Termasuk menggunakan internet walaupun tidak memiliki kemampuan untuk membuka dan menutup (*log in* dan *log out*) internet. Siapa saja dimasukkan menggunakan internet meskipun hanya tinggal melanjutkan.

Rumah

Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman). Termasuk dalam klasifikasi rumah adalah bangunan tempat tinggal lainnya yang dapat dijadikan tempat berhuni misalnya apartemen, kondominium, dll.

Keterangan rumah yang dimaksud adalah keterangan perumahan yang ditempati pada saat pencacahan. Contoh: Jika pada saat pencacahan, rumah tangga sedang mengungsi di rumah tetangganya, karena rumahnya sedang direnovasi, maka keterangan



perumahan yang dicatat adalah kondisi perumahan pada rumah yang sedang diungsi (rumah tetangganya). Adapun status kepemilikan bangunan tempat tinggal yang ditempati mencakup: milik sendiri, kontrak/sewa, bebas sewa, dinas, dan lainnya.

Fasilitas Tempat Buang Air Besar

Ketersediaan jamban/kloset yang dapat digunakan oleh rumah tangga responden. Ketersediaan ini dilihat dari keberadaan fasilitas tersebut dan siapa saja yang menggunakannya yang dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu: ada dan digunakan hanya ART sendiri, ada dan digunakan bersama ART rumah tangga tertentu, ada di MCK komunal, ada di MCK umum/siapapun menggunakan, ada dan ART tidak menggunakan, serta tidak ada fasilitas.

Sumber Air Minum

Sumber air yang digunakan untuk minum sehari-hari. Jika responden menggunakan air minum yang berasal dari beberapa sumber air, maka yang dimaksud merupakan salah satu sumber air yang volume airnya paling banyak digunakan oleh rumah tangga.

Sumber Air Minum Bersih

Terdiri dari air kemasan, air isi ulang, dan leding. Selain itu, sumur bor atau sumur pompa, sumur terlindung, serta air yang berasal dari sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung, dengan ketentuan bahwa lokasi sumber air tersebut berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat.

Sumber Air Minum Layak

Klasifikasi sumber air minum layak adalah jika sumber utama air yang digunakan untuk minum berasal dari air leding, sumur bor atau sumur pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan. Termasuk juga ketika sumber air utama yang digunakan berasal dari air kemasan bermerk atau air isi ulang.

Sumur Terlindung

Sumur galian bila lingkaran sumur/perigi tersebut dilindungi oleh tembok paling sedikit 0,8 meter di atas tanah dan 3 meter ke bawah tanah, serta ada lantai semen sejauh 1 meter dari lingkaran sumur/perigi.

Bahan Bakar Utama Memasak

Bahan bakar yang paling sering digunakan untuk keperluan memasak sehari-hari. Jenis bahan bakar utama untuk memasak yaitu listrik, bluegaz, elpiji 12 kg, elpiji 3 kg, gas kota, bio gas, minyak tanah, briket/batu bara, arang, dan kayu bakar.

Sumber Utama Penerangan Rumah Tangga

Sumber utama yang digunakan untuk menerangi tempat tinggal rumah tangga. Apabila rumah tangga menggunakan lebih dari satu sumber penerangan, maka yang dimaksud adalah sumber penerangan yang paling banyak digunakan. Macam-macam sumber penerangan adalah sebagai berikut: listrik PLN dengan meteran, listrik PLN tanpa meteran, listrik non-PLN, dan bukan listrik. Sumber penerangan listrik non-PLN merupakan sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi/pihak lain selain PLN, termasuk yang menggunakan sumber penerangan dari accu (aki), generator, dan pembangkit listrik tenaga surya (tidak dikelola oleh PLN). Sumber penerangan bukan listrik meliputi petromak, aladin, pelita, sentir, obor, lilin, karbit, biji jarak, kemiri, dan lain-lain.

Kepemilikan Aset

Kepemilikan rumah tangga terhadap barang-barang meliputi tabung gas 5,5 kg atau lebih; lemari es/kulkas; ac (air conditioner); pemanas air (*water heater*); telepon rumah, *Public Switched Telephone Network* (PSTN) atau yang biasa disebut jaringan telpon tetap (dengan kabel); komputer/laptop/tablet; emas/perhiasan minimal 10 gram; sepeda motor; perahu; perahu motor; mobil; televisi layar datar minimal 30 inch; serta tanah/lahan, termasuk tanah milik sendiri yang didirikan bangunan tempat tinggal rumah tangga.

Kepemilikan ini termasuk memiliki barang apabila barang tersebut masih dalam proses kredit, sedang digadaikan atau digunakan oleh orang lain. Termasuk juga jika memiliki barang namun dalam keadaan rusak dan hanya sementara tidak dapat dipakai, maka tetap dianggap memiliki. Bila tidak dapat diperbaiki lagi, maka dianggap tidak memiliki. Indikator ini dapat digunakan untuk menentukan suatu ukuran kasar mengenai keadaan sosial ekonomi rumah tangga.

Telepon Seluler (HP)/Nirkabel

Telepon Seluler adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon

tetap kabel, namun dapat dibawa ke mana-mana (*portable, mobile*), dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telekomunikasi kabel. Selain berfungsi sebagai telepon, telepon seluler modern biasanya mendukung layanan tambahan, seperti *Short Messages Services (SMS)*, *Multimedia Messages Service (MMS)*, e-mail, akses internet, aplikasi bisnis dan permainan, serta fotografi.

Telepon tetap nirkabel atau *Fixed Wireless Access (FWA)* merujuk pada jaringan transmisi nirkabel lokal yang menggunakan teknologi seluler, gelombang mikro atau radio untuk menghubungkan sinyal kepada pelanggan di lokasi yang tetap ke sentral lokal. Lisensi FWA menggunakan teknologi *Code Division Multiple Access (CDMA)* yang mengikuti nomor telepon biasa dengan kode area tertentu yang tidak bisa dibawa ke luar area tersebut, kecuali dengan mengganti sementara dengan nomor kode area daerah setempat. Telepon tetap nirkabel basisnya merupakan telepon tetap bukan portable, sehingga tidak termasuk telepon seluler.

Komputer

Komputer yang dimaksud mencakup PC (*personal computer*)/*desktop*, laptop/*notebook*, dan tablet. **PC (*personal computer*)/Desktop** adalah komputer yang biasanya tetap di satu tempat, biasanya pengguna ditempatkan di depannya, di belakang *keyboard*.

Laptop/Notebook adalah komputer yang cukup kecil untuk dibawa dan biasanya memungkinkan tugas yang sama sebagai komputer desktop, tetapi juga mencakup *netbook*, tetapi tidak termasuk tablet dan sejenis komputer genggam.

Tablet (atau sejenis komputer genggam) adalah komputer yang terintegrasi ke layar sentuh datar, yang dioperasikan dengan menyentuh layar daripada menggunakan keyboard fisik. Dalam hal ini, tidak termasuk peralatan dengan beberapa kemampuan komputasi, seperti set TV pintar, dan perangkat dengan telepon sebagai fungsi utama mereka, seperti *smartphone*. Tablet meskipun bisa digunakan untuk menelpon, tidak dimasukkan dalam kelompok telepon seluler karena fungsi utama tablet adalah sebagai komputer.

Internet (*Interconnected Network*)

Jaringan komputer publik di seluruh dunia, menyediakan akses ke sejumlah komunikasi termasuk World Wide Web, e-mail, berita, hiburan, dan file data, terlepas dari perangkat yang digunakan (tidak diasumsikan hanya melalui komputer, mungkin juga melalui

telepon seluler, tablet, PDA, mesin game, TV digital, dll.). Akses bisa melalui jaringan *fixed* maupun mobile.

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Bantuan sosial pangan dalam bentuk nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme perbankan. KPM akan menerima kit bantuan nontunai berupa kupon elektronik (*e-voucher*) dari Bank Penyalur. Besaran Bantuan Pangan Non Tunai adalah Rp110.000,00 per KPM per bulan.

Program Sembako

Program bantuan sosial pangan yang merupakan pengembangan dari bantuan pangan nontunai dengan penambahan nilai bantuan dan jenis bahan pangan. Nilai dari Program Sembako sebesar Rp150.000,00 per KPM per bulan. Kriteria pangan yang diperoleh adalah pangan bernutrisi dan bahan makanan yang sensitif dengan daya beli masyarakat.

Program Indonesia Pintar (PIP)

Bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan.

Jaminan Pensiun/Veteran

Jaminan pekerja/pegawai negeri sipil (PNS)/TNI/Polri yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib. Jaminan pensiun diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap (sumber UU No 40 Tahun 2004). Manfaat jaminan pensiun umumnya berwujud uang tunai yang diterima setiap bulan.

Jaminan Hari Tua

Program jaminan yang ditujukan sebagai pengganti terputusnya penghasilan tenaga kerja karena meninggal, cacat, atau hari tua dan diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua. Program Jaminan Hari Tua memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 tahun atau telah memenuhi persyaratan tertentu (sumber: BPJS Ketenagakerjaan).

Jaminan/Asuransi Kecelakaan Kerja

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat dimulai berangkat bekerja sampai tiba kembali di rumah atau menderita penyakit akibat hubungan kerja. Cakupan jaminan kecelakaan kerja termasuk penyakit akibat kerja yang harus dihadapi oleh tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya bertujuan untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh adanya risiko-risiko sosial seperti kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental. Kesehatan dan keselamatan tenaga kerja merupakan tanggung jawab pengusaha sehingga pengusaha memiliki kewajiban untuk membayar iuran jaminan kecelakaan kerja yang berkisar antara 0,24 persen hingga 1,74 persen sesuai kelompok jenis usaha. (sumber: BPJS Ketenagakerjaan).

Jaminan/Asuransi Kematian

Jaminan yang memberikan manfaat berupa santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia.

Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

Jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan).

Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Jaminan yang diberikan akibat pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara buruh/pekerja dan pengusaha.

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

Kartu yang diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) dan BLSM di tahun 2015. Sebelumnya KKS lebih dikenal sebagai Kartu Perlindungan Sosial (KPS). KKS memiliki fungsi yang kurang lebih sama dengan KPS, akan tetapi dengan berbagi perubahan format dan tambahan informasi di dalam kartu tersebut untuk memudahkan pemerintah menyalurkan bantuan sosial.

Program Keluarga Harapan (PKH)

Program bantuan sosial (bansos) bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin/rentan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Akses terhadap Layanan Keuangan

Akses rumah tangga terhadap layanan keuangan apabila ada minimal salah satu anggota rumah tangga (ART) yang menerima kredit dalam setahun terakhir. Jika pencairan kredit diterima ART pada saat sebelum setahun terakhir, tetapi ART tersebut masih membayar angsurannya dalam setahun terakhir, ART tersebut tidak di kategorikan menerima kredit. Jenis-jenis kredit yaitu: Kredit Usaha Rakyat (KUR), kredit dari bank umum selain KUR, Kredit dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR), kredit dari koperasi, perorangan (dengan bunga), pegadaian, perusahaan leasing, pinjaman online, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan lainnya.

Sumber Terbesar Pembiayaan di Rumah Tangga

Mengacu pada sumber pembiayaan terbesar yang digunakan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam setahun terakhir.



BAB 3

PENDUDUK MIGRAN INDONESIA

BAB 3. PENDUDUK MIGRAN INDONESIA

Migrasi di Indonesia bukan sekadar perpindahan penduduk, tetapi instrumen kebijakan pembangunan yang dinamis untuk menyeimbangkan persebaran penduduk dengan daya dukung lingkungan, sekaligus mencerminkan interaksi ruang, waktu, dan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan pembangunan di Indonesia dilaksanakan dengan mempertimbangkan konsekuensi persebaran penduduk yang optimal. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera menjelaskan bahwa migrasi, baik melalui kebijaksanaan Pemerintah seperti transmigrasi maupun atas keinginan sendiri, merupakan salah satu bentuk dari mobilitas penduduk. Kebijakan pengarahannya mobilitas penduduk dan atau penyebaran penduduk berkaitan erat dengan upaya penyebaran kegiatan pembangunan yang mendorong terjadinya gerak keruangan antar daerah. Kebijakan terkait mobilitas penduduk tidak bersifat tetap melainkan dapat diubah setiap waktu bila dianggap perlu, sesuai dengan perkembangan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Dengan demikian, Pemerintah dapat menetapkan suatu daerah sebagai daerah tertutup jika migrasi masuk tidak seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Dalam konteks demografi, migrasi didefinisikan sebagai perpindahan yang menghasilkan perubahan lokasi tempat tinggal secara permanen (Toney dan Bailey, 2014). Migrasi melibatkan perpindahan dalam jarak yang cukup jauh sehingga pelaku perlu menetap di lokasi yang dituju secara permanen. Secara operasional, lokasi tempat tinggal perlu didefinisikan berdasarkan batasan wilayah tertentu. Migrasi dapat dibatasi menurut wilayah secara administrasi politik (seperti negara atau sub wilayah dibawahnya) serta pasar tenaga kerja yang berbeda. Migrasi di dalam suatu negara disebut sebagai migrasi internal sementara yang melewati batas negara disebut sebagai migrasi internasional. Migrasi internasional masuk ke suatu negara disebut sebagai imigrasi, sedangkan migrasi keluar disebut sebagai emigrasi.

Selain melibatkan ruang, migrasi juga melibatkan aspek temporal yaitu lamanya seseorang menetap di suatu lokasi sehingga lokasi tersebut dapat dikatakan sebagai tempat tinggalnya yang baru. Berdasarkan periode waktu perpindahannya, penduduk migran dapat dibedakan menjadi migran seumur hidup dan migran risen. Perbedaan kedua jenis migrasi tersebut terletak pada lokasi tempat tinggal sebelumnya. Migrasi seumur hidup terjadi ketika seseorang memiliki tempat lahir yang berbeda dengan tempat tinggal saat ini. Sementara migrasi risen terjadi ketika seseorang memiliki lokasi tempat tinggal yang berbeda diantara dua periode pengamatan.

Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 mendefinisikan mobilitas penduduk sebagai gerak keruangan penduduk dengan melewati batas administrasi Daerah Tingkat II (atau kabupaten/kota). Kebijakan kependudukan pada tingkat nasional meliputi pengarahannya mobilitas penduduk dan atau penyebaran penduduk antarprowinsi, sedangkan pada tingkat daerah arah kebijakan kependudukan meliputi penyebaran penduduk antarkabupaten dan kotamadya. Meskipun demikian untuk keperluan analisis secara makro, data dan informasi migrasi disajikan dengan batasan perpindahan penduduk antar provinsi. Migran seumur hidup yang dicakup dalam analisis ini adalah penduduk yang melakukan perpindahan dari provinsi tempat lahir ke provinsi tempat tinggal saat pencacahan atau dengan kata lain, terdapat perbedaan provinsi tempat lahir dan provinsi tempat tinggal saat pencacahan. Migrasi risen dalam analisis ini didefinisikan sebagai penduduk yang lokasi provinsi tempat tinggalnya pada Februari 2019 berbeda dengan tempat tinggalnya pada saat pendataan Susenas Februari 2024.

Pada bab ini disajikan gambaran kondisi kesejahteraan rumah tangga hasil Susenas Maret 2024 berdasarkan status migrasinya. Ulasan terkait intensitas arus migrasi masuk dan keluar dilakukan untuk mendapatkan gambaran fenomena migrasi antarprowinsi di Indonesia. Pembahasan terkait karakteristik kependudukan, khusus untuk migran risen, dibahas pada bab selanjutnya.

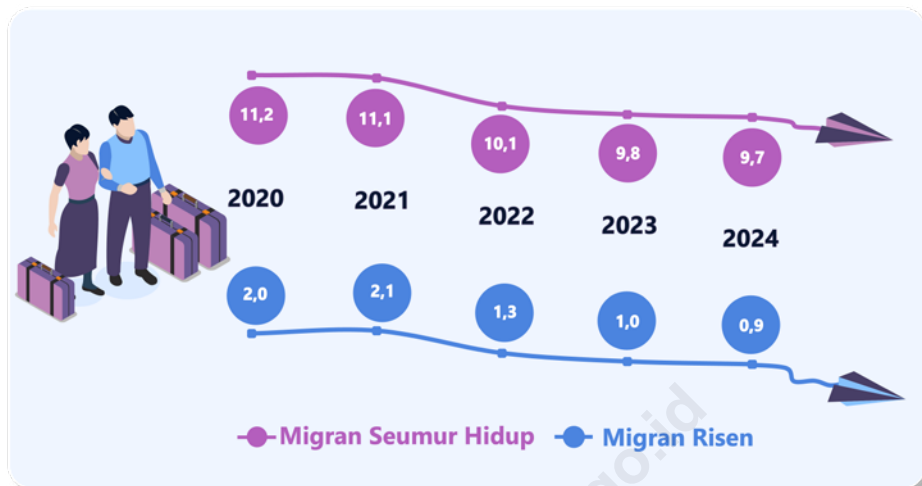
3.1 PENDUDUK MIGRAN

Hasil Susenas Maret 2024 menunjukkan bahwa penduduk Indonesia yang berstatus migran seumur hidup mencapai 9,7 persen. Dengan demikian dari 10 penduduk Indonesia, satu diantaranya lahir di provinsi yang berbeda dengan tempat tinggalnya pada saat pendataan. Jika dibandingkan dengan migran seumur hidup tahun 2022 dan 2023 yang masing-masing sebesar 10,1 persen dan 9,8 persen, maka terjadi penurunan dalam kurun dua tahun terakhir. Dari sudut pandang kependudukan, penurunan persentase migran seumur hidup mengindikasikan bahwa heterogenitas penduduk provinsi di Indonesia semakin menurun. Pertumbuhan penduduk cenderung tidak lagi diikuti oleh persebaran antarwilayah yang pesat.

Sementara itu, penduduk yang berstatus migran risen pada tahun 2024 tercatat kurang dari satu persen, atau tepatnya 0,9 persen. Hal ini menunjukkan bahwa dari setiap seratus penduduk, terdapat satu penduduk yang bermigrasi dari provinsi lain selama periode lima tahun sebelum pendataan. Jika dibandingkan dengan persentase migran risen periode 2022 dan 2023 yang masing-masing sebesar 1,3 persen dan 1,0 persen, migran risen di tahun 2024 terus mengalami tren penurunan.

Setelah lonjakan migrasi risen selama pandemi (2019–2021) yang diduga karena migran kembali, data menunjukkan tren penurunan persentase migran risen dari 2022–2024. Penurunan ini kemungkinan didorong oleh perbaikan kondisi ekonomi dan kesempatan kerja di daerah asal, sehingga mengurangi dorongan untuk berpindah.

Selain itu, pembangunan lokal yang meningkatkan layanan dan infrastruktur juga ikut memperkuat keengganan seseorang untuk berpindah. Keseluruhan faktor ini berpotensi saling memengaruhi dalam menurunkan frekuensi migrasi risen setelah 2021.

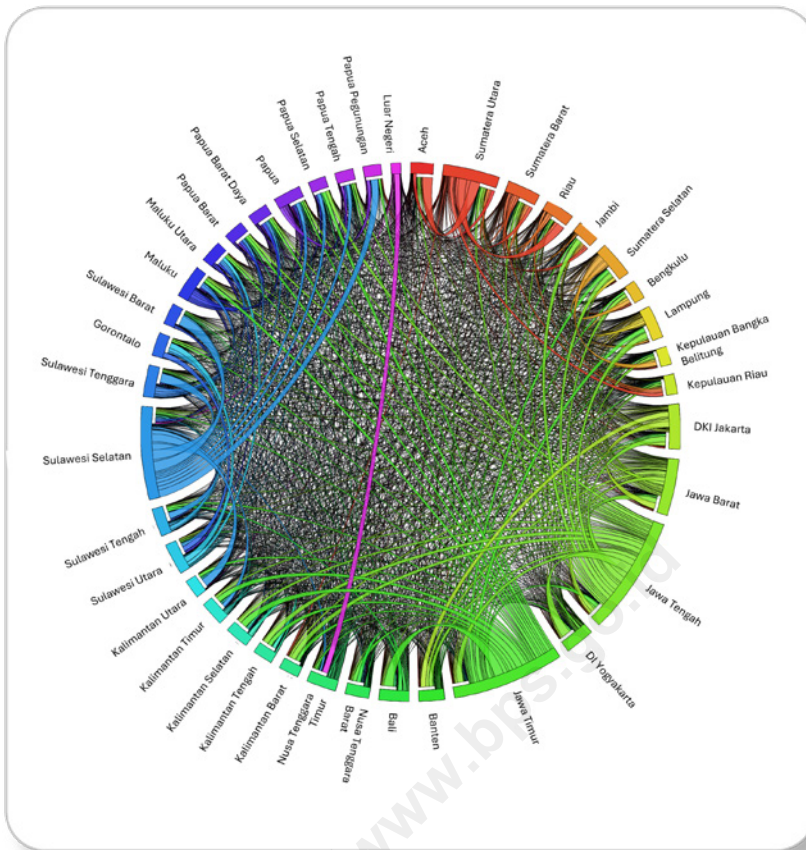


Gambar 3.1
Persentase Penduduk Migran Menurut Jenis Migrasi, 2020–2024

3.2 MIGRAN SEUMUR HIDUP

Migrasi seumur hidup merupakan peristiwa perpindahan di mana tempat tinggal saat ini berbeda dengan tempat kelahirannya. Penduduk yang melakukan migrasi seumur hidup disebut sebagai migran seumur hidup. Cakupan migrasi seumur hidup yang akan diuraikan pada publikasi ini adalah perpindahan antarprovinsi. Ukuran ini tidak mempertimbangkan kemungkinan perpindahan yang terjadi pada periode saat meninggalkan tempat kelahiran sampai saat kedatangan di tempat tinggal saat ini, serta tidak mempertimbangkan penduduk yang sempat tinggal di luar tempat kelahirannya tetapi kembali tinggal di tempat kelahirannya saat ini (United Nations, 1970).

Arus migrasi seumur hidup masuk (ke) dan keluar (dari) suatu provinsi ke provinsi lainnya ditunjukkan Gambar 3.2 dengan diagram sirkuler yang dikembangkan oleh Gu Zuguang (2014). Setiap sektor dalam diagram menunjukkan provinsi. Ketebalan pita dalam diagram menunjukkan besaran relatif arus migrasi seumur hidup asal suatu provinsi menuju provinsi lainnya. Warna tebal yang dimulai dari setiap provinsi menunjukkan arus migrasi keluar dari wilayah tersebut, sedangkan arah panah menunjukkan arus masuk ke provinsi tersebut. Berdasarkan gambar tersebut, arus migrasi masuk dan migrasi keluar seumur hidup masih dominan berada di provinsi-provinsi dalam Pulau Jawa, hal ini bersesuaian dengan masih dominannya jumlah penduduk Indonesia di Pulau Jawa.



Gambar 3.2

Arus Migrasi Masuk dan Migrasi Keluar Seumur Hidup, 2024

3.2.1 MIGRAN MASUK SEUMUR HIDUP

Migran masuk seumur hidup adalah penduduk yang lahir di luar wilayah tempat tinggalnya pada saat pendataan. Konsep ini mengacu pada pada tempat tinggal ibu kandungnya pada saat melahirkan. Lima provinsi dengan persentase migran masuk seumur hidup terbesar di Indonesia ditampilkan pada Gambar 3.3. Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi dengan persentase penduduk berstatus migran masuk seumur hidup terbesar, diikuti oleh Provinsi Kalimantan Timur, DKI Jakarta, Kalimantan Utara, dan Riau.

Kepulauan Riau masih menjadi provinsi yang memiliki migran seumur hidup dengan persentase yang cukup besar, yaitu 42,0 persen. Fenomena ini dimungkinkan karena provinsi ini memiliki daya tarik sebagai kawasan industri, perdagangan, dan jasa yang strategis, bersebelahan dengan Singapura dan Malaysia. Arus migrasi ke provinsi ini juga didorong oleh ketersediaan lapangan kerja di sektor manufaktur, pelabuhan, hingga kawasan perdagangan bebas Batam (Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun

2007). Hal ini membuat banyak orang dari luar provinsi menetap secara permanen untuk memperoleh peluang ekonomi yang lebih baik.

Provinsi Kalimantan Timur dan DKI Jakarta juga termasuk memiliki persentase migran seumur hidup yang cukup besar, dimana sekitar 3 dari 10 orang penduduknya lahir di provinsi lain. Adanya pembangunan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang wilayahnya berada di Provinsi Kalimantan Timur, mendorong arus migrasi permanen ke wilayah ini. Proyek infrastruktur skala besar, kebutuhan tenaga kerja di sektor konstruksi, serta daya tarik sektor energi, khususnya pertambangan dan migas, menjadi daya tarik bagi penduduk dari berbagai daerah untuk menjadikan Kalimantan Timur sebagai tempat tinggal jangka panjang. Sementara itu, DKI Jakarta dengan statusnya sebagai pusat aktivitas ekonomi, jasa, dan pemerintahan, masih memiliki daya tarik yang cukup kuat untuk menjadi daerah tujuan. Namun, adanya faktor keterbatasan ruang dan tingginya biaya hidup, bisa mendorong sebagian migran baru untuk lebih memilih daerah lain yang menawarkan prospek masa depan yang lebih baik.

Kalimantan Utara menempati posisi keempat provinsi dengan persentase migran masuk seumur hidup terbanyak, mencapai 29,2 persen. Sebagai provinsi muda yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Kalimantan Utara menawarkan potensi ekonomi di sektor perdagangan lintas batas, perkebunan, dan energi. Daya tarik tersebut membuat banyak pendatang menetap secara permanen, apalagi dengan dukungan kebijakan pembangunan kawasan perbatasan. Sementara itu, Riau berada di posisi kelima dengan persentase migran masuk seumur hidup mencapai 26,7 persen. Riau sejak lama dikenal sebagai provinsi dengan basis industri migas dan perkebunan sawit yang besar, sehingga peluang kerja di sektor ini tetap menjadi faktor pendorong utama masuknya migran seumur hidup. Selain itu, posisinya yang strategis di jalur perdagangan Selat Malaka memperkuat perannya sebagai magnet migrasi.



Gambar 3.3

Lima Provinsi dengan Persentase Migran Masuk Seumur Hidup Terbesar di Indonesia, 2024

Secara keseluruhan, dari lima provinsi dengan persentase migran masuk seumur hidup terbesar memiliki daya tarik ekonomi dan prospek ketersediaan lapangan kerja yang menjanjikan. Hal ini sejalan dengan Ravenstein (1885) yang menekankan bahwa motif ekonomi merupakan faktor utama dalam perpindahan penduduk, di mana orang cenderung bergerak ke wilayah yang menyediakan lebih banyak kesempatan kerja. Selain itu, menurut Todaro (1980), keputusan migrasi sering kali didasarkan pada ekspektasi pendapatan masa depan di daerah tujuan, bukan semata pada kondisi saat ini. Fenomena banyaknya migran masuk seumur hidup di Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, DKI Jakarta, Kalimantan Utara, dan Riau mencerminkan bagaimana pertimbangan ekonomi tetap menjadi daya tarik utama suatu wilayah menjadi tujuan migran.

ARUS MIGRASI MASUK SEUMUR HIDUP

Arus migrasi masuk seumur hidup menggambarkan perpindahan penduduk dari tempat lahirnya masuk ke tempat di mana seseorang menetap secara permanen di wilayah yang baru. Dalam praktiknya, arus migrasi masuk sering kali dipengaruhi oleh faktor kedekatan geografis—masyarakat cenderung pindah ke wilayah yang letaknya berdekatan dengan daerah asal karena biaya perpindahan lebih rendah dan jaringan sosial yang lebih mudah dijaga. Oleh karena itu, tidak jarang arus migrasi antara dua wilayah yang bertetangga menunjukkan intensitas yang tinggi, misalnya antara provinsi-provinsi yang berbatasan langsung atau terhubung oleh jalur transportasi utama.

Tabel 3.1 menampilkan lima besar provinsi asal atau tempat kelahiran migran seumur hidup di setiap provinsi. Sebagian besar migran seumur hidup memiliki provinsi tempat kelahiran yang tidak jauh dari provinsi tempat mereka tinggal saat ini. Migran seumur hidup yang tinggal di wilayah Indonesia bagian barat mayoritas lahir di provinsi bagian barat. Pola yang sama juga terjadi pada provinsi-provinsi di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur. Temuan yang menarik adalah bahwa Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur hampir selalu masuk dalam provinsi asal para migran di semua provinsi di Indonesia.

Terdapat beberapa provinsi yang lebih dari setengah migran seumur hidupnya berasal dari suatu provinsi tertentu, seperti di Provinsi Aceh dimana sebanyak 60,1 persen migran masuk seumur hidup di provinsi ini berasal dari Sumatera Utara. Selanjutnya, lebih dari setengah migran seumur hidup di Bali berasal dari Jawa Timur (56,3 persen) dan 52,9 persen migran seumur hidup di DI Yogyakarta berasal dari Jawa Tengah.

Selain itu, sebanyak masing-masing 61,1 persen dan 57,9 persen migran seumur hidup di Sulawesi Barat dan di Sulawesi Tenggara berasal dari Sulawesi Selatan. Secara geografis, lokasi antara provinsi dan tujuan yang disebutkan di atas merupakan provinsi-provinsi yang jaraknya berdekatan. Fakta ini sesuai dengan teori migrasi yang dikemukakan oleh Ravenstein (1885), dimana tingkat migrasi berhubungan terbalik dengan jarak migrasi.

Tabel 3.1
Lima Besar Provinsi Asal Migran Seumur Hidup Antarprovinsi
di Setiap Provinsi, 2024

Provinsi Tempat Tinggal Sekarang (Provinsi Tujuan Migran)	Uru- tan	Provinsi Tempat Lahir (Provinsi Asal Migran)	Persentase (%)	Provinsi Tempat Tinggal Sekarang (Provinsi Tujuan Migran)	Uru- tan	Provinsi Tempat Lahir (Provinsi Asal Migran)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	1	Sumatera Utara	60,1	Lampung	1	Jawa Tengah	31,2
	2	Jawa Tengah	10,9		2	Jawa Timur	24,1
	3	Jawa Barat	5,8		3	Sumatera Selatan	11,1
	4	Sumatera Barat	5,1		4	Jawa Barat	10,7
	5	Jawa Timur	3,9		5	DI Yogyakarta	6,1
Sumatera Utara	1	Aceh	19,4	Kep. Bangka Belitung	1	Sumatera Selatan	27,4
	2	Riau	13,9		2	Jawa Tengah	13,8
	3	Jawa Tengah	13,5		3	Lampung	9,7
	4	Sumatera Barat	13,1		4	Jawa Barat	8,3
	5	DKI Jakarta	7,1		5	Jawa Timur	7,9
Sumatera Barat	1	Sumatera Utara	21,8	Kepulauan Riau	1	Sumatera Utara	20,7
	2	Riau	17,3		2	Riau	13,2
	3	Jawa Tengah	12,4		3	Sumatera Barat	12,7
	4	Jambi	8,6		4	Jawa Tengah	11,1
	5	Jawa Barat	8,1		5	Jawa Timur	8,7
Riau	1	Sumatera Utara	48,0	DKI Jakarta	1	Jawa Tengah	35,1
	2	Sumatera Barat	16,4		2	Jawa Barat	22,0
	3	Jawa Tengah	11,1		3	Jawa Timur	9,6
	4	Jawa Timur	7,2		4	Banten	6,5
	5	Jawa Barat	3,3		5	Sumatera Utara	6,1
Jambi	1	Jawa Tengah	28,2	Jawa Barat	1	DKI Jakarta	36,2
	2	Sumatera Utara	14,7		2	Jawa Tengah	32,6
	3	Sumatera Barat	10,1		3	Jawa Timur	7,7
	4	Sumatera Selatan	10,0		4	Banten	4,3
	5	Jawa Timur	8,9		5	Sumatera Utara	3,9
Sumatera Selatan	1	Jawa Tengah	26,8	Jawa Tengah	1	Jawa Barat	24,2
	2	Jawa Timur	19,9		2	Jawa Timur	23,3
	3	Lampung	16,5		3	DKI Jakarta	13,4
	4	Jawa Barat	7,7		4	DI Yogyakarta	12,9
	5	DI Yogyakarta	4,7		5	Banten	4,6
Bengkulu	1	Sumatera Selatan	24,7	DI Yogyakarta	1	Jawa Tengah	52,9
	2	Jawa Tengah	20,1		2	Jawa Timur	11,4
	3	Lampung	13,0		3	Jawa Barat	7,8
	4	Jawa Timur	12,0		4	DKI Jakarta	6,9
	5	Sumatera Barat	7,4		5	Sumatera Selatan	2,6

Lanjutan Tabel 3.1

Provinsi Tempat Tinggal Sekarang (Provinsi Tujuan Migran)	Urutan	Provinsi Tempat Lahir (Provinsi Asal Migran)	Persentase (%)	Provinsi Tempat Tinggal Sekarang (Provinsi Tujuan Migran)	Urutan	Provinsi Tempat Lahir (Provinsi Asal Migran)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
Jawa Timur	1	Jawa Tengah	37,2	Kalimantan Selatan	1	Jawa Timur	37,7
	2	Jawa Barat	9,9		2	Jawa Tengah	18,1
	3	DKI Jakarta	7,2		3	Kalimantan Tengah	9,8
	4	Bali	3,8		4	Jawa Barat	6,3
	5	DI Yogyakarta	3,7		5	Kalimantan Timur	5,4
Banten	1	DKI Jakarta	30,4	Kalimantan Timur	1	Jawa Timur	29,8
	2	Jawa Tengah	23,5		2	Sulawesi Selatan	23,4
	3	Jawa Barat	18,5		3	Jawa Tengah	10,9
	4	Jawa Timur	7,1		4	Kalimantan Selatan	8,2
	5	Lampung	4,0		5	Jawa Barat	4,3
Bali	1	Jawa Timur	56,3	Kalimantan Utara	1	Sulawesi Selatan	47,8
	2	Nusa Tenggara Timur	8,9		2	Jawa Timur	14,5
	3	Nusa Tenggara Barat	7,2		3	Kalimantan Timur	7,2
	4	Jawa Tengah	7,1		4	Nusa Tenggara Timur	6,3
	5	Jawa Barat	5,7		5	Jawa Tengah	4,5
Nusa Tenggara Barat	1	Jawa Timur	24,0	Sulawesi Utara	1	Gorontalo	29,9
	2	Bali	23,7		2	Sulawesi Selatan	12,7
	3	Jawa Tengah	7,4		3	Maluku Utara	8,3
	4	Kalimantan Timur	3,8		4	Sulawesi Tengah	7,3
	5	Nusa Tenggara Timur	3,5		5	DKI Jakarta	6,5
Nusa Tenggara Timur	1	Luar Negeri	33,8	Sulawesi Tengah	1	Sulawesi Selatan	37,5
	2	Jawa Timur	12,5		2	Bali	13,8
	3	Sulawesi Selatan	11,5		3	Jawa Timur	13,6
	4	Jawa Tengah	6,9		4	Jawa Tengah	6,9
	5	Nusa Tenggara Barat	5,5		5	Sulawesi Barat	6,1
Kalimantan Barat	1	Jawa Tengah	30,5	Sulawesi Selatan	1	Jawa Timur	10,1
	2	Jawa Timur	22,2		2	Sulawesi Tenggara	9,0
	3	Jawa Barat	12,3		3	Sulawesi Barat	8,9
	4	Sumatera Utara	6,4		4	Jawa Tengah	8,0
	5	DI Yogyakarta	4,9		5	Sulawesi Tengah	6,8
Kalimantan Tengah	1	Jawa Tengah	29,2	Sulawesi Tenggara	1	Sulawesi Selatan	57,9
	2	Jawa Timur	25,0		2	Jawa Timur	6,7
	3	Kalimantan Selatan	21,2		3	Maluku	5,7
	4	Jawa Barat	4,8		4	Bali	5,1
	5	Nusa Tenggara Timur	3,8		5	Jawa Barat	4,5
Gorontalo	1	Sulawesi Utara	32,3	Papua Barat Daya	1	Maluku	18,9
	2	Sulawesi Tengah	19,9		2	Jawa Timur	14,8
	3	Sulawesi Selatan	11,7		3	Sulawesi Selatan	13,1
	4	Jawa Timur	11,6		4	Jawa Tengah	10,1
	5	Jawa Tengah	7,9		5	Sulawesi Tenggara	8,9
Sulawesi Barat	1	Sulawesi Selatan	61,1	Papua	1	Sulawesi Selatan	23,4
	2	Sulawesi Tengah	7,5		2	Jawa Timur	12,7
	3	Bali	6,3		3	Jawa Tengah	11,4
	4	Jawa Tengah	6,3		4	Maluku	10,0
	5	Jawa Timur	4,2		5	Sulawesi Utara	4,7

Lanjutan Tabel 3.1

Provinsi Tempat Tinggal Sekarang (Provinsi Tujuan Migran)	Urutan	Provinsi Tempat Lahir (Provinsi Asal Migran)	Persentase (%)	Provinsi Tempat Tinggal Sekarang (Provinsi Tujuan Migran)	Urutan	Provinsi Tempat Lahir (Provinsi Asal Migran)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
Maluku	1	Sulawesi Tenggara	19,8	Papua Selatan	1	Sulawesi Selatan	21,6
	2	Jawa Timur	19,6		2	Jawa Timur	21,4
	3	Jawa Tengah	11,7		3	Jawa Tengah	19,5
	4	Sulawesi Selatan	10,0		4	Maluku	7,9
	5	Maluku Utara	8,3		5	Nusa Tenggara Timur	6,4
Maluku Utara	1	Sulawesi Utara	18,9	Papua Tengah	1	Sulawesi Selatan	23,6
	2	Sulawesi Tenggara	13,3		2	Papua	13,2
	3	Maluku	12,3		3	Jawa Tengah	12,1
	4	Jawa Timur	11,9		4	Jawa Timur	11,0
	5	Sulawesi Selatan	11,5		5	Maluku	8,9
Papua Barat	1	Jawa Timur	17,7	Papua Pegunungan	1	Sulawesi Selatan	42,6
	2	Maluku	14,8		2	Papua	20,6
	3	Jawa Tengah	13,2		3	Jawa Timur	13,1
	4	Sulawesi Selatan	12,5		4	Sumatera Utara	4,9
	5	Sulawesi Tenggara	7,8		5	Maluku	3,9

Fakta menarik ditemukan pada hampir semua provinsi di Pulau Kalimantan, dimana sebagian besar migran seumur hidup di provinsi-provinsi tersebut berasal dari Pulau Jawa. Lebih dari separuh migran masuk seumur hidup di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan berasal dari provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Sementara di Kalimantan Timur, hampir separuh migran masuk seumur hidup berasal dari Pulau Jawa. Hanya Provinsi Kalimantan Utara yang sebagian besar migran seumur hidupnya bukan berasal dari Pulau Jawa.

Jika dilihat persebarannya, migran seumur hidup yang provinsi tempat lahirnya berasal dari Pulau Jawa tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Dari keseluruhan, migran yang berasal dari Provinsi Jawa Timur menempati posisi lima besar di 34 provinsi, migran dari Provinsi Jawa Tengah juga termasuk dalam lima besar di 32 provinsi, dan migran dari Provinsi Jawa Barat menempati lima besar di 16 provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga provinsi tersebut menjadi daerah asal utama migran seumur hidup di berbagai wilayah Indonesia, dengan jangkauan sebaran yang relatif luas di luar Pulau Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa migran seumur hidup yang berasal dari Pulau Jawa mendominasi karena selain jumlahnya yang besar, migran seumur hidup yang berasal dari Pulau Jawa juga tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Di sisi lain, terdapat lima provinsi yaitu Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara menjadi provinsi yang tidak termasuk ke dalam lima besar provinsi asal migran seumur hidup di provinsi lainnya di Indonesia.

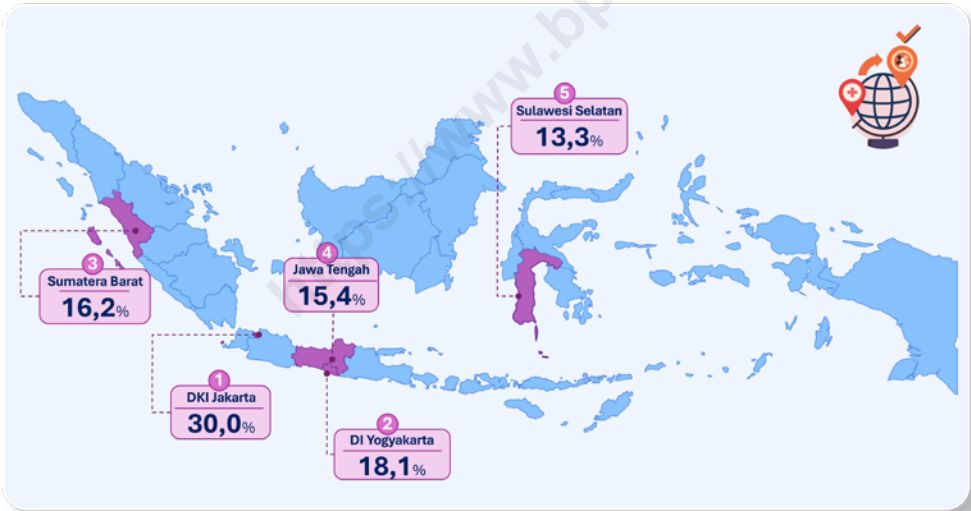
Fakta lainnya yang dapat diperoleh dari Tabel 3.1 adalah sekitar satu dari tiga migran seumur hidup di Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki tempat kelahiran di luar

negeri. Sebagaimana diketahui, Provinsi NTT merupakan provinsi yang berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste. Timor Leste sebelumnya merupakan bagian dari Indonesia yang bernama Provinsi Timor Timur. Sejak tahun 1999, Timor Leste melepaskan diri dari Indonesia dan menjadi sebuah negara. Oleh karena itu, cukup banyak penduduk NTT yang tempat kelahirannya di luar negeri yaitu di Timor Leste.

3.2.2 MIGRAN KELUAR SEUMUR HIDUP

Migran keluar merupakan penduduk migran dilihat dari tempat asal mereka melakukan migrasi. Migran keluar seumur hidup merupakan penduduk yang meninggalkan tempat kelahirannya dan saat ini bertempat tinggal di luar wilayah tempat kelahirannya. Gambar 3.4 menunjukkan bahwa DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Sumatera Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan merupakan lima provinsi dengan persentase migran keluar seumur hidup terbesar tahun 2024.

Sebesar 30,0 persen penduduk yang lahir di DKI Jakarta meninggalkan provinsi ini dan tinggal di provinsi lain di Indonesia. Tingginya persentase migran keluar seumur hidup ini didukung dengan fakta bahwa pada 2023 DKI Jakarta merupakan provinsi terpadat di Indonesia, dengan kepadatan mencapai 16.146 penduduk per km². Di posisi kedua, persentase migran seumur hidup asal DI Yogyakarta mencapai 18,1 persen.



Gambar 3.4
Lima Provinsi dengan Persentase Migran Keluar Seumur Hidup Terbesar di Indonesia, 2024

Migran seumur hidup asal Sumatera Barat menempati posisi ketiga dengan persentase mencapai 16,2 persen. Sumatera Barat kental dengan budaya merantau hingga keluar provinsi baik untuk belajar maupun bekerja. Hal ini turut menjelaskan besarnya persentase migrasi keluar asal Sumatera Barat. Selanjutnya, persentase

migran asal Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan berturut-turut 15,4 persen dan 13,3 persen. Persentase penduduk menurut provinsi dan status migrasi keluar seumur hidup secara lengkap disajikan pada Lampiran 3.

DKI Jakarta merupakan provinsi dengan intensitas migran masuk dan migran keluar seumur hidup yang tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa Provinsi DKI Jakarta memiliki faktor penarik dan pendorong yang kuat dalam memengaruhi mobilitas penduduk. Sesuai dengan teori migrasi Lee (1966) mengenai faktor pendorong dan penarik, penduduk yang sebelumnya menetap di DKI Jakarta terdorong untuk berpindah dan menetap di luar provinsi, sementara penduduk dari luar provinsi tertarik untuk bermigrasi ke DKI Jakarta. Faktor penarik migrasi ke DKI Jakarta antara lain tersedianya peluang kerja yang luas, akses terhadap pendidikan dan layanan publik yang lebih baik, serta perkembangan infrastruktur perkotaan yang relatif maju. Sebaliknya, faktor pendorong seperti tingginya biaya hidup, kepadatan penduduk, dan tekanan sosial ekonomi menjadi alasan utama sebagian penduduk memilih untuk bermigrasi keluar dari provinsi ini. Sedangkan empat provinsi lainnya yaitu DI Yogyakarta, Sumatera Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan hanya memiliki intensitas migran keluar seumur hidup yang tinggi.

ARUS MIGRASI KELUAR SEUMUR HIDUP

Lima besar provinsi tujuan migran seumur hidup dari setiap provinsi tempat kelahirannya dapat dilihat pada Tabel 3.2. Secara umum, migran seumur hidup bermigrasi ke provinsi yang dekat dengan provinsi tempat kelahirannya. Arus migrasi seumur hidup yang tinggi terlihat pada provinsi yang secara geografis saling berdekatan, seperti pada Provinsi Jawa Barat di mana migran seumur hidupnya paling besar bermigrasi ke DKI Jakarta, dan begitu juga sebaliknya. Pola yang sama terjadi pada Lampung dan Sumatera Selatan, Kepulauan Riau dan Riau, serta Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.

Tabel 3.2
Lima Besar Provinsi Tujuan Migran Seumur Hidup Antarprovinsi
dari Provinsi Tempat Lahir, 2024

Provinsi Tempat Lahir (Provinsi Asal Migran)	Urutan	Provinsi Tempat Tinggal Sekarang (Provinsi Tujuan Migran)	Persentase (%)	Provinsi Tempat Lahir (Provinsi Asal Migran)	Urutan	Provinsi Tempat Tinggal Sekarang (Provinsi Tujuan Migran)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	1	Sumatera Utara	37,6	Lampung	1	Sumatera Selatan	18,7
	2	Riau	16,7		2	Jawa Barat	16,5
	3	DKI Jakarta	13,8		3	Banten	13,5
	4	Jawa Barat	4,9		4	DKI Jakarta	9,4
	5	Banten	3,9		5	Riau	5,5
Sumatera Utara	1	Riau	42,8	Kep. Bangka Belitung	1	DKI Jakarta	30,6
	2	Kepulauan Riau	10,1		2	Banten	18,8
	3	Jawa Barat	9,2		3	Jawa Barat	10,6
	4	DKI Jakarta	9,0		4	Sumatera Selatan	10,2
	5	Aceh	5,9		5	Lampung	6,0

Lanjutan Tabel 3.2

Provinsi Tempat Lahir (Provinsi Asal Migran)	Urutan	Provinsi Tempat Tinggal Sekarang (Provinsi Tujuan Migran)	Persentase (%)	Provinsi Tempat Lahir (Provinsi Asal Migran)	Urutan	Provinsi Tempat Tinggal Sekarang (Provinsi Tujuan Migran)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
Sumatera Barat	1	Riau	30,9	Kepulauan Riau	1	Riau	19,7
	2	Kepulauan Riau	13,2		2	Sumatera Utara	14,4
	3	Jawa Barat	12,9		3	Jawa Timur	9,4
	4	DKI Jakarta	11,6		4	Jawa Barat	8,1
	5	Jambi	6,6		5	Sumatera Barat	7,0
Riau	1	Kepulauan Riau	29,5	DKI Jakarta	1	Jawa Barat	59,2
	2	Sumatera Utara	14,8		2	Banten	25,0
	3	Sumatera Barat	14,3		3	Jawa Tengah	4,0
	4	DKI Jakarta	7,7		4	Jawa Timur	1,8
	5	Jambi	7,4		5	DI Yogyakarta	1,3
Jambi	1	Sumatera Barat	14,9	Jawa Barat	1	DKI Jakarta	31,2
	2	Riau	13,0		2	Banten	21,4
	3	Sumatera Selatan	11,8		3	Jawa Tengah	10,1
	4	Kepulauan Riau	8,6		4	Lampung	5,5
	5	DKI Jakarta	6,9		5	Jawa Timur	3,4
Sumatera Selatan	1	Lampung	16,3	Jawa Tengah	1	Jawa Barat	27,7
	2	Jawa Barat	13,8		2	DKI Jakarta	18,4
	3	Kepulauan Riau	10,7		3	Banten	10,0
	4	Bengkulu	9,5		4	Lampung	6,0
	5	Jambi	8,4		5	DI Yogyakarta	5,1
Bengkulu	1	Sumatera Selatan	21,4	DI Yogyakarta	1	Jawa Barat	20,8
	2	Jawa Barat	12,3		2	Jawa Tengah	16,1
	3	Lampung	9,0		3	Banten	11,0
	4	Sumatera Barat	7,6		4	DKI Jakarta	9,9
	5	Sumatera Utara	7,4		5	Lampung	9,3
Jawa Timur	1	Jawa Barat	12,0	Kalimantan Selatan	1	Kalimantan Tengah	41,0
	2	Kalimantan Timur	10,2		2	Kalimantan Timur	32,7
	3	DKI Jakarta	9,2		3	Jawa Timur	5,7
	4	Lampung	8,4		4	Jawa Barat	4,4
	5	Jawa Tengah	6,6		5	Jawa Tengah	2,9
Banten	1	Jawa Barat	32,8	Kalimantan Timur	1	Kalimantan Selatan	15,2
	2	DKI Jakarta	30,4		2	Jawa Timur	14,9
	3	Lampung	8,2		3	Sulawesi Selatan	12,6
	4	Jawa Tengah	6,4		4	Kalimantan Utara	9,2
	5	Sumatera Selatan	5,5		5	DKI Jakarta	4,9
Bali	1	Sulawesi Tengah	24,1	Kalimantan Utara	1	Kalimantan Timur	29,0
	2	Jawa Timur	11,6		2	Jawa Timur	26,9
	3	Nusa Tenggara Barat	9,9		3	Sulawesi Selatan	8,4
	4	Sulawesi Tenggara	8,7		4	DI Yogyakarta	7,1
	5	Lampung	6,7		5	Jawa Barat	5,5
Nusa Tenggara Barat	1	Bali	12,6	Sulawesi Utara	1	Sulawesi Tengah	12,5
	2	Kalimantan Timur	10,9		2	Maluku Utara	12,3
	3	DKI Jakarta	8,0		3	Gorontalo	11,5
	4	Jawa Barat	6,5		4	Banten	8,3
	5	Kalimantan Selatan	6,5		5	DKI Jakarta	7,0

Lanjutan Tabel 3.2

Provinsi Tempat Lahir (Provinsi Asal Migran)	Urutan	Provinsi Tempat Tinggal Sekarang (Provinsi Tujuan Migran)	Persentase (%)	Provinsi Tempat Lahir (Provinsi Asal Migran)	Urutan	Provinsi Tempat Tinggal Sekarang (Provinsi Tujuan Migran)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
Nusa Tenggara Timur	1	Kepulauan Riau	12,7	Sulawesi Tengah	1	Sulawesi Selatan	16,2
	2	Kalimantan Timur	12,7		2	Kalimantan Timur	13,2
	3	Bali	10,7		3	Sulawesi Utara	9,5
	4	Kalimantan Tengah	7,3		4	Gorontalo	8,8
	5	Jawa Barat	6,2		5	Sulawesi Barat	8,5
Kalimantan Barat	1	DKI Jakarta	33,7	Sulawesi Selatan	1	Kalimantan Timur	20,3
	2	Jawa Barat	13,5		2	Sulawesi Tenggara	19,5
	3	Banten	9,7		3	Sulawesi Tengah	12,8
	4	Kepulauan Riau	8,2		4	Kalimantan Utara	7,8
	5	Jawa Tengah	6,3		5	Sulawesi Barat	7,0
Kalimantan Tengah	1	Kalimantan Selatan	46,3	Sulawesi Tenggara	1	Sulawesi Selatan	15,4
	2	Jawa Timur	14,0		2	Maluku	12,9
	3	Kalimantan Timur	11,0		3	Kalimantan Timur	9,7
	4	Jawa Tengah	5,0		4	Maluku Utara	7,7
	5	Banten	4,3		5	Papua Barat Daya	7,0
Gorontalo	1	Sulawesi Utara	57,9	Papua Barat Daya	1	Papua	20,1
	2	Sulawesi Tengah	22,3		2	Papua Barat	17,1
	3	DKI Jakarta	3,3		3	Maluku	13,9
	4	Jawa Timur	2,5		4	Sulawesi Selatan	11,0
	5	Jawa Barat	2,3		5	Papua Tengah	8,6
Sulawesi Barat	1	Sulawesi Selatan	25,3	Papua	1	Papua Tengah	23,7
	2	Sulawesi Tengah	24,3		2	Sulawesi Selatan	10,5
	3	Kalimantan Timur	23,9		3	Papua Barat	9,7
	4	Sulawesi Tenggara	9,6		4	Papua Barat Daya	9,3
	5	Kalimantan Selatan	5,7		5	Papua Selatan	6,8
Maluku	1	Papua Barat Daya	13,9	Papua Selatan	1	Papua	20,5
	2	Sulawesi Tenggara	12,7		2	Papua Tengah	19,2
	3	Papua Barat	9,6		3	Jawa Barat	11,8
	4	Papua	9,6		4	Papua Barat	8,7
	5	Papua Tengah	7,4		5	Jawa Tengah	7,5
Maluku Utara	1	Sulawesi Utara	27,5	Papua Tengah	1	Papua	31,7
	2	Maluku	19,0		2	Sulawesi Selatan	24,3
	3	Papua Barat Daya	7,5		3	Papua Barat	11,2
	4	Papua	7,0		4	Jawa Barat	7,2
	5	Sulawesi Selatan	5,9		5	Maluku	7,0
Papua Barat	1	Papua	19,4	Papua Pegunungan	1	Papua	65,8
	2	Papua Barat Daya	16,6		2	Papua Tengah	16,4
	3	Papua Tengah	10,4		3	Papua Selatan	4,7
	4	Jawa Timur	9,6		4	Sulawesi Selatan	4,4
	5	Nusa Tenggara Timur	7,8		5	Papua Barat Daya	3,7

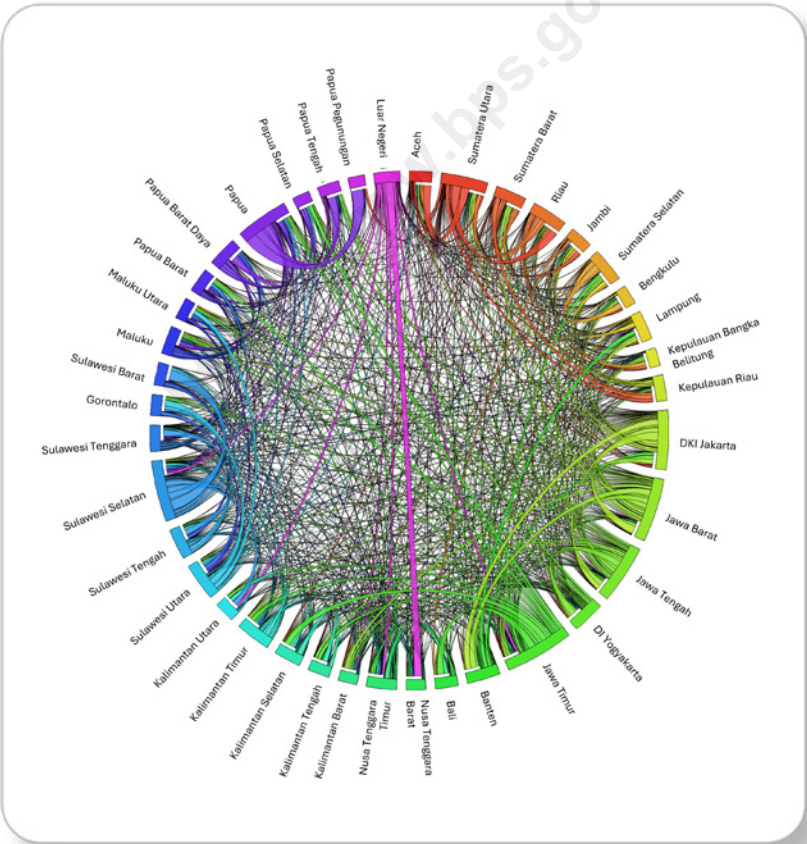
Jawa Barat merupakan provinsi yang paling banyak menjadi tujuan migran seumur hidup, dengan menempati posisi lima besar provinsi tujuan bagi migran dari 22 dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Tidak hanya itu, Jawa Barat juga menempati posisi pertama tujuan migran seumur hidup yang lahir di semua provinsi di Pulau Jawa (terkecuali Jawa Barat, Tabel 3.2). Sedangkan DKI Jakarta menjadi tujuan utama dari

17 provinsi di Indonesia bagian barat dan tengah. Di wilayah timur (Maluku dan Papua), arus migran keluar seumur hidup kebanyakan bertujuan ke provinsi-provinsi di wilayah tengah dan timur.

3.3 MIGRAN RISEN

Migran risen merujuk kepada penduduk yang berpindah tempat tinggal dalam periode waktu akhir-akhir ini, misalnya dalam satu, tiga, atau lima tahun terakhir. Fenomena ini menjadi sorotan penting dalam studi kependudukan dan sosiologi karena mencerminkan dinamika masyarakat terkini.

Kuesioner Susenas menanyakan tempat tinggal penduduk pada lima tahun sebelum pendataan. Penduduk dengan tempat tinggal saat ini yang berbeda dengan tempat tinggalnya pada 5 tahun yang lalu diklasifikasikan sebagai migran risen. Migrasi risen menggambarkan keadaan terkini mengenai pola migrasi yang terjadi. Namun, ukuran ini tidak dapat menjelaskan bagaimana perpindahan tersebut terjadi mulai dari meninggalkan tempat tinggalnya lima tahun lalu hingga akhirnya pindah dan menetap di tempat tinggalnya saat ini.



Gambar 3.5
Arus Migrasi Masuk dan Migrasi Keluar Risen, 2024

Diagram sirkuler (Gambar 3.5) menunjukkan arus migrasi risen masuk (ke) dan keluar (dari) suatu provinsi ke provinsi lainnya. Setiap sektor dalam diagram menunjukkan satu provinsi. Ketebalan pita dalam diagram menunjukkan besaran relatif arus migrasi risen asal suatu provinsi menuju provinsi lainnya. Warna tebal yang dimulai dari setiap provinsi menunjukkan arus migrasi keluar dari wilayah tersebut, sedangkan arah panah menunjukkan arus masuk ke provinsi tersebut. Berdasarkan gambar tersebut, arus migrasi masuk risen dan migrasi keluar risen masih didominasi provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Hal ini sejalan dengan fakta bahwa Pulau Jawa merupakan pulau dengan penduduk terbesar di Indonesia dengan berbagai peluang ekonomi dan fasilitas yang menarik penduduk dari daerah lain (World Bank, 2021).

3.3.1 MIGRAN MASUK RISEN

Migran masuk risen merupakan migran risen jika dilihat dari tempat tinggal mereka saat ini. Berdasarkan Susenas 2024, provinsi Kepulauan Riau memiliki persentase migran risen terbesar. Tiga hingga empat dari 100 penduduk Kepulauan Riau pada lima tahun sebelumnya tinggal di provinsi lain (3,7 persen). Provinsi urutan kedua adalah DI Yogyakarta sebesar 2,8 persen, diikuti oleh Papua Barat (1,7 persen), Sumatera Barat (1,6 persen), dan Nusa Tenggara Barat (1,5 persen). Faktor-faktor seperti peluang atau motif ekonomi (industri, perdagangan, dan mungkin pertambangan) berikut upah yang kompetitif serta pendidikan diduga menjadi faktor penarik utama migrasi ke provinsi-provinsi tersebut.



Gambar 3.6

Lima Provinsi dengan Persentase Migran Masuk Risen Terbesar di Indonesia, 2024

Provinsi Kepulauan Riau telah lama dikenal sebagai provinsi tujuan migrasi. Selain tercatat sebagai tujuan migrasi risen, provinsi ini merupakan penerima migrasi seumur hidup utama. Provinsi ini diduga dipandang migran sebagai provinsi yang menawarkan

peluang ekonomi industri dan perdagangan. Sementara itu provinsi DI Yogyakarta, yang terkenal sebagai kota pelajar, memiliki daya tarik bagi para migran pelajar untuk melanjutkan pendidikannya terutama jenjang pendidikan tinggi di provinsi ini. Alasan daya tarik pendidikan ini tecermin dari karakteristik migrannya. Lebih dari separuh migran ke provinsi tersebut berumur 20–29 tahun, lebih dari 60 persen belum kawin, dan hampir 60 persen merupakan tamatan SMA sederajat (lihat Lampiran 6, 7 dan 9).

ARUS MIGRASI MASUK RISEN

Sebagaimana teori migrasi, migrasi risen lebih banyak terjadi pada jarak yang lebih dekat daripada jarak yang lebih jauh. Sebagaimana ditunjukkan Tabel 3.3, arus migrasi masuk risen suatu provinsi secara umum berasal dari provinsi tetangga atau provinsi yang masih berasal dari pulau utama yang sama. Sebagai contoh, separuh migran risen di Aceh berasal dari provinsi tetangga, yaitu Sumatera Utara. Di Sumatera Utara, seperempat migran risen berasal dari Riau dan 13,1 persennya berasal dari Aceh.

Tabel 3.3
Lima Besar Provinsi Asal Migran Risen Antarprovinsi
di Setiap Provinsi, 2024

Provinsi Tempat Tinggal Sekarang (Provinsi Tujuan Migran)	Urutan	Provinsi Tempat Tinggal 5 Tahun yang Lalu (Provinsi Asal Migran)	Persentase (%)	Provinsi Tempat Tinggal Sekarang (Provinsi Tujuan Migran)	Urutan	Provinsi Tempat Tinggal 5 Tahun yang Lalu (Provinsi Asal Migran)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	1	Sumatera Utara	49,0	Lampung	1	Banten	22,2
	2	Riau	15,4		2	DKI Jakarta	17,6
	3	Jawa Barat	9,1		3	Jawa Barat	16,9
	4	Kalimantan Utara	6,3		4	Sumatera Selatan	10,1
	5	Banten	4,2		5	Jawa Timur	5,6
Sumatera Utara	1	Riau	25,1	Kep. Bangka Belitung	1	Sumatera Selatan	21,8
	2	Aceh	13,1		2	Riau	14,8
	3	DKI Jakarta	11,5		3	Jawa Barat	11,1
	4	Kepulauan Riau	10,5		4	Jawa Tengah	10,0
	5	Jawa Barat	9,5		5	DKI Jakarta	9,2
Sumatera Barat	1	Riau	20,8	Kepulauan Riau	1	Sumatera Barat	26,6
	2	Jawa Barat	16,1		2	Sumatera Utara	18,8
	3	DKI Jakarta	14,0		3	Riau	13,6
	4	Jambi	11,9		4	Jawa Barat	9,3
	5	Sumatera Utara	9,9		5	Jawa Tengah	7,4
Riau	1	Sumatera Utara	47,8	DKI Jakarta	1	Jawa Barat	30,9
	2	Sumatera Barat	16,1		2	Jawa Tengah	20,6
	3	Kepulauan Riau	8,2		3	Banten	17,0
	4	Jawa Tengah	5,8		4	Sumatera Barat	7,9
	5	Jawa Timur	5,7		5	Aceh	6,2
Jambi	1	Sumatera Barat	17,0	Jawa Barat	1	DKI Jakarta	48,7
	2	Sumatera Selatan	14,7		2	Jawa Tengah	19,2
	3	Kepulauan Riau	11,9		3	Banten	6,7
	4	Riau	9,5		4	Luar Negeri	4,5
	5	Sumatera Utara	8,7		5	Jawa Timur	4,3

Lanjutan Tabel 3.3

Provinsi Tempat Tinggal Sekarang (Provinsi Tujuan Migran)	Urutan	Provinsi Tempat Tinggal 5 Tahun yang Lalu (Provinsi Asal Migran)	Persentase (%)	Provinsi Tempat Tinggal Sekarang (Provinsi Tujuan Migran)	Urutan	Provinsi Tempat Tinggal 5 Tahun yang Lalu (Provinsi Asal Migran)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
Sumatera Selatan	1	Lampung	20,1	Jawa Tengah	1	Jawa Barat	30,7
	2	Jawa Timur	14,6		2	DKI Jakarta	28,4
	3	Jawa Tengah	11,9		3	Jawa Timur	7,7
	4	Bengkulu	10,5		4	Banten	7,1
	5	Jawa Barat	10,0		5	DI Yogyakarta	6,2
Bengkulu	1	Sumatera Selatan	32,7	DI Yogyakarta	1	Jawa Tengah	38,8
	2	DKI Jakarta	14,1		2	Jawa Timur	12,1
	3	Sumatera Utara	6,7		3	Jawa Barat	11,0
	4	Riau	6,6		4	DKI Jakarta	6,6
	5	Jawa Tengah	5,2		5	Sumatera Selatan	4,3
Jawa Timur	1	Jawa Tengah	14,8	Kalimantan Selatan	1	Jawa Timur	36,0
	2	Luar Negeri	14,0		2	Kalimantan Tengah	18,2
	3	DKI Jakarta	10,4		3	Kalimantan Timur	14,9
	4	Jawa Barat	10,2		4	Sumatera Barat	6,7
	5	Bali	6,9		5	Jawa Barat	4,3
Banten	1	Jawa Barat	37,5	Kalimantan Timur	1	Jawa Timur	18,2
	2	DKI Jakarta	34,9		2	Jawa Barat	9,8
	3	Jawa Tengah	13,4		3	Nusa Tenggara Timur	8,7
	4	Lampung	5,1		4	Bali	7,8
	5	Sumatera Utara	1,7		5	Sulawesi Selatan	7,7
Bali	1	Jawa Timur	41,6	Kalimantan Utara	1	Sulawesi Selatan	29,1
	2	Nusa Tenggara Timur	24,8		2	Kalimantan Timur	22,1
	3	Jambi	10,3		3	Jawa Timur	14,8
	4	DKI Jakarta	6,3		4	Luar Negeri	13,5
	5	DI Yogyakarta	3,9		5	Sulawesi Tengah	5,1
Nusa Tenggara Barat	1	Luar Negeri	49,1	Sulawesi Utara	1	Gorontalo	20,8
	2	Kalimantan Timur	8,1		2	Maluku Utara	12,8
	3	Jawa Timur	6,8		3	Sulawesi Tengah	11,8
	4	Nusa Tenggara Timur	5,5		4	Kalimantan Timur	10,9
	5	Sulawesi Tenggara	5,0		5	Sulawesi Selatan	9,8
Nusa Tenggara Timur	1	Luar Negeri	14,4	Sulawesi Tengah	1	Sulawesi Selatan	34,6
	2	Bali	14,3		2	Sulawesi Barat	18,3
	3	Jawa Timur	14,1		3	Sulawesi Utara	12,8
	4	Kalimantan Timur	9,7		4	Jawa Timur	7,0
	5	Sulawesi Selatan	7,1		5	Kalimantan Utara	5,6
Kalimantan Barat	1	Jawa Barat	17,8	Sulawesi Selatan	1	Luar Negeri	13,5
	2	Jawa Tengah	11,9		2	Kalimantan Timur	11,6
	3	Jawa Timur	10,1		3	Sulawesi Tenggara	10,1
	4	Luar Negeri	8,9		4	Papua	8,6
	5	Sulawesi Tengah	7,3		5	Sulawesi Tengah	8,5
Kalimantan Tengah	1	Kalimantan Selatan	28,7	Sulawesi Tenggara	1	Sulawesi Selatan	38,2
	2	Jawa Timur	20,9		2	Kalimantan Timur	7,4
	3	Jawa Tengah	15,7		3	Maluku	7,1
	4	Kalimantan Barat	5,2		4	Papua Barat Daya	5,0
	5	Nusa Tenggara Timur	4,4		5	Sulawesi Tengah	4,5

Lanjutan Tabel 3.3

Provinsi Tempat Tinggal Sekarang (Provinsi Tujuan Migran)	Urutan	Provinsi Tempat Tinggal 5 Tahun yang Lalu (Provinsi Asal Migran)	Persentase (%)	Provinsi Tempat Tinggal Sekarang (Provinsi Tujuan Migran)	Urutan	Provinsi Tempat Tinggal 5 Tahun yang Lalu (Provinsi Asal Migran)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
Gorontalo	1	Sulawesi Utara	36,6	Papua Barat Daya	1	Papua	35,5
	2	Sulawesi Tengah	22,4		2	Maluku	20,2
	3	Jawa Timur	11,0		3	Papua Barat	13,0
	4	Sulawesi Selatan	10,8		4	Papua Tengah	8,4
	5	DI Yogyakarta	7,6		5	Sulawesi Utara	6,8
Sulawesi Barat	1	Sulawesi Selatan	62,5	Papua	1	Papua Barat Daya	21,7
	2	Sulawesi Tengah	15,1		2	Jawa Timur	12,3
	3	Kalimantan Timur	6,9		3	Sulawesi Selatan	10,7
	4	Luar Negeri	4,9		4	Papua Barat	10,4
	5	Sulawesi Tenggara	4,0		5	Sulawesi Utara	9,2
Maluku	1	Papua Barat Daya	17,3	Papua Selatan	1	Papua Barat Daya	20,2
	2	DI Yogyakarta	11,4		2	Jawa Timur	19,4
	3	Jawa Barat	9,7		3	Papua	16,5
	4	Papua Tengah	7,1		4	Sulawesi Selatan	10,3
	5	Papua	6,9		5	Nusa Tenggara Timur	6,7
Maluku Utara	1	Sulawesi Utara	26,6	Papua Tengah	1	Papua	51,2
	2	Maluku	11,8		2	DI Yogyakarta	13,5
	3	Sulawesi Tenggara	9,8		3	Jawa Tengah	10,6
	4	Jawa Timur	9,4		4	Maluku	8,2
	5	Jawa Tengah	9,2		5	Papua Barat	7,5
Papua Barat	1	Jawa Timur	16,2	Papua Pegunungan	1	Papua	73,0
	2	Sulawesi Selatan	14,5		2	Sumatera Utara	13,7
	3	Maluku	13,5		3	Papua Barat Daya	7,7
	4	Papua	11,2		4	Sumatera Barat	1,7
	5	Jawa Tengah	7,5		5	Sulawesi Selatan	1,7

Di sejumlah provinsi, terdapat arus migrasi masuk risen yang cukup signifikan yang berasal dari satu provinsi. Sebesar 73,0 persen migran risen di Papua Pegunungan berasal dari Papua. Sebesar 62,5 persen migran risen di Sulawesi Barat berasal dari Sulawesi Selatan. Sebesar 51,2 persen migran risen di Papua Tengah berasal dari Papua. Selain provinsi-provinsi tersebut, beberapa provinsi yang juga menjadi tujuan utama dari provinsi tetangganya dalam persentase yang tinggi antara lain: Aceh dari Sumatera Utara (49,1 persen), Jawa Barat dari DKI Jakarta (48,7 persen), dan Riau dari Sumatera Utara (47,8 persen). Migrasi yang cukup intens dari beberapa provinsi yang bertetangga ini ditengarai menunjukkan pengaruh perbedaan kondisi ekonomi, konektivitas yang baik, dan kedekatan sosial/budaya.

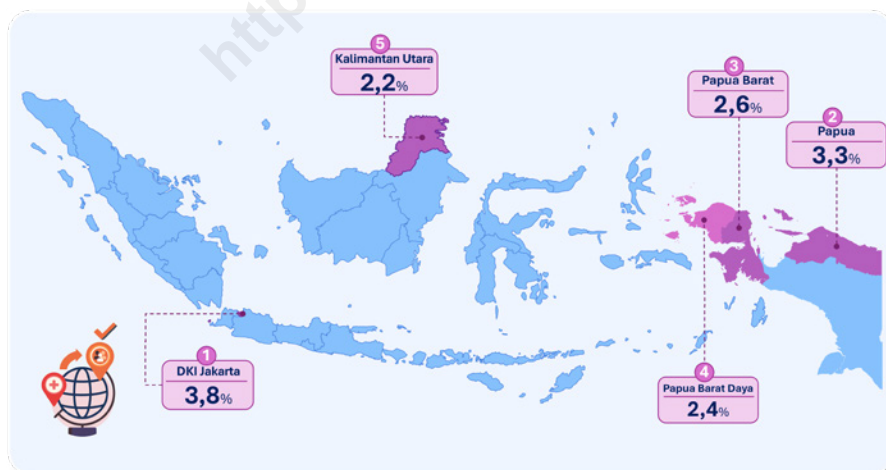
Hal yang juga cukup menarik adalah beberapa provinsi mencatatkan persentase migran risen dari luar negeri yang cukup signifikan. Luar negeri tercatat masuk ke dalam lima besar asal migran risen di delapan provinsi. Sebagai contoh, setengah migran risen yang masuk ke Nusa Tenggara Barat berasal dari luar negeri. Sebesar 13-14 persen migran risen di Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, Kalimantan Utara dan Sulawesi Selatan berasal dari luar negeri. Fenomena ini menunjukkan bahwa

arus migrasi internasional memiliki kontribusi terhadap dinamika kependudukan di Indonesia, khususnya di provinsi-provinsi yang memiliki sejarah panjang sebagai daerah pekerja migran Indonesia (PMI). Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dikenal sebagai daerah basis pengiriman PMI, sehingga sebagian pekerja migran yang kembali (*return migrants*) kemudian tercatat sebagai migran risen.

3.3.2 MIGRAN KELUAR RISEN

Migran keluar risen merupakan migran risen dilihat dari wilayah asal migrasinya. Migran keluar risen didefinisikan sebagai penduduk yang pernah bertempat tinggal di suatu provinsi pada lima tahun yang lalu dan saat ini bertempat tinggal di luar provinsi tersebut. Susenas Maret 2024 mencatat DKI Jakarta sebagai provinsi dengan intensitas migrasi keluar risen tertinggi (3,8 persen), diikuti oleh Papua (3,3 persen), Papua Barat (2,6 persen), Papua Barat Daya (2,4 persen), dan Kalimantan Utara (2,2 persen).

DKI Jakarta, sebagai pusat administrasi dan ekonomi nasional, memang menawarkan banyak kesempatan kerja dan layanan pendidikan, namun kepadatan penduduk dan biaya tinggal yang tinggi diduga mendorong sebagian penduduk mencari peluang di Jawa Barat atau Banten atau wilayah yang lebih terjangkau. Begitu pula di Papua, Papua Barat, dan Papua Barat Daya: meskipun provinsi-provinsi ini kaya akan sumber daya alam, terbatasnya infrastruktur ekonomi dan tenaga kerja terampil di daerah-daerah pedalaman diduga menyebabkan mobilitas penduduk ke luar provinsi. Migrasi keluar kemungkinan dipandang sebagai strategi untuk mencari akses pendidikan, pekerjaan, atau kualitas hidup lebih baik. Kalimantan Utara, provinsi dengan ekonomi yang relatif masih berkembang, diduga menghadapi dilema serupa, di mana sebagian penduduk mencari peluang di wilayah yang lebih maju secara ekonomi.



Gambar 3.7
Lima Provinsi dengan Persentase Migran Keluar Risen Terbesar di Indonesia, 2024

ARUS MIGRASI KELUAR RISEN

Sebagaimana teori migrasi, migrasi risen lebih banyak terjadi pada jarak yang lebih dekat daripada jarak yang lebih jauh. Sebagaimana ditunjukkan Tabel 3.4, arus migrasi keluar risen suatu provinsi secara umum bertujuan ke provinsi tetangga atau provinsi yang masih berasal dari pulau utama yang sama. Sebagai contoh DKI Jakarta, di mana 83,1 persen migran dari provinsi tersebut berpindah tempat tinggal ke provinsi-provinsi di Jawa. Sebanyak 41,3 persen migran dari DKI Jakarta pindah ke Jawa Barat, diikuti ke Jawa Tengah (29,4 persen), Banten (6,9 persen), dan Jawa Timur (5,4 persen).

Tabel 3.4
Lima Besar Provinsi Tujuan Migran Risen Antarprovinsi dari
Provinsi Tempat Tinggal 5 (lima) Tahun yang Lalu, 2024

Provinsi Tempat Tinggal 5 tahun yang Lalu (Provinsi Asal Migran)	Urutan	Provinsi Tempat Tinggal Sekarang (Provinsi Tujuan Migran)	Persentase (%)	Provinsi Tempat Tinggal 5 tahun yang Lalu (Provinsi Asal Migran)	Urutan	Provinsi Tempat Tinggal Sekarang (Provinsi Tujuan Migran)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	1	Sumatera Utara	32,9	Lampung	1	Sumatera Selatan	17,4
	2	DKI Jakarta	27,9		2	Jawa Timur	15,2
	3	Kepulauan Riau	9,0		3	Jawa Tengah	11,4
	4	Jawa Timur	5,1		4	DKI Jakarta	8,9
	5	Sumatera Barat	4,9		5	Jawa Barat	7,7
Sumatera Utara	1	Riau	26,0	Kep. Bangka Belitung	1	Sumatera Selatan	18,0
	2	Kepulauan Riau	19,1		2	Jawa Barat	14,5
	3	Sumatera Barat	9,8		3	Jawa Tengah	13,3
	4	Aceh	8,6		4	Nusa Tenggara Barat	12,9
	5	Jawa Barat	7,3		5	Banten	10,8
Sumatera Barat	1	Kepulauan Riau	38,6	Kepulauan Riau	1	Sumatera Utara	21,4
	2	DKI Jakarta	18,6		2	Sumatera Barat	15,5
	3	Riau	12,5		3	Jawa Tengah	15,3
	4	Jambi	8,8		4	Riau	9,9
	5	Jawa Barat	4,4		5	Jambi	9,7
Riau	1	Sumatera Utara	25,7	DKI Jakarta	1	Jawa Barat	41,3
	2	Sumatera Barat	22,9		2	Jawa Tengah	29,4
	3	Kepulauan Riau	15,4		3	Banten	6,9
	4	Jawa Tengah	9,1		4	Jawa Timur	5,4
	5	DKI Jakarta	3,9		5	Sumatera Barat	3,1
Jambi	1	Sumatera Barat	32,1	Jawa Barat	1	Jawa Tengah	41,4
	2	Jawa Timur	11,2		2	DKI Jakarta	14,7
	3	Sumatera Selatan	10,9		3	Banten	9,6
	4	Jawa Barat	9,2		4	Jawa Timur	6,8
	5	Jawa Tengah	8,6		5	Sumatera Barat	4,6
Sumatera Selatan	1	Jawa Barat	17,6	Jawa Tengah	1	Jawa Barat	29,0
	2	Lampung	13,7		2	DI Yogyakarta	19,2
	3	Bengkulu	10,9		3	Jawa Timur	13,6
	4	DI Yogyakarta	9,3		4	DKI Jakarta	13,4
	5	Jambi	9,2		5	Banten	4,7

Lanjutan Tabel 3.4

Provinsi Tempat Tinggal 5 tahun yang Lalu (Provinsi Asal Migran)	Urutan	Provinsi Tempat Tinggal Sekarang (Provinsi Tujuan Migran)	Persentase (%)	Provinsi Tempat Tinggal 5 tahun yang Lalu (Provinsi Asal Migran)	Urutan	Provinsi Tempat Tinggal Sekarang (Provinsi Tujuan Migran)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
Bengkulu	1	Sumatera Selatan	35,5	DI Yogyakarta	1	Jawa Tengah	43,6
	2	Jawa Barat	27,9		2	Jawa Timur	11,1
	3	DKI Jakarta	8,5		3	Jawa Barat	9,8
	4	Jawa Tengah	6,6		4	Nusa Tenggara Barat	4,7
	5	Sumatera Barat	6,4		5	Maluku	3,2
Jawa Timur	1	Jawa Tengah	21,1	Kalimantan Selatan	1	Jawa Timur	31,6
	2	Jawa Barat	9,7		2	Kalimantan Tengah	24,8
	3	DI Yogyakarta	8,9		3	Sulawesi Selatan	6,3
	4	Kalimantan Selatan	7,8		4	Jawa Tengah	6,1
	5	Bali	7,2		5	Kalimantan Timur	6,0
Banten	1	Jawa Tengah	23,9	Kalimantan Timur	1	Sulawesi Selatan	16,1
	2	DKI Jakarta	20,2		2	Jawa Timur	15,2
	3	Jawa Barat	18,4		3	Nusa Tenggara Timur	11,4
	4	Lampung	12,5		4	Nusa Tenggara Barat	10,9
	5	Jawa Timur	7,6		5	Kalimantan Selatan	8,4
Bali	1	Jawa Timur	39,4	Kalimantan Utara	1	Sulawesi Selatan	27,3
	2	Nusa Tenggara Timur	27,4		2	Jawa Barat	17,9
	3	Jawa Tengah	9,7		3	Nusa Tenggara Timur	15,4
	4	Kalimantan Timur	6,8		4	Sulawesi Tengah	9,1
	5	Nusa Tenggara Barat	5,0		5	DI Yogyakarta	8,8
Nusa Tenggara Barat	1	Jawa Timur	25,1	Sulawesi Utara	1	Sulawesi Tengah	15,1
	2	Nusa Tenggara Timur	21,3		2	Maluku Utara	12,5
	3	DI Yogyakarta	17,7		3	Gorontalo	10,6
	4	Kalimantan Timur	15,1		4	Kepulauan Riau	8,4
	5	Kalimantan Tengah	7,2		5	Jawa Barat	6,3
Nusa Tenggara Timur	1	Bali	20,4	Sulawesi Tengah	1	Sulawesi Selatan	33,8
	2	Nusa Tenggara Barat	13,4		2	Kalimantan Timur	9,7
	3	Jawa Barat	13,0		3	Sulawesi Barat	9,7
	4	DI Yogyakarta	12,3		4	Gorontalo	7,1
	5	Jawa Timur	10,9		5	Sulawesi Tenggara	6,9
Kalimantan Barat	1	Jawa Tengah	37,8	Sulawesi Selatan	1	Sulawesi Tenggara	19,9
	2	Nusa Tenggara Timur	13,7		2	Sulawesi Tengah	15,4
	3	Jawa Timur	10,3		3	Sulawesi Barat	13,9
	4	Kalimantan Tengah	9,4		4	Nusa Tenggara Timur	8,3
	5	Sulawesi Selatan	8,9		5	Jawa Timur	6,4
Kalimantan Tengah	1	Jawa Tengah	32,8	Sulawesi Tenggara	1	Sulawesi Selatan	40,7
	2	Kalimantan Selatan	22,6		2	Nusa Tenggara Barat	19,5
	3	Jawa Timur	20,7		3	Jawa Tengah	6,2
	4	Nusa Tenggara Timur	13,3		4	Maluku Utara	5,1
	5	Nusa Tenggara Barat	5,6		5	Sulawesi Tengah	5,0

Lanjutan Tabel 3.4

Provinsi Tempat Tinggal 5 tahun yang Lalu (Provinsi Asal Migran)	Urutan	Provinsi Tempat Tinggal Sekarang (Provinsi Tujuan Migran)	Persentase (%)	Provinsi Tempat Tinggal 5 tahun yang Lalu (Provinsi Asal Migran)	Urutan	Provinsi Tempat Tinggal Sekarang (Provinsi Tujuan Migran)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
Gorontalo	1	Sulawesi Utara	42,7	Papua Barat Daya	1	Maluku	22,1
	2	Sulawesi Tengah	27,0		2	Papua	12,9
	3	DI Yogyakarta	13,0		3	Sulawesi Tenggara	12,0
	4	Sulawesi Tenggara	6,2		4	Papua Selatan	11,7
	5	Sumatera Selatan	4,2		5	Jawa Tengah	10,6
Sulawesi Barat	1	Sulawesi Selatan	37,6	Papua	1	Sulawesi Selatan	24,4
	2	Sulawesi Tengah	30,1		2	Papua Pegunungan	11,8
	3	Kalimantan Timur	11,2		3	Jawa Timur	11,4
	4	Nusa Tenggara Barat	7,0		4	Papua Tengah	9,1
	5	Kalimantan Selatan	6,7		5	Papua Barat Daya	5,5
Maluku	1	Jawa Barat	16,4	Papua Selatan	1	Jawa Timur	31,9
	2	Sulawesi Tenggara	14,3		2	Nusa Tenggara Timur	24,8
	3	Sumatera Utara	13,6		3	Sulawesi Selatan	17,9
	4	Lampung	9,3		4	Sulawesi Tenggara	9,0
	5	Maluku Utara	8,0		5	Papua	9,0
Maluku Utara	1	Sulawesi Selatan	34,9	Papua Tengah	1	Sulawesi Selatan	21,4
	2	Sulawesi Utara	18,5		2	Maluku	15,4
	3	Jawa Timur	11,6		3	Jawa Tengah	13,4
	4	Maluku	10,4		4	Sulawesi Tenggara	11,2
	5	Sulawesi Tenggara	9,4		5	Nusa Tenggara Barat	9,9
Papua Barat	1	Jawa Timur	21,7	Papua Pegunungan	1	Papua	55,3
	2	Nusa Tenggara Timur	21,2		2	Sulawesi Selatan	44,7
	3	Sulawesi Selatan	8,9				
	4	Maluku	7,9				
	5	Sulawesi Tenggara	7,0				

Di sejumlah provinsi, terdapat arus migrasi keluar risen yang cukup signifikan menuju satu provinsi. Sebesar 43,6 persen migran asal DI Yogyakarta berpindah tempat tinggal ke Jawa Tengah. Sekitar 40–42 persen migran dari provinsi asal berpindah tempat tinggal ke provinsi tujuan sebagai berikut: dari Gorontalo ke Sulawesi Utara, dari Jawa Barat ke Jawa Tengah, dari DKI Jakarta ke Jawa Barat, dan dari Sulawesi Tenggara ke Sulawesi Selatan. Pola ini diduga terjadi karena provinsi tujuan memiliki kedekatan geografis, kesamaan budaya, serta menawarkan peluang ekonomi dibanding provinsi asal, sehingga migrasi lebih cenderung berlangsung antarprovinsi tetangga daripada lintas wilayah yang jauh.

Tabel 3.4 juga menunjukkan secara frekuentatif bahwa provinsi-provinsi di Jawa masih menjadi tujuan migrasi risen. Jawa Timur berada dalam lima besar provinsi tujuan migrasi risen di 20 provinsi, diikuti Jawa Tengah (di 18 provinsi), dan Jawa Barat (di 16 provinsi). Fenomena ini diduga disebabkan tingginya konsentrasi kegiatan ekonomi, pendidikan, dan industri di Pulau Jawa, yang sejak lama berperan sebagai pusat pertumbuhan nasional.

Di Sumatera, arus migrasi keluar utama di seluruh provinsi adalah menuju provinsi di Sumatera, kecuali Sumatera Selatan di mana 17,6 persen migrannya berpindah ke Jawa Barat. Di Jawa, arus migrasi keluar masih didominasi menuju ke provinsi di Jawa juga. Sementara itu di Kalimantan, arus keluar utama dari kelima provinsinya menuju ke luar Kalimantan. Di Indonesia Timur, secara umum arus migrasi keluar utama menuju kawasan Indonesia Timur juga, kecuali di Maluku di mana 16,2 persen migrannya berpindah ke Jawa Barat, dan Papua Selatan di mana 31,9 persen migrannya berpindah ke Jawa Timur. Pola ini menunjukkan dugaan adanya keterkaitan spasial dan jaringan sosial yang kuat dalam migrasi, di mana perpindahan lebih banyak terjadi antarprovinsi yang secara geografis berdekatan atau memiliki kesamaan budaya. Sementara itu, arus yang mengarah ke Jawa mencerminkan daya tarik ekonomi dan pendidikan yang lebih besar, sehingga meskipun jaraknya jauh, Jawa tetap menjadi magnet migrasi dari berbagai wilayah.

3.4 MIGRAN NETO

Migrasi neto merupakan selisih antara jumlah imigran (orang yang datang ke suatu wilayah) dan emigran (orang yang meninggalkan suatu wilayah) (Liu, 1975). Ketika jumlah orang yang datang ke suatu wilayah lebih banyak dibandingkan dengan jumlah orang yang meninggalkan wilayah tersebut, maka terjadi migrasi neto positif atau wilayah tersebut merupakan penerima migran. Sebaliknya, apabila jumlah orang yang datang ke suatu wilayah lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah orang yang meninggalkan wilayah tersebut, terjadi migrasi neto negatif atau wilayah tersebut merupakan pengirim migran. Sementara apabila jumlah antara migran masuk dan migran keluar suatu wilayah sama, migrasi neto dikatakan berimbang.

Publikasi profil migran ini menampilkan ukuran persentase migran neto. Persentase yang dimaksud adalah perbandingan antara perbedaan (selisih) jumlah migran masuk dan migran keluar terhadap jumlah penduduk yang berpeluang melakukan migrasi dikurangi dengan setengah dari jumlah migran yang masuk ditambah dengan jumlah migran keluar dari wilayah tersebut (rumus penghitungan dapat dilihat pada subbab 2.6 konsep definisi operasional). Persentase migran neto dapat dipergunakan untuk melihat pengaruh migrasi yang terjadi terhadap komposisi kependudukan di suatu wilayah. Semakin besar persentase migran neto maka semakin besar peranan komponen migrasi terhadap komposisi dan pertumbuhan penduduk suatu wilayah. Analisis terkait migrasi neto dilakukan kepada migran yang lahir di luar wilayah tempat tinggal saat pendataan (migran seumur hidup), serta migran yang melakukan perpindahan tempat tinggal dalam jangka waktu lima tahun terakhir saat pendataan (migran risen). Wilayah tempat tinggal yang dimaksud mengacu kepada wilayah administrasi provinsi.

3.4.1 MIGRAN NETO SEUMUR HIDUP

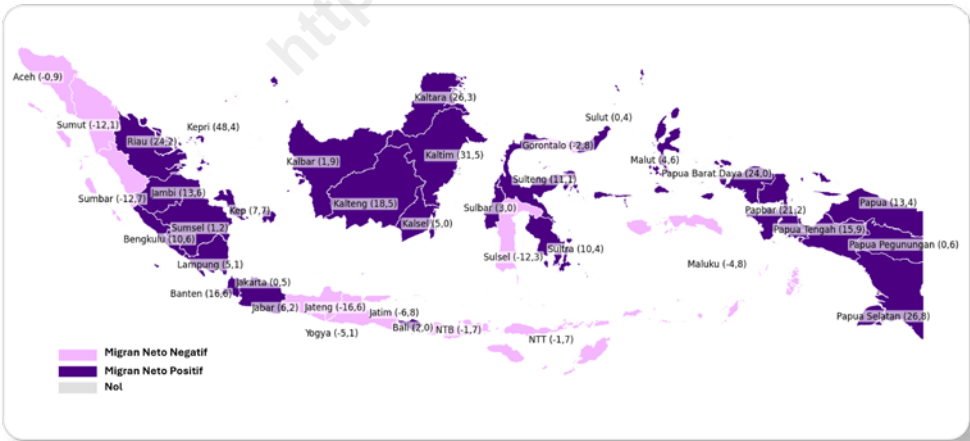
Wilayah yang mengalami migrasi neto seumur hidup positif berada di sebagian besar Pulau Sumatera, sebagian kecil Pulau Jawa-Bali (Jakarta, Jawa Barat, Banten,

dan Bali), semua provinsi di Pulau Kalimantan dan Papua, serta sebagian provinsi di Pulau Sulawesi dan Maluku (Lampiran 3).

Proporsi migran neto seumur hidup dengan nilai positif terbesar dapat ditemukan di Provinsi Kepulauan Riau yaitu 48,4 persen. Tempat kedua dan ketiga diduduki masing-masing oleh Provinsi Kalimantan Timur (31,5 persen), dan Provinsi Papua Selatan (26,8 persen). Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Timur masih mempertahankan posisinya sebagai provinsi dengan proporsi migran neto seumur hidup terbesar pada 2021, 2023, dan 2024. Sementara itu, provinsi baru yaitu Papua Selatan menempati posisi ketiga menggantikan Provinsi Kalimantan Utara yang mempati posisi tersebut pada tahun 2023.

Hal ini menunjukkan bahwa di wilayah-wilayah tersebut memiliki faktor penarik yang cukup kuat sehingga menjadi tujuan bagi migran seumur hidup dari provinsi lainnya di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, ketiga provinsi ini juga termasuk dalam sepuluh besar provinsi dengan persentase migran masuk seumur hidup tertinggi pada tahun 2024. Dari sisi ekonomi, Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Timur termasuk ke dalam lima provinsi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita terbesar baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan pada 2024 yang menjadi salah satu daya tarik ekonomi bagi wilayah tersebut.

Sementara itu, proporsi migran neto seumur hidup dengan nilai positif terkecil ditempati oleh Provinsi Sulawesi Utara (0,4 persen), Provinsi Daerah Khusus Jakarta (0,5 persen), dan Provinsi Papua Pegunungan (0,6 persen). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat migran seumur hidup yang menuju provinsi tersebut, namun jumlahnya relatif berimbang dengan jumlah orang yang lahir di wilayah tersebut namun kemudian bermigrasi keluar provinsi.



Gambar 3.8
Persentase Migran Neto Seumur Hidup Menurut Provinsi, 2024

Proporsi migran netto seumur hidup dengan nilai negatif terbesar berada di Provinsi Jawa Tengah (16,6 persen). Wilayah dengan proporsi migran netto seumur hidup negatif terbesar lainnya terdapat di Provinsi Sumatera Barat (12,7 persen), Provinsi Sulawesi Selatan (12,3 persen), dan Provinsi Sumatera Utara (12,1 persen). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peluang besar bahwa mereka yang lahir di wilayah-wilayah tersebut akan bermigrasi ke provinsi lainnya. Sementara itu wilayah dengan proporsi migran seumur hidup negatif terkecil dapat ditemukan di Provinsi Aceh (0,9 persen), Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (1,7 persen). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat sejumlah penduduk yang lahir di wilayah tersebut dan bermigrasi keluar, namun jumlahnya relatif sebanding dengan penduduk yang lahir di provinsi lain bermigrasi masuk ke wilayah tersebut.

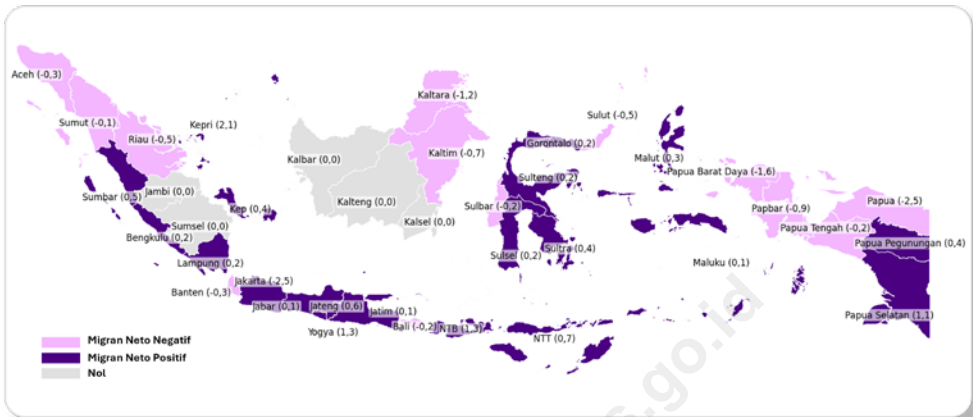
Arus migrasi seumur hidup keluar dan masuk antar provinsi di Indonesia menunjukkan kualitas preferensi tertentu. Misalnya, migran masuk seumur hidup di Provinsi Kepulauan Riau didominasi oleh penduduk yang datang dari Provinsi Sumatera Utara (20,7 persen), Provinsi Riau (13,2), Provinsi Sumatera Barat (12,7 persen), dan Jawa Tengah (11,1 persen). Arus migrasi ini sekaligus dapat menjelaskan mengapa Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sumatera Barat, dan Provinsi Sumatera Utara tergolong sebagai lima besar provinsi dengan proporsi migrasi seumur hidup negatif terbesar di Indonesia. Sementara itu, sebagai wilayah dengan migran netto seumur hidup terbesar, migrasi keluar Provinsi Jawa Tengah sebagian besar mengarah ke Provinsi Jawa Barat (27,7 persen), Provinsi Daerah Khusus Jakarta (18,4 persen), dan Provinsi Banten (10,0 persen). Hal ini menunjukkan bahwa migrasi netto seumur hidup melibatkan pergerakan dari wilayah yang relatif berdekatan, menuju wilayah-wilayah dengan peluang pekerjaan yang lebih baik, atau akibat terjadinya pemekaran wilayah.

3.4.2 MIGRAN NETO RISEN

Migrasi netto risen negatif terjadi di Sumatera Utara, Bali, Sulawesi Barat, Papua Tengah, Aceh, Banten, Riau, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Papua Barat, Kalimantan Utara, Papua Barat Daya, Daerah Khusus Jakarta, dan Papua (Lampiran 4). Proporsi migran netto risen dengan nilai positif terbesar dapat ditemukan di Provinsi Kepulauan Riau yaitu 2,1 persen. Tempat kedua dan ketiga diduduki masing-masing oleh D.I Yogyakarta (1,3 persen) dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (1,3 persen). Hal ini menunjukkan bahwa wilayah-wilayah tersebut memiliki faktor penarik yang cukup tinggi sehingga menjadi tujuan utama bagi migran risen dari provinsi lainnya di Indonesia.

Sementara itu, proporsi migran netto risen dengan nilai yang mendekati nol ditempati oleh Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah migran yang menuju provinsi tersebut jumlahnya relatif berimbang dengan jumlah orang yang bermigrasi keluar. Proporsi migran netto risen dengan nilai negatif terbesar berada di Provinsi Papua dan Daerah Khusus Jakarta (2,5 persen). Wilayah dengan proporsi migran netto risen negatif terbesar lainnya yang memiliki nilai di atas 1,0 persen terdapat di Papua Barat

Daya (1,6 persen) dan Kalimantan Utara (1,2 persen). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat gejala migrasi keluar yang cukup signifikan dari wilayah-wilayah tersebut ke provinsi lainnya pada periode lima tahun terakhir. Sementara itu, wilayah dengan proporsi migran risen negatif terkecil dapat ditemukan di Provinsi Sumatera Utara yaitu 0,1 persen. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang bermigrasi masuk dan keluar di wilayah tersebut selama lima tahun terakhir relatif sebanding meskipun jumlah migran risen yang keluar sedikit lebih banyak.



Gambar 3.9
Persentase Migran Neto Risen Menurut Provinsi, 2024

Sebagaimana pada migrasi seumur hidup, arus migrasi risen keluar dan masuk antarprovinsi di Indonesia juga menunjukkan preferensi tertentu. Misalnya, migran masuk risen di Provinsi Kepulauan Riau didominasi oleh penduduk yang datang dari Provinsi Sumatera Barat (26,6 persen), Sumatera Utara (18,8 persen), dan Riau (13,6 persen). Tingginya migrasi masuk ke Provinsi Kepulauan Riau ini sejalan dengan yang terjadi pada migrasi seumur hidup.

Selain itu, Kepulauan Riau menjadi daya tarik karena salah satu alasan utamanya berkaitan dengan letak geografis di wilayah pengembangan segitiga Singapura-Johor-Riau (SIJORI) yang merupakan kawasan yang secara khusus dikembangkan untuk industri, alih kapal, dan pariwisata (Triningsih, 2013). Sementara itu, migrasi keluar risen tertinggi terjadi di Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Sebagian besar migran dari Jakarta mengarah ke Provinsi Jawa Barat (41,3 persen), Jawa Tengah (29,4 persen), dan Banten (6,9 persen). Situasi ini berkaitan erat dengan terus berlangsungnya proses suburbanisasi di sekeliling wilayah Jakarta (Rukmana et al., 2019), serta menunjukkan berkembangnya peluang kerja di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini juga menunjukkan bahwa migrasi neto risen melibatkan pergerakan dari wilayah yang relatif berdekatan, menuju wilayah-wilayah dengan peluang pekerjaan yang lebih baik.



BAB 4

PROFIL MIGRAN RISEN

BAB 4. PROFIL MIGRAN RISEN

Bab ini menganalisis karakteristik migran masuk risen, yaitu penduduk di mana provinsi tempat tinggalnya pada saat 5 tahun yang lalu berbeda dengan provinsi tempat tinggal pada saat survei. Analisis pada bab ini disajikan secara komparatif dengan memberikan gambaran perbedaan karakteristik antara migran risen dan nonmigran risen. Karakteristik migran risen yang dibahas meliputi jenis kelamin, umur, status perkawinan, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, kemampuan membaca dan menulis, kesehatan, fertilitas, dan karakteristik sosial lainnya.

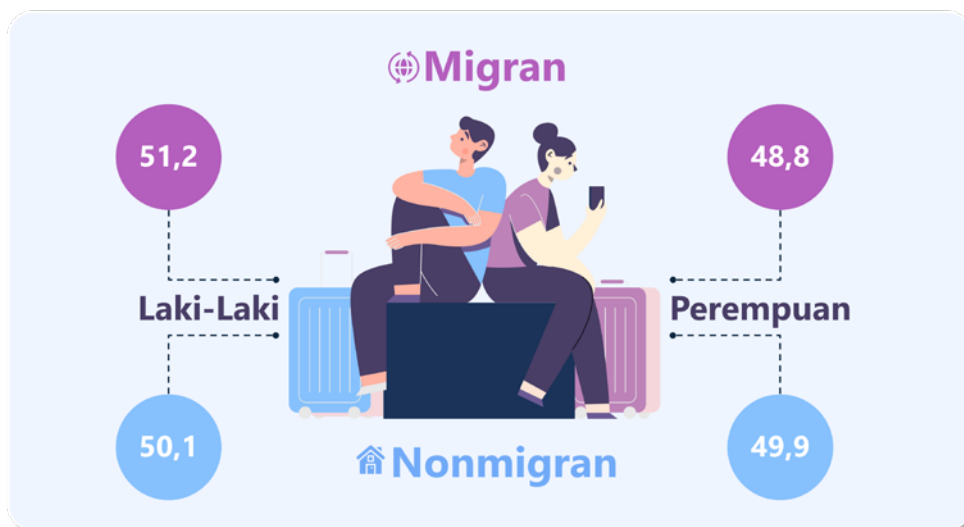
Tidak berhenti pada level individu, bab ini juga akan mengulas mengenai karakteristik rumah tangga migran dan nonmigran risen. Rumah tangga migran risen didefinisikan sebagai rumah tangga di mana setidaknya terdapat satu orang anggota rumah tangga yang berstatus Migrasi Risen. Untuk mempermudah penyajian dalam bab ini, terminologi “rumah tangga migran risen” akan disebut sebagai “rumah tangga migran”, dan sebaliknya, “rumah tangga non-migran risen” akan disebut sebagai “rumah tangga non-migran”.

4.1 KOMPOSISI MIGRAN DAN NONMIGRAN RISEN

4.1.1 JENIS KELAMIN

Faktor demografi, seperti jenis kelamin, memainkan peran penting dalam keputusan seseorang untuk bermigrasi, sejalan dengan teori migrasi selektif dari Lee (1966). Artinya, setiap individu, tergantung pada karakteristiknya, akan merespons faktor pendorong dan penarik migrasi secara berbeda. Jika dahulu migrasi didominasi oleh laki-laki, kini jumlah migran perempuan telah meningkat pesat hingga hampir separuh dari total migran global, dan mereka memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian.

Berdasarkan hasil Susenas Maret 2024, persentase migran laki-laki sedikit lebih besar daripada migran perempuan. Persentase migran laki-laki tercatat mencapai 51,2 persen, sedangkan persentase migran perempuan sebesar 48,8 persen. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, kesenjangan persentase migran risen laki-laki dan perempuan semakin menyempit. Hal ini merupakan kombinasi berbagai faktor ekonomi, sosial, dan pendidikan yang saling terkait. Dahulu migrasi banyak didorong oleh kebutuhan tenaga kerja di sektor padat karya yang didominasi laki-laki, seperti konstruksi, perkebunan, pertambangan. Kini, ekonomi modern semakin bergeser ke arah sektor jasa dan industri manufaktur yang justru banyak menyerap tenaga kerja perempuan.



Gambar 4.1

Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Status Migrasi Risen dan Jenis Kelamin, 2024

Hugo (2005) menyoroti bahwa perubahan struktur ekonomi di banyak negara Asia, termasuk Indonesia, telah membuka lapangan kerja baru yang secara stereotip dianggap cocok untuk perempuan. Hal ini secara langsung menarik perempuan dari daerah perdesaan ke pusat-pusat industri perkotaan untuk bekerja di pabrik dan sektor jasa, menjadikan mereka migran ekonomi yang independen. Adanya globalisasi dan perubahan struktur ekonomi telah membuka lebih banyak lapangan kerja bagi perempuan, khususnya di sektor jasa dan kreatif. Hal ini mendorong semakin banyak perempuan untuk melakukan migrasi internal, mengisi peran yang sebelumnya jarang mereka masuki (OECD, 2023). Namun, penting untuk diingat bahwa migrasi perempuan juga membawa risiko, sebab mereka berada dalam posisi yang lebih rentan.

Gambar 4.1 menunjukkan perbandingan distribusi persentase jenis kelamin untuk setiap penduduk migran dan nonmigran. Kesetaraan dalam persentase migran antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing berada di angka 51,1 persen dan 48,9 persen menunjukkan bahwa dalam populasi yang memilih untuk bermigrasi, terdapat stabilitas dalam peran gender. Perbandingan yang sama juga tercermin dari persentase nonmigran antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing berada di angka 50,1 persen dan 49,9 persen. Pola migrasi internal di Indonesia menunjukkan pergeseran signifikan: perempuan kini berperan sebagai migran yang otonom, yaitu bukan lagi pasif mengikuti keluarga. Motivasi mereka telah bergeser dari alasan pernikahan menjadi dorongan ekonomi pribadi dan keinginan untuk menempuh pendidikan tinggi. Hal ini terlihat dari banyaknya perempuan yang bekerja di sektor jasa dan industri manufaktur ringan di perkotaan. Temuan ini mendukung analisis Hugo (2005) mengenai peningkatan agensi dan kemandirian perempuan dalam mengambil keputusan migrasi.

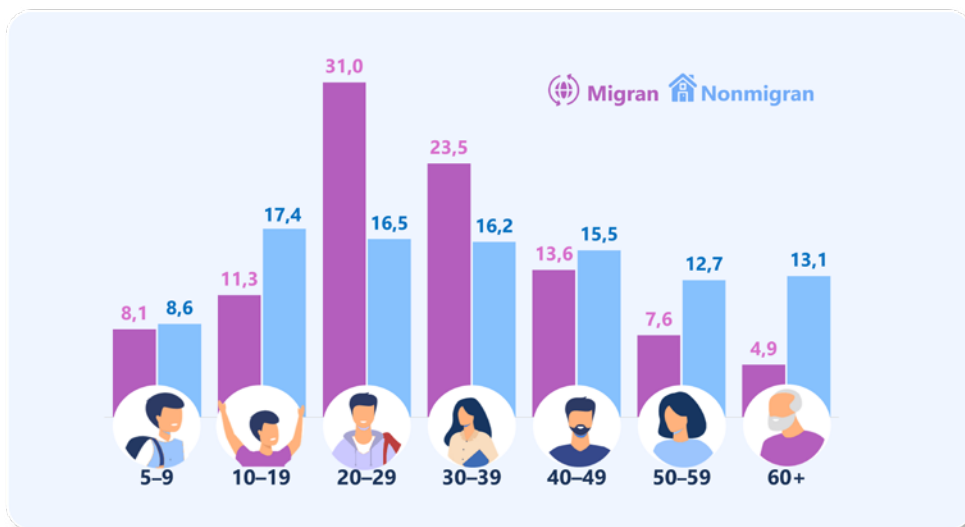
Di beberapa wilayah di Indonesia migran risen perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki, seperti Papua Barat Daya menjadi wilayah dengan persentase migran perempuan terbesar, bahkan mencapai 65,0 persen. Kemudian diikuti oleh Banten yang mencapai 59,3 persen dan DI Yogyakarta sebesar 58,7 persen. Tingginya persentase migran perempuan di Papua Barat Daya, yang merupakan provinsi baru dengan pusat kegiatan di Kota Sorong, kemungkinan besar didorong oleh perkembangan sektor jasa perkotaan dan faktor sosial-keluarga. Pola migrasi di wilayah timur Indonesia seringkali diawali oleh migrasi laki-laki yang kemudian membawa serta keluarga mereka, termasuk para istri (perempuan) yang juga masuk ke pasar kerja di sektor informal atau jasa untuk menambah pendapatan keluarga. Banten adalah rumah bagi ribuan pabrik, terutama di sektor garmen, tekstil, alas kaki, dan elektronik. Sektor-sektor ini secara historis lebih banyak merekrut tenaga kerja perempuan karena dianggap lebih teliti dan terampil untuk jenis pekerjaan perakitan. Sebuah studi menyoroti bahwa faktor utama yang membuat Yogyakarta memiliki persentase migrasi internal yang tinggi adalah pendidikan dan pariwisata (UGM, 2018). Dibandingkan dengan destinasi lain, Yogyakarta unggul karena ketersediaan institusi pendidikan yang sangat beragam dan masif, yang menjadi pintu masuk utama bagi para migran muda, termasuk perempuan.

4.1.2 STRUKTUR UMUR

Umur adalah faktor krusial dalam keputusan migrasi, karena perpindahan penduduk seringkali dipicu oleh peristiwa penting dalam hidup yang bergantung pada umur, seperti pendidikan, pekerjaan, dan pernikahan. Lee (1966) menekankan peran umur dalam seleksi migran ini. Akibatnya, mayoritas migran adalah kelompok usia kerja (Kuhnt, 2019), sebab pada usia muda, dorongan untuk meningkatkan kondisi finansial dan menambah pengalaman berada pada puncaknya (Massey, et al., 1993).

Hasil Susenas Maret 2024 menunjukkan bahwa migran di Indonesia didominasi oleh mereka yang berumur 20–29 sebesar 31,0 persen, meningkat dari 26,3 persen pada data tahun lalu, diikuti oleh umur 30–39 (25,9 persen). Statistik ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah migran berada pada awal umur produktif 20–39 tahun. Persentase migran meningkat sampai dengan 20–29 tahun, kemudian perlahan menurun pada kelompok umur yang lebih tua. Migran lansia hanya mencapai 4,9 persen dari jumlah seluruh migran di Indonesia dan angka ini menurun dari 5,3 persen pada hasil Susenas Maret 2023.

Dibandingkan dengan populasi nonmigran, terdapat perbedaan pola distribusi penduduk menurut kelompok umur. Sama dengan pola tahun lalu, penduduk cenderung tersebar secara merata pada setiap kelompok umur dan tidak terjadi pemusatan pada kelompok umur tertentu. Penduduk nonmigran paling banyak berumur 10–19 tahun dengan persentase 17,4 persen, kemudian persentase ini menurun dengan perlahan seiring dengan menuanya kelompok umur.



Gambar 4.2

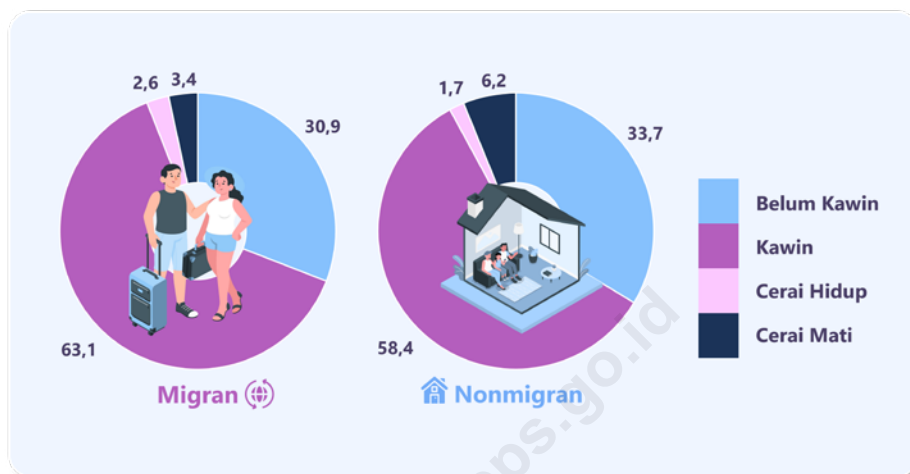
Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Status Migrasi Risen dan Kelompok Umur, 2024

Sama seperti tahun lalu, Kepulauan Riau menjadi provinsi dengan persentase migran berumur 20–29 tahun terbesar di Indonesia, mencapai 55,2 persen berdasarkan hasil Susenas Maret 2024. Salah satu alasan utamanya adalah status Kepulauan Riau, khususnya kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK), sebagai Kawasan Perdagangan Bebas (*Free Trade Zone*) dan pusat industri manufaktur yang masif. Sebagai salah satu pusat industri manufaktur terbesar di Indonesia, Kota Batam menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar di sektor industri, terutama untuk posisi operator produksi, teknisi, dan staf level awal, yang sangat sesuai dengan profil demografi usia 20–29 tahun yang baru memasuki angkatan kerja atau mencari peluang kerja pertama. Selain itu, letak geografis Kepulauan Riau yang sangat strategis, berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia, membuka peluang ekonomi dan mobilitas yang tidak dimiliki provinsi lain.

4.1.3 STATUS PERKAWINAN

Secara historis, migrasi sering kali didorong oleh faktor ekonomi, sosial, dan politik. Namun, faktor-faktor mikro-demografi seperti status perkawinan, usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan juga memainkan peran krusial. Pada masyarakat tradisional, migrasi sering dilakukan oleh individu lajang, terutama laki-laki muda, untuk mencari pekerjaan atau kesempatan ekonomi yang lebih baik sebelum mereka menikah dan berkeluarga, hal ini sejalan dengan studi Boyle & Cooke, 2012, terkait individu lajang lebih mobile dibanding yang sudah menikah karena ikatan sosial-ekonomi mereka di daerah asal lebih sedikit. Setelah menikah, keputusan untuk bermigrasi sering kali menjadi keputusan bersama yang melibatkan pasangan dan mempertimbangkan kebutuhan keluarga. Orang yang baru menikah cenderung pindah dari rumah orang

tuanya, sedangkan orang yang berpisah dari pasangannya juga cenderung berpindah (Lee, 1966). Dalam konteks migrasi internal, pasangan baru menikah cenderung untuk berpindah atau paling tidak salah satu dari pasangan berpindah (Alden Speare dan Goldscheider, 1987). Di satu sisi, setelah bersatu dalam keluarga, seseorang menjadi lebih terbatas pergerakan migrasinya. Dengan kata lain, kemungkinan untuk bermigrasi lebih besar untuk mereka yang belum menikah (Massey dan Espinosa, 1997).



Gambar 4.3

Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Status Migrasi Risen dan Status Perkawinan, 2024

Hasil Susenas Maret 2024 menunjukkan bahwa migrasi risen mayoritas dilakukan oleh penduduk umur 10 tahun ke atas yang berstatus kawin dengan persentase mencapai 63,1 persen. Statistik ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah migran di Indonesia berstatus kawin. Selain itu, persentase migran yang belum kawin juga relatif tinggi, yaitu 30,9 persen. Sedangkan sebagian kecil migran berstatus cerai hidup (2,6 persen) dan cerai mati (3,4 persen). Pada Provinsi DI Yogyakarta dan Kepulauan Riau yang sebelumnya didominasi oleh migran kawin pada Susenas Maret 2023, yaitu DI Yogyakarta 51,7 persen dan Kepulauan Riau 45,6 persen, namun pada hasil Susenas Maret 2024 ini beralih menjadi migran belum kawin yang mendominasi, hal ini berbanding terbalik dengan wilayah lainnya yang didominasi oleh migran berstatus kawin.

Gambar 4.3 menunjukkan pola distribusi yang sama antara migran dan nonmigran menurut status perkawinan. Untuk penduduk sepuluh tahun ke atas nonmigran, mereka yang berstatus kawin mendominasi dengan persentase 58,4 persen, diikuti dengan belum kawin sebesar 33,7 persen. Pola yang sama ini sejalan dengan fakta bahwa status “kawin” merupakan mayoritas status perkawinan penduduk di Indonesia setidaknya dalam rentang satu dekade terakhir. Pola yang sama antara migran dan nonmigran pada level nasional ini menjadi sinyal bahwa belum terdapat perbedaan

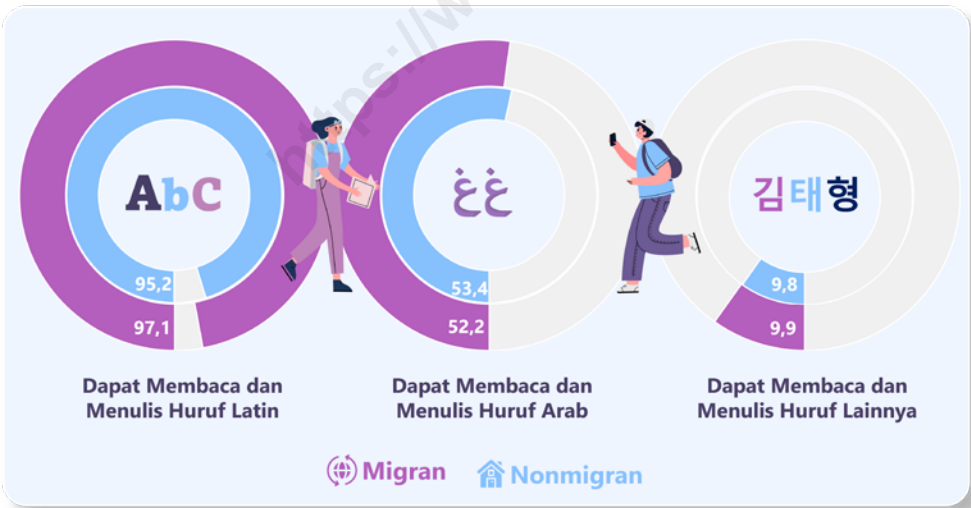
kecenderungan antara penduduk 10 tahun ke atas yang berstatus kawin dan belum kawin untuk menjadi migran. Persentase migran dan nonmigran berumur 10 tahun ke atas menurut provinsi dan status perkawinan ditampilkan pada Lampiran 7.

4.2 PENDIDIKAN MIGRAN DAN NONMIGRAN RISEN

4.2.1 KEMAMPUAN MEMBACA DAN MENULIS

Kemampuan literasi dimulai dari penguasaan membaca dan menulis kalimat sederhana, baik dalam huruf Latin, Arab, maupun bentuk aksara lain. Keterampilan dasar ini bukan hanya membuka peluang pengembangan potensi diri, tetapi juga menjadi fondasi untuk memastikan keterlibatan aktif dalam proses pembangunan sosial, ekonomi, maupun budaya. Dengan literasi, seseorang dapat mengakses informasi, beradaptasi dengan perubahan zaman, serta turut berkontribusi dalam peningkatan kualitas hidup keluarga dan komunitas. Pentingnya aspek ini juga tercermin dalam indikator Angka Melek Huruf (AMH), yang telah lama digunakan sebagai tolok ukur seberapa luas akses suatu masyarakat terhadap pendidikan, informasi, dan pengetahuan.

Berdasarkan data Susenas Maret 2024, terdapat temuan menarik mengenai kemampuan literasi penduduk. Data menunjukkan bahwa kemampuan literasi migran untuk huruf Latin dan huruf lainnya lebih tinggi dibandingkan nonmigran. Sebaliknya, nonmigran menunjukkan persentase kemampuan literasi yang lebih tinggi untuk huruf Arab.



Gambar 4.4
Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Dapat Membaca dan Menulis Menurut Status Migrasi Risen, 2024

Secara spesifik, persentase migran yang mampu membaca dan menulis huruf Latin, huruf Arab, dan huruf Lainnya masing-masing adalah 97,1 persen, 52,2 persen, dan 9,9 persen. Sementara itu, persentase nonmigran untuk kemampuan yang sama adalah 95,2 persen, 53,4 persen, dan 9,8 persen. Angka-angka ini menunjukkan kondisi yang sangat baik, di mana hampir seluruh penduduk, baik migran maupun nonmigran, memiliki kemampuan membaca dan menulis huruf latin.

Hasil Susenas menunjukkan bahwa tingkat penguasaan literasi huruf Latin baik pada migran maupun nonmigran di Indonesia sudah sangat tinggi. Hampir seluruh provinsi mencatat angka di atas 90 persen, dengan capaian tertinggi terdapat di Jambi, DI Yogyakarta, dan Papua Tengah (mendekati 100 persen) pada kelompok migran. Namun, Papua Pegunungan menjadi anomali, baik pada migran (67,1 persen) maupun nonmigran (70,4 persen), yang mengindikasikan adanya kesenjangan serius dalam akses literasi formal di wilayah tersebut. Untuk literasi huruf Arab, pola yang muncul lebih beragam dan memperlihatkan perbedaan cukup jelas antara migran dan nonmigran. Beberapa provinsi mencatat penguasaan huruf Arab yang sangat tinggi, misalnya Jawa Barat (68,1 persen migran; 70,0 persen nonmigran), Aceh (66,1 persen migran; 60,5 persen nonmigran), serta Riau (62,0 persen migran; 71,2 persen nonmigran). Sebaliknya, ada provinsi dengan penguasaan sangat rendah seperti Papua Tengah (9,5 persen migran; 6,1 persen nonmigran) dan Papua Pegunungan (0,0 persen migran; 0,3 persen nonmigran). Sementara itu, literasi huruf Lainnya masih rendah baik pada migran maupun nonmigran. Namun, distribusinya menunjukkan variasi yang menarik.

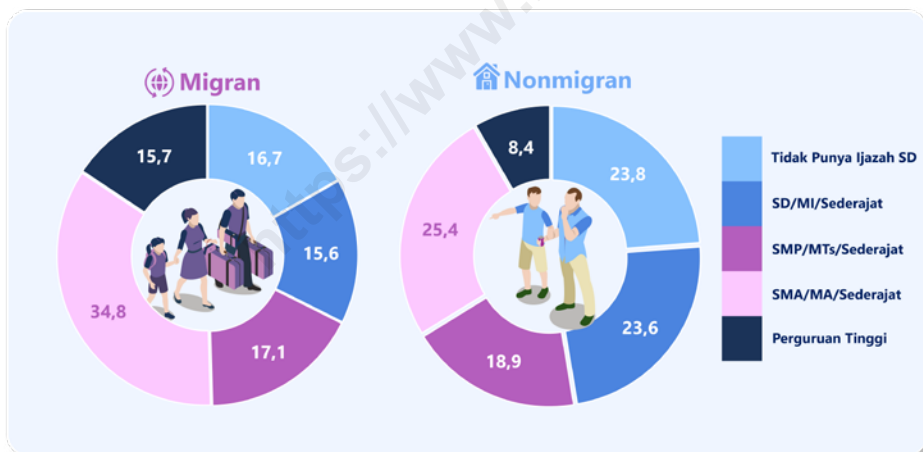
Secara keseluruhan, pola ini menegaskan bahwa huruf Latin sudah menjadi standar literasi utama bagi kedua kelompok, dengan migran sedikit lebih unggul. Untuk huruf Arab, nonmigran relatif lebih tinggi penguasaannya. Sedangkan literasi huruf lainnya lebih banyak dijumpai pada migran. Persentase migran dan nonmigran menurut provinsi dan kemampuan membaca dan menulis huruf Latin, huruf Arab, dan huruf Lainnya secara lengkap ditampilkan pada Lampiran 10.

4.2.2 PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam kehidupan manusia. Lebih dari sekadar investasi ekonomi, pendidikan adalah landasan fundamental yang menentukan arah perkembangan, keberlanjutan, serta kualitas hidup seseorang (Idris et al., 2012). Dalam konteks migrasi, pendidikan berperan ganda sebagai faktor pendorong sekaligus cerminan peluang. Teori migrasi yang dikemukakan Todaro menegaskan bahwa pendidikan meningkatkan kapasitas individu untuk beradaptasi dan memanfaatkan peluang ekonomi di lokasi baru. Hal ini sejalan dengan temuan Faggian & McCann (2009) yang menunjukkan adanya korelasi positif antara tingkat pendidikan yang lebih tinggi dengan kecenderungan migrasi, sementara mereka yang berpendidikan rendah umumnya terikat pada sektor-sektor tertentu dan memiliki mobilitas yang lebih terbatas.

Kondisi di Indonesia turut memperkuat teori tersebut. Migrasi internal, khususnya menuju kawasan perkotaan, banyak didominasi oleh individu dengan tingkat pendidikan menengah ke atas. Kota dipandang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, serta akses pendidikan lanjutan, sehingga memberikan peluang mobilitas sosial yang lebih besar bagi kelompok ini. Fenomena tersebut terlihat jelas di wilayah perkotaan yang menjadi magnet utama migran, karena mampu menyediakan lebih banyak kesempatan kerja yang sesuai dengan keterampilan lulusan SMA maupun perguruan tinggi (Tirtosudarmo, 2009). Sebaliknya, migrasi dari kelompok berpendidikan rendah umumnya bersifat sirkuler atau temporer, dengan orientasi pada pekerjaan informal atau sektor padat karya, seperti buruh tani, buruh bangunan, atau pekerja kasar. Hal ini menegaskan bahwa kualitas pendidikan berperan penting dalam menentukan jenis pekerjaan yang diperoleh serta stabilitas kehidupan migran di daerah tujuan.

Pentingnya peran pendidikan juga sejalan dengan komitmen global melalui *Sustainable Development Goals* (SDGs). Tujuan 4 SDGs secara tegas menekankan perlunya memastikan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan memberikan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua orang. Upaya ini relevan dengan konteks migrasi, sebab individu dengan tingkat pendidikan yang lebih baik memiliki daya saing dan adaptabilitas yang lebih tinggi di daerah tujuan. Pada saat yang sama, akses pendidikan yang merata di daerah asal berpotensi mengurangi kesenjangan serta menekan migrasi akibat keterbatasan kesempatan di daerah tertinggal.



Gambar 4.5
Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut
Status Migrasi Risen dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2024

Tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan merujuk pada jenjang pendidikan tertinggi yang diselesaikan oleh individu, yang dibuktikan dengan kepemilikan ijazah atau sertifikat kelulusan pada jenjang tersebut. Indikator ini penting untuk menilai kualitas pendidikan formal seseorang. Berdasarkan data pada Gambar 4.5, mayoritas penduduk berstatus migran menamatkan pendidikan di tingkat SMA/MA atau yang

sederajat dengan persentase sebesar 34,8 persen. Ini diikuti oleh lulusan SMP/MTs/ sederajat sebesar 17,1 persen, mereka yang tidak memiliki ijazah SD sebesar 16,7 persen, dan lulusan SD sederajat sebesar 15,6 persen. Migran lulusan perguruan tinggi (Diploma I/II/III, Diploma IV/S1, Profesi, S2/S3) sebesar 15,7 persen.

Sementara itu, pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh nonmigran paling banyak juga pada jenjang SMA/MA/sederajat dengan persentase sebesar 25,4 persen. Sementara itu, mereka yang tidak memiliki ijazah atau tidak tamat SD sebesar 23,8 persen. Kemudian, dilanjutkan oleh tamatan SD/MI/sederajat sebesar 23,6 persen dan SMP/MTs/ sederajat sebesar 18,9 persen. Persentase terkecil adalah nonmigran tamatan perguruan tinggi yaitu sebesar 8,4 persen.

Jika ditinjau dari kebijakan wajib belajar 12 tahun (UU No. 20 Tahun 2003), terlihat bahwa pencapaian antara migran dan nonmigran relatif berimbang. Sebanyak 67,5 persen migran telah menuntaskan pendidikan minimal hingga SMA/MA/sederajat, sementara pada nonmigran sedikit lebih tinggi yaitu 67,9 persen. Meskipun demikian, ada perbedaan dalam pola pencapaiannya: kelompok migran lebih menonjol pada pendidikan tinggi, sementara nonmigran lebih banyak terakumulasi pada jenjang menengah ke bawah. Perbedaan ini mencerminkan kesenjangan kualitas dan keberlanjutan pendidikan antara kelompok migran dan nonmigran.

Tingkat pendidikan yang ditamatkan masih menjadi faktor penentu penting dalam perilaku migrasi di Indonesia. Migran cenderung memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi dibandingkan nonmigran. Data menunjukkan bahwa proporsi migran lulusan SMA/MA dan pendidikan tinggi relatif lebih besar, sedangkan nonmigran lebih banyak terkonsentrasi pada jenjang pendidikan yang lebih rendah. Pola ini mengindikasikan bahwa pendidikan menjadi modal sosial utama bagi seseorang untuk bermigrasi, baik dalam mencari peluang kerja, melanjutkan studi, maupun mengakses fasilitas perkotaan. Namun, tingginya proporsi migran pada lulusan SMA/MA juga mencerminkan adanya tantangan baru. Banyak lulusan menengah yang bermigrasi ke kota besar dengan tujuan mencari pekerjaan, tetapi tidak semuanya mampu melanjutkan ke pendidikan tinggi. Hal ini menyebabkan migrasi masih didominasi oleh tenaga kerja menengah yang rawan terjebak dalam sektor informal atau pekerjaan berupah rendah. Kondisi ini konsisten dengan penelitian terbaru (World Bank, 2022) yang menekankan bahwa meskipun pendidikan menengah telah meningkat di Indonesia, akses ke pendidikan tinggi masih timpang antarwilayah dan memengaruhi pola migrasi.

Dalam konteks kebijakan, penting untuk memastikan agar migran tidak hanya berhenti pada pendidikan menengah, melainkan juga mendapat kesempatan menempuh pendidikan tinggi atau pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri. Program pemerintah seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, pengembangan pendidikan vokasi berbasis industri, serta beasiswa afirmasi untuk daerah tertinggal dapat menjadi instrumen untuk mempersempit kesenjangan ini. Dengan demikian, migrasi dapat diarahkan menjadi sarana peningkatan kualitas SDM yang tidak hanya berkontribusi pada sektor padat karya, tetapi juga mampu mengisi lapangan kerja di sektor berteknologi dan bernilai tambah tinggi.

Provinsi dengan persentase migran tertinggi yang berpendidikan minimal SMA/MA/ sederajat adalah DI Yogyakarta yaitu 78,2 persen. Kondisi ini sejalan dengan posisi DI Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan pusat perguruan tinggi ternama di Indonesia. Fenomena ini menunjukkan bahwa migrasi di DI Yogyakarta lebih bersifat *education-driven migration*, bukan sekadar pencarian kerja. Persentase migran dengan tamatan minimal SMA/MA/ sederajat dua nominasi terendah ada di Papua Pegunungan sebesar 33,2 persen. Hal ini mungkin berkaitan dengan keterbatasan akses pendidikan tinggi di wilayah timur Indonesia, rendahnya ketersediaan fasilitas pendidikan, serta adanya arus migrasi yang lebih didorong oleh pekerjaan di sektor primer (pertanian, perikanan, dan pertambangan) dibandingkan sektor formal yang membutuhkan keterampilan tinggi. Sementara itu, untuk persentase nonmigran tertinggi yang berpendidikan minimal SMA/MA/ sederajat adalah DKI Jakarta sebesar 56,6 persen dan terendah di Papua Pegunungan sebesar 15,0 persen. Persentase migran dan nonmigran menurut provinsi dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan secara lengkap ditampilkan pada Lampiran 9.

4.3 KESEHATAN

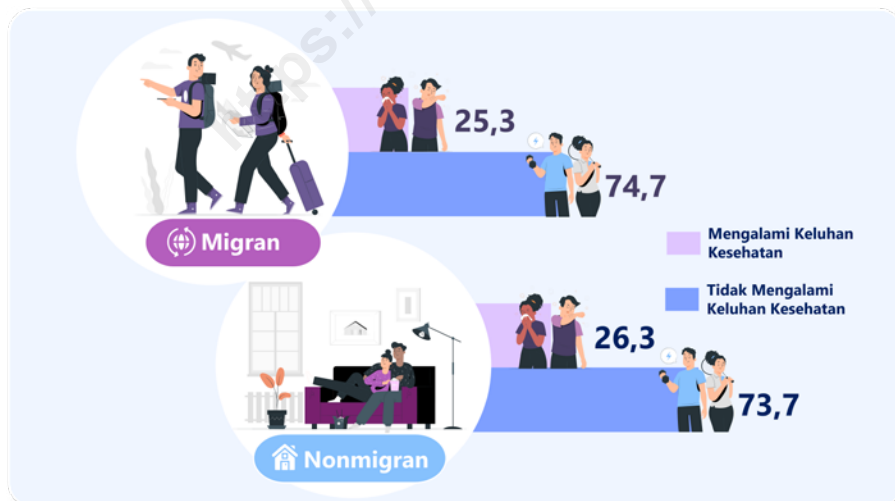
World Health Organization (1948) mendefinisikan kesehatan sebagai kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang menyeluruh, bukan hanya sekadar bebas dari penyakit atau kelemahan. Kesehatan merupakan hak yang sangat fundamental dari setiap manusia, terlepas dari ras, agama, keyakinan politik, atau kondisi ekonomi dan sosial. Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mendefinisikan kesehatan sebagai keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Berdasarkan kedua definisi tersebut, kesehatan merupakan hak mendasar setiap orang untuk menjalani kehidupan yang produktif tanpa terkecuali.

Salah satu hubungan antara migrasi dan kesehatan dapat dijelaskan melalui konsep *healthy migrant hypothesis*. Teori ini mengusulkan bahwa migran biasanya adalah individu-individu yang dipilih secara alami karena kesehatan mereka yang lebih baik dibandingkan dengan populasi umum di daerah asal mereka. Karena faktor ini, saat mereka pindah ke negara atau daerah tujuan, kondisi kesehatan mereka sering kali tampak lebih unggul dibandingkan dengan penduduk lokal. Namun, dampak migrasi terhadap kesehatan ini bisa sangat berbeda, tergantung pada jenis migrasi yang terjadi dan aspek kesehatan yang sedang dianalisis (Lu, 2008).

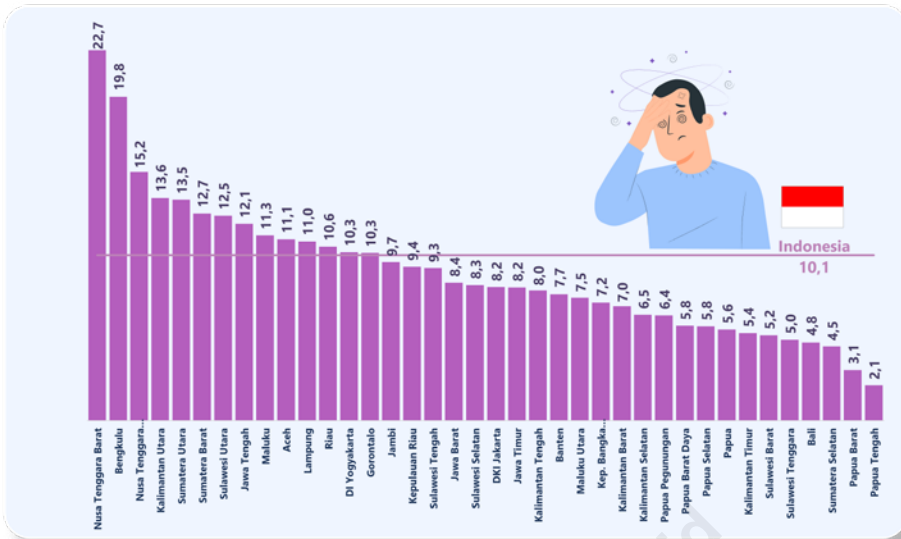
Migrasi berperan sebagai salah satu determinan sosial kesehatan yang memengaruhi kesejahteraan individu dan masyarakat. Dalam hal ini, migrasi yang sehat tidak hanya mengacu pada tingkat kesehatan seorang migran saja, namun kesehatan keseluruhan masyarakat antara daerah asal, transit, dan tujuan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip *leave no-one behind* dari langkah global Sustainable Development Goals (SDGs) yang dapat mendukung tercapainya Universal Health Coverage (UHC). UHC sendiri bertujuan untuk memastikan bahwa semua orang dapat mengakses layanan kesehatan yang berkualitas, tanpa memandang status.

Beberapa indikator kesehatan mencakup mortalitas (seperti usia harapan hidup), morbiditas (angka kesakitan), status kesehatan, disabilitas, nutrisi, akses ke sistem kesehatan, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kesehatan. Salah satu indikator penting yang menggambarkan kondisi kesehatan adalah persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan. Keluhan kesehatan merujuk pada gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena gangguan/penyakit yang sering dialami, seperti panas, batuk, pilek, diare, sakit kepala, maupun penyakit akut, penyakit kronis, ataupun keluhan kesehatan akibat kecelakaan, kriminalitas, dan alasan lainnya. Keluhan kesehatan mencakup keluhan fisik maupun psikis. Dalam bagian ini, informasi tentang keluhan kesehatan diperoleh dari migran berusia 5 tahun ke atas yang mengalami gangguan kesehatan dalam satu bulan terakhir, hingga menghambat aktivitas mereka sehari-hari.

Berdasarkan hasil Susenas, diketahui bahwa sebanyak 25,3 persen migran berusia 5 tahun ke atas mengalami keluhan kesehatan selama satu bulan terakhir. Jika dilihat lebih rinci, sebanyak 10,1 persen migran mengalami keluhan kesehatan yang mengganggu kegiatan sehari-hari, sementara 15,1 persen tidak sampai mengganggu kegiatan sehari-hari. Kondisi tersebut dapat menunjukkan bahwa terdapat 1 dari 10 migran tidak dapat melakukan kegiatan seperti bekerja, sekolah, atau kegiatan sehari-hari lainnya sebagaimana biasanya akibat memiliki keluhan kesehatan. Meskipun tidak berbeda secara signifikan, persentase keluhan kesehatan yang dialami sebulan yang lalu pada migran lebih rendah dibanding nonmigran. Secara total, persentase nonmigran yang mengalami keluhan kesehatan selama sebulan terakhir adalah sebesar 26,3 persen dimana 11,4 persen nonmigran sampai terganggu kegiatan sehari-harinya, sementara 14,9 persen nonmigran tidak sampai terganggu kegiatan sehari-harinya.



Gambar 4.6
 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut
 Status Migrasi Risen dan Keluhan Kesehatan yang Mengganggu
 Kegiatan Sehari-hari Selama 1 Bulan Terakhir, 2024



Gambar 4.7

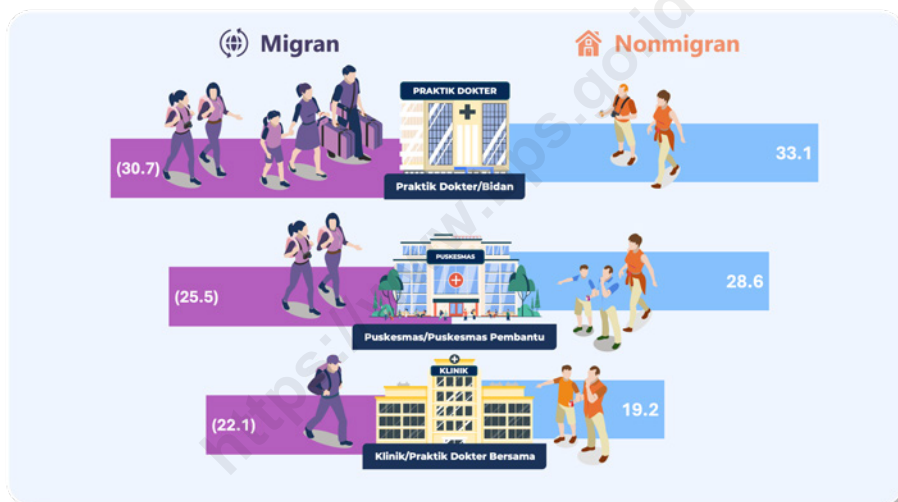
Persentase Migran Risen Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Mengganggu Kegiatan Sehari-hari Selama 1 Bulan Terakhir Menurut Provinsi, 2024

Pada tingkat provinsi, Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki persentase migran dengan keluhan kesehatan yang mengganggu kegiatan sehari-hari terbesar yaitu 22,7 persen. Provinsi lainnya dengan persentase terbesar kedua dan ketiga yaitu Bengkulu dan Nusa Tenggara Timur dengan nilai berturut-turut 19,8 persen dan 15,2 persen. Selain ketiga provinsi tersebut, persentase migran yang memiliki keluhan kesehatan yang mengganggu kegiatan sehari-hari berada di bawah 15 persen. Sementara, jika dilihat dari nilai terkecil, Papua Tengah menjadi provinsi dengan persentase paling rendah yaitu 2,1 persen.

Lebih lanjut, dari sebanyak 25,2 persen migran yang mengalami keluhan kesehatan, terdapat 38,3 persen migran yang memutuskan untuk melakukan berobat jalan. Hal ini berarti terdapat 3 sampai 4 migran dari 10 migran yang mengalami keluhan kesehatan, melakukan pemeriksaan diri dan mendapatkan pengobatan dengan mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan tanpa menginap. Fasilitas pengobatan yang paling banyak didatangi oleh migran adalah praktik dokter/bidan sebesar 30,7 persen. Puskesmas menjadi fasilitas pengobatan kedua yang paling banyak dikunjungi untuk berobat jalan oleh migran dengan persentase sebesar 25,5 persen. Fasilitas pengobatan lain yang menjadi andalan untuk berobat jalan adalah klinik/praktik dokter bersama dengan persentase sebesar 22,1 persen. Rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat, praktik pengobatan tradisional, atau fasilitas pengobatan lainnya menjadi fasilitas kesehatan lainnya yang dikunjungi oleh migran untuk berobat jalan dengan persentase di bawah 15 persen.

Pola-pola kesehatan yang sama juga terlihat pada nonmigran. Terdapat sebanyak 37,2 persen nonmigran yang mengalami keluhan kesehatan sebulan yang lalu dan ditindaklanjuti dengan melakukan berobat jalan. Praktik dokter/bidan memiliki persentase terbesar fasilitas pelayanan kesehatan yang dikunjungi sebesar 33,1 persen. Sama seperti pada migran, fasilitas pengobatan kedua dan ketiga yang paling banyak dikunjungi adalah puskesmas/pustu dan klinik/praktik dokter bersama. Persentase nonmigran yang berobat jalan pada kedua fasilitas pengobatan tersebut secara berturut-turut adalah 28,6 persen dan 19,2 persen.

Secara umum, berdasarkan analisis kesehatan pada kedua kelompok migran dan nonmigran, diketahui bahwa fasilitas pengobatan yang paling banyak dikunjungi adalah praktik dokter/bidan, puskesmas/pustu, dan klinik/praktik dokter bersama. Hal ini berarti bahwa ketiga fasilitas pengobatan tersebut adalah fasilitas yang paling mudah diakses jika seseorang mengalami keluhan kesehatan. Persamaan pola antara migran dan nonmigran dalam hal kesehatan menunjukkan adanya kesetaraan dalam akses pada fasilitas pengobatan.



Gambar 4.8

Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Memiliki Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan Menurut Status Migrasi Risen dan Tiga Fasilitas Pengobatan yang Paling Banyak Dikunjungi, 2024

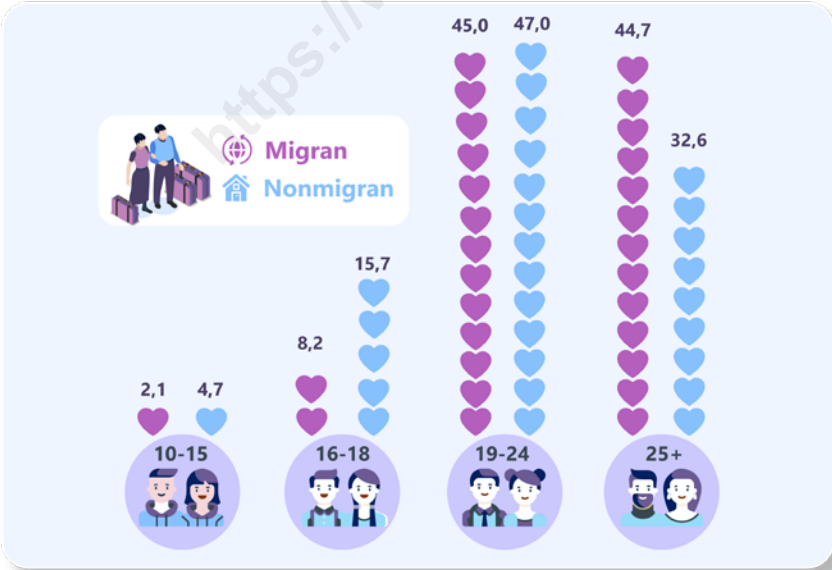
4.4 UMUR KAWIN PERTAMA

Umur kawin pertama merupakan indikator penting dalam mengukur perubahan pola fertilitas perempuan di Indonesia. Menurut Bongaarts (1978), ada empat faktor utama yang memengaruhi fertilitas: perkawinan, kontrasepsi, masa menyusui (laktasi), dan aborsi yang disengaja. Dalam konteks budaya dan norma sosial di Indonesia, perkawinan menandai dimulainya hubungan seksual, sehingga umur kawin pertama dapat mencerminkan pola fertilitas perempuan. Semakin muda usia saat pertama kali menikah, semakin besar kemungkinan memiliki lebih banyak anak.

Isu perkawinan dini dan perkawinan anak saat ini menjadi perhatian global. Pemerintah Indonesia merespons dengan merevisi UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa perempuan dan laki-laki harus berusia minimal 19 tahun untuk menikah. BKKBN bahkan mengkampanyekan usia ideal pernikahan bagi perempuan pada 21 tahun dan laki-laki 25 tahun. Di tingkat global, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) juga menargetkan penghapusan praktik perkawinan anak dan perkawinan dini pada tujuan 5.3, dengan umur kawin pertama sebagai salah satu indikatornya. Problematika ini penting karena berdampak pada putusnya pendidikan, masalah kesehatan, dan masalah ekonomi.

Hasil Susenas Maret 2024 menunjukkan bahwa 88,5 persen migran berusia 10 tahun ke atas melakukan perkawinan pertama setelah berusia 19 tahun. Sebaliknya, pada nonmigran, angkanya hanya 79,2 persen, menunjukkan bahwa proporsi nonmigran yang menikah di usia muda lebih besar dibandingkan migran.

Jika dilihat menurut jenis kelamin, diketahui terdapat 83,2 persen migran perempuan berumur 10 tahun ke atas, menikah pertama kali pada umur minimal 19 tahun. Lebih rinci, migran perempuan dengan umur kawin pertama pada 19–24 tahun adalah sebanyak 52 persen. Sementara itu, masih terdapat 16,8 persen migran perempuan yang menikah pertama kali sebelum berumur 18 tahun. Berdasarkan provinsi, Banten memiliki persentase migran perempuan yang memiliki umur kawin pertama minimal 19 tahun terbesar yaitu 96,8 persen. Provinsi kedua dan ketiga adalah Aceh dan Sumatera Barat dengan persentase berturut-turut sebesar 94,6 persen dan 93,7 persen. Sementara itu, persentase terendah adalah 56,2 persen pada provinsi Gorontalo.



Gambar 4.9
Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Status Migrasi Risen dan Umur Kawin Pertama, 2024

Nonmigran perempuan berumur 10 tahun ke atas memiliki persentase perkawinan pertama pada usia muda yang lebih besar. Persentase umur kawin pertama di usia 10–18 tahun pada nonmigran perempuan adalah sebesar 33,4 persen. Artinya, jika 1–2 dari 10 migran perempuan menikah sebelum usia 18 tahun, maka pada kelompok nonmigran jumlahnya mencapai 2–3 orang.

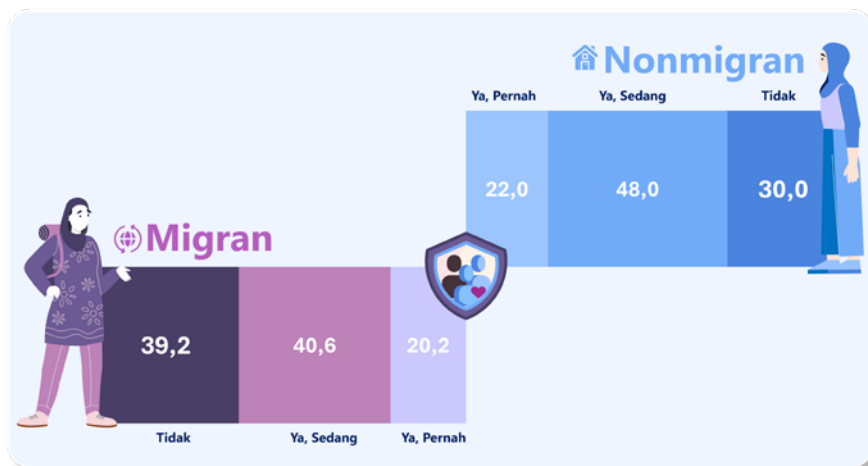
Pada jenis kelamin laki-laki, tidak ada perbedaan besar antara persentase migran laki-laki dan nonmigran laki-laki yang menikah pada umur minimal 19 tahun. Persentase umur kawin pertama minimal 19 tahun pada migran laki-laki adalah sebesar 96,3 persen, sementara pada nonmigran laki-laki adalah 94,6 persen. Kedua angka tersebut lebih besar jika dibanding dengan jenis kelamin perempuan pada kategori yang sama. Kondisi ini dapat menjadi perhatian, mengingat terdapat banyak faktor yang dapat memengaruhi umur kawin pertama pada perempuan. Umur kawin pertama pada perempuan sangat penting karena berhubungan dengan fertilitas maupun mortalitas yang nantinya dapat memengaruhi dinamika kependudukan.

4.5 ALAT/CARA KB

Alat kontrasepsi merupakan alat yang digunakan untuk mencegah kehamilan, mengatur jarak kelahiran anak, ataupun membatasi jumlah anak. Menurut Pradini dkk (2013) kontrasepsi merupakan upaya pencegahan kehamilan dengan metode-metode yang spesifik. Metode tersebut diantaranya adalah pil, suntik, IUD, dan kondom dengan penggunaannya berdasarkan kesepakatan antara pasangan suami istri. Adapun faktor-faktor yang dapat memengaruhi keputusan pasangan suami istri dalam menggunakan alat kontrasepsi yaitu sosial, ekonomi, psikologis, pekerjaan, hubungan, budaya, agama, fisik, hukum, riwayat genetik dan status kesehatan saat ini (Pradini dkk, 2013).

Salah satu faktor yang memengaruhi pasangan suami istri dalam menggunakan alat kontrasepsi adalah pekerjaan dan ekonomi. Di Indonesia, program nasional yang terkait dengan kontrasepsi adalah Program Keluarga Berencana (KB). KB di Indonesia diharapkan mampu mengendalikan pertumbuhan penduduk serta meningkatkan kesejahteraan keluarga. Banyaknya pengguna KB dapat digunakan untuk mengukur perbaikan kesehatan ibu melalui pengaturan kelahiran dan menggambarkan akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi. Dalam analisis ini, penggunaan alat/cara KB serta alat/cara KB yang digunakan adalah untuk wanita berumur 10–54 tahun yang pernah kawin. Gambar 4.10 menyoroti disparitas yang signifikan dalam penggunaan alat/cara KB antara wanita migran dan nonmigran di Indonesia. Data menunjukkan bahwa wanita migran memiliki prevalensi penggunaan KB yang lebih rendah dibandingkan dengan wanita nonmigran.

Pada Gambar 4.10 terlihat bahwa terdapat 40,6 persen migran wanita berumur 10–54 tahun yang pernah kawin dan sedang menggunakan alat/cara KB. Angka ini menunjukkan bahwa terdapat 4 dari 10 migran wanita pernah kawin dan sedang menggunakan alat/cara KB. Sementara itu, migran wanita pernah kawin dan tidak menggunakan alat/cara KB sebesar 39,2 persen. Sedangkan sisanya merupakan migran wanita pernah kawin dan pernah menggunakan alat/cara KB (20,2 persen).



Gambar 4.10

Persentase Wanita yang Berumur 10–54 Tahun Pernah Kawin Menurut Status Migrasi Risen dan Penggunaan Alat/Cara KB, 2024

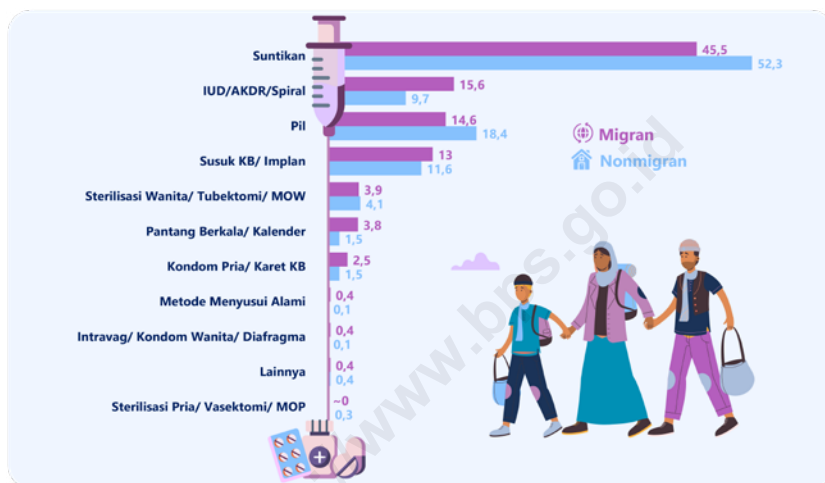
Pola yang sama terjadi pada nonmigran dimana persentase nonmigran wanita berstatus pernah kawin dan sedang menggunakan KB mencapai 48,0 persen. Artinya, terdapat 5 dari 10 nonmigran wanita berstatus pernah kawin dan sedang menggunakan alat/cara KB. Selanjutnya, 3 dari 10 nonmigran wanita berstatus pernah kawin dan tidak pernah menggunakan alat/cara KB, dan 2 dari 10 nonmigran wanita berstatus pernah kawin dan pernah menggunakan alat/cara KB. Persentase migran dan nonmigran wanita berumur 10–54 tahun yang berstatus pernah kawin menurut provinsi dan penggunaan alat/cara KB secara lengkap ditampilkan pada Lampiran 14.

Selanjutnya, alat/cara KB didefinisikan sebagai alat/cara yang dipakai oleh suatu pasangan untuk mencegah atau menunda kehamilan. Menurut Septalia dan Puspitasari (2016), faktor yang memengaruhi pemilihan metode kontrasepsi adalah biaya pemakaian kontrasepsi dan biaya nonmateriil (pengalaman efek samping). Selain itu, faktor lain yang dianggap dapat memengaruhi alat/cara KB adalah faktor agama dan budaya.

Gambar 4.11 menunjukkan alat/cara KB yang paling banyak digunakan oleh migran wanita adalah suntikan yaitu 45,5 persen. Persentase penggunaan alat/cara KB suntikan pada wanita migran merupakan yang tertinggi di sebagian besar provinsi di Indonesia, kecuali di Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Selatan, di mana pil menjadi metode yang paling banyak digunakan. Sementara itu, metode kontrasepsi yang paling banyak digunakan di Provinsi Bali adalah susuk KB/implan, sedangkan di Provinsi Papua Pegunungan adalah alat KB lainnya. Sama halnya dengan kondisi pada wanita migran, alat/cara KB suntikan menjadi yang paling mendominasi digunakan oleh wanita nonmigran, yaitu sebesar 52,3 persen diantara alat/cara KB lainnya. Kontrasepsi dengan suntikan banyak digunakan di Indonesia karena dinilai efektif, pemakaiannya praktis, harganya relatif murah dan aman, bekerja

dalam waktu lama, tidak mengganggu menyusui, dan dapat dipakai segera setelah keguguran atau setelah masa nifas (Anggriani dkk, 2019).

Gambar 4.11 menunjukkan distribusi jenis alat/cara KB yang digunakan oleh perempuan usia 10–54 tahun pernah kawin dan pengguna KB, di mana sebagian besar menggunakan metode modern, yaitu 95,4 persen pada migran dan 98,0 persen pada nonmigran, dengan suntikan sebagai metode yang paling banyak dipilih. Hal ini mengindikasikan adanya kesadaran dan akses yang baik terhadap alat KB modern. Meski demikian, migran diketahui memiliki kecenderungan yang lebih rendah dalam menggunakan alat/cara KB dibanding nonmigran. Kemungkinan yang terjadi adalah mayoritas migran berada pada kelompok umur 20–29 tahun, pada kondisi tersebut fase pernikahan baru dimulai sehingga penggunaan alat/cara KB belum diperlukan.



Gambar 4.11

Persentase Wanita Berumur 10-54 Tahun yang Berstatus Pernah Kawin dan Sedang Menggunakan Alat/Cara KB Menurut Status Migrasi Risen dan Penggunaan Alat/Cara KB, 2024

Papua Pegunungan merupakan salah satu provinsi dengan perbedaan persentase yang cukup tinggi antara pengguna KB modern pada migran dan nonmigran yakni sebesar 28,6 persen dan 9,4 persen. Sementara terdapat 71,4 persen migran dan 90,6 persen nonmigran yang masih menggunakan cara KB tradisional. Kondisi ini dapat menjadi perhatian untuk perbaikan akses pada pelayanan kesehatan reproduksi agar dapat dengan mudah diakses oleh penduduk asli maupun pendatang. Terdapat kebutuhan untuk memastikan akses pelayanan kesehatan reproduksi yang universal dan mudah dijangkau oleh semua kelompok penduduk, termasuk migran. Terlebih khususnya di wilayah Indonesia Timur. Hal ini penting untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) terkait kesehatan dan kesejahteraan. Persentase migran dan nonmigran wanita berumur 10–54 tahun yang sedang menggunakan alat/cara KB menurut provinsi dan alat/cara KB yang digunakan secara lengkap ditampilkan pada Lampiran 15.

4.6 MENGALAMI TINDAK KEJAHATAN

Marthin dan Zurcher (2008) dalam Parkins (2010) menyebutkan bahwa terdapat dua kategori pertimbangan yang menyebabkan seseorang melakukan perpindahan, yaitu ekonomi dan nonekonomi. Sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian-bagian sebelumnya, alasan ekonomi erat kaitannya dengan faktor penarik terkait ketenagakerjaan, dimana dengan melakukan perpindahan, kesejahteraan hidup akan dapat ditingkatkan. Sementara, pertimbangan lain seperti faktor kejahatan dan kekerasan juga dapat menjadi dorongan utama bagi seseorang untuk melakukan migrasi. Selain itu, terdapat efek domino pada kejahatan dan kekerasan yang berimplikasi pada kondisi sosial ekonomi yang menyebabkan terjadinya migrasi. Suhrke (1997) menyebutkan bahwa pada daerah tujuan, migran dapat dinilai sebagai tiga kategori yaitu korban, aset, dan ancaman secara bersamaan dengan kombinasi yang berbeda-beda.



Gambar 4.12

Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Status Migrasi Risen dan Kondisi Pernah Mengalami Tindak Kejahatan selama 1 Januari–31 Desember 2023

Berdasarkan hasil Susenas Maret 2024, korban kejahatan didefinisikan sebagai seseorang yang diri atau harta bendanya selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan. Sementara, yang dimaksud tindak kejahatan adalah semua tindakan kejahatan dan pelanggaran yang dapat diancam dengan hukuman berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengenai diri pribadi seseorang dan harta bendanya, misalnya penipuan, pencurian, pencurian dengan kekerasan (termasuk penodongan, perampokan), penganiayaan, pelecehan seksual (termasuk perkosaan, pencabulan), dan lainnya, seperti penculikan, pemerasan, dan sebagainya. Korban kejahatan tidak termasuk mereka yang mengalami perbuatan santet, guna-guna, atau jimat-jimat.

Pada 1 Januari–31 Desember 2023, sebanyak 0,9 persen migran atau sekitar 1 dari setiap 100 orang migran mengalami tindak kejahatan. Angka tersebut lebih tinggi dibanding persentase nonmigran yang pernah mengalami tindak kejahatan pada periode yang sama yaitu 0,5 persen. Pada level yang lebih rendah, terdapat 4 provinsi dengan persentase migran pernah mengalami tindak kejahatan sebesar 2,5 persen atau lebih. Keempat provinsi tersebut adalah Nusa Tenggara Barat (4,0 persen), Aceh (2,7 persen), D.I Yogyakarta (2,7 persen), dan Maluku (2,5 persen). Sementara pada kategori nonmigran, persentase penduduk pernah mengalami tindak kejahatan tertinggi ada di provinsi Papua Barat Daya sebesar 1,3 persen. Persentase migran dan nonmigran menurut provinsi dan kondisi mengalami tindak kejahatan selama 1 Januari–31 Desember 2023 secara lengkap ditampilkan pada Lampiran 16.

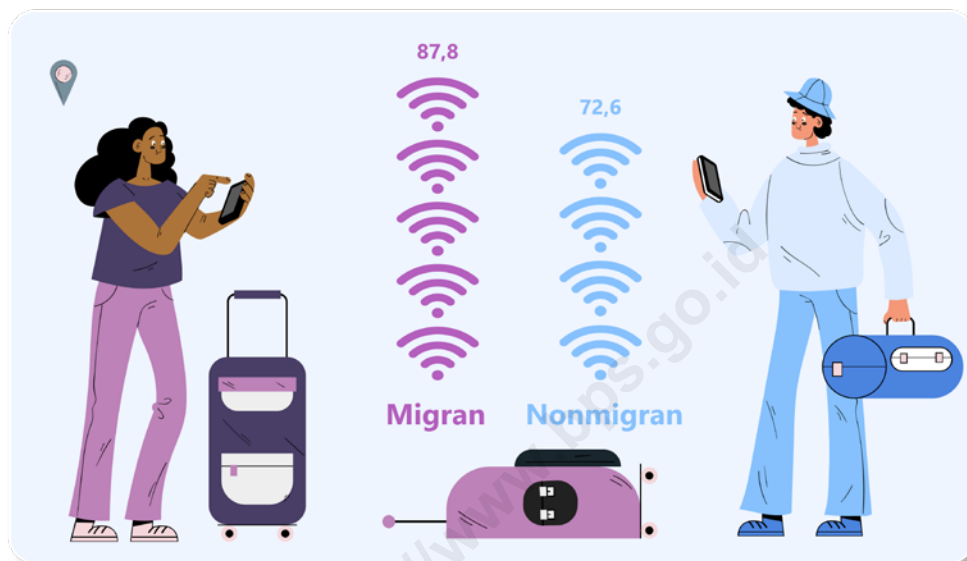
4.7 AKSES INTERNET

Revolusi industri 4.0 membuat teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan secara penuh (Setya, 2018). Kemampuan dan keterampilan dalam *internet of things* menjadi salah satu strategi pemerintah dalam menghadapi Era Industri 4.0. Internet menjadi salah satu kebutuhan utama bagi sebagian orang. Dalam konteks migrasi, teknologi atau dalam hal ini adalah internet yang dapat menghubungkan antara daerah asal dan daerah tujuan lebih dekat dan terjangkau (Hidayati, 2019). Internet dapat berperan sebagai penyedia informasi tentang tujuan dan media untuk membangun kontak sosial. Kemudahan akses internet dapat mempercepat keputusan migrasi, terutama bagi mereka yang mencari peluang kerja atau pendidikan yang lebih baik pada daerah tujuan.

Pada kehidupan sehari-hari, internet digunakan secara rutin dalam berbagai aktivitas tidak terkecuali oleh para migran. Para pekerja sangat bergantung dengan internet dalam menjalankan pekerjaannya. Para pelajar dan mahasiswa menggunakan internet dalam kegiatan belajar baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Di samping itu, internet juga digunakan sebagai sarana hiburan bagi sebagian masyarakat seperti menonton film, mendengarkan musik, bermain *game*, dan lain-lain. Bahkan, kegiatan belanja barang dan jasa pun juga menggunakan internet. Lebih lanjut, internet juga dibutuhkan untuk mengakses layanan penting seperti perbankan digital dan *e-government*.

Tren akses internet terus meningkat hingga tahun 2024. Persentase migran yang mengakses internet dalam tiga bulan terakhir pada tahun 2024 adalah sebesar 87,8 persen. Angka ini meningkat 2,6 persen dibanding tahun 2023. Persentase akses internet tertinggi dalam tiga bulan terakhir pada migran terdapat di Provinsi Kalimantan Timur atau sebesar 97,9 persen. Lebih lanjut, terdapat 14 provinsi lain dengan akses internet pada migran berada di atas angka nasional. Kelompok migran juga memiliki akses internet yang lebih tinggi dibanding nonmigran. Persentase akses internet pada nonmigran adalah sebesar 72,6 persen. Provinsi Kepulauan Riau dan DKI Jakarta adalah 2 provinsi yang memiliki akses internet tertinggi selama tiga bulan terakhir pada nonmigran dengan persentase yaitu 89,2 persen dan 87,8 persen. Akses internet

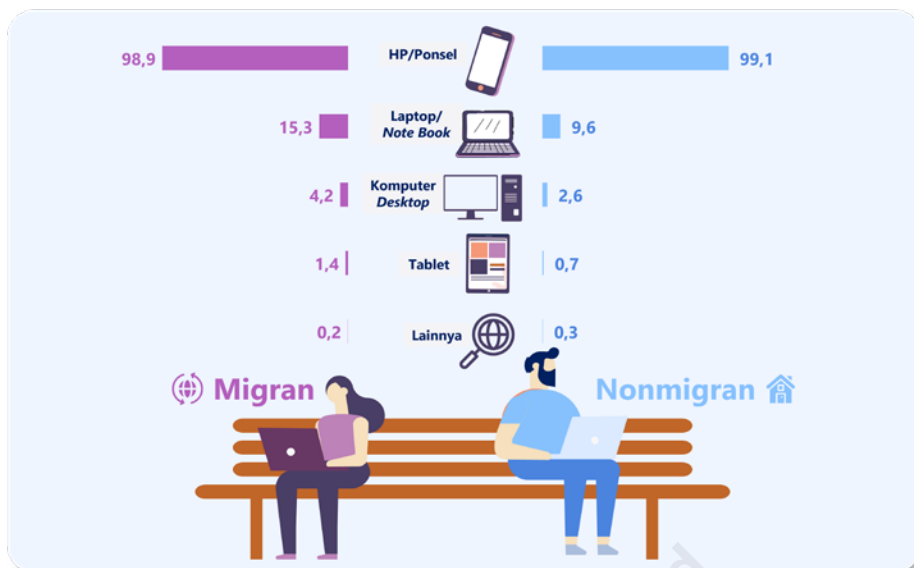
yang lebih tinggi pada migran dapat dimungkinkan karena kebutuhan yang lebih untuk terhubung dengan daerah asal, beradaptasi dengan lingkungan baru, mengakses informasi, dan sebagainya. Adanya selisih persentase akses internet antara migran dan nonmigran perlu menjadi perhatian khusus, mengingat akses internet dapat menjadi salah satu cerminan kondisi sosial dan ekonomi seseorang. Kemudahan akses internet dapat memungkinkan seseorang berpartisipasi dalam ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan sosial yang modern baik bagi migran maupun nonmigran.



Gambar 4.13

Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet dalam Tiga Bulan Terakhir Menurut Status Migrasi Risen, 2024

Handphone/ponsel menjadi alat yang paling banyak digunakan oleh migran untuk mengakses internet selama tiga bulan terakhir oleh migran dengan persentase sebesar 98,9 persen. Besaran angka tersebut menunjukkan bahwa hampir seluruh migran mengakses internet melalui HP/ponsel. Setelah HP/ponsel, alat atau perangkat lain yang digunakan adalah laptop/*notebook* dengan persentase migran yang menggunakan adalah 15,3 persen. Selain kedua alat yang telah disebutkan, migran juga mengakses internet melalui komputer/*dekstop*, tablet, dan alat lainnya dengan persentase masing-masing sebesar 4,2 persen, 1,4 persen, dan 0,2 persen. Pola yang sama juga terjadi pada nonmigran dalam mengakses internet, meskipun penggunaan alat selain HP/ponsel memiliki persentase yang lebih rendah dibanding pada migran. Rumah sendiri menjadi lokasi mayoritas untuk mengakses internet, baik untuk migran (95,9 persen) maupun nonmigran (97,3 persen). Persentase migran dan nonmigran menurut kondisi akses internet secara lengkap ditampilkan pada Lampiran 17–18.



Gambar 4.14

Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Alat yang Digunakan untuk Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir dan Status Migrasi Risen, 2024

4.8 PERUMAHAN

Perumahan merupakan kebutuhan pokok manusia selain makanan dan pakaian. Perumahan merupakan kebutuhan dasar manusia dan juga merupakan determinan kesehatan masyarakat (Keman, 2005). Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, permintaan akan perumahan juga akan terus bertambah. Kualitas dan kondisi tempat tinggal juga dapat mencerminkan kondisi sosial ekonomi seseorang. Semakin baik kondisi dan kualitas rumah yang ditempati maka semakin baik keadaan sosial ekonomi rumah tangga tersebut.

Dalam profil migran ini disajikan informasi mengenai kondisi dan kualitas perumahan penduduk yang berstatus migran dan nonmigran berdasarkan hasil Susenas Maret 2024. Melalui hasil Susenas Maret 2024 dapat disajikan berbagai informasi penting mengenai keterangan perumahan, seperti status kepemilikan, jenis lantai terluas, jenis dinding terluas, jenis atap terluas, luas lantai per kapita tempat tinggal, sanitasi, sumber air minum, bahan bakar utama untuk memasak, dan sumber penerangan. Pembahasan pada subbab ini merujuk kepada karakteristik tempat tinggal milik rumah tangga migran. Rumah tangga migran adalah rumah tangga biasa yang salah satu anggota rumah tangganya memiliki status sebagai migran (bermigrasi dalam jangka waktu lima tahun terakhir). Sementara istilah nonmigran merujuk rumah tangga yang tidak ada satupun anggota rumah tangganya yang bermigrasi dalam jangka waktu lima tahun terakhir. Persentase rumah tangga menurut provinsi dan status migrasi risen disajikan pada Lampiran 19.

4.8.1. STATUS KEPEMILIKAN BANGUNAN TEMPAT TINGGAL

Kondisi tempat tinggal merupakan salah satu indikator penting untuk menilai kesejahteraan rumah tangga. Dua aspek yang saling terkait adalah status penguasaan bangunan tempat tinggal dan bukti kepemilikan tanah/bangunan. Status penguasaan menggambarkan bagaimana rumah tangga menghuni bangunan (milik sendiri, sewa, bebas sewa, atau dinas), sementara bukti kepemilikan menunjukkan tingkat legitimasi dan keamanan hukum atas tempat tinggal tersebut. Pada bagian ini, disajikan gambaran menyeluruh mengenai kedua aspek ini, baik untuk migran maupun nonmigran, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih lengkap mengenai pola hunian di Indonesia.

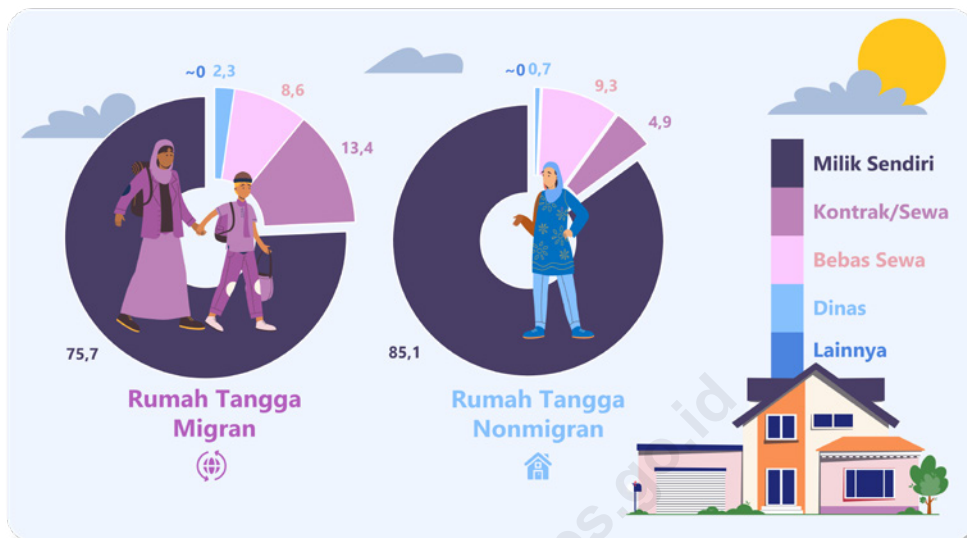
Gambar 4.15 menampilkan kondisi secara nasional, di mana rumah tangga migran paling banyak menempati bangunan milik sendiri (75,7 persen), diikuti kontrak/sewa (13,4 persen), bebas sewa (8,6 persen), dan dinas (2,3 persen). Komposisi ini berbeda dengan nonmigran, yang proporsi milik sendiri-nya lebih tinggi (85,1 persen) dan kontrak/sewa-nya lebih rendah (4,9 persen).

Variasi antarprovinsi cukup lebar. Di kelompok migran, provinsi dengan proporsi milik sendiri relatif rendah antara lain Kepulauan Riau (32,3 persen) dan Papua (52,8 persen), yang beriring dengan porsi kontrak/sewa tinggi seperti di Kepulauan Riau (57,9 persen) dan DKI Jakarta (22,3 persen). Sebaliknya, beberapa provinsi menunjukkan kepemilikan tinggi pada migran, misalnya Kalimantan Barat (94,5 persen), Jawa Tengah (92,0 persen), Sulawesi Barat (91,8 persen), dan Lampung (91,5 persen). Pada nonmigran, pola umum kepemilikan yang lebih tinggi tampak di banyak provinsi; pengecualian mencolok adalah DKI Jakarta, di mana milik sendiri sebesar 54,5 persen berdampingan dengan kontrak/sewa 21,3 persen dan bebas sewa 23,1 persen. Penjelasan detail mengenai status kepemilikan tempat tinggal dapat dilihat pada Lampiran 20.

Pola di atas konsisten dengan temuan literatur bahwa urbanisasi dan arus migrasi ke pusat-pusat kegiatan berkorelasi dengan permintaan hunian sewa yang lebih tinggi dan porsi kepemilikan yang lebih rendah dibanding wilayah nonperkotaan. Menurut Firman (2004), urbanisasi yang cepat di kota-kota besar Indonesia mendorong lonjakan kebutuhan hunian sementara, yang sebagian besar diakomodasi melalui pasar sewa. Studi lanjut menunjukkan bahwa pasar sewa memainkan peran penting dalam menampung mobilitas penduduk dan menjaga fleksibilitas perumahan perkotaan (Hidayat & Susilawati, 2018). Selain itu, analisis empiris oleh Imai, Nishiyama, dan Yamada (2021) menemukan bahwa migrasi antardaerah berasosiasi positif dengan kenaikan harga dan biaya perumahan di wilayah tujuan migran, mencerminkan tekanan permintaan pada pasar properti perkotaan.

Perbedaan status kepemilikan bangunan tempat tinggal antara migran dan nonmigran hanya menjelaskan dimensi penguasaan fisik terhadap hunian. Namun, kepemilikan yang diakui oleh rumah tangga belum tentu disertai bukti legal yang sah secara hukum. Karena itu, perlu dilihat lebih lanjut jenis bukti kepemilikan yang

dimiliki oleh rumah tangga yang mengaku menempati rumah milik sendiri. Lampiran 21 memperdalam temuan ini dengan memeriksa variasi dokumen kepemilikan, mulai dari Sertifikat Hak Milik (SHM) hingga bukti nonformal seperti girik atau Letter C, sekaligus menyoroti rumah tangga yang sama sekali tidak memiliki bukti tertulis.



Gambar 4.15
Persentase Rumah Tangga Menurut Status Migrasi Risen dan Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal, 2024

Pada migran, secara nasional Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama anggota rumah tangga tercatat 61,0 persen; dokumen selain SHM (SHGB/SHSRS) 2,6 persen; surat bukti lainnya (girik, letter C, dan sejenisnya) 15,6 persen; dan tidak punya bukti 11,7 persen. Pada nonmigran, SHM atas nama anggota sebesar 59,9 persen; selain SHM 2,3 persen; surat bukti lainnya 19,2 persen; dan tidak punya 10,3 persen.

Terdapat heterogenitas yang penting dicatat. Di kelompok migran, Kepulauan Riau memiliki porsi tinggi sertifikat selain SHM (61,9 persen), sedangkan proporsi tanpa bukti relatif tinggi di beberapa wilayah timur seperti Papua Tengah (62,8 persen) dan Maluku (38,5 persen). Di kelompok nonmigran, Papua Pegunungan (96,3 persen), Papua Tengah (73,5 persen), dan Papua Selatan (49,0 persen) memperlihatkan porsi tanpa bukti yang besar, sementara provinsi lain lebih didominasi dokumen formal (SHM) atau surat bukti lainnya. Temuan ini menunjukkan bahwa pengakuan “milik sendiri” dalam praktiknya tidak selalu disertai bukti legal formal, dan persebarannya berbeda antarwilayah.

Secara konseptual, keamanan tenurial (*security of tenure*) merupakan unsur kunci dari hak atas hunian yang layak menurut PBB/UN-Habitat (2009) dan OHCHR (2014). Hunian dinilai tidak memadai apabila penghuninya tidak memiliki perlindungan yang cukup terhadap pengusuran maupun persengketaan lahan. Literatur empiris juga menunjukkan bahwa keamanan atau legitimasi tenurial berhubungan erat dengan

insentif investasi dalam peningkatan kualitas rumah serta keterhubungan dengan stabilitas finansial rumah tangga melalui akses pada kredit dan pembiayaan formal (Payne, 2002; Gilbert, 2012; Field & Torero, 2006). Meski demikian, besarnya pengaruh keamanan tenurial sangat bervariasi, tergantung pada konteks kelembagaan lokal dan jenis sertifikasi atau dokumen kepemilikan yang berlaku (Durand-Lasserve & Selod, 2009).

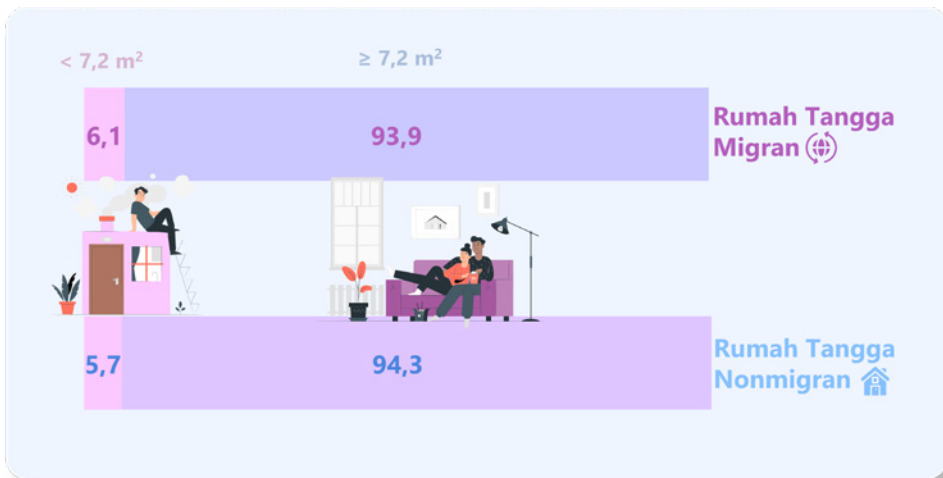
4.8.2 LUAS LANTAI PER KAPITA TEMPAT TINGGAL

Ukuran luas lantai tempat tinggal per kapita merupakan indikator penting untuk menilai kecukupan hunian dan kualitas kehidupan rumah tangga. Standar internasional yang digunakan secara luas adalah ambang batas 7,2 m² per kapita sebagaimana dirujuk oleh UN-Habitat (2009), yang menandai hunian layak dari sisi ruang. Gambar 4.16 menunjukkan bahwa secara nasional, 6,1 persen migran dan 5,7 persen nonmigran tinggal di rumah dengan luas lantai di bawah standar 7,2 m² per kapita. Angka ini mengindikasikan bahwa sebagian kecil rumah tangga masih menghadapi keterbatasan ruang, dengan variasi antarprovinsi yang cukup signifikan.

Pada kelompok migran, proporsi rumah tangga yang tinggal di hunian sempit (kurang dari 7,2 m² per kapita) relatif tinggi di beberapa provinsi. Misalnya, DKI Jakarta mencatat 18,1 persen migran dengan luas lantai di bawah standar, Nusa Tenggara Timur (15,4 persen), dan Papua Selatan (17,9 persen). Sementara itu, di wilayah dengan kepadatan rendah seperti Papua Tengah (27,1 persen) dan Papua (6,1 persen), data menunjukkan tantangan serupa meskipun penyebabnya kemungkinan berbeda, yakni keterbatasan akses infrastruktur dan bahan bangunan, bukan sekadar kepadatan urban. Di sisi lain, sebagian besar provinsi di Pulau Jawa menunjukkan proporsi rendah, seperti Jawa Tengah (1,2 persen) dan Jawa Timur (1,8 persen), menandakan kondisi hunian relatif lebih memadai dari sisi ruang.

Pada kelompok nonmigran, pola yang serupa muncul, tetapi dengan proporsi lebih kecil. Meski begitu, terdapat pengecualian penting seperti Papua Pegunungan, di mana 43 persen nonmigran masih tinggal di rumah dengan luas lantai di bawah 7,2 m² per kapita. Kondisi ini memperlihatkan bahwa masalah keterbatasan ruang tidak hanya dialami migran, tetapi juga nonmigran, terutama di wilayah dengan hambatan geografis dan ekonomi.

Temuan ini konsisten dengan literatur internasional yang menekankan bahwa kepadatan hunian (*crowding*) merupakan salah satu dimensi krusial dalam mengukur kualitas perumahan. Menurut UN-Habitat (2009) dan OHCHR (2014), hunian yang tidak menyediakan ruang cukup per orang dapat berimplikasi pada kesehatan, privasi, serta kualitas hidup. Penelitian di berbagai negara berkembang juga menegaskan bahwa keterbatasan ruang per kapita sering kali terkait dengan kerentanan kesehatan rumah tangga, terutama risiko penyakit menular akibat *over-crowding* (Baker et al., 2018). Selain itu, studi di Indonesia menemukan bahwa kepadatan hunian cenderung berkorelasi dengan status sosial ekonomi rendah, terutama pada populasi migran di kawasan urban (Hidayat & Susilawati, 2018).



Gambar 4.16
Persentase Rumah Tangga Menurut Status Migrasi Risen dan Luas Lantai Bangunan Tempat Tinggal, 2024

Secara konseptual, teori kebutuhan dasar (*basic needs theory*) menempatkan hunian layak sebagai prasyarat kesejahteraan, sejajar dengan pangan, pendidikan, dan kesehatan (Streeten, 1979). Dengan demikian, luas lantai per kapita dapat dipandang sebagai proksi multidimensi: ia merefleksikan tidak hanya kondisi fisik hunian, tetapi juga keterhubungan dengan faktor struktural seperti tingkat pendapatan, harga tanah, urbanisasi, serta akses terhadap pembiayaan perumahan. Perbedaan yang ditemukan antara migran dan nonmigran memperlihatkan dimensi tambahan: mobilitas penduduk sering kali berasosiasi dengan keterbatasan ruang tinggal, baik karena sifat transisi migrasi maupun karena biaya sewa dan akses lahan yang lebih terbatas bagi pendatang baru.

4.8.3 JENIS DINDING, LANTAI DAN ATAP RUMAH TERLUAS

Kualitas tempat tinggal tidak hanya ditentukan oleh status kepemilikan atau luas lantai per kapita, tetapi juga oleh bahan bangunan utama yang digunakan. Bahan bangunan pada dinding, lantai, dan atap rumah merupakan indikator penting yang mencerminkan ketahanan fisik, kenyamanan, serta tingkat kesejahteraan rumah tangga. UN-Habitat (2009) dan OHCHR (2014) menegaskan bahwa penggunaan material yang layak dan aman adalah salah satu dimensi mendasar dari hak atas hunian yang layak. Dalam konteks Indonesia, data migran dan nonmigran yang disajikan dalam Lampiran 23, 24, dan 25 memberikan gambaran faktual mengenai variasi penggunaan bahan bangunan di berbagai provinsi, sekaligus mencerminkan perbedaan kondisi geografis, ekonomi, dan ketersediaan sumber daya lokal.

Gambar 4.17 menggambarkan kondisi kualitas bahan bangunan secara nasional, di mana dinding tembok merupakan bahan bangunan utama rumah tangga,

digunakan oleh 86,3 persen migran dan 81,1 persen nonmigran. Meski demikian, variasi antarwilayah sangat mencolok. Pada kelompok migran, penggunaan tembok hampir merata di kawasan perkotaan maju, seperti DKI Jakarta (99,5 persen) dan DI Yogyakarta (97,5 persen), namun jauh lebih rendah di daerah terpencil seperti Papua Pegunungan (22,4 persen) dan Papua Tengah (32,1 persen). Pola serupa terlihat pada nonmigran: Bali (98,9 persen) dan DKI Jakarta (97,1 persen) menunjukkan dominasi tembok, kontras dengan Papua Pegunungan (4,3 persen) dan Papua Tengah (17,2 persen). Angka selengkapnya tertampil pada Lampiran 23.

Selain tembok, bahan bangunan kayu/papan dan anyaman bambu masih berperan signifikan di sejumlah wilayah. Misalnya, 66,5 persen rumah nonmigran di Kalimantan Selatan ber dinding kayu/papan. Hal ini mencerminkan keterkaitan erat antara ketersediaan sumber daya lokal, biaya material, serta tradisi konstruksi. Penelitian Tipple (2005) menegaskan bahwa pemilihan bahan bangunan bukan sekadar pilihan teknis, tetapi juga terkait dengan aksesibilitas material, pola mata pencaharian, dan adaptasi terhadap kondisi lingkungan. Dengan demikian, distribusi material bangunan di Indonesia tidak hanya menggambarkan tingkat ekonomi, tetapi juga merupakan cerminan adaptasi lokal terhadap sumber daya dan budaya konstruksi setempat.

Dari sudut pandang kebijakan, variasi ini penting dicermati karena bahan bangunan berimplikasi langsung pada ketahanan rumah terhadap bencana alam, seperti gempa dan angin kencang, yang sering melanda wilayah Indonesia. Dengan memperhatikan distribusi material bangunan, pemerintah dapat mengidentifikasi provinsi yang lebih rentan dari sisi kualitas perumahan, sekaligus merancang intervensi peningkatan mutu material yang tetap selaras dengan praktik lokal.



Gambar 4.17
Persentase Rumah Tangga Menurut Status Migrasi Risen dan Kualitas Bahan Bangunan Tempat Tinggal Yang Digunakan, 2024

Apabila dinding mencerminkan ketahanan struktur, maka lantai rumah menjadi indikator penting kenyamanan dan higienitas. Material lantai dapat menunjukkan perbedaan yang lebih tajam dalam kualitas hunian karena langsung berhubungan dengan kesehatan rumah tangga, terutama dalam mencegah kelembapan, debu, maupun penyakit berbasis lingkungan.

Data Susenas Tahun 2024 menunjukkan bahwa keramik telah menjadi bahan lantai utama rumah tangga di Indonesia, digunakan oleh 65,3 persen migran dan 59,8 persen nonmigran. Penggunaan keramik paling menonjol terdapat di wilayah perkotaan dengan akses tinggi terhadap pasar bahan bangunan, seperti DKI Jakarta (91,3 persen migran, 89,6 persen nonmigran), Jawa Barat (86,2 persen migran, 79,8 persen nonmigran), dan Banten (87,5 persen migran, 87,4 persen nonmigran). Sebaliknya, di kawasan timur Indonesia, khususnya Papua Pegunungan, proporsi rumah tangga dengan lantai tanah dan bambu masih mencapai lebih dari 50 persen, baik untuk migran maupun nonmigran. Data selengkapnya ditampilkan pada Lampiran 24.

Meskipun secara nasional hanya 2,2 persen nonmigran dan 0,3 persen migran yang masih menempati rumah dengan lantai tanah, angka ini tetap signifikan dari perspektif kesehatan masyarakat. WHO (2018) menegaskan bahwa lantai tanah berkorelasi dengan peningkatan risiko penyakit menular, termasuk diare dan infeksi parasit usus pada anak-anak. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian Spears (2013) yang menunjukkan bahwa kondisi sanitasi dan lingkungan rumah tangga, termasuk jenis lantai, berhubungan erat dengan *stunting* dan perkembangan anak di negara berkembang.

Bagi pengambil kebijakan, data ini menggarisbawahi pentingnya program intervensi perumahan yang tidak hanya fokus pada kepemilikan rumah, tetapi juga pada peningkatan kualitas material dasar rumah tangga. Program subsidi atau bantuan renovasi lantai untuk rumah tangga berpenghasilan rendah di daerah dengan prevalensi lantai tanah yang tinggi dapat menjadi strategi efektif dalam menurunkan risiko kesehatan masyarakat. Sementara itu, bagi akademisi, data ini membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut mengenai hubungan antara material lantai, kondisi sanitasi rumah tangga, dan *outcome* kesehatan jangka panjang, terutama di wilayah dengan ketimpangan infrastruktur yang besar.

Setelah membahas lantai, komponen terakhir yang tak kalah penting adalah atap rumah. Atap merupakan pelindung utama dari iklim tropis Indonesia yang bercirikan curah hujan tinggi, panas, dan lembap. Variasi material atap dapat mencerminkan kemampuan rumah tangga dalam menghadapi tantangan iklim sekaligus menjadi indikator ketahanan rumah terhadap bencana alam.

Pada tingkat nasional, genteng masih menjadi material atap paling umum, digunakan oleh 54,7 persen migran dan 54,9 persen nonmigran (Lampiran 25). Selain itu, seng juga menempati porsi besar (32,7 persen migran; 32,4 persen nonmigran), menunjukkan bahwa kedua material ini mendominasi atap rumah tangga di Indonesia. Di wilayah perkotaan besar dengan infrastruktur lebih maju seperti DKI Jakarta,

terjadi diversifikasi penggunaan material: proporsi rumah tangga yang menggunakan genteng relatif lebih rendah (50,4 persen pada migran, 37,3 persen pada nonmigran), sementara penggunaan beton dan asbes cukup signifikan. Variasi ini mencerminkan transisi menuju material modern yang lebih tahan lama, seiring dengan ketersediaan pasar bahan bangunan dan tingkat daya beli masyarakat.

Namun, kesenjangan antarwilayah sangat terlihat. Di Papua Pegunungan, 54,1 persen migran dan 42,0 persen nonmigran masih menggunakan jerami, ijuk, daun-daunan, atau rumbia sebagai atap. Fenomena ini mencerminkan dua hal sekaligus. Pertama, keberlanjutan tradisi lokal dalam memanfaatkan material alami, yang sesuai dengan kondisi ekologis setempat dan relatif mudah diakses. Kedua, adanya keterbatasan dalam akses terhadap material modern akibat faktor geografis, infrastruktur transportasi, maupun daya beli masyarakat.

Dari perspektif akademis, temuan ini mendukung teori Turner (1976) yang menekankan bahwa pemilihan material bangunan tidak hanya ditentukan oleh aspek ekonomi, tetapi juga terkait dengan identitas budaya dan adaptasi ekologis. Bagi pengambil kebijakan, data ini menegaskan pentingnya strategi pembangunan perumahan yang tidak seragam (*one-size-fits-all*), melainkan sensitif terhadap konteks lokal. Di satu sisi, perlu dorongan peningkatan kualitas material agar rumah lebih tahan terhadap bencana iklim tropis seperti hujan deras dan angin kencang. Di sisi lain, kebijakan tersebut harus memperhatikan nilai budaya dan kearifan lokal dalam penggunaan material alami, yang masih menjadi bagian integral dari praktik konstruksi di beberapa daerah.

4.8.4 SANITASI

Selain pemenuhan kebutuhan air bersih, salah satu aspek penting dari lingkungan tempat tinggal yang sehat adalah tersedianya fasilitas sanitasi, khususnya fasilitas buang air besar. Fasilitas ini berperan besar dalam mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan seperti diare, kolera, dan infeksi cacing. Oleh karena itu, rumah tangga perlu memiliki akses terhadap fasilitas buang air besar yang layak, idealnya dimiliki sendiri, tertutup, menggunakan kloset leher angsa dan sistem pembuangannya diolah melalui tangki septik atau instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

Berdasarkan hasil Susenas 2024, secara nasional 89,3 persen rumah tangga migran telah memiliki fasilitas buang air besar sendiri, meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya (87,8 persen). Penggunaan fasilitas bersama juga menurun dari 9,1 persen menjadi 7,9 persen, sementara proporsi rumah tangga migran yang tidak memiliki fasilitas buang air besar juga mengalami penurunan dari 2,3 persen menjadi 2,0 persen. Di sisi lain, rumah tangga nonmigran mencatatkan angka kepemilikan fasilitas sendiri sebesar 89,4 persen, dengan 3,1 persen di antaranya belum memiliki fasilitas.

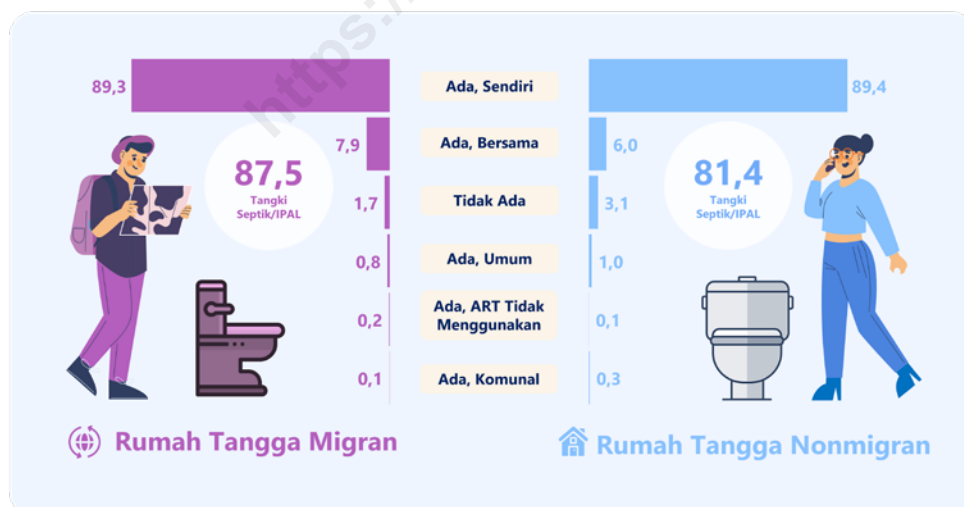
Secara regional, Provinsi Papua Pegunungan mencatat capaian sempurna dalam kepemilikan fasilitas sendiri pada rumah tangga migran (100 persen), berbeda dengan

tahun sebelumnya yang menunjukkan cakupan rendah. Sementara itu, DI Yogyakarta masih menjadi provinsi dengan capaian terendah, yakni hanya 63,9 persen rumah tangga migran memiliki fasilitas sendiri.

Dari sisi jenis kloset yang digunakan, 97,9 persen rumah tangga migran telah menggunakan kloset leher angsa, meningkat dari 96,9 persen pada tahun sebelumnya. Sementara itu, penggunaan kloset plengsengan/cemplung/cubluk turun menjadi 2,1 persen. Jika dibandingkan, rumah tangga nonmigran mencatatkan penggunaan kloset leher angsa sebesar 96,6 persen, menunjukkan bahwa rumah tangga migran memiliki akses sedikit lebih baik terhadap sanitasi yang lebih higienis.

Beberapa provinsi bahkan mencapai 100 persen rumah tangga migran menggunakan kloset leher angsa, seperti Aceh, DKI Jakarta, Banten, Bali, NTB, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Papua Barat Daya. Namun demikian, tantangan signifikan masih terdapat di Papua Pegunungan, di mana hanya 29,1 persen rumah tangga migran menggunakan kloset leher angsa dan 70,9 persen masih menggunakan sistem tradisional.

Dari segi tempat pembuangan akhir tinja, data menunjukkan bahwa 87,5 persen rumah tangga migran secara nasional menggunakan tangki septik atau IPAL, menurun dibandingkan tahun 2023 yang mencatat angka 86,6 persen. Sebaliknya, rumah tangga nonmigran mencatatkan capaian 81,4 persen, menunjukkan bahwa migran memiliki akses yang relatif lebih baik terhadap sistem pembuangan yang lebih aman. Penggunaan selain tangki septik atau IPAL, seperti pembuangan langsung ke kolam, sawah, sungai, atau kebun, masih dilakukan oleh 12,5 persen rumah tangga migran, dan bahkan lebih tinggi pada rumah tangga nonmigran (18,6 persen).



Gambar 4.18
Persentase Rumah Tangga Menurut Status Migrasi Risen dan Fasilitas Pengelolaan Limbah yang Digunakan, 2024

Secara regional, provinsi dengan cakupan penggunaan tangki septik tertinggi oleh rumah tangga migran adalah Bali (100 persen), Kep. Riau (99,5 persen), dan Papua Barat Daya (99,2 persen). Sebaliknya, Papua Pegunungan kembali menjadi sorotan, dengan hanya 29,1 persen rumah tangga migran yang menggunakan IPAL/tangki septik, dan 70,9 persen lainnya masih membuang tinja ke lokasi terbuka atau tanpa pengolahan, menjadikannya provinsi dengan sanitasi terburuk di Indonesia. Hal ini konsisten dengan rendahnya kualitas jenis kloset di provinsi ini, dan menunjukkan bahwa sanitasi layak belum dapat dijangkau oleh mayoritas rumah tangga migran di wilayah tersebut.

Provinsi-provinsi lain dengan tingkat rendah penggunaan IPAL pada rumah tangga migran mencakup Bengkulu (53,6 persen), Papua Selatan (66,4 persen), dan Papua Tengah (83,2 persen). Sementara itu, sejumlah provinsi seperti Jawa Tengah, Sumatera Barat, dan Kalimantan Barat mencatat proporsi 70–80 persen, artinya masih cukup banyak rumah tangga migran di wilayah tersebut yang membuang tinja ke lingkungan tanpa pengolahan.

Secara keseluruhan, data Susenas 2024 menunjukkan bahwa akses fasilitas sanitasi rumah tangga migran mengalami peningkatan di hampir semua dimensi: mulai dari kepemilikan fasilitas sendiri, jenis kloset yang digunakan, hingga sistem pengolahan limbahnya. Meski demikian, tantangan besar masih tersisa, terutama di wilayah timur Indonesia seperti Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan, yang masih menghadapi hambatan geografis dan infrastruktur dasar. Intervensi kebijakan yang terfokus, pembangunan infrastruktur sanitasi, dan edukasi masyarakat mutlak diperlukan untuk menjamin bahwa tidak ada rumah tangga di Indonesia yang tertinggal dalam akses terhadap sanitasi yang layak dan aman.

4.8.5 SUMBER AIR MINUM

Setelah mengetahui kondisi fisik bangunan dan fasilitas sanitasi tempat tinggal rumah tangga migran, aspek penting lainnya yang mendukung kualitas hidup di tempat tinggal adalah akses terhadap air minum yang bersih dan layak. Air merupakan kebutuhan pokok manusia yang sangat vital, khususnya untuk konsumsi sehari-hari. Berdasarkan standar kebutuhan fisiologis, manusia dewasa memerlukan asupan air sebanyak 2,0 hingga 2,5 liter atau setara 8 gelas per hari (Armstrong dan Johnson, 2018). Kekurangan konsumsi air bersih tidak hanya berdampak pada kenyamanan hidup, tetapi juga berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan jangka panjang apabila air yang dikonsumsi tidak memenuhi standar higienis.

Dalam analisis ini, kualitas akses terhadap air minum rumah tangga dibedakan menjadi dua indikator utama, yaitu sumber air minum bersih dan akses air minum layak. Sumber air minum bersih mencakup air kemasan, air isi ulang, air ledeng, serta air dari sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung yang letaknya minimal sepuluh meter dari tempat penampungan limbah atau kotoran. Sementara

itu, akses air minum layak mencakup seluruh sumber air yang dapat dikonsumsi langsung dengan atau tanpa pengolahan tambahan, serta didukung oleh sumber air penggunaan rumah tangga lainnya yang juga memenuhi kriteria sanitasi.

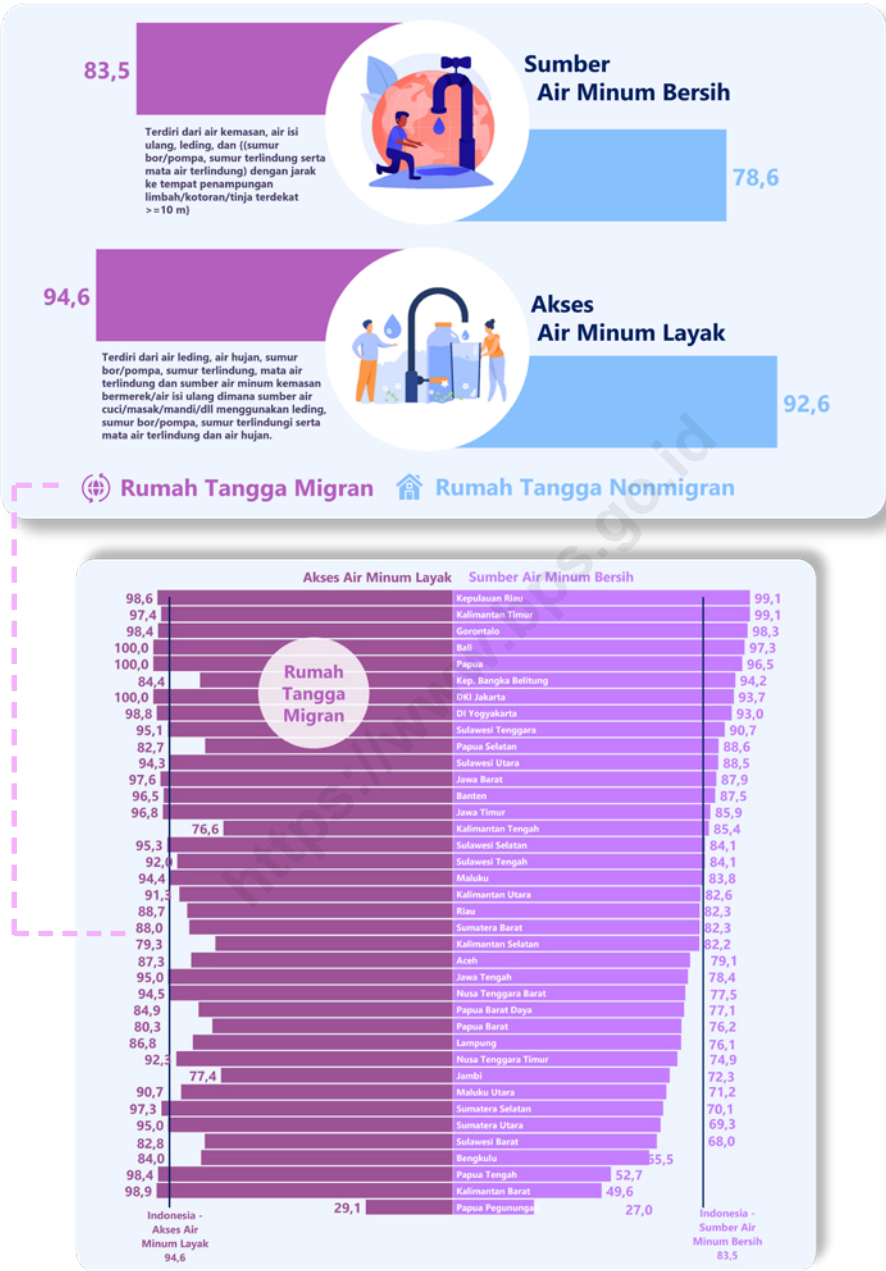
Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024, secara nasional tercatat bahwa 83,5 persen rumah tangga migran menggunakan sumber air minum bersih. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 2,5 persen poin dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang sebesar 81,0 persen. Sementara itu, akses rumah tangga migran terhadap air minum layak mencapai 94,6 persen pada tahun 2024, meningkat dari 93,7 persen pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan bahwa secara umum, baik dari sisi kualitas maupun kelayakan, kondisi akses air minum bagi rumah tangga migran mengalami perbaikan dalam satu tahun terakhir.

Jika dibandingkan dengan rumah tangga nonmigran, penggunaan sumber air minum bersih tercatat sebesar 78,6 persen, dan akses air minum layak mencapai 92,6 persen. Dengan demikian, rumah tangga migran memiliki keunggulan sekitar lima persen poin dalam hal akses terhadap sumber air minum bersih, serta keunggulan dua persen poin dalam akses air minum layak. Selisih ini relatif stabil dibandingkan dengan pola tahun-tahun sebelumnya dan mengindikasikan bahwa rumah tangga migran cenderung memiliki akses air minum yang lebih baik dibandingkan nonmigran, baik karena mobilitas ke wilayah yang lebih maju, maupun akibat dari peningkatan kondisi sosial ekonomi setelah bermigrasi.

Secara regional, penggunaan sumber air minum bersih tertinggi oleh rumah tangga migran tercatat di Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Timur, masing-masing sebesar 99,1 persen. Provinsi Gorontalo menyusul di angka 98,3 persen, sementara DKI Jakarta berada di posisi keempat dengan capaian 93,7 persen. Di sisi lain, akses air minum layak tertinggi pada rumah tangga migran tercatat di tiga provinsi dengan capaian 100 persen, yaitu DKI Jakarta, Bali, dan Papua. Provinsi lain yang juga mencatatkan angka tinggi dalam hal akses air layak adalah DI Yogyakarta sebesar 98,8 persen dan Kepulauan Riau sebesar 98,6 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa wilayah-wilayah perkotaan dan provinsi-provinsi dengan infrastruktur dasar yang lebih maju cenderung memberikan akses yang sangat baik terhadap air minum bagi rumah tangga migran.

Sementara itu, sejumlah wilayah di Indonesia bagian timur masih menunjukkan capaian rendah. Provinsi Papua Pegunungan merupakan wilayah dengan tingkat penggunaan sumber air minum bersih terendah pada rumah tangga migran, yaitu hanya sebesar 27,0 persen. Provinsi Papua Tengah juga mencatat angka yang rendah, yakni 52,7 persen, diikuti oleh Kalimantan Barat sebesar 49,6 persen. Dalam hal akses air minum layak, Papua Pegunungan kembali mencatatkan capaian terendah secara nasional, yakni hanya 29,1 persen, diikuti oleh Papua Selatan sebesar 82,7 persen, serta Kalimantan Tengah sebesar 76,6 persen. Temuan ini menunjukkan bahwa kesenjangan antarwilayah masih signifikan, khususnya antara kawasan barat dan timur Indonesia. Di sisi lain, pada rumah tangga nonmigran, pola serupa juga ditemukan. DKI Jakarta mencatat 100 persen akses air minum layak, sedangkan Papua Pegunungan hanya mencapai 30,7 persen.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara nasional telah terjadi perbaikan akses terhadap air minum bersih dan layak, baik pada rumah tangga migran maupun nonmigran.



Gambar 4.19
Persentase Rumah Tangga Menurut Status Migrasi Risen yang Menggunakan Sumber Air Minum Utama Menurut Provinsi, 2024

Namun demikian, disparitas wilayah masih menjadi tantangan besar. Provinsi-provinsi di kawasan timur, terutama Papua dan beberapa wilayah Kalimantan, masih tertinggal cukup jauh dibandingkan wilayah barat Indonesia. Oleh karena itu, perlu ada intervensi kebijakan yang lebih terarah, terutama dalam bentuk pembangunan infrastruktur air bersih dan program penyediaan air layak minum berbasis masyarakat, guna menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar yang adil dan merata bagi seluruh lapisan rumah tangga di Indonesia, tanpa terkecuali.

4.8.6 BAHAN BAKAR UTAMA MEMASAK

Setiap rumah tangga memerlukan energi untuk menunjang aktivitas kehidupan, salah satunya adalah untuk keperluan memasak. Pemilihan bahan bakar utama yang digunakan untuk memasak sangat berpengaruh terhadap kualitas lingkungan tempat tinggal dan kesehatan penghuni rumah tangga. Dalam konteks ini, bahan bakar gas seperti elpiji, gas kota, dan biogas merupakan bahan bakar yang dinilai lebih ramah lingkungan karena menghasilkan emisi yang lebih rendah dan tidak menyebabkan kerusakan hutan. Selain itu, bahan bakar gas juga cenderung lebih mudah dijangkau karena tersedia luas di pasar dan memiliki sistem distribusi yang relatif stabil dibandingkan bahan bakar padat seperti arang, briket, dan kayu bakar.

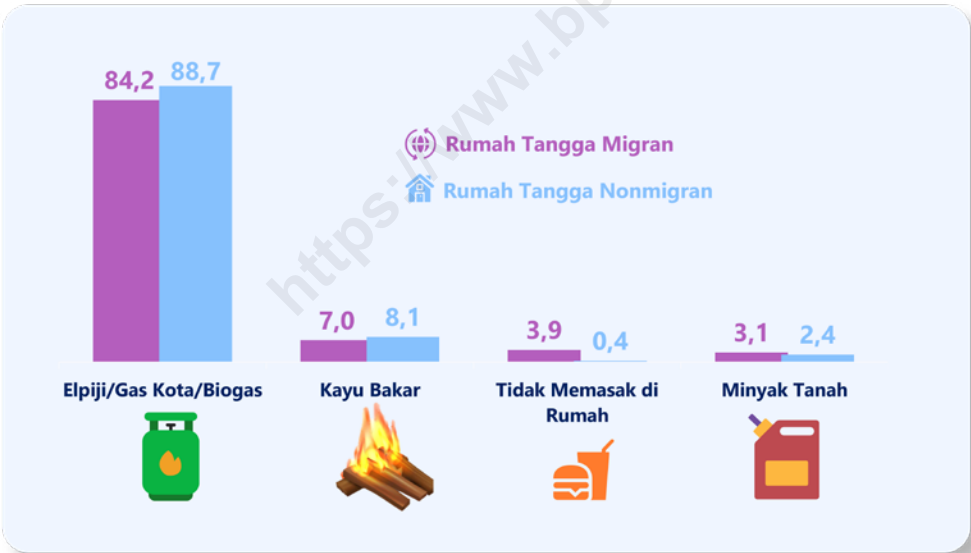
Berdasarkan hasil Susenas 2024, secara nasional 84,2 persen rumah tangga migran telah menggunakan elpiji, gas kota, atau biogas sebagai bahan bakar utama untuk memasak. Meskipun angka ini mengalami penurunan sebesar 1,9 persen poin dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang mencapai 86,1 persen, kelompok migran tetap menunjukkan dominasi penggunaan bahan bakar gas untuk keperluan memasak. Sementara itu, bahan bakar padat seperti kayu bakar masih digunakan oleh 7,0 persen rumah tangga migran, diikuti oleh minyak tanah sebesar 3,1 persen, dan listrik sebesar 1,8 persen. Sebanyak 3,9 persen rumah tangga migran tercatat tidak memasak di rumah, meningkat signifikan dibandingkan tahun 2023 yang hanya sebesar 1,7 persen. Hal ini mengindikasikan kemungkinan meningkatnya akses terhadap makanan siap saji atau konsumsi di luar rumah pada kelompok migran.

Dibandingkan dengan rumah tangga nonmigran, proporsi penggunaan bahan bakar gas sedikit lebih tinggi, yakni sebesar 86,7 persen, atau berselisih 2,5 persen poin di atas kelompok migran. Namun demikian, kelompok nonmigran menunjukkan proporsi penggunaan kayu bakar yang lebih besar, yaitu sebesar 8,1 persen, atau selisih 1,1 persen poin lebih tinggi dibanding rumah tangga migran. Penggunaan minyak tanah pada nonmigran tercatat sebesar 2,4 persen, lebih rendah dari migran. Selain itu, rumah tangga nonmigran yang tidak memasak di rumah jauh lebih sedikit, yaitu hanya 0,4 persen, menunjukkan bahwa rumah tangga nonmigran cenderung lebih stabil dalam kegiatan memasak mandiri di rumah dibandingkan kelompok migran. Perbedaan ini dapat mencerminkan karakteristik gaya hidup atau keterjangkauan sumber pangan siap saji di lokasi tempat tinggal masing-masing kelompok rumah tangga.

Jika dilihat secara provinsi, penggunaan elpiji/gas/biogas tertinggi pada rumah tangga migran tercatat di Kalimantan Timur dan Kepulauan Riau, masing-masing sebesar 97,7 persen, disusul oleh Gorontalo (97,0 persen) dan Banten (93,1 persen).

Di sisi lain, provinsi dengan tingkat penggunaan bahan bakar gas terendah pada rumah tangga migran masih didominasi oleh wilayah timur Indonesia, terutama Papua Pegunungan (2,0 persen), Papua Tengah (2,8 persen), dan Papua Selatan (4,1 persen). Di wilayah-wilayah ini, bahan bakar yang dominan digunakan untuk memasak adalah kayu bakar dan minyak tanah. Sebagai contoh, Papua Pegunungan mencatatkan penggunaan kayu bakar sebesar 63,3 persen dan minyak tanah sebesar 34,5 persen, sedangkan Papua Tengah mencatat penggunaan kayu bakar sebesar 70,7 persen dan minyak tanah sebesar 24,5 persen. Papua Selatan dan Maluku Utara juga menunjukkan pola serupa, dengan penggunaan bahan bakar padat yang jauh lebih tinggi dibanding gas.

Sementara itu, untuk rumah tangga nonmigran, pola penggunaan bahan bakar memasak juga memperlihatkan ketimpangan regional yang signifikan. Di provinsi seperti Papua, Papua Barat, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan, proporsi penggunaan kayu bakar dan minyak tanah masih sangat dominan. Misalnya, di Papua Pegunungan, 80,6 persen rumah tangga nonmigran menggunakan kayu bakar, sedangkan penggunaan gas hanya sebesar 0,5 persen. Di Papua, meskipun penggunaan gas telah mencapai 49,5 persen, penggunaan kayu bakar masih tinggi yaitu sebesar 33,9 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap bahan bakar padat masih tinggi di Kawasan Timur Indonesia, baik pada rumah tangga migran maupun nonmigran.



Gambar 4.20
Persentase Rumah Tangga Menurut Status Migrasi Risen dan Empat Terbesar Bahan Bakar Utama untuk Memasak, 2024

Secara umum, data tahun 2024 menunjukkan bahwa penggunaan bahan bakar gas masih menjadi pilihan utama rumah tangga di Indonesia, terutama pada kelompok rumah tangga nonmigran. Namun demikian, ketimpangan antarwilayah masih mencolok, terutama di wilayah Indonesia bagian timur yang masih sangat bergantung

pada bahan bakar tradisional seperti minyak tanah dan kayu bakar. Ketergantungan ini tidak hanya berdampak pada kualitas udara dalam rumah tangga dan risiko kesehatan pernapasan, tetapi juga berpotensi menambah tekanan terhadap lingkungan sekitar akibat deforestasi. Oleh karena itu, perlu upaya lebih lanjut dalam distribusi energi bersih dan terjangkau, seperti program subsidi elpiji yang lebih merata, pembangunan infrastruktur distribusi energi di wilayah terpencil, serta penyuluhan tentang bahaya penggunaan beberapa jenis bahan bakar terhadap kesehatan dan lingkungan.

4.8.7 SUMBER PENERANGAN

Hal esensial lain yang wajib ada dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sehari-hari adalah fasilitas penerangan yang mengacu pada keberadaan aliran listrik yang menjangkau tempat tinggal rumah tangga. Dengan adanya fasilitas penerangan, rumah tangga tetap dapat melakukan aktivitasnya meskipun di malam hari. Bagi beberapa rumah tangga, listrik juga menjadi sumber energi untuk mendapatkan sumber air minum dan memasak. Selain itu, anak-anak di rumah tangga tersebut masih dapat belajar di malam hari dan berdampak pada kualitas pendidikan mereka. Sebagian besar penyediaan energi listrik di Indonesia berasal dari Perusahaan Listrik Negara (PLN). Walaupun tempat tinggal rumah tangga perlu memasang meteran untuk berlangganan listrik PLN, masih ada banyak rumah tangga yang mengakses listrik PLN tanpa meteran, mengusahakan listrik sendiri, atau bahkan tidak menggunakan listrik sebagai sumber penerangan. Oleh karena itu, keberadaan sumber penerangan, terutama dari PLN, bisa menjadi indikator kesejahteraan rumah tangga.

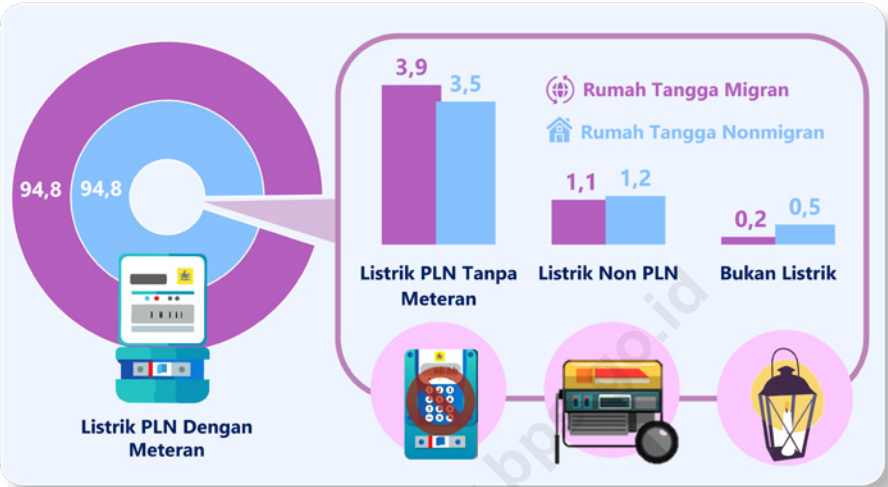
Hasil Susenas 2024 menunjukkan bahwa akses rumah tangga migran terhadap listrik dari PLN secara nasional telah mencapai 98,7 persen. Dari jumlah tersebut, 94,8 persen rumah tangga migran menempati rumah yang terpasang listrik PLN dengan meteran, sementara 3,9 persen lainnya mengakses listrik PLN tanpa meteran (Lampiran 31). Hanya 1,1 persen rumah tangga migran yang menggunakan listrik selain dari PLN, dan 0,2 persen masih bergantung pada penerangan bukan listrik.

Pada rumah tangga nonmigran, persentase yang terpasang listrik PLN dengan meteran juga mencapai 94,8 persen, sama dengan rumah tangga migran. Namun, proporsi yang mengakses listrik PLN tanpa meteran sedikit lebih rendah, yakni 3,5 persen. Sementara itu, rumah tangga nonmigran yang menggunakan listrik nonPLN dan penerangan bukan listrik masing-masing sebesar 1,2 persen dan 0,5 persen, lebih tinggi dibandingkan rumah tangga migran.

Bila dilihat secara regional, proporsi penggunaan listrik PLN dengan meteran yang tinggi oleh rumah tangga migran dapat ditemukan di Provinsi Maluku (98,1 persen), Provinsi Aceh (97,8 persen), dan Provinsi Jawa Tengah (97,7 persen). Sementara itu, proporsi penggunaan listrik PLN dengan meteran terendah tercatat di Provinsi Papua Pegunungan (27,0 persen), diikuti oleh Provinsi Papua Tengah (57,6 persen) dan Provinsi Kalimantan Tengah (74,5 persen).

Di Papua Pegunungan, rendahnya akses listrik PLN dengan meteran diimbangi oleh tingginya penggunaan listrik nonPLN (54,1 persen) serta penerangan bukan listrik

(18,9 persen). Sementara itu, di Papua Tengah, masih terdapat proporsi cukup besar yang mengandalkan penerangan bukan listrik (26,9 persen) dan listrik non-PLN (15,5 persen). Adapun di Kalimantan Tengah, keterbatasan listrik PLN dengan meteran sebagian ditutupi oleh penggunaan listrik PLN tanpa meteran (22,5 persen) serta listrik non-PLN (3,0 persen). Di sisi lain, akses penerangan bukan listrik tertinggi di Indonesia tercatat di Provinsi Papua Tengah (26,9 persen), diikuti oleh Provinsi Papua Pegunungan (18,9 persen) dan Provinsi Papua Barat (2,9 persen).



Gambar 4.21
Persentase Rumah Tangga Menurut Status Migrasi Risen dan Sumber Penerangan yang Digunakan, 2024

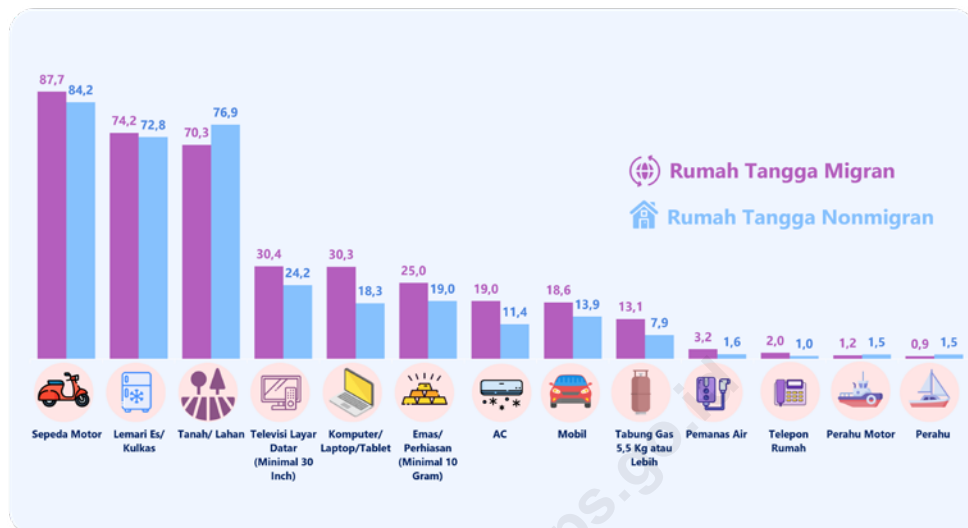
Jika ditinjau menurut provinsi, terlihat adanya variasi yang cukup tajam antara rumah tangga migran dan nonmigran dalam akses listrik PLN dengan meteran. Di wilayah timur Indonesia, rumah tangga non-migran masih banyak yang belum terakses listrik PLN dengan meteran, seperti di Papua Pegunungan (hanya 12,8 persen), Papua Tengah (32,0 persen), dan Papua Selatan (62,7 persen), sehingga sebagian besar masih mengandalkan listrik non-PLN maupun penerangan bukan listrik. Sebaliknya, di sejumlah provinsi lain, capaian rumah tangga non-migran lebih tinggi daripada migran, misalnya di DI Yogyakarta (95,6 persen non-migran vs 88,0 persen migran) dan Bali (96,6 persen vs 83,1 persen). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun rata-rata nasional seimbang, kerentanan akses justru lebih banyak dialami rumah tangga non-migran di beberapa wilayah timur Indonesia.

4.9 KEADAAN SOSIAL EKONOMI LAINNYA

4.9.1 KEPEMILIKAN ASET

Jumlah dan nilai aset yang dimiliki merupakan salah satu indikator dari tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga. Semakin banyak aset yang dimiliki dan semakin

besar nilainya, dapat menunjukkan semakin sejahtera suatu rumah tangga. Pada bagian ini akan dibahas karakteristik rumah tangga migran berdasarkan kepemilikan aset. Aset yang termasuk antara lain tabung gas, kulkas, AC, pemanas air, telepon rumah, komputer/laptop, sepeda motor, perahu, perahu motor, mobil, dan televisi layar datar, emas/perhiasan dan tanah/lahan.



Gambar 4.22
Persentase Rumah Tangga Menurut Status Migrasi Risen dan
Kepemilikan Aset Rumah Tangga, 2024

Berdasarkan hasil Susenas Maret 2024, ada sebanyak 2,0 persen rumah tangga migran yang tidak memiliki semua aset yang telah disebutkan di atas, sedikit lebih rendah dari rumah tangga nonmigran yang sebesar 2,3 persen. Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya menjadi provinsi dengan persentase tertinggi rumah tangga migran yang tidak memiliki aset. Untuk rumah tangga nonmigran, Papua Pegunungan dan Papua Tengah menjadi provinsi dengan persentase tertinggi rumah tangga nonmigran yang tidak memiliki aset.

Apabila dirinci menurut jenis aset, sepeda motor, lemari es/kulkas, dan tanah/ lahan merupakan aset yang dominan dimiliki baik oleh rumah tangga migran maupun nonmigran. Persentase rumah tangga migran yang memiliki sepeda motor sebesar 87,7 persen, sedangkan nonmigran sebesar 84,2 persen. Sedangkan rumah tangga migran yang memiliki lemari es/kulkas sebesar 74,2 persen dan rumah tangga non migran sebesar 72,8 persen. Adapun terkait kepemilikan tanah/lahan, rumah tangga migran yang memiliki tanah/lahan sebesar 70,3 persen dan rumah tangga non migran sebesar 76,9 persen.

Kepemilikan barang konsumtif rumah tangga yang sifatnya mewah seperti AC, pemanas air, dan mobil di rumah tangga migran sebagian besar terdapat di Banten, DKI Jakarta, dan Kepulauan Bangka Belitung. Sedangkan pada rumah tangga non migran terdapat di Provinsi Kepulauan Riau, DKI Jakarta, dan Bali. Persentase kepemilikan

barang-barang tersebut terdapat di provinsi yang berada pada kuartil atas sehingga memberikan kesimpulan bahwa secara umum merupakan rumah tangga yang berada pada tingkat kesejahteraan yang sangat baik. Persentase rumah tangga migran dan nonmigran menurut provinsi dan kepemilikan aset ditampilkan pada Lampiran 32.

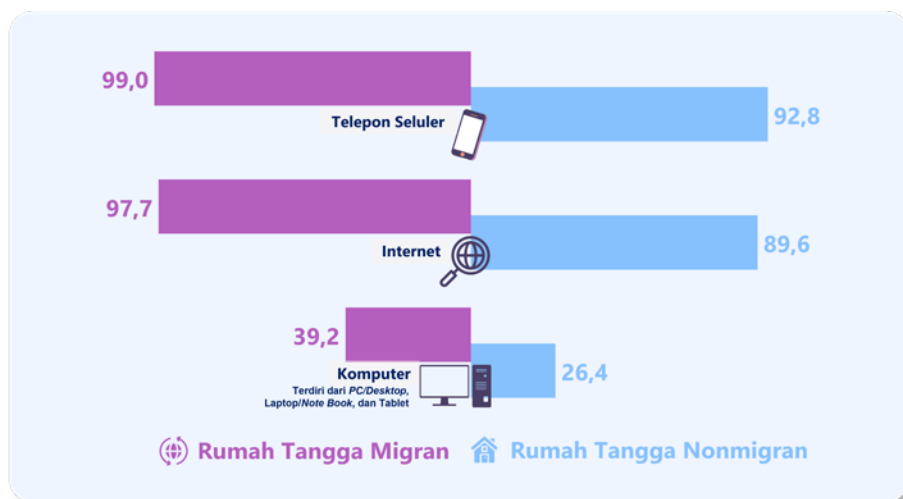
4.9.2 JENIS ALAT KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai informasi yang lebih umum yaitu jenis alat komunikasi dan informasi yang digunakan oleh rumah tangga migran dan nonmigran dalam tiga bulan terakhir sebelum periode survei. Alat komunikasi yang dicakup antara lain telepon seluler (HP)/telepon tetap nirkabel atau *Fixed Wireless Access* (FWA), komputer, dan internet. Penggunaan komputer meliputi PC (*personal computer*)/*desktop*, laptop/*notebook*, dan tablet (atau sejenis komputer genggam). Pertanyaan ini ditanyakan untuk semua anggota rumah tangga (ART). Secara umum, penggunaan ketiga alat komunikasi dan informasi tersebut di semua wilayah pada rumah tangga migran memiliki tingkat penetrasi yang lebih tinggi dibanding rumah tangga nonmigran (Gambar 4.23). Persentase rumah tangga migran dan nonmigran menurut jenis alat komunikasi dan informasi yang digunakan dalam tiga bulan terakhir secara rinci terdapat pada Lampiran 33.

Persentase penggunaan telepon seluler/nirkabel memiliki nilai yang cenderung sama di semua wilayah baik pada rumah tangga migran maupun nonmigran. Hal ini mengindikasikan bahwa layanan dan penggunaan telepon seluler sudah cukup meluas dan merata. Adapun tingkat penetrasi untuk rumah tangga migran sebesar 99,0 persen, lebih tinggi dari rumah tangga nonmigran sebesar 92,8 persen.

Sebagian besar provinsi memiliki penetrasi penggunaan telepon seluler/nirkabel di atas nilai 90 persen baik pada rumah tangga migran maupun nonmigran. Penetrasi penggunaan telepon seluler/nirkabel pada rumah tangga migran di 8 (delapan) provinsi bahkan mencapai 100 persen yaitu terdapat di provinsi Riau, Jambi, Bali, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Papua Selatan. Terdapat 2 (dua) provinsi dengan penetrasi penggunaan telepon seluler/nirkabel terendah baik pada rumah tangga migran maupun nonmigran secara berturut-turut yaitu Papua Tengah (73,5 persen dan 48,0 persen) dan Papua Pegunungan (47,7 persen dan 31,6 persen). Sementara itu, terdapat perbedaan penetrasi penggunaan telepon seluler/nirkabel yang cukup kontras di Provinsi Papua Selatan. Penetrasi pada rumah tangga migran di provinsi tersebut sebesar 100,0 persen, namun pada rumah tangga nonmigran sebesar 72,9 persen (terendah ketiga dari 38 provinsi). Adapun persentase tertinggi penggunaan telepon seluler/nirkabel pada rumah tangga nonmigran terdapat di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 99,1 persen.

Penggunaan telepon seluler/nirkabel sangat terkait dengan penggunaan internet. Pola yang terjadi pada penggunaan telepon seluler/nirkabel cenderung sama dengan pola penggunaan internet. Mayoritas provinsi memiliki angka penetrasi penggunaan internet pada rumah tangga migran dengan nilai di atas 90 persen, sedangkan pada rumah tangga nonmigran dengan nilai di atas 80 persen.



Gambar 4.23

Persentase Rumah Tangga Menurut Status Migrasi Risen dan Jenis Alat Komunikasi dan Informasi yang Digunakan dalam 3 Bulan Terakhir, 2024

Dua provinsi dengan angka penetrasi paling rendah baik pada rumah tangga migran maupun nonmigran adalah Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan yang notabene juga memiliki angka penetrasi penggunaan telepon seluler/nirkabel terendah. Adapun perbandingan penetrasi internet antara rumah tangga migran dan nonmigran di kedua provinsi tersebut juga memiliki perbedaan kontras. Rumah tangga migran di Papua Tengah dan Papua Pegunungan memiliki persentase penggunaan internet sekitar 2 (dua) dan 3,5 kali lebih banyak dibanding rumah tangga nonmigran di masing-masing provinsi tersebut.

Di Provinsi Papua Selatan juga terjadi pola yang sama dengan penetrasi penggunaan telepon seluler/nirkabel. Perbedaan penetrasi penggunaan internet yang cukup kontras di Provinsi Papua Selatan yaitu sebesar 91,6 persen pada rumah tangga migran dan sebesar 64,9 persen pada rumah tangga nonmigran (paling rendah ketiga dari 38 provinsi). Provinsi dengan penetrasi penggunaan internet tertinggi pada rumah tangga migran terdapat di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 100,0 persen dan pada rumah tangga nonmigran terdapat di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 97,4 persen.

Dalam hal penggunaan komputer, secara umum penetrasinya masih jauh lebih rendah dibanding penggunaan telepon seluler/nirkabel dan internet. Penetrasi penggunaan telepon seluler/nirkabel dan internet secara nasional pada rumah tangga migran masing-masing bernilai sekitar 2,5 kali lebih besar dibanding penggunaan komputer. Sementara itu, pada rumah tangga nonmigran, perbedaannya jauh lebih besar yaitu persentase penggunaan telepon seluler/nirkabel dan internet sekitar 3,5 dan 3,4 kali lebih banyak dibandingkan penetrasi penggunaan komputer. Di sisi lain, terdapat perbedaan penetrasi penggunaan komputer dimana persentase pada rumah tangga migran (39,2 persen) 1,5 kali lebih besar dibanding rumah tangga nonmigran (26,4 persen). Sebagian besar provinsi memiliki penetrasi penggunaan komputer lebih dari 20 persen baik pada rumah tangga migran maupun nonmigran.

Pada rumah tangga migran, hanya terdapat 1 (satu) provinsi yang berada di bawah nilai tersebut yaitu Papua Pegunungan sebesar 18,2 persen. Sedangkan pada rumah tangga nonmigran, terdapat 3 (tiga) provinsi dengan penetrasi penggunaan komputer kurang dari 20 persen, yaitu Lampung (19,1 persen), Papua Tengah (9,0 persen), dan Papua Pegunungan (2,9 persen). Provinsi DI Yogyakarta merupakan provinsi dengan persentase penggunaan komputer tertinggi pada rumah tangga migran sebesar 77,9 persen, sedangkan untuk rumah tangga nonmigran terjadi di DKI Jakarta sebesar 44,9 persen.

4.9.3 PENERIMAAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI/PROGRAM SEMBAKO

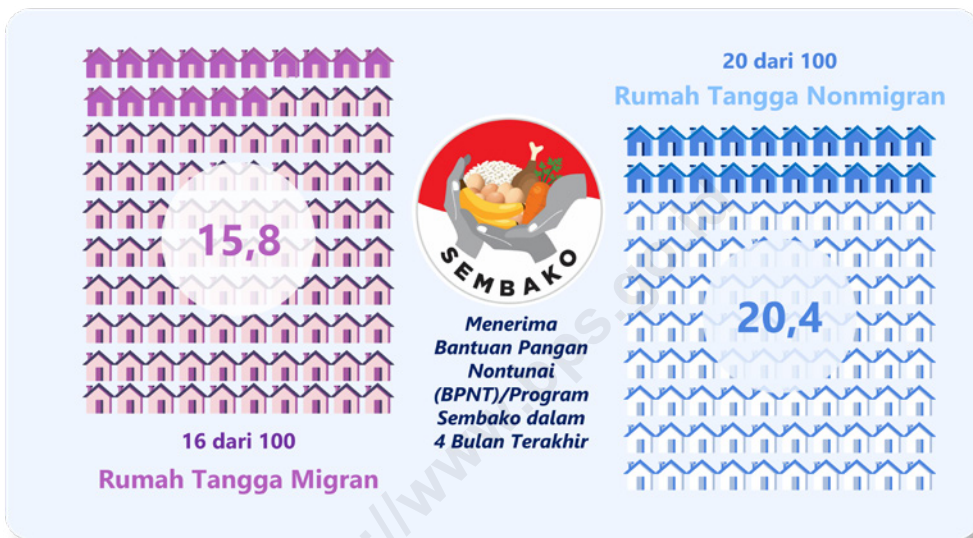
Dalam rangka program penanggulangan kemiskinan, pemerintah menyalurkan bantuan sosial secara non tunai kepada masyarakat. Program bantuan sosial dilaksanakan guna memenuhi kebutuhan dasar keluarga miskin dan rentan. Program bantuan sosial pangan sebelumnya merupakan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) yang mulai tahun 2017 ditransformasikan menjadi Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) yang kemudian pada tahun 2020 dikembangkan lagi menjadi Program Sembako. Pemberian bantuan dari pemerintah idealnya diterima keluarga penerima manfaat (KPM) setiap bulannya.

Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) adalah bantuan sosial yang disalurkan secara nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui uang elektronik yang selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e-Warong. Pada tahun 2020 program BPNT dikembangkan menjadi program Sembako. Dengan Program Sembako, indeks bantuan yang semula Rp.110.000/KPM/bulan naik menjadi Rp.150.000/KPM/bulan. Selain itu, program Sembako memperluas jenis komoditas yang dapat dibeli sehingga tidak hanya berupa beras dan telur seperti pada program BPNT. Sebagai Jaring Pengaman Sosial dalam rangka mengurangi dampak pandemi Covid-19, sejak bulan Maret 2020 Pemerintah menaikkan besaran manfaat program Sembako menjadi Rp200.000/KPM/ bulan. Jumlah penerima manfaat program Sembako pada tahun 2020 juga diperluas dari 15,6 juta KPM menjadi 18,8 juta KPM. Alat pembayaran elektronik untuk Program Sembako adalah dengan Kartu Keluarga Sejahtera.

Program Sembako adalah program Bantuan Sosial pangan yang diberikan dalam bentuk tunai atau nontunai kepada keluarga penerima manfaat yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial. (Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Program Sembako). Waktu penyaluran Program Sembako dilaksanakan setiap periode atau sesuai dengan kebijakan Pemerintah. Penyaluran Program Sembako dapat dilaksanakan bersamaan dengan penyaluran Bantuan Sosial lainnya di Kementerian Sosial.

Hasil Susenas Maret 2024 menunjukkan bahwa secara nasional, terdapat 15,8 persen rumah tangga migran yang menerima Bantuan Pangan Nontunai/Program Sembako minimal satu kali dalam 4 bulan sebelum survei (Gambar 4.24). Angka tersebut lebih kecil dibandingkan dengan persentase rumah tangga nonmigran yang

menerima bantuan yang sama selama 4 bulan terakhir, yaitu sebesar 20,4 persen. Provinsi DKI Jakarta menjadi provinsi dengan persentase terendah bagi rumah tangga migran yang menerima BPNT/Program Sembako dalam 4 bulan terakhir, yaitu sebesar 0,5 persen. Sebaliknya Papua Pegunungan menjadi provinsi dengan persentase tertinggi sebesar 58,1 persen dengan sekitar tiga dari lima rumah tangga migran di Papua Pegunungan menerima Bantuan Pangan Nontunai/Program Sembako minimal sekali dalam 4 bulan terakhir. Sementara itu, Gorontalo menjadi provinsi dengan persentase tertinggi (33,6 persen) dan Papua Tengah menjadi provinsi dengan persentase terendah (1,8 persen) untuk rumah tangga nonmigran penerima bantuan yang sama.



Gambar 4.24

Persentase Rumah Tangga yang Menerima Bantuan Pangan Nontunai/Program Sembako Selama 4 Bulan Terakhir Menurut Status Migrasi Risen, 2024

Sebagian besar rumah tangga penerima manfaat baik migran (30,8 persen) maupun nonmigran (39,8 persen) menerima BPNT/Program Sembako setiap bulannya dalam empat bulan sebelum survei. Hal tertentu terjadi di Provinsi Bali, yang mana 100,0 persen rumah tangga migran penerima manfaat menerima BPNT/Program Sembako setiap bulannya dalam 4 bulan terakhir sebelum survei. Di sisi lain, 100,0 persen rumah tangga migran penerima manfaat di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan menerima BPNT/Program Sembako selama 1 bulan dalam 4 bulan terakhir sebelum survei. Persentase rumah tangga migran dan nonmigran yang pernah menjadi penerima Bantuan Pangan Nontunai/Program Sembako menurut provinsi dan jumlah bulan penerimaan ditampilkan pada Lampiran 34.

4.9.4 MENERIMA PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP)

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik

dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai Pendidikan (Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2022). Pertanyaan terkait PIP di Susenas ditanyakan untuk anggota rumah tangga (ART) yang berumur 5 (lima) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun dengan periode penerimaan selama setahun terakhir (Agustus 2023–Februari 2024). PIP terbagi menjadi dua, yaitu PIP Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Dikdasmen) yang diperuntukkan bagi anak berusia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun dan PIP Pendidikan Tinggi yang diperuntukkan bagi Mahasiswa yang diterima di Perguruan Tinggi.



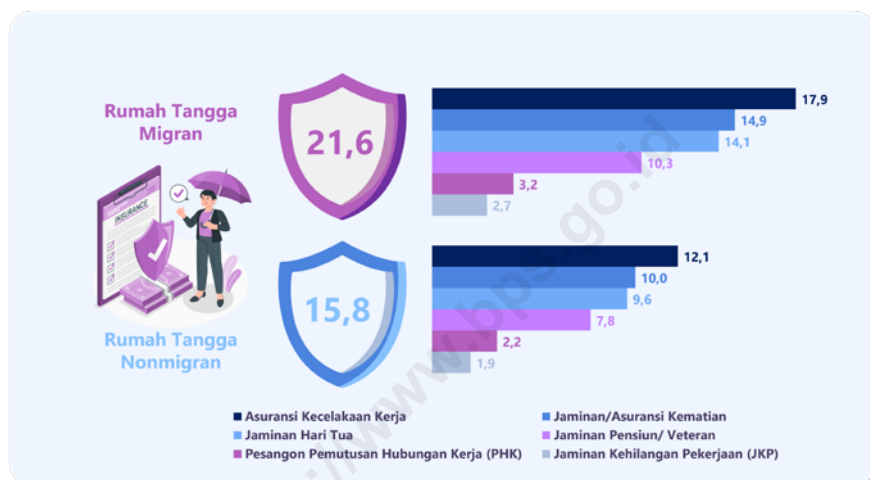
Gambar 4.25

Persentase Rumah Tangga yang Menerima Program Indonesia Pintar (PIP) dalam Setahun Terakhir Menurut Status Migrasi Risen, 2024

Berdasarkan hasil Susenas Maret 2024 (Gambar 4.25), secara umum, persentase rumah tangga migran dengan paling sedikit satu penerima PIP (10,7 persen) tercatat sedikit lebih kecil dibandingkan rumah tangga nonmigran (12,4 persen). Hal ini juga terjadi di sebagian besar provinsi (24 provinsi), kecuali di 14 (empat belas) provinsi yang mana persentase rumah tangga migrannya lebih besar dibanding nonmigran. Provinsi Papua Pegunungan menjadi provinsi dengan persentase tertinggi baik rumah tangga migran yang menerima PIP mencapai 46,2 persen maupun rumah tangga nonmigran yang menerima PIP sebesar 25,4 persen. Selain itu, Papua Pegunungan sekaligus memiliki perbandingan nilai persentase rumah tangga migran penerima PIP yang paling besar dibanding rumah tangga nonmigran yaitu sebanyak 1,8 kali. Sedangkan DKI Jakarta dan Papua menjadi provinsi dengan persentase rumah tangga migran penerima PIP paling sedikit. Persentase rumah tangga migran dan nonmigran yang menerima Program Indonesia Pintar (PIP) dalam setahun terakhir menurut provinsi ditampilkan pada Lampiran 35.

4.9.5 MEMILIKI/MENERIMA JAMINAN SOSIAL

Variabel ini merupakan salah satu dari indikator Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG's), tepatnya target 1.3 yaitu proporsi penduduk yang telah memiliki jaminan sosial. Jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar yang layak (UU Nomor 40 Tahun 2024). Kepemilikan jaminan sosial dapat menjadi indikator penting untuk mengukur sejauh mana negara berhasil memberikan perlindungan sosial kepada penduduknya, termasuk para migran. Jaminan sosial yang dicakup dalam bagian ini antara lain jaminan pensiun/veteran, jaminan hari tua, asuransi kecelakaan kerja, jaminan/asuransi kematian, jaminan kehilangan pekerjaan (JKP), dan pesangon pemutusan hubungan kerja/PHK.



Gambar 4.26

Persentase Rumah Tangga yang Memiliki atau Menerima Jaminan Sosial dalam Setahun Terakhir Menurut Status Migrasi Risen dan Jenisnya, 2024

Berdasarkan Susenas Maret 2024, secara nasional, kepemilikan jaminan sosial masih rendah, terlihat hanya 21,6 persen rumah tangga migran dan 15,8 persen rumah tangga nonmigran yang memiliki atau menerima setidaknya satu jenis jaminan sosial dalam setahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses terhadap perlindungan sosial masih terbatas bagi sebagian besar penduduk Indonesia, baik migran maupun non-migran (Gambar 4.26). Berdasarkan Gambar 4.26, Rumah tangga migran lebih mungkin memiliki/menerima jaminan sosial. Hal ini mungkin disebabkan oleh karakteristik migran yang cenderung lebih muda, berpendidikan lebih tinggi, dan bekerja di sektor formal sehingga lebih memungkinkan mempunyai akses terhadap jaminan sosial.

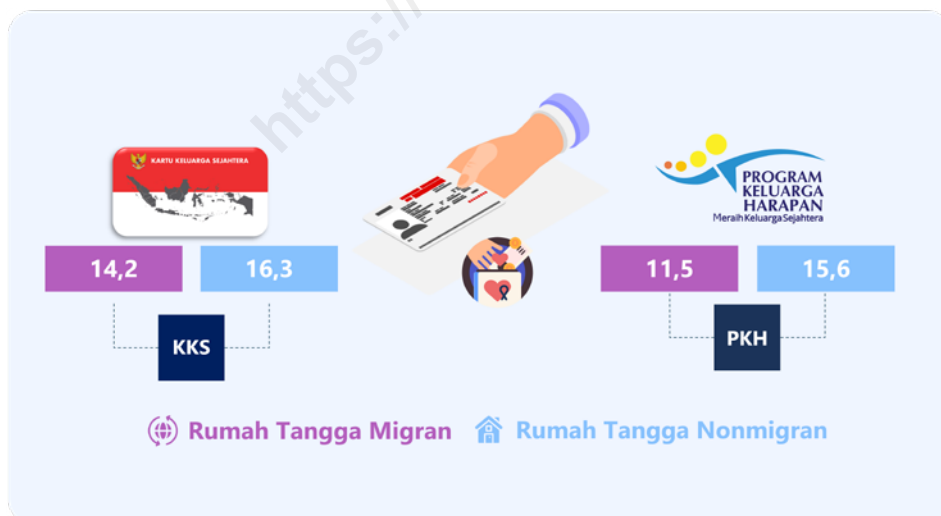
Kalimantan Tengah merupakan provinsi dengan persentase tertinggi rumah tangga migran yang memiliki atau menerima jaminan sosial. Sementara itu, untuk rumah tangga nonmigran, persentase tertinggi rumah tangga yang memiliki atau menerima jaminan sosial terdapat di Provinsi Kepulauan Riau.

Jenis jaminan sosial dengan persentase terbesar asuransi kecelakaan kerja untuk rumah tangga migran dan nonmigran pada level nasional, sebesar 17,9 persen dan 12,1 persen. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) merupakan jenis jaminan sosial dengan persentase terendah yang diterima baik oleh rumah tangga migran dan nonmigran, yaitu 2,7 persen dan 1,9 persen.

Persentase rumah tangga migran dan nonmigran yang memiliki atau menerima jaminan sosial dalam setahun terakhir menurut provinsi dan jenis jaminan sosial ditampilkan pada Lampiran 36.

4.9.6 MENERIMA KARTU KELUARGA SEJAHTERA (KKS) DAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)

Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia untuk membantu keluarga pra-sejahtera dan meningkatkan kualitas hidup mereka. KKS adalah kartu yang diterbitkan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial. Kartu ini berfungsi untuk membantu meringankan hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM) antara lain mendapatkan bantuan pangan, mendapatkan bantuan pendidikan bagi siswa dan Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial (bansos) bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin/rentan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. PKH menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memperbaiki akses keluarga miskin dan rentan terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial guna meningkatkan kualitas hidup keluarga sasaran.



Gambar 4.27

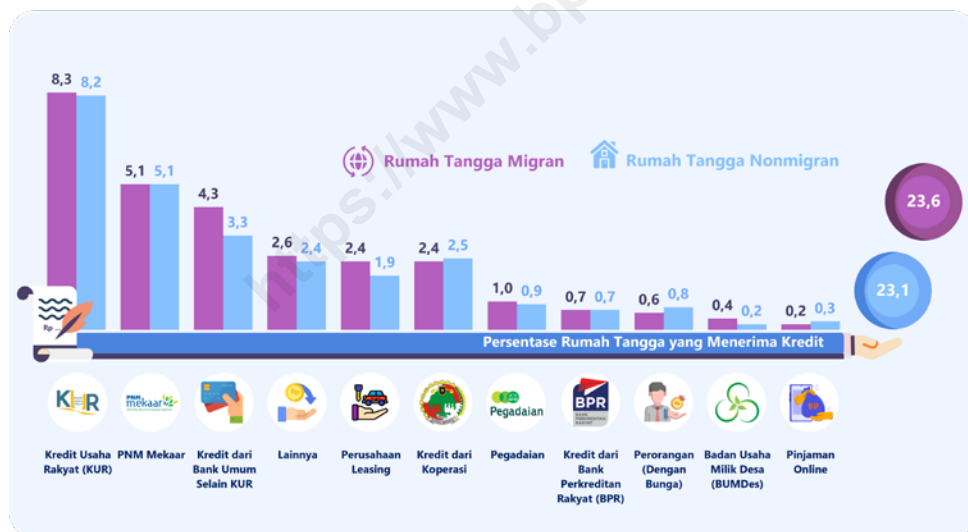
Persentase Rumah Tangga yang Menerima Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Program Keluarga Harapan (PKH) Menurut Status Migrasi Risen, 2024

Berdasarkan hasil Susenas Maret 2024, secara umum, persentase penerima KKS dan PKH untuk rumah tangga nonmigran lebih tinggi dibandingkan rumah tangga migran. Terdapat sekitar 16,3 persen dan 15,6 persen rumah tangga nonmigran yang menerima KKS dan PKH secara berurutan (Gambar 4.27). Sementara itu, persentase rumah tangga migran yang menerima KKS dan PKH adalah sebesar 14,2 persen dan 11,5 persen.

Terdapat variasi penerimaan KKS dan PKH di berbagai wilayah di Indonesia. Sulawesi Barat memiliki persentase tertinggi untuk rumah tangga migran yang menerima KKS, sedangkan untuk PKH, terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu masing-masing sebesar 34,6 persen dan 36,6 persen. Persentase rumah tangga migran dan nonmigran yang menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Program Keluarga Harapan (PKH) menurut provinsi ditampilkan pada Lampiran 37.

4.9.7 MENERIMA KREDIT

Fasilitas kredit dapat membantu rumah tangga dalam pemenuhan kebutuhan dan peningkatan usaha. Salah satunya pemerintah telah mencanangkan program pemberian kredit usaha yang ditujukan untuk masyarakat ekonomi rendah dengan syarat-syarat tertentu. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan modal untuk usaha kecil.



Gambar 4.28
Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit Menurut Status Migrasi Risen dan Jenis Kredit, 2024

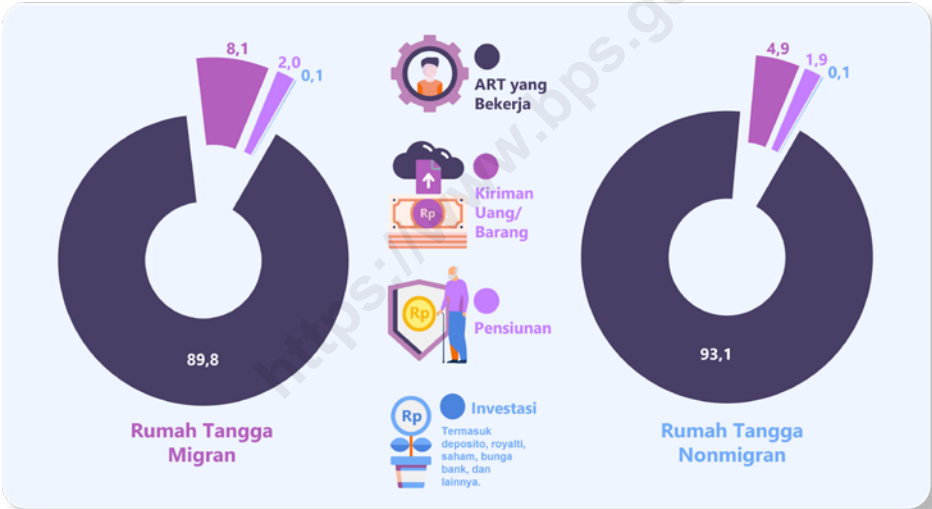
Hasil Susenas 2024 menunjukkan bahwa, secara nasional, ada sebanyak 23,6 persen rumah tangga migran yang menerima kredit. Angka ini tidak jauh berbeda dengan persentase di rumah tangga nonmigran (23,1 persen). Jika diperinci menurut jenis kredit pun, persentase antara rumah tangga migran dengan nonmigran memiliki

pola yang mirip. Jenis kredit yang diterima paling banyak adalah kredit usaha rakyat (KUR), yakni 8,3 persen di rumah tangga migran dan 8,2 persen di rumah tangga nonmigran.

Sulawesi Barat merupakan provinsi dengan persentase rumah tangga migran penerima kredit tertinggi sebesar 49,7 persen. Provinsi dengan persentase tertinggi berikutnya adalah Sulawesi Utara (46,9 persen) dan Nusa Tenggara Timur (46,0 persen).

4.9.8 SUMBER TERBESAR PEMBIAYAAN RUMAH TANGGA

Hasil Susenas Maret 2024 menunjukkan bahwa secara nasional sumber utama pembiayaan rumah tangga, baik rumah tangga migran maupun nonmigran, berasal dari penghasilan anggota rumah tangga (ART) yang bekerja. Sebanyak 89,8 persen rumah tangga migran bergantung pada sumber ini, sedikit lebih rendah dibanding rumah tangga nonmigran (93,8 persen). Sumber pembiayaan terbesar kedua adalah kiriman uang atau barang, dengan perbedaan yang cukup mencolok antara keduanya: 8,1 persen rumah tangga migran menggantungkan pembiayaan dari kiriman, hampir dua kali lipat lebih tinggi dibanding rumah tangga nonmigran (4,9 persen).



Gambar 4.29
Persentase Rumah Tangga Menurut Status Migrasi Risen dan Sumber Terbesar Pembiayaan Rumah Tangga, 2024

Pada tingkat provinsi, sebagian besar wilayah mengikuti pola nasional, di mana lebih dari 79 persen rumah tangga migran memperoleh pembiayaan terutama dari ART yang bekerja. Namun, DI Yogyakarta menjadi pengecualian yang menonjol. Hanya 51,3 persen rumah tangga migran yang bergantung pada penghasilan ART yang bekerja, sementara 45,1 persen justru mengandalkan kiriman uang atau barang. Pola ini sangat mungkin dipengaruhi oleh karakteristik Yogyakarta sebagai kota pelajar, di mana proporsi besar migran adalah mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia yang masih dibiayai oleh keluarganya di daerah asal.



DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2019. *Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2019*. Jakarta: BPS.
- _____. 2021. *Hasil Sensus Penduduk 2020*. Jakarta: BPS.
- _____. 2024. *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Triwulan IV 2023*. Jakarta: BPS.
- Baker, Emma, Rebecca Bentley, Kate Mason, Laurence Lester, Andrew Beer, and Shelley Mallett. 2018. *Crowded Housing and Health: An Evidence Review*. Melbourne: AHURI.
- BPS Provinsi Bali. 2021. *Provinsi Bali dalam Angka 2021*. Denpasar: BPS Provinsi Bali.
- Côté, Isabelle. 2022. "Internal Migration and Resource Conflict: Evidence from Riau, Indonesia." *Journal of Global Security Studies* 7, no. 1: ogab025. <https://doi.org/10.1093/jogss/ogab025>
- Davies, A., A. Basten, and C. Frattini. 2009. "Migration: A Social Determinant of Migrants' Health." *Eurohealth* 16, no. 1: 10–12.
- Evers, H. D. 1975. "Changing Patterns of Minangkabau Urban Land-ownership." *Bijdragen tot de Taal-, Land-en Volkenkunde/Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia* 131, no. 1: 86–110. <https://doi.org/10.1163/22134379-90002682>.
- Ford, Michele, and Lenore Lyons. 2007. "Where Internal and International Migration Intersect: Mobility and the Formation of Multi-ethnic Communities in the Riau Islands Transit Zone." *International Journal on Multicultural Societies* 9, no. 2: 236–63.
- Global Migration Group. 2017. Handbook for Improving the Production and Use of Migration Data for Development. *Global Knowledge Partnership for Migration and Development (KNOMAD)*, World Bank.
- Goma, Erny I., Sri R. Giyarsih, and Uswatun Listiyaningsih. 2022. "Minat Menjadi Migran Permanen di Yogyakarta (Kasus Mahasiswa Asal NTT Anggota Kesa)." *Media Komunikasi Geografi* 23, no. 1: 84–92. <https://doi.org/10.23887/mkg.v23i1.41403>.
- Gu, Zuguang, Lei Gu, Roland Eils, Markus Schlesner, and Benedikt Brors. 2014. "Circlize Implements and Enhances Circular Visualization in R." *Bioinformatics* 30, no. 19: 2811–2812. <https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btu393>
- Hidayat, Budi, and Retno Susilawati. 2018. "Overcrowding and Health in Indonesia: Evidence from Susenas." *Journal of Population and Social Studies* 26, no. 2: 123–140.
- Hidayati, Isti. 2019. "Proses Migrasi dan Peran Teknologi Komunikasi di Antara Pekerja Migran di Batam, Indonesia." *Society* 7, no. 2: 189–200. <https://doi.org/10.11648/j.soc.20190702.16>.
- Hugo, Graeme. 2005. "The State of Indonesian Migration." in *International Migration in Southeast Asia*, edited by Aris Ananta and Evi Nurvidya Arifin, 71–98. Singapore: ISEAS.
- Hugo, Graeme. 2005. "Female Migration in the Asian Region: The Case of Indonesia." Disampaikan pada Bellagio Conference on Female Migration, Bellagio, Italy.
- Idris, F., Z. Hassan, A. Ya'acob, S. K. Gill, and N. A. M. Awal. 2012. "The Role of Education in Shaping Youth's National Identity." *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 59: 443–50. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.299>.
- Ilmidi, Idham, and Fadlan. 2021. "Juridical Analysis of Land Registration Property Rights on the Management Rights of the Batam Company Agency to Confirm Legal Currency (Research Study at the Batam City Land Office)." *International Journal of Advance Research and Innovative Ideas in Education* 7, no. 6: 1076–84.
- International Organization for Migration. 2018. *Migration Health Annual Review 2016*. Geneva: IOM.
- Keman, Syarifuddin. 2005. "Kesehatan Perumahan dan Lingkungan Pemukiman." *Jurnal Kesehatan Lingkungan* 2, no. 1: 29–42.

-
- Kuhnt, Jana. 2019. "Literature Review: Drivers of Migration. Why Do People Leave Their Homes? Is There an Easy Answer? A Structured Overview of Migratory Determinants." Discussion Paper 9/2019. *Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE)*. <https://doi.org/10.23661/dp9.2019>.
- Lee, Everett S. 1966. "A Theory of Migration." *Demography* 3, no. 1: 47–57.
- Liu, Ben-Chieh. 1975. "Differential Net Migration Rates and the Quality of Life." *Review of Economics and Statistics* 57: 329–37.
- Lu, Yao. 2008. "Test of the 'Healthy Migrant Hypothesis': A Longitudinal Analysis of Health Selectivity of Internal Migration in Indonesia." *Social Science & Medicine* 67, no. 8: 1331–39. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2008.07.022>.
- Manning, Chris. 2005. "Internal Migration and Regional Disparities in Indonesia: An Overview." *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 41, no. 3: 347–366.
- Massey, Douglas S., and Kristin E. Espinosa. 1997. "What's Driving Mexico–U.S. Migration? A Theoretical, Empirical, and Policy Analysis." *American Journal of Sociology* 102, no. 4: 939–999.
- Massey, Douglas S., Joaquín Arango, Graeme Hugo, Ali Kouaouci, Adela Pellegrino, and J. Edward Taylor. 1993. "Theories of International Migration: A Review and Appraisal." *Population and Development Review* 19, no. 3: 431–466.
- McDonald, Peter, Iwu D. Utomo, Ariane Utomo, Andrew Reimondos, and Terence Hull. 2013. "Migration and Transition to Adulthood: Education and Employment Outcomes among Young Migrants in Greater Jakarta." *Asian Population Studies* 9, no. 1: 4–27. <https://doi.org/10.1080/17441730.2013.797294>
- OECD. 2023. *International Migration Outlook 2023*. Paris: OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/migr_outlook-2023-en.
- OECD. 2023. *International Migration Outlook 2023*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/b0f40584-en>.
- _____. 2023. *Women's Employment and Childcare Services in Advanced Economies*. Paris: OECD iLibrary.
- OHCHR. 2014. *The Right to Adequate Housing*. Geneva: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights.
- Orford, S. 2010. "Towards a Data-Rich Infrastructure for Housing-Market Research: Deriving Floor-Area Estimates for Individual Properties from Secondary Data Sources." *Environment and Planning B: Planning and Design* 37, no. 2: 248–264. <https://doi.org/10.1068/b35082>.
- Pardede, E., and S. Muhidin. 2006. "Life Course Stages and Migration Behavior of Indonesian Population: Evidence from the IFLS Data." Disampaikan pada Population Association of America 2006 Annual Meeting, Los Angeles, California.
- Parkins, N. C. 2010. "Push and Pull Factors of Migration." *American Review of Political Economy*.
- Republik Indonesia. 2021. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. 2020. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. 2019. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.
- Republik Indonesia. 2016. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. 2011. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144.

- Republik Indonesia. 2008. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. 2007. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150.
- Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78.
- Republik Indonesia. 1992. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35.
- Pradini, D. I., et al. 2013. "Tingkat Ekonomi Keluarga Berhubungan dengan Pemilihan Alat Kontrasepsi di Dukuh Manukan Sendangsari Pajangan Bantul." *Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia* 1, no. 2: 55–60.
- Rasul, A., J. A. Nasir, S. Akhtar, and A. Hinde. 2022. "Factors Associated with Female Age at First Marriage: An Analysis Using All Waves of the Pakistan Demographic and Health Survey." *PLoS ONE* 17, no. 3: e0264505. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0264505>.
- Ravenstein, E. G. 1885. "The Laws of Migration." *Journal of the Statistical Society of London* 48, no. 2: 167–235.
- Rukmana, D., F. Z. Fahmi, and T. Firman. 2019. "Suburbanization in Asia: A Focus on Jakarta." In *The Routledge Companion to the Suburbs*, edited by B. Hanlon and T. J. Vicino, 110–120. 1st ed. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315266442-10>.
- Ruyssen, I., and S. Salomone. 2015. *Female Migration and Discrimination*. Washington, DC: Center for Global Development.
- Septalia, R., and N. Puspitasari. 2016. "Faktor yang Memengaruhi Pemilihan Metode Kontrasepsi." *Jurnal Biometrika dan Kependudukan* 5, no. 2: 91–98.
- Setya, V. E. 2018. "Strategi Indonesia Menghadapi Industri 4.0." *Pusat Penelitian Industri* Vol. X, no. 09/II Puslit/Mei/2018.
- Sosiologi FISIPOL UGM. 2018. "Yogyakarta Masuk dalam Lima Besar Internal Migrasi Tertinggi di Indonesia." *Portal Berita FISIPOL UGM*, 2018.
- Speare, A., Jr., and F. K. Goldscheider. 1987. "Effect of Marital Status Change on Residential Mobility." *Journal of Marriage and the Family* 49, no. 2: 455–464.
- Streeten, Paul. 1979. "Basic Needs: Premises and Promises." *Journal of Policy Modeling* 1, no. 1: 136–146.
- Suhrke, A. 1997. "Environmental Degradation, Migration, and the Potential for Violent Conflict." In *Conflict and the Environment*, 255–272. Dordrecht: Springer.
- Suhrke, Astri. 1997. "Refugees and Migration: A Global Perspective." *Journal of International Affairs* 51, no. 2: 283–304.
- Sumantri, I. 2013. *Migrasi dan Dinamika Kependudukan di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Kependudukan.
- Todaro, M. P. 1980. "Internal Migration in Developing Countries: A Survey." In *Population and Economic Change in Developing Countries*, 361–402. Chicago: University of Chicago Press.
- Toney, M. B., and A. K. Bailey. 2014. "Migration, an Overview." In *Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research*, 171. Springer.
- Turner, John F. C. 1976. *Housing by People: Towards Autonomy in Building Environments*. London: Marion Boyars.

-
- UN-Habitat. 2009. *The Right to Adequate Housing*. Nairobi: United Nations Human Settlements Programme.
- UN Women. 2022. "How Migration Is a Gender Equality Issue." August 22. <https://interactive.unwomen.org/multimedia/explainer/migration/en/index.html>.
- United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA), Population Division. 2020. *International Migrant Stock 2020*. New York: United Nations.
- United Nations. 1970. *Methods of Measuring Internal Migration*. Sales No. E.70.XIII.3. New York: United Nations Publications.
- World Bank. 2022. *Indonesia Economic Prospects: Investing in People*. Washington, DC: World Bank.
- World Health Organization. 1948. *Preamble to the Constitution of the World Health Organization*. Geneva: WHO.

<https://www.bps.go.id>



LAMPIRAN

Lampiran 1
Persentase Penduduk Menurut Provinsi dan Status Migrasi Seumur Hidup Antarprovinsi, 2024

Provinsi	Status Migrasi Seumur Hidup Antarprovinsi		Jumlah
	Migran	Nonmigran	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	3,8	96,2	100,0
Sumatera Utara	3,3	96,7	100,0
Sumatera Barat	6,9	93,1	100,0
Riau	26,7	73,3	100,0
Jambi	18,1	81,9	100,0
Sumatera Selatan	10,1	89,9	100,0
Bengkulu	15,0	85,0	100,0
Lampung	13,5	86,5	100,0
Kep. Bangka Belitung	13,7	86,3	100,0
Kepulauan Riau	42,0	58,0	100,0
DKI Jakarta	30,3	69,7	100,0
Jawa Barat	10,3	89,7	100,0
Jawa Tengah	2,7	97,3	100,0
DI Yogyakarta	14,6	85,4	100,0
Jawa Timur	2,0	98,0	100,0
Banten	19,7	80,3	100,0
Bali	7,6	92,4	100,0
Nusa Tenggara Barat	2,0	98,0	100,0
Nusa Tenggara Timur	3,5	96,5	100,0
Kalimantan Barat	5,4	94,6	100,0
Kalimantan Tengah	20,0	80,0	100,0
Kalimantan Selatan	11,1	88,9	100,0
Kalimantan Timur	30,5	69,5	100,0
Kalimantan Utara	29,2	70,8	100,0
Sulawesi Utara	7,0	93,0	100,0
Sulawesi Tengah	14,3	85,7	100,0
Sulawesi Selatan	3,6	96,4	100,0
Sulawesi Tenggara	15,9	84,1	100,0
Gorontalo	5,0	95,0	100,0
Sulawesi Barat	10,8	89,2	100,0
Maluku	6,7	93,3	100,0
Maluku Utara	8,5	91,5	100,0
Papua Barat	26,2	73,8	100,0
Papua Barat Daya	26,7	73,3	100,0
Papua	22,0	78,0	100,0
Papua Selatan	25,1	74,9	100,0
Papua Tengah	16,5	83,5	100,0
Papua Pegunungan	1,8	98,2	100,0
Indonesia	9,7	90,3	100,0

Lampiran 2
 Persentase Penduduk berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Provinsi dan Status Migrasi Risen Antarprovinsi, 2024

Provinsi	Status Migrasi Risen Antarprovinsi		Jumlah
	Migran	Nonmigran	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	0,3	99,7	100,0
Sumatera Utara	0,6	99,4	100,0
Sumatera Barat	1,6	98,4	100,0
Riau	0,7	99,3	100,0
Jambi	0,9	99,1	100,0
Sumatera Selatan	0,6	99,4	100,0
Bengkulu	0,9	99,1	100,0
Lampung	0,8	99,2	100,0
Kep. Bangka Belitung	1,1	98,9	100,0
Kepulauan Riau	3,7	96,3	100,0
DKI Jakarta	1,4	98,6	100,0
Jawa Barat	0,7	99,3	100,0
Jawa Tengah	1,2	98,8	100,0
DI Yogyakarta	2,8	97,2	100,0
Jawa Timur	0,5	99,5	100,0
Banten	0,6	99,4	100,0
Bali	0,6	99,4	100,0
Nusa Tenggara Barat	1,5	98,5	100,0
Nusa Tenggara Timur	1,3	98,7	100,0
Kalimantan Barat	0,3	99,7	100,0
Kalimantan Tengah	1,0	99,0	100,0
Kalimantan Selatan	0,8	99,2	100,0
Kalimantan Timur	0,9	99,1	100,0
Kalimantan Utara	1,0	99,0	100,0
Sulawesi Utara	0,4	99,6	100,0
Sulawesi Tengah	0,9	99,1	100,0
Sulawesi Selatan	0,9	99,1	100,0
Sulawesi Tenggara	1,1	98,9	100,0
Gorontalo	0,5	99,5	100,0
Sulawesi Barat	1,0	99,0	100,0
Maluku	0,9	99,1	100,0
Maluku Utara	0,8	99,2	100,0
Papua Barat	1,7	98,3	100,0
Papua Barat Daya	0,8	99,2	100,0
Papua	0,9	99,1	100,0
Papua Selatan	1,5	98,5	100,0
Papua Tengah	0,5	99,5	100,0
Papua Pegunungan	0,4	99,6	100,0
Indonesia	0,9	99,1	100,0

Lampiran 3

Persentase Migran Masuk Seumur Hidup, Migran Keluar Seumur Hidup, dan Migran Neto Seumur Hidup Antarprovinsi Menurut Provinsi, 2024

Provinsi	Migran Masuk	Migran Keluar	Migran Neto
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	3,8	4,6	-0,9
Sumatera Utara	3,3	13,0	-12,1
Sumatera Barat	6,9	16,2	-12,7
Riau	26,7	8,2	24,2
Jambi	18,1	7,0	13,6
Sumatera Selatan	10,1	9,1	1,2
Bengkulu	15,0	6,1	10,6
Lampung	13,5	9,5	5,1
Kep. Bangka Belitung	13,7	7,3	7,7
Kepulauan Riau	42,0	8,0	48,4
DKI Jakarta	30,3	30,0	0,5
Jawa Barat	10,3	4,8	6,2
Jawa Tengah	2,7	15,4	-16,6
DI Yogyakarta	14,6	18,1	-5,1
Jawa Timur	2,0	7,9	-6,8
Banten	19,7	6,0	16,6
Bali	7,6	5,9	2,0
Nusa Tenggara Barat	2,0	3,6	-1,7
Nusa Tenggara Timur	3,5	5,0	-1,7
Kalimantan Barat	5,4	3,7	1,9
Kalimantan Tengah	20,0	4,4	18,5
Kalimantan Selatan	11,1	6,8	5,0
Kalimantan Timur	30,5	6,1	31,5
Kalimantan Utara	29,2	9,8	26,3
Sulawesi Utara	7,0	6,6	0,4
Sulawesi Tengah	14,3	4,8	11,1
Sulawesi Selatan	3,6	13,3	-12,3
Sulawesi Tenggara	15,9	7,4	10,4
Gorontalo	5,0	7,4	-2,8
Sulawesi Barat	10,8	8,3	3,0
Maluku	6,7	10,6	-4,8
Maluku Utara	8,5	4,3	4,6
Papua Barat	26,2	10,4	21,2
Papua Barat Daya	26,7	8,3	24,0
Papua	22,0	12,1	13,4
Papua Selatan	25,1	2,6	26,8
Papua Tengah	16,5	2,4	15,9
Papua Pegunungan	1,8	1,2	0,6

Lampiran 4
 Persentase Migran Masuk Risen, Migran Keluar Risen, dan Migran Neto Risen Antarprovinsi Menurut Provinsi, 2024

Provinsi	Migran Masuk	Migran Keluar	Migran Neto
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	0,3	0,6	-0,3
Sumatera Utara	0,6	0,6	-0,1
Sumatera Barat	1,6	1,1	0,5
Riau	0,7	1,1	-0,5
Jambi	0,9	0,9	–
Sumatera Selatan	0,6	0,6	–
Bengkulu	0,9	0,7	0,2
Lampung	0,8	0,6	0,2
Kep. Bangka Belitung	1,1	0,7	0,4
Kepulauan Riau	3,7	1,7	2,1
DKI Jakarta	1,4	3,8	-2,5
Jawa Barat	0,7	0,6	0,1
Jawa Tengah	1,2	0,7	0,6
DI Yogyakarta	2,8	1,5	1,3
Jawa Timur	0,5	0,4	0,1
Banten	0,6	1,0	-0,3
Bali	0,6	0,8	-0,2
Nusa Tenggara Barat	1,5	0,2	1,3
Nusa Tenggara Timur	1,3	0,6	0,7
Kalimantan Barat	0,3	0,3	~0
Kalimantan Tengah	1,0	1,0	~0
Kalimantan Selatan	0,8	0,7	~0
Kalimantan Timur	0,9	1,6	-0,7
Kalimantan Utara	1,0	2,2	-1,2
Sulawesi Utara	0,4	0,9	-0,5
Sulawesi Tengah	0,9	0,7	0,2
Sulawesi Selatan	0,9	0,7	0,2
Sulawesi Tenggara	1,1	0,7	0,4
Gorontalo	0,5	0,4	0,2
Sulawesi Barat	1,0	1,2	-0,2
Maluku	0,9	0,9	0,1
Maluku Utara	0,8	0,5	0,3
Papua Barat	1,7	2,6	-0,9
Papua Barat Daya	0,8	2,4	-1,6
Papua	0,9	3,3	-2,5
Papua Selatan	1,5	0,5	1,1
Papua Tengah	0,5	0,7	-0,2
Papua Pegunungan	0,4	~0	0,4

Lampiran 5
 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Provinsi, Status Migrasi Risen Antarprovinsi dan Jenis Kelamin, 2024

Provinsi	Migran		Nonmigran	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	55,3	44,7	49,7	50,3
Sumatera Utara	52,0	48,0	49,9	50,1
Sumatera Barat	51,4	48,6	49,6	50,4
Riau	51,3	48,7	50,9	49,1
Jambi	49,9	50,1	50,6	49,4
Sumatera Selatan	47,9	52,1	50,5	49,5
Bengkulu	43,0	57,0	50,8	49,2
Lampung	48,6	51,4	51,0	49,0
Kep. Bangka Belitung	49,6	50,4	51,1	48,9
Kepulauan Riau	50,1	49,9	50,8	49,2
DKI Jakarta	43,9	56,1	49,4	50,6
Jawa Barat	48,4	51,6	50,6	49,4
Jawa Tengah	60,2	39,8	49,4	50,6
DI Yogyakarta	41,3	58,7	49,7	50,3
Jawa Timur	51,4	48,6	49,2	50,8
Banten	40,7	59,3	50,6	49,4
Bali	58,7	41,3	50,2	49,8
Nusa Tenggara Barat	71,4	28,6	49,0	51,0
Nusa Tenggara Timur	55,9	44,1	49,3	50,7
Kalimantan Barat	44,3	55,7	50,6	49,4
Kalimantan Tengah	47,8	52,2	51,5	48,5
Kalimantan Selatan	50,0	50,0	50,3	49,7
Kalimantan Timur	44,8	55,2	51,5	48,5
Kalimantan Utara	47,4	52,6	52,1	47,9
Sulawesi Utara	52,1	47,9	51,0	49,0
Sulawesi Tengah	48,7	51,3	50,7	49,3
Sulawesi Selatan	45,1	54,9	48,8	51,2
Sulawesi Tenggara	48,9	51,1	49,8	50,2
Gorontalo	65,5	34,5	49,9	50,1
Sulawesi Barat	45,1	54,9	50,0	50,0
Maluku	42,3	57,7	50,3	49,7
Maluku Utara	49,5	50,5	50,5	49,5
Papua Barat	50,4	49,6	52,5	47,5
Papua Barat Daya	35,0	65,0	51,9	48,1
Papua	42,1	57,9	51,8	48,2
Papua Selatan	54,2	45,8	50,8	49,2
Papua Tengah	50,0	50,0	52,3	47,7
Papua Pegunungan	43,5	56,5	52,2	47,8
Indonesia	51,2	48,8	50,1	49,9

Lampiran 6
 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Provinsi, Status Migrasi Risen Antarprovinsi, dan Kelompok Umur, 2024

Provinsi	Migran						
	5–9	10–19	20–29	30–39	40–49	50–59	60+
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	9,4	13,6	32,5	30,2	9,2	2,2	2,9
Sumatera Utara	13,5	10,7	26,3	28,8	10,5	3,4	6,8
Sumatera Barat	11,1	13,9	32,6	17,5	15,5	6,4	3,1
Riau	15,9	11,2	36,4	21,1	8,7	3,9	2,8
Jambi	10,2	12,5	25,3	20,6	14,7	11,0	5,7
Sumatera Selatan	6,9	9,1	32,5	25,5	7,2	7,0	11,8
Bengkulu	8,1	10,7	43,0	22,4	8,3	2,8	4,6
Lampung	6,9	11,5	37,9	20,7	9,2	8,0	5,9
Kep. Bangka Belitung	8,6	21,9	24,7	20,5	14,5	2,6	7,2
Kepulauan Riau	4,4	6,7	55,2	16,2	6,8	1,5	9,1
DKI Jakarta	8,6	12,2	24,3	21,6	15,4	9,5	8,4
Jawa Barat	7,1	11,0	29,5	23,6	16,4	9,7	2,6
Jawa Tengah	8,0	9,0	26,8	26,8	14,5	9,5	5,4
DI Yogyakarta	3,6	13,4	54,4	14,1	6,7	5,6	2,1
Jawa Timur	7,0	13,4	24,5	22,0	19,1	9,0	5,0
Banten	12,4	15,2	20,6	32,4	10,6	5,4	3,4
Bali	4,1	6,4	51,4	20,2	9,7	2,0	6,3
Nusa Tenggara Barat	6,1	4,3	33,9	33,7	12,6	8,9	0,6
Nusa Tenggara Timur	8,1	6,3	40,6	23,6	12,8	4,8	3,8
Kalimantan Barat	4,2	18,7	24,1	17,3	15,6	12,5	7,8
Kalimantan Tengah	5,1	10,9	30,5	30,0	9,8	10,5	3,1
Kalimantan Selatan	8,2	11,7	27,6	21,6	18,6	3,2	9,2
Kalimantan Timur	9,6	9,3	46,6	20,9	5,5	5,8	2,3
Kalimantan Utara	8,5	11,4	37,0	20,7	12,3	9,6	0,6
Sulawesi Utara	8,8	11,7	16,8	20,9	14,6	17,2	10,0
Sulawesi Tengah	12,8	11,7	24,0	28,3	13,6	3,3	6,4
Sulawesi Selatan	10,1	18,6	16,7	22,3	17,6	9,9	4,8
Sulawesi Tenggara	9,0	15,2	31,3	24,1	13,0	5,1	2,4
Gorontalo	7,0	12,4	34,2	31,6	4,9	6,1	3,8
Sulawesi Barat	13,3	16,0	26,0	23,5	11,8	4,3	5,2
Maluku	11,5	13,1	26,8	15,1	28,3	1,6	3,6
Maluku Utara	9,5	9,6	29,8	32,5	6,0	4,2	8,4
Papua Barat	11,4	14,7	38,0	20,8	10,5	2,9	1,7
Papua Barat Daya	8,0	16,7	32,9	18,4	10,6	11,0	2,4
Papua	8,7	12,9	37,3	8,4	7,8	15,4	9,5
Papua Selatan	1,9	7,5	29,1	30,6	13,8	6,4	10,8
Papua Tengah	12,1	17,0	30,3	22,0	14,1	2,3	2,2
Papua Pegunungan	4,4	28,3	8,6	18,2	32,6	7,8	–
Indonesia	8,1	11,3	31,0	23,5	13,6	7,6	4,9

Lanjutan Lampiran 6

Provinsi	Nonmigran						
	5-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60+
(1)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Aceh	10,1	19,7	17,9	16,9	14,7	11,0	9,9
Sumatera Utara	9,8	20,0	17,4	15,9	14,3	11,5	11,1
Sumatera Barat	9,9	19,6	16,4	16,0	14,8	11,4	11,8
Riau	9,7	20,7	16,6	17,7	15,6	11,1	8,4
Jambi	9,3	18,1	16,2	16,3	15,8	12,6	11,7
Sumatera Selatan	9,7	18,4	17,0	16,7	15,3	11,6	11,2
Bengkulu	8,9	17,5	16,5	16,9	15,7	12,6	11,9
Lampung	8,9	17,8	16,2	16,2	15,7	12,7	12,6
Kep. Bangka Belitung	9,2	18,1	16,4	16,6	16,0	12,4	11,3
Kepulauan Riau	9,7	17,8	18,9	18,9	16,8	10,8	7,2
DKI Jakarta	8,2	15,4	17,4	17,6	17,1	12,8	11,6
Jawa Barat	8,5	17,7	17,2	16,6	15,4	12,3	12,3
Jawa Tengah	7,6	16,3	15,4	15,1	15,1	13,7	16,7
DI Yogyakarta	7,5	14,0	16,0	16,0	15,3	13,4	17,9
Jawa Timur	7,4	14,6	15,0	15,5	15,8	14,5	17,2
Banten	9,1	18,1	17,0	17,0	15,9	12,5	10,4
Bali	7,5	15,8	16,1	16,1	15,8	13,7	15,0
Nusa Tenggara Barat	9,9	18,4	16,5	16,4	15,3	12,0	11,5
Nusa Tenggara Timur	11,0	20,5	17,0	15,9	13,5	10,8	11,3
Kalimantan Barat	9,2	18,3	17,0	16,9	15,8	11,7	11,1
Kalimantan Tengah	8,9	17,9	16,6	16,8	16,9	12,9	9,9
Kalimantan Selatan	9,4	18,2	16,1	15,7	15,0	13,2	12,4
Kalimantan Timur	9,2	18,2	16,4	16,3	16,8	12,7	10,4
Kalimantan Utara	9,4	18,9	17,2	16,5	15,5	12,3	10,2
Sulawesi Utara	8,2	16,4	15,7	15,2	15,4	13,8	15,3
Sulawesi Tengah	9,7	18,5	16,6	16,6	15,7	12,0	11,0
Sulawesi Selatan	8,5	17,6	16,2	15,8	15,6	12,8	13,4
Sulawesi Tenggara	10,3	20,5	17,4	16,1	14,4	11,3	9,9
Gorontalo	8,7	17,8	16,8	16,6	15,6	12,6	11,9
Sulawesi Barat	10,1	19,5	17,4	16,2	15,0	12,0	9,8
Maluku	10,1	20,3	17,8	16,7	14,0	10,6	10,5
Maluku Utara	9,9	20,1	17,4	16,6	14,9	11,3	9,8
Papua Barat	10,8	20,8	19,0	18,5	14,6	9,2	7,1
Papua Barat Daya	10,1	20,1	18,2	17,9	15,1	10,6	8,1
Papua	8,9	19,2	17,9	13,8	14,1	14,0	12,0
Papua Selatan	11,8	21,0	17,1	14,6	13,8	12,3	9,3
Papua Tengah	8,9	20,5	19,0	18,8	17,4	10,5	4,7
Papua Pegunungan	9,0	22,4	17,4	19,2	17,8	10,2	4,0
Indonesia	8,6	17,4	16,5	16,2	15,5	12,7	13,1

Lampiran 7
 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Provinsi, Status Migrasi Risen Antarprovinsi, dan Status Perkawinan, 2024

Provinsi	Migran				Nonmigran			
	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	42,3	52,6	3,5	1,6	40,7	52,4	0,9	6,0
Sumatera Utara	33,3	61,0	2,3	3,4	39,5	53,5	1,3	5,8
Sumatera Barat	35,0	55,6	6,4	2,9	36,4	55,6	2,1	6,0
Riau	24,7	69,7	1,4	4,2	38,5	55,7	1,5	4,3
Jambi	25,2	67,4	3,9	3,5	32,9	60,4	1,4	5,2
Sumatera Selatan	21,6	68,8	2,5	7,0	34,2	59,3	1,5	5,1
Bengkulu	29,6	64,3	1,2	4,8	31,9	61,8	1,7	4,7
Lampung	26,2	67,9	2,2	3,7	32,6	60,9	1,3	5,2
Kep. Bangka Belitung	41,2	51,2	1,2	6,5	34,3	58,8	2,1	4,8
Kepulauan Riau	46,2	43,1	2,1	8,6	36,6	58,7	1,1	3,6
DKI Jakarta	27,9	67,6	0,3	4,2	38,7	54,1	1,8	5,4
Jawa Barat	27,4	68,4	1,8	2,5	34,5	58,2	2,0	5,3
Jawa Tengah	23,1	71,2	2,7	2,9	29,7	60,9	1,8	7,6
DI Yogyakarta	61,5	33,9	1,7	2,9	30,2	59,5	2,1	8,2
Jawa Timur	25,1	66,3	5,2	3,5	27,1	62,1	2,0	8,8
Banten	27,9	65,7	1,8	4,5	36,4	57,5	1,3	4,7
Bali	61,6	34,2	0,7	3,5	31,6	60,6	1,2	6,6
Nusa Tenggara Barat	27,2	68,2	4,4	0,3	32,8	59,0	2,5	5,7
Nusa Tenggara Timur	38,3	55,2	3,7	2,7	39,8	52,6	1,4	6,2
Kalimantan Barat	39,6	46,7	2,9	10,8	34,8	58,7	1,4	5,2
Kalimantan Tengah	21,0	74,3	2,4	2,2	33,1	61,8	1,2	3,9
Kalimantan Selatan	29,6	64,2	3,0	3,3	33,7	58,0	2,2	6,1
Kalimantan Timur	34,0	62,2	1,6	2,3	35,6	57,8	1,8	4,8
Kalimantan Utara	30,9	68,4	–	0,6	39,1	54,7	2,1	4,1
Sulawesi Utara	31,3	61,6	1,7	5,4	33,2	58,3	1,8	6,7
Sulawesi Tengah	27,6	68,0	3,3	1,0	34,2	58,9	1,7	5,3
Sulawesi Selatan	36,2	57,5	3,6	2,6	36,0	54,9	2,4	6,7
Sulawesi Tenggara	37,4	57,7	2,5	2,4	37,3	55,4	2,0	5,3
Gorontalo	36,8	62,8	0,2	0,2	32,8	59,1	1,9	6,2
Sulawesi Barat	36,4	57,8	0,9	4,9	37,0	56,0	1,9	5,1
Maluku	33,1	63,5	1,2	2,2	40,6	53,0	1,1	5,2
Maluku Utara	24,0	71,3	0,7	4,1	36,8	57,1	1,5	4,5
Papua Barat	41,5	56,1	0,4	2,0	41,1	53,5	1,0	4,3
Papua Barat Daya	24,7	68,7	5,2	1,4	40,6	54,5	1,1	3,8
Papua	45,3	45,7	~0	9,0	42,1	52,7	1,3	4,0
Papua Selatan	20,3	75,1	0,1	4,5	39,6	55,0	0,9	4,4
Papua Tengah	42,1	55,4	0,1	2,5	41,9	54,0	0,9	3,2
Papua Pegunungan	36,0	63,8	0,3	–	42,5	54,4	0,8	2,3
Indonesia	30,9	63,1	2,6	3,4	33,7	58,4	1,7	6,2

Lampiran 8

Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Provinsi, Status Migrasi Risen Antarprovinsi, dan Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga (KRT), 2024

Provinsi	Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga (KRT)									Jumlah
	Kepala Rumah Tangga	Pasangan/ Istri/Suami	Anak Kandung/ Tiri	Anak Angkat	Menantu	Cucu	Orang Tua/ Mertua	Pembantu/ Sopir	Lainnya (Famili Lain/Orang yang Tidak Ada Hubungan Famili dengan KRT)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aceh	33,0	16,6	31,4	~0	5,9	5,5	0,8	1,4	5,3	100,0
Sumatera Utara	21,4	19,2	39,2	–	8,0	6,1	1,5	0,1	4,4	100,0
Sumatera Barat	23,3	17,1	31,7	0,6	6,5	10,4	0,7	0,1	9,7	100,0
Riau	21,6	27,9	30,8	–	9,3	2,7	2,4	0,4	4,9	100,0
Jambi	27,0	21,0	29,8	–	5,7	10,3	3,1	0,5	2,7	100,0
Sumatera Selatan	22,4	22,2	28,6	–	12,8	7,2	4,0	–	2,7	100,0
Bengkulu	22,6	16,8	26,2	–	17,6	4,7	4,2	–	7,9	100,0
Lampung	16,7	15,9	34,5	–	18,4	7,4	3,1	–	3,8	100,0
Kep. Bangka Belitung	23,5	17,1	34,5	–	2,6	1,0	4,4	1,3	15,7	100,0
Kepulauan Riau	39,2	20,7	20,9	–	0,5	0,3	4,8	–	13,6	100,0
DKI Jakarta	28,1	27,6	18,9	~0	2,7	4,0	3,7	9,4	5,5	100,0
Jawa Barat	32,6	25,0	25,9	–	3,9	1,6	2,5	1,9	6,7	100,0
Jawa Tengah	31,5	10,6	29,7	0,3	13,6	8,9	2,1	~0	3,2	100,0
DI Yogyakarta	56,8	10,7	9,6	–	5,4	5,6	1,0	2,0	8,9	100,0
Jawa Timur	24,9	14,0	29,0	–	12,2	7,8	2,7	1,6	7,9	100,0
Banten	15,6	26,1	27,7	–	9,1	5,6	3,5	2,4	9,9	100,0
Bali	39,1	12,5	19,1	–	2,1	1,9	2,9	5,6	16,8	100,0
Nusa Tenggara Barat	45,6	13,9	34,7	–	3,0	1,5	0,3	–	1,1	100,0
Nusa Tenggara Timur	19,4	9,5	46,1	0,1	11,3	6,1	0,9	–	6,5	100,0
Kalimantan Barat	20,2	18,8	33,1	–	5,2	0,2	4,0	–	18,6	100,0
Kalimantan Tengah	28,4	30,9	20,1	–	10,0	1,0	1,5	0,7	7,4	100,0
Kalimantan Selatan	26,4	21,0	31,6	0,6	6,1	1,4	5,3	–	7,6	100,0
Kalimantan Timur	19,9	26,5	29,0	–	6,0	–	1,8	0,8	15,9	100,0
Kalimantan Utara	25,6	21,8	37,7	–	5,6	1,1	0,6	–	7,7	100,0
Sulawesi Utara	24,7	24,6	18,5	2,2	7,2	7,3	2,2	1,3	12,1	100,0
Sulawesi Tengah	25,2	23,3	26,3	~0	7,4	4,0	2,8	–	11,0	100,0
Sulawesi Selatan	18,9	15,7	29,6	0,2	6,7	6,3	3,5	~0	19,0	100,0
Sulawesi Tenggara	19,7	16,9	32,2	–	11,3	10,0	1,1	–	9,0	100,0
Gorontalo	22,3	15,7	30,0	–	16,1	2,0	3,4	–	10,5	100,0
Sulawesi Barat	12,4	11,2	36,5	–	15,4	6,5	3,7	–	14,4	100,0
Maluku	15,9	14,1	36,5	0,1	10,8	7,0	1,6	–	14,1	100,0
Maluku Utara	17,1	17,3	28,6	–	14,3	4,9	1,9	–	15,9	100,0
Papua Barat	20,6	19,3	25,7	–	6,2	2,9	1,2	–	24,0	100,0
Papua Barat Daya	13,2	19,5	10,0	0,2	15,6	4,4	–	–	37,1	100,0
Papua	15,9	22,6	34,0	–	9,0	3,8	–	–	14,7	100,0
Papua Selatan	21,8	20,7	15,0	–	–	–	9,7	–	32,8	100,0
Papua Tengah	21,5	27,8	40,5	–	–	2,0	–	–	8,2	100,0
Papua Pegunungan	30,3	31,1	37,5	–	–	–	–	–	1,0	100,0
Indonesia	28,8	18,1	28,1	0,1	8,3	5,4	2,5	1,3	7,5	100,0

Lampiran 9

Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Provinsi, Status Migrasi Risen Antarprovinsi, dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2024

Provinsi	Migran							
	Tidak Punya Ijazah SD	SD/MI/ Sederajat	SMP/MTs/ Sederajat	SMA/MA/ Sederajat	Diploma I/ II/III	Diploma IV/S1	Profesi	S2/S3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	16,2	8,8	8,6	46,5	3,9	13,6	–	2,4
Sumatera Utara	22,8	9,0	15,6	37,7	5,3	8,0	–	1,7
Sumatera Barat	18,5	12,7	14,4	41,2	3,7	9,3	0,2	~0
Riau	26,3	9,8	19,6	30,5	3,1	10,7	–	–
Jambi	20,9	16,1	21,9	25,0	2,5	9,8	–	3,7
Sumatera Selatan	22,0	19,1	12,6	29,2	7,6	8,3	–	1,2
Bengkulu	14,2	17,5	15,0	29,7	6,0	17,5	–	–
Lampung	18,3	15,7	11,3	38,5	2,5	13,2	0,5	–
Kep. Bangka Belitung	17,1	15,6	18,4	33,2	2,8	12,0	0,4	0,5
Kepulauan Riau	10,0	9,1	14,5	48,4	5,6	9,7	–	2,6
DKI Jakarta	13,3	17,4	13,4	37,9	3,6	13,0	–	1,4
Jawa Barat	12,0	12,3	16,1	42,3	4,3	12,8	–	0,2
Jawa Tengah	17,4	20,8	20,9	31,2	0,9	8,1	0,2	0,7
DI Yogyakarta	7,9	5,2	8,6	59,2	4,0	13,3	–	1,7
Jawa Timur	17,3	20,9	18,9	28,2	2,6	11,2	–	0,8
Banten	19,5	11,1	20,4	32,7	6,2	8,6	–	1,5
Bali	9,6	14,3	23,7	49,1	0,3	2,7	–	0,3
Nusa Tenggara Barat	14,5	22,3	20,7	27,6	0,8	12,8	–	1,3
Nusa Tenggara Timur	22,9	16,9	18,7	19,4	1,3	20,3	0,2	0,2
Kalimantan Barat	24,9	13,7	19,6	18,3	5,1	13,1	1,3	4,0
Kalimantan Tengah	12,2	33,9	15,2	21,7	1,7	14,4	–	1,0
Kalimantan Selatan	22,2	21,1	14,7	21,5	3,7	16,0	–	0,8
Kalimantan Timur	14,9	12,5	13,6	37,3	1,4	16,9	–	3,5
Kalimantan Utara	18,0	16,2	5,5	32,2	0,9	23,3	–	3,9
Sulawesi Utara	19,6	14,7	10,1	32,5	7,3	15,8	–	–
Sulawesi Tengah	21,8	18,6	17,6	26,2	2,8	12,2	–	0,8
Sulawesi Selatan	25,1	12,4	25,7	23,6	1,7	11,0	–	0,6
Sulawesi Tenggara	18,4	22,5	18,7	24,3	1,5	12,7	0,4	1,5
Gorontalo	18,3	14,8	21,3	22,1	0,5	18,6	–	4,4
Sulawesi Barat	24,0	18,3	10,9	26,3	1,7	16,4	1,2	1,2
Maluku	20,6	7,3	14,5	31,9	4,1	13,9	–	7,7
Maluku Utara	15,9	12,2	25,0	28,6	1,6	13,4	0,9	2,4
Papua Barat	14,9	10,5	12,9	38,5	1,3	21,9	–	–
Papua Barat Daya	12,2	8,6	23,6	26,4	2,1	27,2	–	–
Papua	11,2	13,2	22,6	32,0	1,8	12,0	–	7,2
Papua Selatan	14,4	5,3	13,4	35,1	7,6	14,2	–	9,9
Papua Tengah	53,1	9,8	–	16,9	8,2	11,9	–	–
Papua Pegunungan	52,5	9,5	4,8	25,7	5,5	2,0	–	–
Indonesia	16,7	15,6	17,1	34,8	3,1	11,4	0,1	1,1

Lanjutan Lampiran 9

Provinsi	Nonmigran							
	Tidak Punya Ijazah SD	SD/MI/ Sederajat	SMP/MTs/ Sederajat	SMA/MA/ Sederajat	Diploma I/ II/III	Diploma IV/S1	Profesi	S2/S3
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Aceh	23,4	19,3	19,5	27,5	2,3	7,7	~0	0,4
Sumatera Utara	22,3	17,4	18,3	33,0	1,8	6,7	~0	0,3
Sumatera Barat	26,0	19,0	17,7	27,3	2,2	7,3	0,1	0,5
Riau	22,7	22,5	19,5	27,1	1,3	6,5	~0	0,3
Jambi	22,8	24,4	20,1	24,5	1,4	6,3	0,1	0,4
Sumatera Selatan	24,4	26,8	16,7	25,3	1,5	4,8	~0	0,3
Bengkulu	24,4	22,5	18,0	24,4	1,6	8,5	0,1	0,5
Lampung	25,4	23,3	22,1	23,2	1,2	4,7	~0	0,2
Kep. Bangka Belitung	27,6	24,7	14,5	26,0	1,8	5,2	0,1	0,2
Kepulauan Riau	20,7	17,2	15,6	35,9	1,9	8,4	0,1	0,3
DKI Jakarta	16,1	11,8	15,5	41,3	3,2	10,9	~0	1,1
Jawa Barat	20,4	27,5	19,8	25,1	1,5	5,4	~0	0,3
Jawa Tengah	25,3	26,0	20,6	21,5	1,3	5,0	~0	0,2
DI Yogyakarta	23,2	15,2	17,4	31,0	2,7	9,4	0,1	1,1
Jawa Timur	24,9	24,7	18,9	23,6	1,1	6,4	~0	0,4
Banten	21,1	24,7	19,0	28,1	1,4	5,1	0,1	0,5
Bali	21,6	20,0	17,1	27,6	4,2	8,4	0,2	0,9
Nusa Tenggara Barat	29,9	22,8	18,6	21,2	1,2	5,9	0,1	0,3
Nusa Tenggara Timur	31,6	27,3	17,0	16,3	1,6	5,9	~0	0,2
Kalimantan Barat	29,9	25,1	17,4	21,0	1,6	4,7	~0	0,3
Kalimantan Tengah	22,0	27,2	22,2	20,1	1,4	6,8	~0	0,4
Kalimantan Selatan	25,8	26,0	17,8	22,0	1,3	6,6	0,1	0,3
Kalimantan Timur	20,8	19,4	17,6	31,8	2,5	7,3	~0	0,5
Kalimantan Utara	23,0	22,5	20,2	25,3	1,3	7,3	0,1	0,3
Sulawesi Utara	21,1	18,2	20,0	30,9	1,3	7,9	0,1	0,5
Sulawesi Tengah	22,3	28,0	20,7	19,3	1,5	7,9	0,1	0,4
Sulawesi Selatan	26,7	21,4	16,9	24,7	1,6	7,9	0,1	0,7
Sulawesi Tenggara	25,0	21,4	21,4	20,1	1,6	9,6	0,1	0,7
Gorontalo	32,8	22,4	16,9	17,8	1,5	8,0	0,1	0,5
Sulawesi Barat	31,8	24,6	14,3	19,4	1,4	7,9	0,1	0,4
Maluku	21,3	20,1	18,5	29,0	1,7	8,7	0,1	0,6
Maluku Utara	23,7	23,8	19,4	23,6	1,7	7,4	~0	0,4
Papua Barat	27,3	19,2	17,8	25,3	1,9	8,1	~0	0,4
Papua Barat Daya	23,6	17,9	15,4	31,0	1,4	10,3	0,1	0,3
Papua	21,3	15,9	16,8	32,3	2,1	10,4	0,1	1,1
Papua Selatan	35,8	16,3	16,3	23,6	1,4	6,3	0,1	0,3
Papua Tengah	49,6	16,0	12,2	16,9	1,0	4,3	0,1	0,1
Papua Pegunungan	55,5	16,2	13,3	12,3	0,8	2,0	–	~0
Indonesia	23,8	23,6	18,9	25,4	1,6	6,3	~0	0,4

Lampiran 10

Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Provinsi, Status Migrasi Risen Antarprovinsi, dan Kemampuan Membaca dan Menulis, 2024

Provinsi	Migran					
	Dapat Membaca dan Menulis Huruf Latin	Tidak Dapat Membaca dan Menulis Huruf Latin	Dapat Membaca dan Menulis Huruf Arab	Tidak Dapat Membaca dan Menulis Huruf Arab	Dapat Membaca dan Menulis Huruf Lainnya	Tidak Dapat Membaca dan Menulis Huruf Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	95,7	4,3	66,1	33,9	5,4	94,6
Sumatera Utara	95,7	4,3	34,3	65,7	3,8	96,2
Sumatera Barat	97,4	2,6	31,2	68,8	2,8	97,2
Riau	92,2	7,8	62,0	38,0	4,8	95,2
Jambi	99,5	0,5	44,9	55,1	6,7	93,3
Sumatera Selatan	97,1	2,9	57,5	42,5	0,9	99,1
Bengkulu	98,7	1,3	35,4	64,6	11,2	88,8
Lampung	98,3	1,7	43,6	56,4	10,1	89,9
Kep. Bangka Belitung	97,5	2,5	36,3	63,7	20,0	80,0
Kepulauan Riau	98,2	1,8	54,1	45,9	13,5	86,5
DKI Jakarta	97,3	2,7	72,4	27,6	1,3	98,7
Jawa Barat	98,0	2,0	68,1	31,9	5,3	94,7
Jawa Tengah	96,8	3,2	57,7	42,3	15,0	85,0
DI Yogyakarta	99,7	0,3	56,0	44,0	23,0	77,0
Jawa Timur	95,9	4,1	60,8	39,2	15,4	84,6
Banten	99,7	0,3	63,0	37,0	3,9	96,1
Bali	97,8	2,2	43,0	57,0	34,9	65,1
Nusa Tenggara Barat	97,1	2,9	42,6	57,4	8,6	91,4
Nusa Tenggara Timur	96,3	3,7	9,8	90,2	1,4	98,6
Kalimantan Barat	98,3	1,7	37,7	62,3	3,9	96,1
Kalimantan Tengah	97,4	2,6	50,4	49,6	10,8	89,2
Kalimantan Selatan	95,0	5,0	38,7	61,3	25,4	74,6
Kalimantan Timur	97,9	2,1	46,1	53,9	9,1	90,9
Kalimantan Utara	96,3	3,7	32,6	67,4	2,8	97,2
Sulawesi Utara	96,0	4,0	28,6	71,4	3,2	96,8
Sulawesi Tengah	97,9	2,1	45,7	54,3	0,8	99,2
Sulawesi Selatan	96,6	3,4	34,9	65,1	16,9	83,1
Sulawesi Tenggara	95,4	4,6	17,2	82,8	4,4	95,6
Gorontalo	98,0	2,0	42,3	57,7	15,8	84,2
Sulawesi Barat	95,7	4,3	30,2	69,8	0,8	99,2
Maluku	96,0	4,0	23,9	76,1	3,3	96,7
Maluku Utara	94,6	5,4	32,0	68,0	3,4	96,6
Papua Barat	95,2	4,8	27,4	72,6	2,3	97,7
Papua Barat Daya	97,8	2,2	1,4	98,6	6,4	93,6
Papua	96,8	3,2	18,3	81,7	7,6	92,4
Papua Selatan	97,4	2,6	30,7	69,3	1,2	98,8
Papua Tengah	99,8	0,2	9,5	90,5	3,8	96,2
Papua Pegunungan	67,1	32,9	–	100,0	–	100,0
Indonesia	97,1	2,9	52,2	47,8	9,9	90,1

Lanjutan Lampiran 10

Provinsi	Nonmigran					
	Dapat Membaca dan Menulis Huruf Latin	Tidak Dapat Membaca dan Menulis Huruf Latin	Dapat Membaca dan Menulis Huruf Arab	Tidak Dapat Membaca dan Menulis Huruf Arab	Dapat Membaca dan Menulis Huruf Lainnya	Tidak Dapat Membaca dan Menulis Huruf Lainnya
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	95,8	4,2	60,5	39,5	5,9	94,1
Sumatera Utara	97,4	2,6	49,5	50,5	5,6	94,4
Sumatera Barat	96,9	3,1	36,5	63,5	1,4	98,6
Riau	97,4	2,6	71,2	28,8	6,8	93,2
Jambi	96,0	4,0	54,2	45,8	4,5	95,5
Sumatera Selatan	97,3	2,7	52,1	47,9	2,9	97,1
Bengkulu	96,5	3,5	31,6	68,4	2,6	97,4
Lampung	95,6	4,4	42,2	57,8	11,3	88,7
Kep. Bangka Belitung	96,7	3,3	41,0	59,0	3,4	96,6
Kepulauan Riau	97,2	2,8	54,5	45,5	9,2	90,8
DKI Jakarta	98,4	1,6	62,9	37,1	7,4	92,6
Jawa Barat	97,0	3,0	70,0	30,0	3,6	96,4
Jawa Tengah	93,6	6,4	59,1	40,9	18,4	81,6
DI Yogyakarta	94,3	5,7	48,1	51,9	20,5	79,5
Jawa Timur	93,2	6,8	62,6	37,4	18,3	81,7
Banten	96,9	3,1	64,1	35,9	4,1	95,9
Bali	94,9	5,1	8,5	91,5	54,5	45,5
Nusa Tenggara Barat	88,8	11,2	39,0	61,0	3,3	96,7
Nusa Tenggara Timur	93,8	6,2	4,7	95,3	0,9	99,1
Kalimantan Barat	93,6	6,4	22,1	77,9	3,0	97,0
Kalimantan Tengah	97,4	2,6	47,7	52,3	5,0	95,0
Kalimantan Selatan	96,5	3,5	49,5	50,5	2,8	97,2
Kalimantan Timur	97,3	2,7	27,0	73,0	3,7	96,3
Kalimantan Utara	95,7	4,3	25,1	74,9	4,1	95,9
Sulawesi Utara	98,4	1,6	16,8	83,2	2,0	98,0
Sulawesi Tengah	96,1	3,9	46,0	54,0	3,8	96,2
Sulawesi Selatan	92,3	7,7	42,5	57,5	22,0	78,0
Sulawesi Tenggara	94,1	5,9	24,7	75,3	2,5	97,5
Gorontalo	96,8	3,2	45,2	54,8	1,8	98,2
Sulawesi Barat	92,7	7,3	26,3	73,7	2,0	98,0
Maluku	97,6	2,4	29,0	71,0	2,4	97,6
Maluku Utara	96,7	3,3	31,3	68,7	1,9	98,1
Papua Barat	95,4	4,6	19,2	80,8	3,9	96,1
Papua Barat Daya	95,2	4,8	16,4	83,6	4,2	95,8
Papua	96,9	3,1	12,7	87,3	3,4	96,6
Papua Selatan	88,6	11,4	12,7	87,3	1,5	98,5
Papua Tengah	83,5	16,5	6,1	93,9	1,3	98,7
Papua Pegunungan	70,4	29,6	0,3	99,7	0,2	99,8
Indonesia	95,2	4,8	53,4	46,6	9,8	90,2

Lampiran 11

Persentase Penduduk 5 Tahun ke Atas Menurut Provinsi, Status Migrasi Risen Antarprovinsi, dan Status Keluhan Kesehatan Selama 1 Bulan Terakhir, 2024

Provinsi	Migran			Jumlah
	Tidak Mengalami Keluhan Kesehatan	Mengalami Keluhan Kesehatan yang Mengganggu Kegiatan Sehari-hari	Mengalami Keluhan Kesehatan namun Tidak Mengganggu Kegiatan Sehari-hari	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	86,6	11,1	2,3	100,0
Sumatera Utara	76,0	13,5	10,4	100,0
Sumatera Barat	71,3	12,7	16,0	100,0
Riau	78,3	10,6	11,1	100,0
Jambi	84,8	9,7	5,5	100,0
Sumatera Selatan	77,6	4,5	17,9	100,0
Bengkulu	64,4	19,8	15,8	100,0
Lampung	76,5	11,0	12,5	100,0
Kep. Bangka Belitung	77,1	7,2	15,6	100,0
Kepulauan Riau	74,9	9,4	15,6	100,0
DKI Jakarta	78,1	8,2	13,7	100,0
Jawa Barat	73,9	8,4	17,6	100,0
Jawa Tengah	68,7	12,1	19,2	100,0
DI Yogyakarta	74,3	10,3	15,4	100,0
Jawa Timur	78,1	8,2	13,8	100,0
Banten	80,8	7,7	11,5	100,0
Bali	81,2	4,8	14,0	100,0
Nusa Tenggara Barat	56,9	22,7	20,4	100,0
Nusa Tenggara Timur	65,7	15,2	19,1	100,0
Kalimantan Barat	78,1	7,0	14,8	100,0
Kalimantan Tengah	85,9	8,0	6,1	100,0
Kalimantan Selatan	75,6	6,5	17,9	100,0
Kalimantan Timur	85,2	5,4	9,4	100,0
Kalimantan Utara	81,1	13,6	5,3	100,0
Sulawesi Utara	66,7	12,5	20,8	100,0
Sulawesi Tengah	82,9	9,3	7,8	100,0
Sulawesi Selatan	80,0	8,3	11,7	100,0
Sulawesi Tenggara	84,2	5,0	10,9	100,0
Gorontalo	73,6	10,3	16,1	100,0
Sulawesi Barat	80,4	5,2	14,4	100,0
Maluku	84,9	11,3	3,8	100,0
Maluku Utara	85,5	7,5	7,0	100,0
Papua Barat	91,5	3,1	5,4	100,0
Papua Barat Daya	80,6	5,8	13,6	100,0
Papua	93,9	5,6	0,5	100,0
Papua Selatan	74,0	5,8	20,2	100,0
Papua Tengah	81,4	2,1	16,5	100,0
Papua Pegunungan	92,7	6,4	0,8	100,0
Indonesia	74,7	10,1	15,1	100,0

Lanjutan Lampiran 11

Provinsi	Nonmigran			Jumlah
	Tidak Mengalami Keluhan Kesehatan	Mengalami Keluhan Kesehatan yang Mengganggu Kegiatan Sehari-hari	Mengalami Keluhan Kesehatan namun Tidak Mengganggu Kegiatan Sehari-hari	
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	75,9	12,6	11,5	100,0
Sumatera Utara	77,1	9,4	13,5	100,0
Sumatera Barat	70,8	14,8	14,4	100,0
Riau	77,1	9,8	13,0	100,0
Jambi	77,1	9,5	13,4	100,0
Sumatera Selatan	71,1	9,8	19,1	100,0
Bengkulu	72,9	12,1	15,1	100,0
Lampung	71,5	12,0	16,6	100,0
Kep. Bangka Belitung	72,5	9,4	18,1	100,0
Kepulauan Riau	75,2	9,4	15,4	100,0
DKI Jakarta	77,3	8,3	14,5	100,0
Jawa Barat	72,1	13,3	14,5	100,0
Jawa Tengah	69,3	13,0	17,6	100,0
DI Yogyakarta	72,2	11,7	16,1	100,0
Jawa Timur	72,2	11,4	16,4	100,0
Banten	75,5	10,1	14,3	100,0
Bali	81,7	9,9	8,4	100,0
Nusa Tenggara Barat	62,3	18,5	19,2	100,0
Nusa Tenggara Timur	71,7	12,6	15,7	100,0
Kalimantan Barat	76,5	9,5	13,9	100,0
Kalimantan Tengah	79,1	7,4	13,5	100,0
Kalimantan Selatan	72,0	9,7	18,3	100,0
Kalimantan Timur	80,7	8,0	11,3	100,0
Kalimantan Utara	80,9	8,4	10,7	100,0
Sulawesi Utara	77,3	11,1	11,6	100,0
Sulawesi Tengah	78,2	11,1	10,6	100,0
Sulawesi Selatan	77,4	9,6	13,0	100,0
Sulawesi Tenggara	79,8	10,1	10,1	100,0
Gorontalo	66,6	16,3	17,1	100,0
Sulawesi Barat	77,4	10,5	12,1	100,0
Maluku	86,5	6,2	7,2	100,0
Maluku Utara	87,2	7,2	5,6	100,0
Papua Barat	86,6	5,6	7,8	100,0
Papua Barat Daya	83,8	7,4	8,8	100,0
Papua	86,1	7,3	6,5	100,0
Papua Selatan	79,2	9,9	10,9	100,0
Papua Tengah	89,6	3,3	7,1	100,0
Papua Pegunungan	91,3	3,6	5,0	100,0
Indonesia	73,7	11,4	14,9	100,0

Lampiran 12

Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Provinsi, Status Migrasi Risen Antarprovinsi, dan Fasilitas Pengobatan, 2024

Provinsi	Migran								
	Persentase Migran Risen yang Berobat Jalan	Fasilitas Pengobatan							
		RS Pemerintah	RS Swasta	Praktik Dokter/ Bidan	Klinik/ Praktik Dokter Bersama	Puskesmas/ Pustu	UKBM ¹	Praktek Pengobatan Tradisional	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	74,4	17,3	1,0	3,5	30,2	58,6	1,2	–	–
Sumatera Utara	44,8	5,4	7,6	48,2	17,3	15,1	4,7	4,9	–
Sumatera Barat	46,4	4,9	2,1	48,9	14,7	28,5	0,3	1,7	0,7
Riau	45,7	7,6	20,2	44,0	24,7	3,5	–	6,7	–
Jambi	47,2	–	4,1	44,8	33,7	17,5	–	–	–
Sumatera Selatan	22,7	–	–	92,7	5,4	1,8	–	–	–
Bengkulu	33,7	15,7	–	64,5	–	18,1	–	4,0	–
Lampung	49,7	2,6	4,8	61,4	13,3	19,7	–	–	0,1
Kep. Bangka Belitung	26,8	7,8	32,0	19,7	13,3	50,8	–	–	–
Kepulauan Riau	47,1	12,4	–	6,7	50,2	25,6	–	–	5,4
DKI Jakarta	48,1	29,1	4,1	–	30,2	36,6	–	–	–
Jawa Barat	38,9	12,8	18,7	29,8	28,2	10,5	–	–	–
Jawa Tengah	33,0	3,5	18,6	40,4	14,1	27,9	1,8	–	–
DI Yogyakarta	39,9	22,3	17,0	24,0	3,9	34,1	–	–	2,6
Jawa Timur	34,6	9,9	20,1	39,9	14,7	15,9	–	9,3	2,7
Banten	77,0	–	6,9	10,7	51,3	36,5	–	–	–
Bali	34,0	21,6	–	46,8	17,4	9,9	25,9	–	–
Nusa Tenggara Barat	36,1	–	8,0	30,9	20,4	34,6	–	16,4	5,6
Nusa Tenggara Timur	27,9	19,5	9,8	6,2	23,3	57,4	5,7	–	0,8
Kalimantan Barat	37,8	25,4	–	29,8	17,0	31,5	–	–	–
Kalimantan Tengah	15,3	29,2	–	6,7	18,2	13,1	–	–	40,2
Kalimantan Selatan	22,2	12,5	–	23,4	39,3	14,6	13,8	23,4	–
Kalimantan Timur	38,2	23,6	–	21,1	27,1	45,4	–	–	–
Kalimantan Utara	44,6	27,1	–	67,1	–	11,8	–	–	–
Sulawesi Utara	21,9	6,3	32,5	12,9	28,5	19,8	–	–	–
Sulawesi Tengah	28,4	6,1	–	76,6	12,3	11,2	–	–	–
Sulawesi Selatan	36,0	30,5	–	5,6	20,1	29,1	–	11,2	3,8
Sulawesi Tenggara	17,0	–	–	9,6	–	90,4	–	–	–
Gorontalo	18,4	9,5	–	40,7	44,0	15,3	–	–	–
Sulawesi Barat	36,6	–	–	44,7	2,7	28,7	24,0	–	–
Maluku	28,8	9,9	–	–	80,2	9,8	–	–	–
Maluku Utara	15,2	18,8	–	–	52,7	28,6	–	–	–
Papua Barat	42,0	78,0	–	–	–	22,0	–	–	–
Papua Barat Daya	47,4	–	–	5,8	14,4	85,5	–	–	–
Papua	31,3	100,0	22,7	–	–	77,3	–	–	–
Papua Selatan	45,8	91,7	–	–	–	8,3	–	–	–
Papua Tengah	48,5	–	–	–	–	100,0	–	–	–
Papua Pegunungan	88,7	100,0	100,0	–	–	–	–	100,0	–
Indonesia	38,3	10,9	11,5	30,7	22,1	25,5	1,1	2,6	1,1

Catatan: ¹ UKBM terdiri dari Poskesdes, Polindes, Posyandu, Balai Pengobatan

Lanjutan Lampiran 12

Provinsi	Nonmigran								
	Persentase Nonmigran Risen yang Berobat Jalan	Fasilitas Pengobatan							
		RS Pemerintah	RS Swasta	Praktik Dokter/ Bidan	Klinik/ Praktik Dokter Bersama	Puskesmas/ Pustu	UKBM ¹	Praktek Pengobatan Tradisional	Lainnya
(1)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Aceh	49,5	17,1	4,1	28,0	15,1	45,3	2,8	1,6	1,1
Sumatera Utara	34,5	9,6	10,4	42,9	14,4	23,7	1,2	2,7	0,9
Sumatera Barat	50,0	11,7	6,3	37,4	12,2	31,2	3,5	2,5	0,0
Riau	32,7	9,6	14,5	24,8	26,2	25,4	2,7	1,8	0,9
Jambi	32,4	9,8	5,6	42,4	12,6	30,2	0,7	1,9	2,4
Sumatera Selatan	28,8	8,6	6,6	47,2	13,6	19,5	5,7	2,8	1,3
Bengkulu	33,7	8,4	7,2	46,5	8,8	28,5	1,3	1,6	1,7
Lampung	34,6	4,6	7,8	48,9	14,9	25,0	0,8	2,1	0,9
Kep. Bangka Belitung	34,6	16,6	6,8	31,9	13,0	29,5	4,7	2,7	1,4
Kepulauan Riau	32,7	14,1	14,3	11,8	33,5	26,7	2,3	0,9	1,3
DKI Jakarta	41,3	20,2	14,3	3,0	28,7	36,9	0,3	1,2	0,6
Jawa Barat	40,6	8,0	10,8	26,8	29,8	26,2	1,0	1,3	1,4
Jawa Tengah	38,5	8,8	11,5	40,4	16,2	24,3	2,4	1,4	1,0
DI Yogyakarta	46,1	11,4	19,0	24,4	17,2	33,8	0,7	0,8	0,6
Jawa Timur	37,6	9,9	9,5	46,0	12,7	20,8	3,2	1,9	1,6
Banten	36,6	7,3	10,9	20,1	39,3	26,1	0,9	1,9	0,3
Bali	60,4	10,9	11,2	51,2	12,2	16,6	0,5	1,1	0,3
Nusa Tenggara Barat	38,4	8,9	3,2	37,8	12,8	36,8	5,4	3,8	2,9
Nusa Tenggara Timur	31,2	8,8	4,4	11,9	9,6	60,4	9,3	1,2	0,7
Kalimantan Barat	27,2	11,7	4,3	29,4	13,8	38,8	5,2	2,1	0,3
Kalimantan Tengah	19,6	20,2	4,2	26,7	9,7	36,0	5,6	1,9	0,9
Kalimantan Selatan	21,9	19,6	4,9	25,9	10,7	36,4	5,8	2,3	0,9
Kalimantan Timur	38,6	13,0	16,4	12,7	22,2	37,7	3,4	0,8	0,6
Kalimantan Utara	36,7	22,4	3,3	14,9	12,9	49,4	0,8	0,5	–
Sulawesi Utara	41,2	13,0	10,0	29,6	10,4	40,8	1,0	0,3	0,7
Sulawesi Tengah	24,8	15,4	2,7	26,0	4,3	47,0	7,2	1,3	1,4
Sulawesi Selatan	29,3	16,2	5,7	18,2	12,8	47,2	2,7	1,0	1,0
Sulawesi Tenggara	25,6	17,3	4,8	14,3	8,1	55,9	2,3	1,9	0,9
Gorontalo	35,6	8,4	0,6	35,4	16,4	39,4	0,8	0,3	2,8
Sulawesi Barat	27,9	13,0	1,4	15,4	7,8	62,2	2,7	2,2	1,7
Maluku	27,6	11,4	4,6	16,5	6,9	59,2	4,7	1,1	1,1
Maluku Utara	31,0	15,3	0,7	14,6	5,1	55,5	9,9	1,3	1,1
Papua Barat	26,8	19,9	2,2	11,3	8,2	64,5	0,7	0,0	0,1
Papua Barat Daya	37,5	16,1	4,4	5,9	14,7	61,0	0,8	0,9	0,6
Papua	42,6	16,5	6,1	8,1	10,1	61,1	1,5	0,5	0,6
Papua Selatan	38,5	18,3	3,9	2,2	5,8	67,1	5,0	–	0,6
Papua Tengah	23,1	29,8	2,3	5,7	18,1	49,0	0,4	0,3	0,2
Papua Pegunungan	26,7	4,2	–	0,4	0,3	92,7	2,5	0,4	–
Indonesia	37,2	10,2	9,6	33,1	19,2	28,6	2,4	1,7	1,1

Catatan: ¹ UKBM terdiri dari Poskesdes, Polindes, Posyandu, Balai Pengobatan

Lampiran 13
 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Pernah Kawin Menurut Provinsi, Status Migrasi Risen Antarprovinsi, Jenis Kelamin, dan Umur Kawin Pertama, 2024

Laki-laki										
Provinsi	Migran					Nonmigran				
	10-15	16-18	19-24	25+	Jumlah	10-15	16-18	19-24	25+	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aceh	–	0,3	19,7	80,0	100,0	0,2	1,7	29,0	69,2	100,0
Sumatera Utara	0,1	1,4	32,8	65,8	100,0	0,2	2,7	41,0	56,1	100,0
Sumatera Barat	–	0,5	26,9	72,6	100,0	0,2	2,8	35,3	61,7	100,0
Riau	–	3,4	37,4	59,2	100,0	0,3	2,6	41,3	55,8	100,0
Jambi	–	2,0	34,8	63,1	100,0	0,6	5,4	45,6	48,4	100,0
Sumatera Selatan	2,1	0,5	56,4	41,1	100,0	0,7	6,2	47,1	46,0	100,0
Bengkulu	–	6,4	36,2	57,3	100,0	0,7	7,1	48,7	43,5	100,0
Lampung	8,5	–	30,1	61,3	100,0	0,5	3,4	46,2	49,9	100,0
Kep. Bangka Belitung	–	5,5	42,9	51,5	100,0	0,4	5,8	46,9	46,9	100,0
Kepulauan Riau	–	–	26,7	73,3	100,0	~0	1,7	33,7	64,5	100,0
DKI Jakarta	0,5	–	30,5	69,0	100,0	0,3	1,7	29,0	69,0	100,0
Jawa Barat	–	0,4	32,5	67,1	100,0	1,0	6,0	47,2	45,8	100,0
Jawa Tengah	0,2	2,7	42,7	54,3	100,0	0,6	4,4	46,8	48,2	100,0
DI Yogyakarta	–	3,8	35,3	60,9	100,0	0,2	2,6	39,0	58,2	100,0
Jawa Timur	2,2	6,1	33,8	57,9	100,0	1,0	5,4	45,5	48,2	100,0
Banten	–	–	41,9	58,1	100,0	0,6	3,6	42,8	53,0	100,0
Bali	–	–	49,0	51,0	100,0	0,2	3,9	43,2	52,7	100,0
Nusa Tenggara Barat	0,2	6,7	55,4	37,8	100,0	1,0	8,3	48,7	42,0	100,0
Nusa Tenggara Timur	–	1,9	35,5	62,7	100,0	0,2	2,6	37,8	59,3	100,0
Kalimantan Barat	–	12,4	37,2	50,4	100,0	0,5	5,6	45,1	48,8	100,0
Kalimantan Tengah	1,5	5,8	43,9	48,8	100,0	0,6	6,6	47,5	45,3	100,0
Kalimantan Selatan	–	14,9	18,5	66,5	100,0	0,7	6,1	47,7	45,5	100,0
Kalimantan Timur	–	0,2	43,1	56,7	100,0	0,2	4,0	41,1	54,7	100,0
Kalimantan Utara	–	1,0	35,1	63,9	100,0	0,3	3,7	35,8	60,1	100,0
Sulawesi Utara	–	0,5	30,0	69,5	100,0	0,2	5,1	47,0	47,6	100,0
Sulawesi Tengah	3,9	4,8	44,0	47,3	100,0	0,7	6,1	46,8	46,4	100,0
Sulawesi Selatan	1,2	8,9	40,6	49,3	100,0	1,1	6,9	41,9	50,1	100,0
Sulawesi Tenggara	–	10,5	44,1	45,4	100,0	0,8	6,0	46,6	46,6	100,0
Gorontalo	–	2,2	50,8	47,0	100,0	1,1	7,9	51,0	40,0	100,0
Sulawesi Barat	–	1,7	47,0	51,3	100,0	1,4	7,2	44,6	46,8	100,0
Maluku	–	–	39,7	60,3	100,0	0,2	4,1	42,9	52,7	100,0
Maluku Utara	–	1,8	43,6	54,7	100,0	0,3	5,8	48,1	45,8	100,0
Papua Barat	5,3	2,2	37,8	54,8	100,0	1,2	7,5	42,3	49,1	100,0
Papua Barat Daya	–	3,3	22,9	73,8	100,0	0,8	4,4	40,1	54,7	100,0
Papua	–	–	29,2	70,8	100,0	0,2	4,0	35,5	60,3	100,0
Papua Selatan	6,9	11,9	38,4	42,9	100,0	1,0	6,9	42,6	49,4	100,0
Papua Tengah	–	–	61,5	38,5	100,0	1,9	7,5	45,1	45,4	100,0
Papua Pegunungan	–	14,7	27,6	57,7	100,0	0,5	5,7	55,6	38,2	100,0
Indonesia	0,7	3,0	37,8	58,5	100,0	0,7	4,8	44,2	50,4	100,0

Lanjutan Lampiran 13

Perempuan

Provinsi	Migran					Nonmigran				
	10-15	16-18	19-24	25+	Jumlah	10-15	16-18	19-24	25+	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aceh	0,9	4,5	52,6	42,0	100,0	4,2	20,5	53,5	21,8	100,0
Sumatera Utara	1,3	6,5	42,1	50,1	100,0	2,0	15,5	57,3	25,2	100,0
Sumatera Barat	1,9	4,5	59,7	34,0	100,0	3,7	18,0	55,5	22,8	100,0
Riau	2,1	17,2	45,8	34,9	100,0	4,2	20,7	54,7	20,3	100,0
Jambi	7,1	17,3	53,6	22,0	100,0	8,8	28,7	48,6	13,9	100,0
Sumatera Selatan	5,4	16,6	64,4	13,6	100,0	7,0	26,0	51,0	16,1	100,0
Bengkulu	4,6	17,6	47,4	30,3	100,0	7,6	29,6	49,4	13,4	100,0
Lampung	3,7	10,2	62,7	23,5	100,0	6,6	27,0	53,9	12,5	100,0
Kep. Bangka Belitung	3,7	7,7	73,7	15,0	100,0	6,1	26,0	52,3	15,7	100,0
Kepulauan Riau	1,6	17,6	50,8	30,0	100,0	1,9	12,2	55,3	30,5	100,0
DKI Jakarta	1,2	18,0	43,9	36,9	100,0	3,3	12,3	51,5	33,0	100,0
Jawa Barat	3,9	11,5	51,6	32,9	100,0	12,1	28,9	46,6	12,4	100,0
Jawa Tengah	1,7	15,6	56,6	26,1	100,0	8,6	28,8	48,8	13,8	100,0
DI Yogyakarta	1,4	10,8	45,4	42,4	100,0	3,3	15,7	55,7	25,4	100,0
Jawa Timur	2,7	17,3	51,8	28,2	100,0	11,5	28,9	46,4	13,2	100,0
Banten	–	3,1	53,9	42,9	100,0	7,9	23,1	51,1	18,0	100,0
Bali	10,8	25,1	36,0	28,1	100,0	2,6	16,2	56,9	24,3	100,0
Nusa Tenggara Barat	4,5	9,9	59,9	25,8	100,0	7,6	29,3	48,2	14,9	100,0
Nusa Tenggara Timur	3,2	6,4	55,5	34,9	100,0	1,6	15,1	53,7	29,7	100,0
Kalimantan Barat	5,4	12,2	51,1	31,3	100,0	5,9	26,2	49,9	18,0	100,0
Kalimantan Tengah	11,7	21,1	41,3	25,9	100,0	10,8	28,8	46,9	13,5	100,0
Kalimantan Selatan	30,8	11,7	41,2	16,4	100,0	12,5	29,3	45,0	13,3	100,0
Kalimantan Timur	3,6	6,5	55,0	34,9	100,0	5,6	24,0	51,5	19,0	100,0
Kalimantan Utara	7,6	15,4	34,0	43,1	100,0	7,7	22,7	49,6	20,0	100,0
Sulawesi Utara	3,2	12,8	41,4	42,7	100,0	2,7	22,7	53,1	21,5	100,0
Sulawesi Tengah	1,5	17,8	57,2	23,4	100,0	7,2	25,8	48,5	18,5	100,0
Sulawesi Selatan	6,8	13,6	43,4	36,2	100,0	9,2	23,3	44,6	22,9	100,0
Sulawesi Tenggara	10,5	21,9	42,1	25,4	100,0	8,0	27,3	46,9	17,8	100,0
Gorontalo	12,2	31,6	44,9	11,3	100,0	7,1	25,5	51,4	16,0	100,0
Sulawesi Barat	2,5	10,4	52,0	35,1	100,0	8,6	25,8	47,4	18,2	100,0
Maluku	–	8,1	61,0	30,8	100,0	2,9	15,4	52,8	28,9	100,0
Maluku Utara	–	21,4	52,2	26,4	100,0	4,0	23,4	51,3	21,3	100,0
Papua Barat	0,2	28,7	41,1	30,0	100,0	6,3	20,8	51,4	21,5	100,0
Papua Barat Daya	0,6	8,9	40,9	49,7	100,0	5,7	19,3	50,3	24,7	100,0
Papua	–	10,8	74,1	15,0	100,0	2,8	15,9	50,9	30,5	100,0
Papua Selatan	10,8	3,0	48,3	37,9	100,0	8,4	24,9	47,8	18,9	100,0
Papua Tengah	–	12,0	61,5	26,4	100,0	6,1	20,5	50,4	23,0	100,0
Papua Pegunungan	–	14,2	38,8	47,0	100,0	2,8	22,8	58,9	15,5	100,0
Indonesia	3,4	13,4	52,0	31,2	100,0	8,2	25,2	49,6	17,1	100,0

Lanjutan Lampiran 13

Laki-laki + Perempuan

Provinsi	Migran					Nonmigran				
	10-15	16-18	19-24	25+	Jumlah	10-15	16-18	19-24	25+	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aceh	0,4	2,3	35,7	61,5	100,0	2,4	11,9	42,4	43,3	100,0
Sumatera Utara	0,7	4,0	37,7	57,5	100,0	1,2	9,5	49,7	39,6	100,0
Sumatera Barat	1,0	2,6	44,1	52,3	100,0	2,1	11,0	46,2	40,6	100,0
Riau	1,2	11,3	42,2	45,4	100,0	2,3	12,1	48,4	37,2	100,0
Jambi	3,7	10,0	44,7	41,6	100,0	5,0	17,7	47,2	30,2	100,0
Sumatera Selatan	3,9	9,3	60,8	26,1	100,0	4,0	16,6	49,1	30,2	100,0
Bengkulu	2,6	12,7	42,6	42,1	100,0	4,3	18,9	49,1	27,8	100,0
Lampung	5,7	5,9	48,9	39,5	100,0	3,7	15,7	50,2	30,4	100,0
Kep. Bangka Belitung	1,7	6,6	57,6	34,1	100,0	3,3	16,3	49,7	30,6	100,0
Kepulauan Riau	1,0	10,8	41,4	46,9	100,0	1,0	7,2	44,9	46,9	100,0
DKI Jakarta	0,9	10,3	38,1	50,7	100,0	1,9	7,3	41,1	49,7	100,0
Jawa Barat	2,1	6,4	42,7	48,8	100,0	6,9	18,1	46,9	28,1	100,0
Jawa Tengah	0,8	8,2	48,6	42,4	100,0	5,0	17,7	47,9	29,5	100,0
DI Yogyakarta	0,8	7,7	41,0	50,5	100,0	1,9	9,6	48,0	40,5	100,0
Jawa Timur	2,5	11,8	42,9	42,9	100,0	6,7	18,1	46,0	29,2	100,0
Banten	–	1,8	48,8	49,4	100,0	4,4	13,9	47,1	34,6	100,0
Bali	5,2	12,2	42,7	39,9	100,0	1,5	10,3	50,4	37,8	100,0
Nusa Tenggara Barat	1,3	7,5	56,5	34,7	100,0	4,6	19,7	48,5	27,2	100,0
Nusa Tenggara Timur	1,5	4,0	44,8	49,8	100,0	1,0	9,4	46,4	43,2	100,0
Kalimantan Barat	2,9	12,3	44,6	40,3	100,0	3,4	16,5	47,6	32,5	100,0
Kalimantan Tengah	6,9	14,0	42,5	36,6	100,0	5,9	18,0	47,2	28,9	100,0
Kalimantan Selatan	15,8	13,3	30,2	40,8	100,0	7,0	18,4	46,2	28,3	100,0
Kalimantan Timur	2,3	4,2	50,6	42,9	100,0	3,0	14,4	46,5	36,2	100,0
Kalimantan Utara	3,4	7,5	34,6	54,5	100,0	4,1	13,5	42,9	39,4	100,0
Sulawesi Utara	1,7	7,0	36,0	55,3	100,0	1,5	14,4	50,2	33,9	100,0
Sulawesi Tengah	2,6	11,7	51,1	34,6	100,0	4,1	16,4	47,6	31,8	100,0
Sulawesi Selatan	4,2	11,4	42,1	42,4	100,0	5,5	15,8	43,4	35,4	100,0
Sulawesi Tenggara	5,4	16,3	43,1	35,2	100,0	4,6	17,5	46,8	31,1	100,0
Gorontalo	5,1	14,3	48,3	32,3	100,0	4,2	17,2	51,2	27,4	100,0
Sulawesi Barat	1,4	6,6	49,8	42,1	100,0	5,2	17,0	46,1	31,7	100,0
Maluku	–	4,3	51,1	44,6	100,0	1,6	10,1	48,1	40,2	100,0
Maluku Utara	–	12,1	48,1	39,8	100,0	2,2	15,0	49,8	33,0	100,0
Papua Barat	2,5	16,7	39,6	41,3	100,0	3,8	14,3	47,0	35,0	100,0
Papua Barat Daya	0,4	7,0	34,9	57,7	100,0	3,3	12,0	45,3	39,4	100,0
Papua	–	7,5	60,4	32,1	100,0	1,5	10,2	43,4	44,9	100,0
Papua Selatan	8,9	7,2	43,6	40,3	100,0	4,8	16,3	45,3	33,6	100,0
Papua Tengah	–	7,0	61,5	31,4	100,0	4,0	14,1	47,8	34,1	100,0
Papua Pegunungan	–	14,4	33,3	52,2	100,0	1,6	14,2	57,2	27,0	100,0
Indonesia	2,1	8,2	45,0	44,7	100,0	4,7	15,7	47,0	32,6	100,0

Lampiran 14

Persentase Wanita Berumur 10–54 Tahun yang Berstatus Pernah Kawin Menurut Provinsi, Status Migrasi Risen Antarprovinsi, dan Penggunaan Alat/Cara KB, 2024

Provinsi	Migran				Nonmigran			
	Penggunaan Alat/Cara KB			Jumlah	Penggunaan Alat/Cara KB			Jumlah
	Ya, Pernah	Ya, Sedang	Tidak		Ya, Pernah	Ya, Sedang	Tidak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	26,9	44,9	28,3	100,0	26,5	37,6	35,9	100,0
Sumatera Utara	22,1	32,3	45,6	100,0	24,2	35,8	40,0	100,0
Sumatera Barat	28,6	31,5	39,9	100,0	28,7	38,8	32,5	100,0
Riau	16,4	41,1	42,5	100,0	25,4	42,0	32,6	100,0
Jambi	19,2	41,8	39,0	100,0	21,1	55,7	23,2	100,0
Sumatera Selatan	20,3	47,1	32,6	100,0	20,1	55,5	24,4	100,0
Bengkulu	12,8	49,4	37,8	100,0	20,0	55,9	24,1	100,0
Lampung	17,9	52,2	29,9	100,0	18,9	58,9	22,2	100,0
Kep. Bangka Belitung	13,6	62,9	23,6	100,0	19,0	55,5	25,5	100,0
Kepulauan Riau	9,7	37,1	53,2	100,0	19,0	38,2	42,7	100,0
DKI Jakarta	24,1	44,6	31,4	100,0	19,5	40,8	39,7	100,0
Jawa Barat	25,5	35,0	39,5	100,0	22,9	50,0	27,1	100,0
Jawa Tengah	15,7	51,1	33,2	100,0	22,9	49,4	27,7	100,0
DI Yogyakarta	16,0	37,1	46,9	100,0	20,2	45,3	34,5	100,0
Jawa Timur	23,9	35,5	40,7	100,0	19,1	53,5	27,5	100,0
Banten	10,5	34,0	55,4	100,0	18,8	52,1	29,1	100,0
Bali	0,3	66,0	33,7	100,0	17,5	47,8	34,7	100,0
Nusa Tenggara Barat	40,6	32,9	26,5	100,0	29,6	50,8	19,6	100,0
Nusa Tenggara Timur	12,4	32,2	55,3	100,0	22,7	34,3	43,0	100,0
Kalimantan Barat	22,0	47,5	30,6	100,0	25,3	53,2	21,5	100,0
Kalimantan Tengah	8,6	68,1	23,3	100,0	21,7	56,3	22,0	100,0
Kalimantan Selatan	28,1	51,2	20,7	100,0	22,6	59,2	18,2	100,0
Kalimantan Timur	13,0	36,1	50,8	100,0	19,7	46,4	33,9	100,0
Kalimantan Utara	26,5	50,0	23,5	100,0	28,3	37,4	34,3	100,0
Sulawesi Utara	7,8	48,7	43,5	100,0	23,5	51,2	25,3	100,0
Sulawesi Tengah	18,0	42,0	39,9	100,0	22,4	46,5	31,1	100,0
Sulawesi Selatan	23,7	29,5	46,8	100,0	24,7	39,4	36,0	100,0
Sulawesi Tenggara	23,3	28,2	48,4	100,0	24,1	38,4	37,5	100,0
Gorontalo	10,8	38,5	50,6	100,0	22,6	47,7	29,7	100,0
Sulawesi Barat	24,0	28,9	47,1	100,0	24,4	39,7	35,9	100,0
Maluku	29,9	23,2	46,9	100,0	25,3	29,7	45,0	100,0
Maluku Utara	17,1	51,1	31,8	100,0	26,7	38,8	34,5	100,0
Papua Barat	9,5	33,0	57,5	100,0	17,3	28,6	54,1	100,0
Papua Barat Daya	27,7	6,2	66,1	100,0	21,5	25,3	53,3	100,0
Papua	12,4	47,3	40,4	100,0	26,5	21,8	51,7	100,0
Papua Selatan	15,2	50,7	34,1	100,0	18,3	23,4	58,3	100,0
Papua Tengah	6,6	11,9	81,5	100,0	7,1	9,8	83,1	100,0
Papua Pegunungan	15,8	69,5	14,8	100,0	12,2	22,2	65,6	100,0
Indonesia	20,2	40,6	39,2	100,0	22,0	48,0	30,0	100,0

Lampiran 15
 Persentase Wanita Pernah Kawin Berumur 10-54 Tahun yang Sedang Menggunakan Alat/
 Cara KB Menurut Provinsi, Status Migrasi Risen Antarprovinsi, dan Alat/Cara KB yang
 Digunakan, 2024

Provinsi	Migran											
	Alat/Cara KB yang Digunakan											Jumlah
	Sterilisasi Wanita/ Tubektomi/ MOW	Sterilisasi Pria/ Vasektomi/ MOP	IUD/ AKDR/ Spiral	Suntikan	Susuk KB/ Implan	Pil	Kondom Pria/ Karet KB	Intravag/ Kondom Wanita/ Diafragma	Metode Menyusui Alami	Pantang Berkala/ Kalender	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	23,8	–	3,9	45,6	–	26,4	–	0,3	–	–	–	100,0
Sumatera Utara	4,2	0,4	11,3	44,3	14,1	15,2	7,3	–	–	3,2	–	100,0
Sumatera Barat	11,0	–	5,7	32,6	13,2	25,0	7,7	–	–	4,5	0,3	100,0
Riau	–	–	7,6	58,2	19,8	4,9	5,6	–	–	3,9	–	100,0
Jambi	–	–	9,6	44,6	11,0	34,8	–	–	–	–	–	100,0
Sumatera Selatan	–	–	10,8	50,1	39,1	–	–	–	–	–	–	100,0
Bengkulu	–	–	–	63,6	20,2	5,8	10,3	–	–	–	–	100,0
Lampung	1,6	–	7,3	67,1	8,6	9,9	–	–	–	5,6	–	100,0
Kep. Bangka Belitung	14,4	–	–	35,8	28,5	21,4	–	–	–	–	–	100,0
Kepulauan Riau	–	–	1,3	75,4	21,9	1,1	0,3	–	–	–	–	100,0
DKI Jakarta	3,0	–	23,0	33,5	–	14,2	5,8	–	–	20,5	–	100,0
Jawa Barat	2,7	–	23,8	43,1	8,8	21,7	–	–	–	–	–	100,0
Jawa Tengah	3,3	–	16,4	51,8	14,0	6,0	4,9	–	–	3,5	–	100,0
DI Yogyakarta	–	–	32,7	38,4	12,4	14,2	–	–	–	2,4	–	100,0
Jawa Timur	8,3	0,4	15,7	34,2	6,5	26,1	0,3	4,2	4,1	–	0,2	100,0
Banten	21,4	–	16,8	41,1	–	8,4	–	–	–	12,3	–	100,0
Bali	–	–	21,0	25,2	34,9	18,9	–	–	–	–	–	100,0
Nusa Tenggara Barat	–	–	13,1	46,7	40,1	0,1	–	–	–	–	–	100,0
Nusa Tenggara Timur	6,1	–	14,0	29,7	17,0	13,7	–	–	–	19,4	–	100,0
Kalimantan Barat	8,0	–	36,7	42,9	5,9	6,6	–	–	–	–	–	100,0
Kalimantan Tengah	–	–	1,6	65,2	7,7	25,5	–	–	–	–	–	100,0
Kalimantan Selatan	2,9	–	–	28,3	26,2	42,7	–	–	–	–	–	100,0
Kalimantan Timur	–	–	13,7	36,7	4,1	24,4	14,7	–	–	–	6,4	100,0
Kalimantan Utara	–	–	20,7	31,9	33,9	13,5	–	–	–	–	–	100,0
Sulawesi Utara	–	–	18,4	31,8	49,8	–	–	–	–	–	–	100,0
Sulawesi Tengah	–	–	22,7	29,5	22,9	24,9	–	–	–	–	–	100,0
Sulawesi Selatan	3,1	–	29,9	41,0	18,6	7,4	–	–	–	–	–	100,0
Sulawesi Tenggara	–	–	–	23,1	35,9	41,1	–	–	–	–	–	100,0
Gorontalo	–	–	–	45,3	17,7	11,7	25,3	–	–	–	–	100,0
Sulawesi Barat	–	–	5,8	18,7	25,0	32,0	–	–	11,0	7,6	–	100,0
Maluku	1,6	–	25,0	46,8	12,0	14,6	–	–	–	–	–	100,0
Maluku Utara	–	–	7,9	78,0	14,1	–	–	–	–	–	–	100,0
Papua Barat	–	–	7,3	55,5	22,3	15,0	–	–	–	–	–	100,0
Papua Barat Daya	–	–	3,8	96,2	–	–	–	–	–	–	–	100,0
Papua	–	–	–	65,7	–	24,9	9,4	–	–	–	–	100,0
Papua Selatan	–	–	29,6	29,1	26,6	13,0	0,3	–	–	1,3	–	100,0
Papua Tengah	–	–	–	100,0	–	–	–	–	–	–	–	100,0
Papua Pegunungan	–	–	–	28,6	–	–	–	–	–	–	71,4	100,0
Indonesia	3,9	~0	15,6	45,5	13,0	14,6	2,5	0,4	0,4	3,8	0,4	100,0

Lanjutan Lampiran 15

Provinsi	Nonmigran											
	Alat/Cara KB yang Digunakan											Jumlah
	Sterilisasi Wanita/ Tubektomi/ MOW	Sterilisasi Pria/ Vasektomi/ MOP	IUD/ AKDR/ Spiral	Suntikan	Susuk KB/ Implan	Pil	Kondom Pria/ Karet KB	Intravag/ Kondom Wanita/ Diafragma	Metode Menyusui Alami	Pantang Berkala/ Kalender	Lainnya	
(1)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
Aceh	1,8	0,4	5,3	63,2	7,9	18,6	0,9	~0	0,1	1,4	0,2	100,0
Sumatera Utara	7,9	0,4	6,3	40,2	17,9	20,5	1,7	–	0,6	3,2	1,1	100,0
Sumatera Barat	6,6	0,7	10,3	44,1	16,4	16,5	3,2	~0	0,4	1,5	0,1	100,0
Riau	3,8	0,2	4,4	53,4	11,3	23,5	1,7	0,1	0,1	0,9	0,7	100,0
Jambi	3,1	0,4	4,4	54,7	11,5	23,3	1,6	–	~0	0,6	0,3	100,0
Sumatera Selatan	1,9	0,2	3,8	62,9	16,4	12,6	0,8	0,1	0,1	1,0	0,1	100,0
Bengkulu	2,6	0,3	6,9	57,1	16,5	12,9	2,4	0,1	~0	1,0	0,1	100,0
Lampung	2,4	0,3	4,0	59,1	15,5	15,6	1,1	0,1	0,1	1,5	0,3	100,0
Kep. Bangka Belitung	3,5	0,1	5,2	50,9	8,5	26,7	1,3	0,1	–	3,6	0,3	100,0
Kepulauan Riau	8,2	0,2	22,3	31,0	8,8	19,3	3,6	0,1	0,5	4,8	1,0	100,0
DKI Jakarta	5,1	0,1	24,3	43,0	5,2	16,7	2,1	0,2	–	3,1	0,2	100,0
Jawa Barat	3,5	0,2	10,4	53,7	6,6	22,8	1,5	0,1	0,1	1,0	~0	100,0
Jawa Tengah	5,6	0,5	11,7	51,1	15,5	11,6	1,7	0,1	0,2	1,8	0,3	100,0
DI Yogyakarta	6,7	0,8	31,5	22,6	13,3	9,6	8,9	0,3	0,4	5,5	0,3	100,0
Jawa Timur	5,0	0,3	9,3	55,6	8,7	18,6	1,1	0,1	~0	1,2	0,1	100,0
Banten	3,4	0,5	5,8	65,8	4,9	16,9	1,2	~0	0,1	1,2	0,3	100,0
Bali	8,2	0,8	32,8	35,7	3,9	10,2	1,9	0,1	0,3	5,3	0,7	100,0
Nusa Tenggara Barat	1,9	0,5	7,0	64,8	19,7	4,7	0,6	–	0,1	0,5	0,2	100,0
Nusa Tenggara Timur	6,4	0,3	12,6	34,7	34,2	7,9	0,3	~0	0,5	2,8	0,3	100,0
Kalimantan Barat	1,9	0,3	4,6	56,7	6,2	28,5	0,8	0,1	0,1	0,6	0,2	100,0
Kalimantan Tengah	1,7	0,1	1,6	61,7	8,5	24,6	0,7	~0	0,1	0,9	~0	100,0
Kalimantan Selatan	2,3	0,3	3,6	44,2	7,5	40,2	1,1	–	0,1	0,6	~0	100,0
Kalimantan Timur	4,2	0,3	15,9	35,9	9,7	30,1	2,4	0,2	0,1	1,0	0,2	100,0
Kalimantan Utara	3,9	0,1	9,9	44,0	13,1	25,0	2,3	~0	–	0,8	0,8	100,0
Sulawesi Utara	3,4	0,1	8,6	44,3	20,6	21,7	0,2	0,1	–	1,0	0,1	100,0
Sulawesi Tengah	1,3	0,3	7,1	43,3	20,1	26,8	0,3	0,2	~0	0,4	0,1	100,0
Sulawesi Selatan	1,8	0,3	7,2	48,3	22,9	18,0	0,6	~0	0,1	0,6	0,1	100,0
Sulawesi Tenggara	2,0	0,4	6,6	43,8	20,3	24,6	0,7	–	–	1,1	0,4	100,0
Gorontalo	1,7	~0	7,2	39,8	32,7	17,0	0,1	–	0,4	0,7	0,3	100,0
Sulawesi Barat	0,8	0,2	3,5	45,2	22,0	25,9	0,8	–	–	1,5	0,1	100,0
Maluku	1,4	0,1	3,5	56,2	27,2	8,4	0,2	–	0,1	2,6	0,4	100,0
Maluku Utara	0,8	0,1	4,0	62,0	27,3	5,3	0,1	–	0,1	0,2	~0	100,0
Papua Barat	3,1	~0	4,8	53,4	18,5	14,0	3,1	~0	0,7	2,3	0,2	100,0
Papua Barat Daya	4,4	–	2,8	63,4	11,3	14,6	2,5	–	–	~0	1,0	100,0
Papua	5,6	0,1	4,5	54,1	23,7	6,1	3,5	–	2,3	–	0,1	100,0
Papua Selatan	2,3	–	4,0	51,0	18,6	17,3	4,5	–	1,6	0,1	0,6	100,0
Papua Tengah	2,5	–	6,0	54,9	16,7	7,3	10,5	–	1,3	0,9	–	100,0
Papua Pegunungan	0,2	~0	0,2	4,6	2,5	0,6	1,3	–	1,6	1,7	87,2	100,0
Indonesia	4,1	0,3	9,7	52,3	11,6	18,4	1,5	0,1	0,1	1,5	0,4	100,0

Lampiran 16

Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Provinsi, Status Migrasi Risen Antarprovinsi, dan Kondisi Pernah/Tidak Mengalami Tindak Kejahatan selama 1 Januari–31 Desember 2023

Provinsi	Migran			Nonmigran		
	Pernah Mengalami Tindak Kejahatan		Jumlah	Pernah Mengalami Tindak Kejahatan		Jumlah
	Ya	Tidak		Ya	Tidak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	2,7	97,3	100,0	0,3	99,7	100,0
Sumatera Utara	1,3	98,7	100,0	0,4	99,6	100,0
Sumatera Barat	1,0	99,0	100,0	0,6	99,4	100,0
Riau	–	100,0	100,0	0,5	99,5	100,0
Jambi	~0	100,0	100,0	0,5	99,5	100,0
Sumatera Selatan	0,3	99,7	100,0	0,6	99,4	100,0
Bengkulu	–	100,0	100,0	0,7	99,3	100,0
Lampung	–	100,0	100,0	0,7	99,3	100,0
Kep. Bangka Belitung	0,7	99,3	100,0	0,4	99,6	100,0
Kepulauan Riau	0,7	99,3	100,0	0,4	99,6	100,0
DKI Jakarta	0,6	99,4	100,0	0,7	99,3	100,0
Jawa Barat	0,9	99,1	100,0	0,7	99,3	100,0
Jawa Tengah	0,8	99,2	100,0	0,4	99,6	100,0
DI Yogyakarta	2,7	97,3	100,0	0,4	99,6	100,0
Jawa Timur	0,5	99,5	100,0	0,3	99,7	100,0
Banten	1,5	98,5	100,0	0,4	99,6	100,0
Bali	0,8	99,2	100,0	0,1	99,9	100,0
Nusa Tenggara Barat	4,0	96,0	100,0	1,1	98,9	100,0
Nusa Tenggara Timur	1,0	99,0	100,0	0,4	99,6	100,0
Kalimantan Barat	–	100,0	100,0	0,3	99,7	100,0
Kalimantan Tengah	1,5	98,5	100,0	0,3	99,7	100,0
Kalimantan Selatan	–	100,0	100,0	0,3	99,7	100,0
Kalimantan Timur	–	100,0	100,0	0,2	99,8	100,0
Kalimantan Utara	0,1	99,9	100,0	0,5	99,5	100,0
Sulawesi Utara	–	100,0	100,0	0,5	99,5	100,0
Sulawesi Tengah	0,7	99,3	100,0	0,6	99,4	100,0
Sulawesi Selatan	0,6	99,4	100,0	0,4	99,6	100,0
Sulawesi Tenggara	0,4	99,6	100,0	0,4	99,6	100,0
Gorontalo	–	100,0	100,0	0,4	99,6	100,0
Sulawesi Barat	–	100,0	100,0	0,3	99,7	100,0
Maluku	2,5	97,5	100,0	0,8	99,2	100,0
Maluku Utara	–	100,0	100,0	0,5	99,5	100,0
Papua Barat	1,9	98,1	100,0	0,4	99,6	100,0
Papua Barat Daya	–	100,0	100,0	1,3	98,7	100,0
Papua	1,2	98,8	100,0	1,1	98,9	100,0
Papua Selatan	–	100,0	100,0	0,9	99,1	100,0
Papua Tengah	–	100,0	100,0	0,2	99,8	100,0
Papua Pegunungan	–	100,0	100,0	0,3	99,7	100,0
Indonesia	0,9	99,1	100,0	0,5	99,5	100,0

Lampiran 17

Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Provinsi, Status Migrasi Risen Antarprovinsi, dan Alat yang Digunakan untuk Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir, 2024

Provinsi	Migran					
	Persentase Migran yang Mengakses Internet	Alat yang Digunakan untuk Mengakses Internet				
		Komputer Dekstop	Laptop/ Notebook	Tablet	HP/ Ponsel	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	85,4	2,6	21,3	–	98,9	–
Sumatera Utara	79,2	1,5	10,2	0,5	99,5	0,2
Sumatera Barat	86,8	6,8	13,1	1,2	98,7	–
Riau	83,8	3,2	9,7	0,3	96,5	1,4
Jambi	75,3	3,7	16,2	2,4	97,6	1,3
Sumatera Selatan	76,7	3,9	6,5	–	100,0	0,8
Bengkulu	84,6	–	16,4	–	100,0	2,7
Lampung	79,7	5,0	10,3	–	100,0	~0
Kep. Bangka Belitung	89,5	2,7	14,9	0,3	100,0	–
Kepulauan Riau	91,6	8,6	15,4	1,9	97,5	1,1
DKI Jakarta	91,8	3,6	22,1	5,0	99,3	–
Jawa Barat	91,8	3,8	17,2	1,1	98,9	–
Jawa Tengah	91,7	3,9	6,4	1,0	99,2	0,4
DI Yogyakarta	97,2	9,5	50,3	3,1	98,8	0,7
Jawa Timur	89,5	2,8	12,6	1,2	98,7	–
Banten	91,9	6,1	18,2	2,2	98,7	0,3
Bali	89,5	5,0	16,1	–	99,1	–
Nusa Tenggara Barat	85,4	4,9	10,7	0,5	99,3	–
Nusa Tenggara Timur	78,0	0,4	9,1	0,3	100,0	–
Kalimantan Barat	85,5	0,9	23,9	–	100,0	–
Kalimantan Tengah	89,2	3,9	19,2	0,8	100,0	–
Kalimantan Selatan	78,5	6,2	14,2	–	96,1	–
Kalimantan Timur	97,9	5,0	15,2	2,0	97,2	–
Kalimantan Utara	89,2	0,4	11,3	0,6	99,4	–
Sulawesi Utara	81,2	1,1	8,3	0,4	100,0	–
Sulawesi Tengah	73,3	4,7	17,1	–	100,0	–
Sulawesi Selatan	78,2	0,9	14,4	1,6	99,2	–
Sulawesi Tenggara	82,3	2,3	15,7	–	99,6	–
Gorontalo	80,3	10,2	27,0	8,0	100,0	–
Sulawesi Barat	86,6	2,2	14,9	–	96,5	–
Maluku	81,8	9,7	17,3	0,9	99,1	–
Maluku Utara	80,2	1,4	12,0	–	100,0	–
Papua Barat	82,7	3,3	14,7	4,7	97,8	–
Papua Barat Daya	79,9	6,1	2,1	1,0	100,0	–
Papua	93,7	7,2	18,0	–	94,8	–
Papua Selatan	88,4	3,2	23,0	0,8	96,1	–
Papua Tengah	39,7	11,3	6,7	–	100,0	–
Papua Pegunungan	26,4	0,3	–	42,2	57,8	–
Indonesia	87,8	4,2	15,3	1,4	98,9	0,2

Lanjutan Lampiran 17

Provinsi	Nonmigran					
	Persentase Nonmigran yang Mengakses Internet	Alat yang Digunakan untuk Mengakses Internet				
		Komputer Dekstop	Laptop/ Notebook	Tablet	HP/ Ponsel	Lainnya
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	62,9	2,1	8,1	0,4	99,2	0,3
Sumatera Utara	74,1	1,7	7,4	0,5	99,0	0,2
Sumatera Barat	74,4	3,1	8,1	0,4	99,3	0,1
Riau	77,6	2,1	6,7	0,5	99,3	0,2
Jambi	71,7	1,9	7,5	0,6	99,2	0,3
Sumatera Selatan	70,5	1,4	6,5	0,4	99,2	0,3
Bengkulu	70,6	1,5	8,8	0,3	99,3	0,3
Lampung	73,3	1,4	5,6	0,2	99,4	0,1
Kep. Bangka Belitung	75,9	2,2	8,2	0,5	99,3	0,2
Kepulauan Riau	89,2	3,7	13,9	0,5	98,4	1,1
DKI Jakarta	87,8	3,4	20,0	1,7	98,4	0,3
Jawa Barat	76,5	2,8	10,0	0,7	99,1	0,2
Jawa Tengah	72,9	3,0	7,8	0,4	99,3	0,3
DI Yogyakarta	79,6	4,4	15,9	1,0	98,8	0,7
Jawa Timur	69,3	2,9	9,6	0,7	99,0	0,2
Banten	75,1	3,2	12,1	1,0	98,6	1,0
Bali	77,5	3,9	14,6	1,0	99,2	–
Nusa Tenggara Barat	68,3	1,6	7,7	0,3	99,5	~0
Nusa Tenggara Timur	54,5	2,4	8,6	0,5	99,0	0,2
Kalimantan Barat	71,5	1,8	7,2	0,5	99,4	0,1
Kalimantan Tengah	75,1	1,8	8,4	0,5	99,4	0,2
Kalimantan Selatan	74,8	2,1	9,1	0,6	99,3	0,1
Kalimantan Timur	84,3	2,8	12,0	1,0	99,1	0,3
Kalimantan Utara	77,3	2,0	8,4	0,6	99,1	1,0
Sulawesi Utara	68,4	2,0	7,4	0,9	99,1	0,1
Sulawesi Tengah	62,3	2,5	8,5	0,6	99,2	0,2
Sulawesi Selatan	70,0	1,8	10,3	0,7	99,1	0,3
Sulawesi Tenggara	70,2	1,7	8,8	0,4	99,3	0,1
Gorontalo	65,8	3,5	9,4	0,2	99,1	0,2
Sulawesi Barat	66,4	1,8	6,4	0,7	98,8	0,1
Maluku	59,8	2,8	9,8	0,4	99,2	0,2
Maluku Utara	59,0	1,3	7,7	0,6	99,4	0,2
Papua Barat	62,6	1,6	8,3	0,3	99,3	0,2
Papua Barat Daya	65,6	1,6	7,8	0,4	98,9	0,9
Papua	62,0	2,7	11,6	1,3	98,6	2,0
Papua Selatan	47,8	4,9	11,6	0,9	98,2	0,2
Papua Tengah	28,7	1,7	9,0	0,8	97,8	0,3
Papua Pegunungan	6,7	1,5	6,8	–	99,3	0,3
Indonesia	72,6	2,6	9,6	0,7	99,1	0,3

Lampiran 18
 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Provinsi, Status Migrasi Risen Antarprovinsi, dan Lokasi Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir, 2024

Provinsi	Migran						
	Persentase yang Mengakses Internet	Lokasi Mengakses					
		Rumah Sendiri	Bukan Rumah Sendiri	Tempat Bekerja/ Kantor	Gedung Sekolah/ Kampus	Tempat Umum	Dalam Kondisi Bergerak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	85,4	99,2	39,7	23,3	13,4	61,8	36,8
Sumatera Utara	79,2	93,6	40,1	26,4	6,4	44,6	30,8
Sumatera Barat	86,8	99,1	45,5	25,5	11,9	54,3	44,7
Riau	83,8	98,9	38,0	25,7	4,1	45,1	28,2
Jambi	75,3	93,6	49,1	28,6	10,3	52,7	27,6
Sumatera Selatan	76,7	96,3	24,6	23,6	4,3	36,1	26,6
Bengkulu	84,6	98,3	39,4	23,5	10,1	47,8	49,2
Lampung	79,7	98,3	50,4	29,1	3,4	49,7	34,5
Kep. Bangka Belitung	89,5	99,4	52,0	33,2	11,4	51,2	32,8
Kepulauan Riau	91,6	88,2	36,3	52,3	11,8	51,6	36,4
DKI Jakarta	91,8	91,8	33,9	36,6	11,1	39,7	39,0
Jawa Barat	91,8	98,7	42,7	40,1	7,8	57,5	40,6
Jawa Tengah	91,7	95,1	51,0	34,5	5,7	56,8	42,2
DI Yogyakarta	97,2	95,4	53,2	34,2	39,8	77,6	41,7
Jawa Timur	89,5	97,4	44,1	26,4	10,7	51,0	36,9
Banten	91,9	97,3	32,8	36,1	11,8	54,2	46,5
Bali	89,5	91,4	48,9	44,9	12,7	61,4	26,2
Nusa Tenggara Barat	85,4	96,6	56,4	25,0	5,2	52,9	31,2
Nusa Tenggara Timur	78,0	92,1	55,4	23,1	7,8	52,1	40,2
Kalimantan Barat	85,5	97,9	39,1	29,0	9,5	62,0	31,6
Kalimantan Tengah	89,2	96,8	31,7	35,0	6,3	60,4	26,8
Kalimantan Selatan	78,5	98,9	42,2	36,4	6,2	53,9	27,2
Kalimantan Timur	97,9	99,6	44,0	33,6	6,4	58,0	32,3
Kalimantan Utara	89,2	97,0	24,2	43,9	2,2	36,2	23,1
Sulawesi Utara	81,2	91,0	35,6	19,3	5,4	53,8	31,1
Sulawesi Tengah	73,3	88,4	37,0	25,2	12,9	51,7	29,0
Sulawesi Selatan	78,2	99,1	47,4	20,7	17,6	59,8	46,6
Sulawesi Tenggara	82,3	95,2	47,4	22,0	5,7	51,6	28,3
Gorontalo	80,3	100,0	27,5	47,2	5,6	60,2	37,2
Sulawesi Barat	86,6	92,8	46,9	30,0	14,5	58,2	45,9
Maluku	81,8	95,9	24,5	27,0	20,0	50,8	53,3
Maluku Utara	80,2	98,1	19,4	18,2	5,2	26,0	19,6
Papua Barat	82,7	96,8	34,2	26,1	10,7	48,4	30,2
Papua Barat Daya	79,9	69,1	29,6	16,1	7,3	35,6	55,4
Papua	93,7	93,1	25,4	15,7	2,4	29,6	41,6
Papua Selatan	88,4	97,0	41,8	30,5	0,5	41,2	53,4
Papua Tengah	39,7	93,7	30,5	45,8	~0	51,2	44,0
Papua Pegunungan	26,4	100,0	1,6	12,0	~0	68,5	52,5
Indonesia	87,8	95,9	44,0	32,7	10,1	54,1	38,5

Lanjutan Lampiran 18

Provinsi	Nonmigran						
	Persentase yang Mengakses Internet	Lokasi Mengakses					
		Rumah Sendiri	Bukan Rumah Sendiri	Tempat Bekerja/ Kantor	Gedung Sekolah/ Kampus	Tempat Umum	Dalam Kondisi Bergerak
(1)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Aceh	62,9	97,2	42,6	27,2	10,6	60,2	29,8
Sumatera Utara	74,1	97,3	39,4	29,2	11,4	51,0	29,7
Sumatera Barat	74,4	98,4	37,2	26,2	12,9	50,4	34,4
Riau	77,6	97,6	36,4	28,3	10,2	51,6	25,8
Jambi	71,7	97,4	44,4	28,3	12,1	52,9	28,9
Sumatera Selatan	70,5	98,0	41,5	26,6	10,2	49,6	34,3
Bengkulu	70,6	96,6	47,6	30,9	11,5	51,4	38,2
Lampung	73,3	98,2	43,1	25,2	10,7	45,7	31,6
Kep. Bangka Belitung	75,9	99,6	60,0	32,0	10,0	59,7	32,4
Kepulauan Riau	89,2	98,8	38,6	36,5	10,2	56,1	36,0
DKI Jakarta	87,8	96,9	31,6	38,5	13,3	51,4	37,3
Jawa Barat	76,5	97,5	38,6	30,0	10,7	51,9	33,1
Jawa Tengah	72,9	98,0	45,0	31,2	12,3	55,3	37,7
DI Yogyakarta	79,6	97,9	46,2	36,4	14,5	56,7	33,7
Jawa Timur	69,3	97,2	35,5	29,0	12,0	50,2	31,7
Banten	75,1	97,1	41,5	34,5	13,4	54,8	37,0
Bali	77,5	99,1	40,4	43,6	14,3	57,3	31,7
Nusa Tenggara Barat	68,3	99,0	49,0	21,8	12,2	45,1	30,6
Nusa Tenggara Timur	54,5	96,2	42,4	22,7	15,3	44,9	33,9
Kalimantan Barat	71,5	95,2	34,4	25,7	9,6	49,7	27,1
Kalimantan Tengah	75,1	96,2	36,4	30,4	10,4	49,6	35,9
Kalimantan Selatan	74,8	98,7	47,7	31,5	11,4	59,3	36,7
Kalimantan Timur	84,3	97,4	34,5	32,1	11,8	48,8	25,9
Kalimantan Utara	77,3	92,2	19,6	30,4	10,7	36,8	25,5
Sulawesi Utara	68,4	95,3	42,6	28,1	13,3	55,6	46,5
Sulawesi Tengah	62,3	95,5	35,6	25,9	11,7	44,2	28,1
Sulawesi Selatan	70,0	97,6	40,7	26,7	14,1	50,9	34,1
Sulawesi Tenggara	70,2	97,7	40,8	25,5	10,6	44,9	26,0
Gorontalo	65,8	96,4	37,3	28,6	12,2	47,5	32,8
Sulawesi Barat	66,4	95,5	38,9	21,4	11,4	42,3	27,5
Maluku	59,8	89,8	28,7	19,7	12,0	38,4	41,5
Maluku Utara	59,0	88,8	26,5	21,9	12,2	38,6	31,7
Papua Barat	62,6	93,1	25,4	20,5	11,8	41,7	19,9
Papua Barat Daya	65,6	88,7	18,1	22,5	8,6	30,4	28,9
Papua	62,0	89,2	21,5	22,8	11,8	38,9	32,9
Papua Selatan	47,8	93,6	32,2	25,1	11,3	47,1	34,0
Papua Tengah	28,7	88,1	25,2	18,0	12,0	39,3	20,1
Papua Pegunungan	6,7	74,5	16,7	15,7	10,4	59,7	36,3
Indonesia	72,6	97,3	39,5	29,9	11,8	51,6	33,3

Lampiran 19
 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Status Migrasi Risen Antarprovinsi, 2024

Provinsi	Status Migrasi Risen Antarprovinsi		Jumlah
	Rumah Tangga Migran	Rumah Tangga Nonmigran	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	0,7	99,3	100,0
Sumatera Utara	1,2	98,8	100,0
Sumatera Barat	3,4	96,6	100,0
Riau	1,5	98,5	100,0
Jambi	1,7	98,3	100,0
Sumatera Selatan	1,4	98,6	100,0
Bengkulu	2,3	97,7	100,0
Lampung	2,0	98,0	100,0
Kep. Bangka Belitung	2,5	97,5	100,0
Kepulauan Riau	8,1	91,9	100,0
DKI Jakarta	2,8	97,2	100,0
Jawa Barat	1,3	98,7	100,0
Jawa Tengah	2,9	97,1	100,0
DI Yogyakarta	7,2	92,8	100,0
Jawa Timur	1,2	98,8	100,0
Banten	1,3	98,7	100,0
Bali	1,5	98,5	100,0
Nusa Tenggara Barat	3,9	96,1	100,0
Nusa Tenggara Timur	3,5	96,5	100,0
Kalimantan Barat	0,9	99,1	100,0
Kalimantan Tengah	2,2	97,8	100,0
Kalimantan Selatan	1,4	98,6	100,0
Kalimantan Timur	1,9	98,1	100,0
Kalimantan Utara	2,4	97,6	100,0
Sulawesi Utara	1,0	99,0	100,0
Sulawesi Tengah	1,7	98,3	100,0
Sulawesi Selatan	2,1	97,9	100,0
Sulawesi Tenggara	2,7	97,3	100,0
Gorontalo	1,6	98,4	100,0
Sulawesi Barat	2,4	97,6	100,0
Maluku	2,4	97,6	100,0
Maluku Utara	2,2	97,8	100,0
Papua Barat	4,4	95,6	100,0
Papua Barat Daya	2,2	97,8	100,0
Papua	2,0	98,0	100,0
Papua Selatan	3,0	97,0	100,0
Papua Tengah	0,7	99,3	100,0
Papua Pegunungan	0,6	99,4	100,0
Indonesia	2,0	98,0	100,0

Lampiran 20

Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi, Status Migrasi Risen Antarprovinsi, dan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati, 2024

Provinsi	Rumah Tangga Migran					Jumlah
	Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal					
	Milik Sendiri	Kontrak/ Sewa	Bebas Sewa	Dinas	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	65,9	22,5	8,0	3,6	–	100,0
Sumatera Utara	63,1	13,8	19,0	4,1	–	100,0
Sumatera Barat	63,6	13,5	19,1	3,8	–	100,0
Riau	51,4	28,9	12,1	7,6	–	100,0
Jambi	77,6	12,1	9,8	0,5	–	100,0
Sumatera Selatan	89,6	4,8	5,5	~0	–	100,0
Bengkulu	78,0	14,6	7,4	–	–	100,0
Lampung	91,5	4,5	3,8	0,2	–	100,0
Kep. Bangka Belitung	68,1	8,6	16,0	7,3	–	100,0
Kepulauan Riau	32,3	57,9	7,7	2,1	–	100,0
DKI Jakarta	54,1	22,3	22,5	1,1	–	100,0
Jawa Barat	74,7	18,4	4,6	2,3	–	100,0
Jawa Tengah	92,0	1,7	6,3	~0	–	100,0
DI Yogyakarta	61,9	29,5	7,7	1,0	–	100,0
Jawa Timur	86,4	7,0	4,9	1,8	–	100,0
Banten	75,4	5,4	11,0	8,2	–	100,0
Bali	53,6	37,4	3,6	5,4	–	100,0
Nusa Tenggara Barat	86,1	2,4	8,5	2,9	–	100,0
Nusa Tenggara Timur	89,6	4,6	4,9	0,9	–	100,0
Kalimantan Barat	94,5	2,0	1,8	1,6	–	100,0
Kalimantan Tengah	53,9	5,4	15,8	24,8	–	100,0
Kalimantan Selatan	68,6	12,1	12,3	7,0	–	100,0
Kalimantan Timur	50,8	40,2	6,6	2,4	–	100,0
Kalimantan Utara	63,2	13,7	10,7	12,5	–	100,0
Sulawesi Utara	67,7	0,5	31,8	–	–	100,0
Sulawesi Tengah	68,0	20,6	8,2	3,2	–	100,0
Sulawesi Selatan	84,9	8,5	6,5	–	0,1	100,0
Sulawesi Tenggara	85,1	2,0	10,8	2,0	–	100,0
Gorontalo	66,2	4,5	29,3	–	–	100,0
Sulawesi Barat	91,8	0,8	6,2	1,2	–	100,0
Maluku	80,1	9,7	8,5	1,6	–	100,0
Maluku Utara	80,1	6,4	13,2	0,3	–	100,0
Papua Barat	57,0	23,0	7,7	12,3	–	100,0
Papua Barat Daya	70,2	12,9	15,2	1,7	–	100,0
Papua	52,8	19,2	24,1	3,8	–	100,0
Papua Selatan	71,0	13,9	5,0	10,1	–	100,0
Papua Tengah	57,8	35,7	0,3	6,2	–	100,0
Papua Pegunungan	77,5	22,1	0,4	–	–	100,0
Indonesia	75,7	13,4	8,6	2,3	~0	100,0

Lanjutan Lampiran 20

Provinsi	Rumah Tangga Nonmigran					Jumlah
	Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal					
	Milik Sendiri	Kontrak/ Sewa	Bebas Sewa	Dinas	Lainnya	
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	85,3	3,9	9,7	1,1	–	100,0
Sumatera Utara	73,0	9,4	15,1	2,4	~0	100,0
Sumatera Barat	73,0	6,9	18,9	1,2	~0	100,0
Riau	78,9	7,7	9,0	4,5	–	100,0
Jambi	89,5	2,7	7,0	0,8	–	100,0
Sumatera Selatan	85,8	3,2	10,4	0,6	–	100,0
Bengkulu	90,0	3,2	5,8	1,0	~0	100,0
Lampung	93,1	1,9	4,9	0,1	–	100,0
Kep. Bangka Belitung	90,2	2,6	6,3	0,9	–	100,0
Kepulauan Riau	78,9	15,4	5,4	0,3	–	100,0
DKI Jakarta	54,5	21,3	23,1	1,2	~0	100,0
Jawa Barat	83,6	5,7	10,4	0,3	~0	100,0
Jawa Tengah	90,9	1,1	7,9	0,1	–	100,0
DI Yogyakarta	85,2	4,6	9,9	0,4	–	100,0
Jawa Timur	91,0	2,6	6,3	0,2	–	100,0
Banten	86,6	6,2	6,9	0,3	–	100,0
Bali	84,0	10,6	5,1	0,4	–	100,0
Nusa Tenggara Barat	92,2	1,2	6,4	0,2	–	100,0
Nusa Tenggara Timur	91,5	2,9	4,7	0,8	0,1	100,0
Kalimantan Barat	91,9	1,4	6,3	0,4	–	100,0
Kalimantan Tengah	83,7	3,0	7,7	5,6	~0	100,0
Kalimantan Selatan	84,8	4,3	9,3	1,7	–	100,0
Kalimantan Timur	77,5	9,6	11,4	1,5	–	100,0
Kalimantan Utara	78,7	9,2	10,6	1,5	–	100,0
Sulawesi Utara	79,6	2,2	17,7	0,5	~0	100,0
Sulawesi Tengah	89,0	2,6	7,9	0,5	~0	100,0
Sulawesi Selatan	88,3	2,0	9,4	0,2	0,1	100,0
Sulawesi Tenggara	91,5	2,3	5,9	0,2	–	100,0
Gorontalo	86,4	1,0	12,4	0,2	–	100,0
Sulawesi Barat	94,3	0,5	4,3	0,9	–	100,0
Maluku	84,9	3,8	9,6	1,7	–	100,0
Maluku Utara	91,2	1,7	6,5	0,6	~0	100,0
Papua Barat	83,7	6,1	7,0	3,2	–	100,0
Papua Barat Daya	84,5	6,7	6,8	2,0	–	100,0
Papua	77,2	10,3	8,1	4,3	0,1	100,0
Papua Selatan	76,7	4,7	12,9	5,7	–	100,0
Papua Tengah	88,5	7,6	3,1	0,8	–	100,0
Papua Pegunungan	97,5	1,4	0,4	0,8	–	100,0
Indonesia	85,1	4,9	9,3	0,7	~0	100,0

Lampiran 21
 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi, Status Migrasi Risen Antarprovinsi, dan Bukti Kepemilikan Tanah Bangunan Tinggal Milik Sendiri, 2024

Provinsi	Rumah Tangga Migran						Jumlah
	Bukti Kepemilikan Tanah Bangunan Tempat Tinggal Milik Sendiri						
	Sertifikat Hak Milik (SHM) Atas Nama ART	SHM Bukan Atas Nama ART dengan Perjanjian Pemanfaatan Tertulis	SHM Bukan Atas Nama ART tanpa Perjanjian Pemanfaatan Tertulis	Sertifikat Selain SHM (SHGB, SHSRS)	Surat Bukti lainnya (Girik, AJB, Letter C, dll)	Tidak Punya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	69,6	7,6	0,9	2,1	7,1	12,7	100,0
Sumatera Utara	38,8	–	3,7	2,2	33,6	21,7	100,0
Sumatera Barat	38,8	1,6	5,4	1,0	18,7	34,4	100,0
Riau	52,0	3,3	3,8	6,5	20,9	13,5	100,0
Jambi	66,4	2,5	6,1	2,5	6,6	15,9	100,0
Sumatera Selatan	54,6	6,5	6,9	6,7	14,1	11,2	100,0
Bengkulu	74,1	5,1	9,5	–	2,6	8,7	100,0
Lampung	64,4	5,5	7,4	2,3	14,4	5,9	100,0
Kep. Bangka Belitung	68,7	4,2	4,4	–	8,9	13,8	100,0
Kepulauan Riau	23,5	–	0,1	61,9	10,2	4,3	100,0
DKI Jakarta	78,5	2,1	2,6	2,0	4,7	10,0	100,0
Jawa Barat	69,9	2,6	4,9	2,1	16,5	4,1	100,0
Jawa Tengah	65,6	2,8	6,2	1,2	20,6	3,7	100,0
DI Yogyakarta	37,0	5,0	7,2	–	3,1	47,7	100,0
Jawa Timur	61,8	1,9	10,8	2,1	18,6	4,8	100,0
Banten	78,1	8,2	7,0	–	5,8	0,9	100,0
Bali	22,8	25,4	10,9	–	5,8	35,1	100,0
Nusa Tenggara Barat	47,6	4,1	7,0	~0	16,8	24,4	100,0
Nusa Tenggara Timur	53,6	2,3	6,2	1,1	24,8	12,0	100,0
Kalimantan Barat	79,9	–	~0	–	12,5	7,6	100,0
Kalimantan Tengah	65,7	9,3	–	4,3	11,6	9,0	100,0
Kalimantan Selatan	76,3	2,6	–	–	12,3	8,8	100,0
Kalimantan Timur	52,4	0,7	3,0	5,7	19,8	18,5	100,0
Kalimantan Utara	83,7	4,2	6,1	–	–	6,0	100,0
Sulawesi Utara	86,7	0,1	–	0,1	11,1	2,0	100,0
Sulawesi Tengah	73,7	3,1	–	0,7	5,5	17,0	100,0
Sulawesi Selatan	57,2	2,1	2,2	1,5	16,6	20,5	100,0
Sulawesi Tenggara	79,6	2,1	3,9	–	1,7	12,7	100,0
Gorontalo	60,2	3,9	9,7	3,4	18,2	4,5	100,0
Sulawesi Barat	71,1	0,1	3,3	–	16,5	8,9	100,0
Maluku	55,7	2,8	–	2,0	0,9	38,5	100,0
Maluku Utara	74,4	8,8	3,0	–	0,8	13,0	100,0
Papua Barat	56,4	0,2	2,9	2,8	6,2	31,5	100,0
Papua Barat Daya	63,1	6,3	–	–	11,7	18,9	100,0
Papua	64,2	–	19,1	1,4	–	15,3	100,0
Papua Selatan	50,8	–	11,8	6,7	0,3	30,4	100,0
Papua Tengah	17,9	–	19,4	–	–	62,8	100,0
Papua Pegunungan	–	–	–	–	–	100,0	100,0
Indonesia	61,0	3,2	5,9	2,6	15,6	11,7	100,0

Lanjutan Lampiran 21

Provinsi	Rumah Tangga Nonmigran						Jumlah
	Bukti Kepemilikan Tanah Bangunan Tempat Tinggal Milik Sendiri						
	Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama ART	SHM Bukan Atas Nama ART dengan Perjanjian Pemanfaatan Tertulis	SHM Bukan Atas Nama ART tanpa Perjanjian Pemanfaatan Tertulis	Sertifikat Selain SHM (SHGB, SHSRS)	Surat Bukti lainnya (Girik, AJB, Letter C, dll)	Tidak Punya	
(1)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Aceh	64,4	2,3	1,3	1,5	15,3	15,2	100,0
Sumatera Utara	44,1	1,6	2,3	2,5	33,2	16,3	100,0
Sumatera Barat	32,9	2,8	5,2	1,7	18,8	38,7	100,0
Riau	56,8	2,9	2,2	4,0	20,7	13,5	100,0
Jambi	65,4	4,4	4,3	1,7	12,1	12,0	100,0
Sumatera Selatan	57,4	4,0	3,4	2,7	15,8	16,7	100,0
Bengkulu	74,3	5,9	5,0	0,8	6,4	7,5	100,0
Lampung	67,8	5,6	6,5	2,0	11,4	6,6	100,0
Kep. Bangka Belitung	65,3	2,0	3,0	1,5	14,3	13,8	100,0
Kepulauan Riau	31,5	1,3	0,8	48,2	9,8	8,4	100,0
DKI Jakarta	67,7	3,9	3,0	5,6	12,1	7,8	100,0
Jawa Barat	54,7	2,8	4,3	2,6	27,2	8,4	100,0
Jawa Tengah	70,4	3,1	7,4	0,7	15,6	2,7	100,0
DI Yogyakarta	66,7	4,5	19,3	0,4	3,9	5,3	100,0
Jawa Timur	63,1	3,0	4,4	1,8	23,4	4,2	100,0
Banten	63,6	3,9	4,1	1,4	19,6	7,3	100,0
Bali	54,3	14,9	15,5	1,2	6,0	8,1	100,0
Nusa Tenggara Barat	52,6	5,2	10,3	1,6	15,0	15,2	100,0
Nusa Tenggara Timur	52,0	3,4	4,4	1,0	25,8	13,5	100,0
Kalimantan Barat	62,3	2,7	3,3	1,5	16,1	14,0	100,0
Kalimantan Tengah	69,0	2,8	2,4	1,2	15,0	9,6	100,0
Kalimantan Selatan	65,2	2,0	2,6	2,6	14,5	13,2	100,0
Kalimantan Timur	62,6	4,5	3,6	3,8	16,3	9,2	100,0
Kalimantan Utara	71,9	1,5	3,3	2,4	11,0	9,8	100,0
Sulawesi Utara	61,3	3,0	3,0	1,8	16,1	14,9	100,0
Sulawesi Tengah	66,7	3,6	3,1	1,0	10,0	15,6	100,0
Sulawesi Selatan	50,8	2,7	3,9	1,4	16,1	25,0	100,0
Sulawesi Tenggara	74,8	6,1	6,1	0,4	4,2	8,3	100,0
Gorontalo	74,0	1,8	3,8	1,9	10,4	8,1	100,0
Sulawesi Barat	59,1	3,0	3,3	1,6	20,5	12,5	100,0
Maluku	59,9	1,9	2,8	1,0	6,4	27,9	100,0
Maluku Utara	82,0	2,1	1,4	0,4	2,0	12,2	100,0
Papua Barat	48,9	3,0	4,7	0,5	3,7	39,2	100,0
Papua Barat Daya	49,0	2,5	3,2	0,6	10,2	34,5	100,0
Papua	56,9	3,3	2,0	0,5	3,6	33,7	100,0
Papua Selatan	41,0	1,4	2,9	0,9	4,7	49,0	100,0
Papua Tengah	22,9	1,0	1,0	~0	1,5	73,5	100,0
Papua Pegunungan	2,2	0,2	0,3	–	1,1	96,3	100,0
Indonesia	59,9	3,4	4,9	2,3	19,2	10,3	100,0

Lampiran 22
 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi, Status Migrasi Risen Antarprovinsi, dan Rata-Rata Luas Lantai Tempat Tinggal per Kapita, 2024

Provinsi	Rumah Tangga Migran			Rumah Tangga Nonmigran		
	Rata-Rata Luas Lantai Rumah Bangunan Tempat Tinggal per Kapita (m ²)		Jumlah	Rata-Rata Luas Lantai Rumah Bangunan Tempat Tinggal per Kapita (m ²)		Jumlah
	<7,2	≥7,2		<7,2	≥7,2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	5,2	94,8	100,0	7,0	93,0	100,0
Sumatera Utara	4,1	95,9	100,0	7,0	93,0	100,0
Sumatera Barat	4,4	95,6	100,0	4,6	95,4	100,0
Riau	9,0	91,0	100,0	5,3	94,7	100,0
Jambi	3,8	96,2	100,0	3,7	96,3	100,0
Sumatera Selatan	3,6	96,4	100,0	8,8	91,2	100,0
Bengkulu	9,4	90,6	100,0	4,2	95,8	100,0
Lampung	0,6	99,4	100,0	1,5	98,5	100,0
Kep. Bangka Belitung	10,4	89,6	100,0	3,1	96,9	100,0
Kepulauan Riau	10,0	90,0	100,0	4,4	95,6	100,0
DKI Jakarta	18,1	81,9	100,0	21,6	78,4	100,0
Jawa Barat	8,6	91,4	100,0	5,7	94,3	100,0
Jawa Tengah	1,2	98,8	100,0	1,7	98,3	100,0
DI Yogyakarta	6,1	93,9	100,0	3,6	96,4	100,0
Jawa Timur	1,8	98,2	100,0	2,6	97,4	100,0
Banten	0,8	99,2	100,0	4,0	96,0	100,0
Bali	11,5	88,5	100,0	4,6	95,4	100,0
Nusa Tenggara Barat	9,1	90,9	100,0	8,6	91,4	100,0
Nusa Tenggara Timur	15,4	84,6	100,0	11,9	88,1	100,0
Kalimantan Barat	2,6	97,4	100,0	2,6	97,4	100,0
Kalimantan Tengah	4,3	95,7	100,0	3,6	96,4	100,0
Kalimantan Selatan	6,8	93,2	100,0	3,5	96,5	100,0
Kalimantan Timur	5,9	94,1	100,0	5,8	94,2	100,0
Kalimantan Utara	3,4	96,6	100,0	7,7	92,3	100,0
Sulawesi Utara	7,5	92,5	100,0	7,5	92,5	100,0
Sulawesi Tengah	9,4	90,6	100,0	10,4	89,6	100,0
Sulawesi Selatan	5,6	94,4	100,0	5,5	94,5	100,0
Sulawesi Tenggara	6,2	93,8	100,0	7,0	93,0	100,0
Gorontalo	12,6	87,4	100,0	11,0	89,0	100,0
Sulawesi Barat	9,0	91,0	100,0	8,3	91,7	100,0
Maluku	12,7	87,3	100,0	10,8	89,2	100,0
Maluku Utara	6,5	93,5	100,0	6,3	93,7	100,0
Papua Barat	13,8	86,2	100,0	11,0	89,0	100,0
Papua Barat Daya	10,4	89,6	100,0	12,9	87,1	100,0
Papua	6,1	93,9	100,0	13,1	86,9	100,0
Papua Selatan	17,9	82,1	100,0	21,0	79,0	100,0
Papua Tengah	27,1	72,9	100,0	33,2	66,8	100,0
Papua Pegunungan	–	100,0	100,0	43,0	57,0	100,0
Indonesia	6,1	93,9	100,0	5,7	94,3	100,0

Lampiran 23

Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi, Status Migrasi Risen Antarprovinsi, dan Bahan Bangunan Utama Dinding Rumah Terluas, 2024

Provinsi	Rumah Tangga Migran							Jumlah
	Bahan Bangunan Utama Dinding Rumah Terluas							
	Tembok	Plesteran Anyaman Bambu/ Kawat	Kayu/ Papan	Anyaman Bambu	Batang Kayu	Bambu	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	72,4	–	26,8	–	0,7	–	–	100,0
Sumatera Utara	69,0	–	28,5	1,9	0,1	–	0,4	100,0
Sumatera Barat	79,5	2,0	18,3	–	0,2	–	~0	100,0
Riau	69,0	3,3	27,1	–	0,6	–	–	100,0
Jambi	81,9	–	18,1	–	–	–	–	100,0
Sumatera Selatan	79,8	1,4	17,3	–	1,6	–	–	100,0
Bengkulu	80,2	5,6	14,2	–	–	–	–	100,0
Lampung	94,2	–	4,2	0,9	–	–	0,6	100,0
Kep. Bangka Belitung	90,2	–	9,8	–	–	–	–	100,0
Kepulauan Riau	97,3	0,3	2,3	–	~0	–	0,1	100,0
DKI Jakarta	99,5	–	0,5	–	–	–	–	100,0
Jawa Barat	95,2	0,1	1,2	3,5	–	–	–	100,0
Jawa Tengah	89,1	0,6	9,3	0,2	0,4	–	0,4	100,0
DI Yogyakarta	97,5	–	1,2	0,5	–	–	0,8	100,0
Jawa Timur	94,0	0,1	4,4	1,1	–	–	0,4	100,0
Banten	96,3	–	–	2,9	–	–	0,9	100,0
Bali	94,6	–	5,4	–	–	–	–	100,0
Nusa Tenggara Barat	87,0	–	5,6	5,3	0,4	0,9	0,8	100,0
Nusa Tenggara Timur	58,5	0,7	10,1	9,3	0,8	11,7	8,9	100,0
Kalimantan Barat	62,4	30,0	7,6	–	–	–	–	100,0
Kalimantan Tengah	50,6	–	49,1	–	–	–	0,2	100,0
Kalimantan Selatan	61,1	–	37,6	–	–	–	1,3	100,0
Kalimantan Timur	56,4	–	43,5	–	0,1	–	–	100,0
Kalimantan Utara	44,2	–	55,8	–	–	–	–	100,0
Sulawesi Utara	92,2	–	7,1	–	–	–	0,7	100,0
Sulawesi Tengah	82,2	–	17,8	–	–	–	–	100,0
Sulawesi Selatan	63,7	–	24,9	1,5	1,3	–	8,5	100,0
Sulawesi Tenggara	64,3	–	33,8	0,5	–	–	1,4	100,0
Gorontalo	92,6	–	6,1	1,3	–	–	–	100,0
Sulawesi Barat	69,1	–	30,7	–	–	–	0,3	100,0
Maluku	89,5	0,8	9,7	–	–	–	–	100,0
Maluku Utara	84,0	–	16,0	–	–	–	–	100,0
Papua Barat	62,7	–	36,9	–	–	–	0,4	100,0
Papua Barat Daya	81,6	–	18,4	–	–	–	–	100,0
Papua	84,5	–	15,5	–	–	–	–	100,0
Papua Selatan	65,2	–	32,9	1,9	–	–	–	100,0
Papua Tengah	32,1	–	59,7	–	8,2	–	–	100,0
Papua Pegunungan	22,4	–	77,6	–	–	–	–	100,0
Indonesia	86,3	0,6	10,2	1,4	0,2	0,4	0,9	100,0

Lanjutan Lampiran 23

Provinsi	Rumah Tangga Nonmigran							
	Bahan Bangunan Utama Dinding Rumah Terluas							Jumlah
	Tembok	Plesteran Anyaman Bambu/ Kawat	Kayu/ Papan	Anyaman Bambu	Batang Kayu	Bambu	Lainnya	
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Aceh	59,6	0,2	38,7	0,4	0,4	0,1	0,7	100,0
Sumatera Utara	73,9	0,4	23,9	1,2	0,3	0,1	0,3	100,0
Sumatera Barat	79,6	1,1	18,6	0,2	0,2	0,1	0,2	100,0
Riau	66,3	1,9	30,8	0,1	0,5	0,1	0,4	100,0
Jambi	71,8	0,6	26,6	~0	0,4	0,1	0,5	100,0
Sumatera Selatan	70,7	0,3	28,1	0,2	0,2	0,1	0,4	100,0
Bengkulu	74,5	4,7	19,1	0,3	0,3	0,4	0,6	100,0
Lampung	86,5	~0	11,6	1,4	~0	0,1	0,4	100,0
Kep. Bangka Belitung	89,1	0,1	10,4	~0	0,1	0,2	0,1	100,0
Kepulauan Riau	87,7	0,6	9,9	~0	0,1	~0	1,7	100,0
DKI Jakarta	97,1	0,2	2,7	~0	–	–	–	100,0
Jawa Barat	89,8	1,1	3,4	4,5	0,1	0,3	0,7	100,0
Jawa Tengah	85,2	0,3	12,9	0,7	0,1	0,1	0,7	100,0
DI Yogyakarta	96,6	0,4	1,7	0,9	0,1	~0	0,4	100,0
Jawa Timur	91,7	0,4	6,3	1,2	~0	~0	0,3	100,0
Banten	93,1	0,7	1,3	3,9	0,1	0,3	0,6	100,0
Bali	98,9	0,1	0,6	0,3	~0	~0	0,1	100,0
Nusa Tenggara Barat	84,9	0,4	9,6	4,1	0,1	0,4	0,7	100,0
Nusa Tenggara Timur	60,4	0,9	10,8	5,8	0,7	8,0	13,4	100,0
Kalimantan Barat	52,4	33,6	13,7	~0	0,2	~0	~0	100,0
Kalimantan Tengah	40,9	1,1	57,7	0,1	0,1	–	0,2	100,0
Kalimantan Selatan	32,9	0,4	66,5	0,1	–	–	0,1	100,0
Kalimantan Timur	50,4	0,1	49,4	~0	~0	–	0,1	100,0
Kalimantan Utara	42,7	0,2	57,0	–	~0	–	0,1	100,0
Sulawesi Utara	78,3	0,2	19,0	0,2	0,3	0,4	1,6	100,0
Sulawesi Tengah	69,5	0,3	29,0	0,3	0,1	0,0	0,7	100,0
Sulawesi Selatan	56,1	0,2	31,4	1,6	0,9	0,1	9,9	100,0
Sulawesi Tenggara	60,9	0,3	37,7	0,2	–	0,1	0,8	100,0
Gorontalo	87,3	–	11,6	1,0	~0	0,1	0,1	100,0
Sulawesi Barat	62,4	0,4	31,7	0,6	0,9	0,1	3,9	100,0
Maluku	86,3	0,3	12,4	0,1	0,1	0,1	0,7	100,0
Maluku Utara	84,0	0,8	14,3	0,1	0,2	0,2	0,4	100,0
Papua Barat	73,3	–	26,0	0,1	0,5	0,1	0,1	100,0
Papua Barat Daya	79,6	~0	19,2	0,1	0,5	0,1	0,4	100,0
Papua	74,0	0,9	24,1	~0	0,4	0,1	0,5	100,0
Papua Selatan	47,8	0,3	47,7	0,1	2,1	0,1	1,9	100,0
Papua Tengah	17,2	0,2	77,1	0,1	4,2	0,2	1,1	100,0
Papua Pegunungan	4,3	~0	90,3	~0	4,8	0,2	0,4	100,0
Indonesia	81,1	1,2	14,5	1,7	0,2	0,3	1,0	100,0

Lampiran 24

Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi, Status Migrasi Risen Antarprovinsi, dan Bahan Bangunan Utama Lantai Rumah Terluas, 2024

Provinsi	Rumah Tangga Migran									Jumlah
	Bahan Bangunan Utama Lantai Rumah Terluas									
	Marmmer/ Granit	Keramik	Parket/ Vinil/ Karpet	Ubin/ Tegel/ Teraso	Kayu/ Papan	Semen/ Bata Merah	Bambu	Tanah	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aceh	3,7	46,6	–	0,2	4,4	44,3	–	0,8	–	100,0
Sumatera Utara	0,1	44,6	–	2,2	6,8	44,0	0,2	2,1	–	100,0
Sumatera Barat	4,7	40,1	–	0,7	3,9	50,6	–	–	–	100,0
Riau	–	42,8	–	1,9	17,1	35,1	0,3	2,9	–	100,0
Jambi	7,2	35,8	–	–	10,2	44,5	–	2,4	–	100,0
Sumatera Selatan	1,7	49,5	–	3,3	5,0	38,7	–	1,7	–	100,0
Bengkulu	–	57,7	2,0	3,4	2,7	34,3	–	–	–	100,0
Lampung	1,6	48,0	–	0,6	2,4	46,0	–	1,3	–	100,0
Kep. Bangka Belitung	0,6	70,0	–	–	–	26,3	–	3,1	–	100,0
Kepulauan Riau	3,0	88,7	–	0,1	0,6	7,6	–	–	–	100,0
DKI Jakarta	5,0	91,3	–	2,8	0,7	0,1	–	–	–	100,0
Jawa Barat	8,0	86,2	0,3	2,0	1,0	0,4	0,8	1,3	–	100,0
Jawa Tengah	3,3	66,7	0,6	6,8	1,0	16,7	–	5,0	–	100,0
DI Yogyakarta	0,4	83,1	–	7,3	–	8,0	–	1,2	–	100,0
Jawa Timur	4,1	68,8	1,3	5,5	0,9	16,1	–	3,4	~0	100,0
Banten	7,5	87,5	–	1,4	–	0,8	2,8	–	–	100,0
Bali	4,8	79,3	5,4	4,4	–	6,1	–	–	–	100,0
Nusa Tenggara Barat	0,7	56,0	1,4	–	5,0	36,5	–	0,5	–	100,0
Nusa Tenggara Timur	1,3	25,3	–	0,0	1,7	62,0	2,1	7,2	0,5	100,0
Kalimantan Barat	–	65,2	–	0,9	19,9	14,1	–	–	–	100,0
Kalimantan Tengah	4,1	31,6	–	1,9	41,9	20,5	–	–	–	100,0
Kalimantan Selatan	1,1	52,4	–	1,7	33,8	10,9	–	–	–	100,0
Kalimantan Timur	–	50,6	–	1,1	39,2	9,0	–	–	–	100,0
Kalimantan Utara	–	31,0	4,6	1,9	47,2	15,4	–	–	–	100,0
Sulawesi Utara	3,4	41,1	–	4,5	4,6	45,1	–	–	1,4	100,0
Sulawesi Tengah	2,7	38,7	–	13,3	1,4	44,0	–	–	–	100,0
Sulawesi Selatan	2,5	46,1	–	3,1	26,5	21,5	–	0,3	–	100,0
Sulawesi Tenggara	2,6	38,6	–	2,8	15,5	39,3	1,2	–	–	100,0
Gorontalo	–	52,6	–	3,9	3,5	40,0	–	–	–	100,0
Sulawesi Barat	4,9	35,4	–	7,6	19,7	32,3	–	–	–	100,0
Maluku	0,4	48,5	0,3	10,8	0,6	39,2	–	–	0,1	100,0
Maluku Utara	0,4	42,2	0,6	6,8	10,4	38,5	–	1,1	–	100,0
Papua Barat	–	39,5	–	3,4	23,1	31,4	0,8	1,8	–	100,0
Papua Barat Daya	–	47,9	0,1	8,1	12,1	29,4	–	2,4	–	100,0
Papua	5,4	66,2	0,3	3,0	8,2	16,9	–	–	–	100,0
Papua Selatan	2,5	57,2	2,2	–	25,9	3,9	–	8,4	–	100,0
Papua Tengah	–	56,0	–	1,6	6,6	14,8	–	21,1	–	100,0
Papua Pegunungan	–	–	–	–	19,3	26,6	–	54,1	–	100,0
Indonesia	3,5	65,3	0,4	3,6	4,9	19,8	0,3	2,2	~0	100,0

Lanjutan Lampiran 24

Provinsi	Rumah Tangga Nonmigran									Jumlah
	Bahan Bangunan Utama Lantai Rumah Terluas									
	Marmar/ Granit	Keramik	Parket/ Vinil/ Karpet	Ubin/ Tegel/ Teraso	Kayu/ Papan	Semen/ Bata Merah	Bambu	Tanah	Lainnya	
(1)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Aceh	3,0	27,0	0,4	0,6	7,1	60,0	0,4	1,5	0,1	100,0
Sumatera Utara	1,3	46,6	~0	1,0	5,2	44,7	0,1	0,9	~0	100,0
Sumatera Barat	1,8	34,1	0,2	1,2	6,2	56,0	0,2	0,3	–	100,0
Riau	2,1	37,8	0,4	1,6	18,0	39,4	0,3	0,4	–	100,0
Jambi	2,2	34,0	0,5	0,8	16,3	44,9	0,5	0,8	~0	100,0
Sumatera Selatan	1,9	41,6	0,3	1,0	20,4	33,2	0,2	1,4	~0	100,0
Bengkulu	1,9	49,6	0,3	1,6	4,5	41,3	0,1	0,6	~0	100,0
Lampung	2,1	41,7	~0	1,5	2,2	50,4	0,1	2,0	–	100,0
Kep. Bangka Belitung	1,6	67,1	0,1	0,8	1,2	29,2	~0	~0	–	100,0
Kepulauan Riau	2,4	69,3	0,4	0,7	7,8	19,4	~0	~0	~0	100,0
DKI Jakarta	3,0	89,6	0,3	4,0	1,2	1,8	~0	0,1	–	100,0
Jawa Barat	2,3	79,8	0,3	5,3	4,7	6,0	0,8	0,8	~0	100,0
Jawa Tengah	2,2	61,5	0,4	7,4	0,8	20,0	0,1	7,5	0,1	100,0
DI Yogyakarta	1,1	66,1	0,1	7,7	0,4	23,2	~0	1,2	0,1	100,0
Jawa Timur	2,2	68,4	0,4	5,8	0,4	17,5	0,2	5,0	0,1	100,0
Banten	2,9	87,4	0,1	2,9	1,2	2,8	1,6	1,1	–	100,0
Bali	2,2	82,5	0,3	1,3	0,2	13,2	–	0,2	~0	100,0
Nusa Tenggara Barat	1,3	48,9	0,1	0,7	8,1	39,8	0,3	0,8	~0	100,0
Nusa Tenggara Timur	1,0	23,9	0,2	0,3	3,7	56,7	4,1	9,9	0,2	100,0
Kalimantan Barat	0,6	45,7	0,2	1,2	32,4	19,8	0,1	~0	–	100,0
Kalimantan Tengah	0,9	30,3	0,6	1,0	52,4	14,6	~0	0,2	~0	100,0
Kalimantan Selatan	0,2	28,1	–	0,8	61,2	9,5	~0	0,2	–	100,0
Kalimantan Timur	1,0	46,0	1,1	0,8	41,6	9,2	0,1	0,1	–	100,0
Kalimantan Utara	1,0	32,8	1,0	3,1	49,8	12,2	–	0,1	–	100,0
Sulawesi Utara	1,3	34,7	0,6	9,8	5,5	45,7	0,5	1,9	0,1	100,0
Sulawesi Tengah	1,0	32,1	0,6	7,4	9,4	47,5	0,5	1,2	0,1	100,0
Sulawesi Selatan	1,6	36,5	0,4	5,4	33,7	21,8	0,2	0,4	0,1	100,0
Sulawesi Tenggara	1,4	38,4	–	2,9	15,8	39,9	0,8	0,8	–	100,0
Gorontalo	0,3	40,4	~0	0,5	1,5	56,6	0,2	0,4	–	100,0
Sulawesi Barat	1,7	28,4	0,4	6,0	22,9	38,9	0,4	1,2	0,1	100,0
Maluku	0,8	43,0	1,1	8,4	3,9	40,1	0,5	2,1	0,1	100,0
Maluku Utara	1,6	33,9	0,6	6,5	4,0	49,4	0,5	3,4	0,1	100,0
Papua Barat	0,1	40,8	1,4	4,8	15,4	36,5	0,2	0,7	0,0	100,0
Papua Barat Daya	0,1	49,9	0,6	5,0	12,7	29,7	0,1	1,4	0,4	100,0
Papua	1,2	37,7	1,1	4,5	19,8	34,7	0,3	0,6	0,1	100,0
Papua Selatan	0,8	21,7	0,7	5,2	37,3	31,9	0,3	1,4	0,7	100,0
Papua Tengah	0,5	16,6	4,3	3,0	43,7	13,9	0,4	17,5	0,1	100,0
Papua Pegunungan	0,1	0,4	0,4	0,2	34,2	12,7	4,1	39,0	8,8	100,0
Indonesia	2,0	59,8	0,3	4,1	8,1	22,3	0,5	2,7	0,1	100,0

Lampiran 25
 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi, Status Migrasi Risen Antarprovinsi, dan Bahan Bangunan Utama Atap Rumah Terluas, 2024

Provinsi	Rumah Tangga Migran								Jumlah
	Bahan Bangunan Utama Atap Rumah Terluas								
	Beton	Genteng	Seng	Asbes	Bambu	Kayu/ Sirap	Jerami/ Ijuk/Daun- Daunan/ Rumbia	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	4,5	0,3	95,2	–	–	–	–	–	100,0
Sumatera Utara	2,4	0,6	92,2	~0	2,3	~0	2,5	–	100,0
Sumatera Barat	0,6	3,6	94,3	1,4	~0	0,1	–	–	100,0
Riau	2,1	1,3	90,2	5,7	–	0,7	–	–	100,0
Jambi	5,3	21,3	70,0	3,4	–	0,0	–	–	100,0
Sumatera Selatan	1,7	50,9	39,5	7,4	–	0,5	–	–	100,0
Bengkulu	1,3	5,1	93,4	0,2	–	–	–	–	100,0
Lampung	0,0	93,4	1,5	5,1	–	–	–	–	100,0
Kep. Bangka Belitung	1,1	15,9	30,7	52,3	–	–	–	–	100,0
Kepulauan Riau	4,3	12,1	63,3	20,3	–	–	–	–	100,0
DKI Jakarta	5,3	50,4	2,2	42,0	–	–	–	–	100,0
Jawa Barat	5,5	73,1	1,7	19,7	–	–	–	–	100,0
Jawa Tengah	2,0	85,4	7,8	4,6	–	–	–	0,2	100,0
DI Yogyakarta	0,5	95,7	0,4	3,4	–	–	–	–	100,0
Jawa Timur	3,8	88,9	2,2	5,1	–	–	–	–	100,0
Banten	~0	80,0	1,1	18,9	–	–	–	–	100,0
Bali	2,7	76,8	4,2	16,2	–	–	–	–	100,0
Nusa Tenggara Barat	2,4	51,4	38,9	6,9	0,5	–	–	–	100,0
Nusa Tenggara Timur	0,1	1,9	96,8	0,2	–	–	1,1	–	100,0
Kalimantan Barat	–	6,2	93,8	–	–	–	–	–	100,0
Kalimantan Tengah	–	16,2	78,5	3,9	–	1,4	–	–	100,0
Kalimantan Selatan	–	2,0	87,1	7,1	–	3,8	–	–	100,0
Kalimantan Timur	1,6	9,1	84,9	0,9	–	3,5	–	–	100,0
Kalimantan Utara	3,3	–	96,7	–	–	–	–	–	100,0
Sulawesi Utara	0,6	0,5	96,5	2,4	–	–	–	–	100,0
Sulawesi Tengah	–	2,1	95,0	1,7	1,2	–	~0	–	100,0
Sulawesi Selatan	1,1	4,1	91,6	2,5	0,4	–	0,3	–	100,0
Sulawesi Tenggara	2,4	1,5	90,9	3,1	2,1	–	0,2	–	100,0
Gorontalo	–	–	98,7	–	–	–	1,3	–	100,0
Sulawesi Barat	–	2,9	92,3	1,5	–	0,4	1,9	0,9	100,0
Maluku	3,7	–	95,7	0,5	0,1	0,0	–	–	100,0
Maluku Utara	0,7	0,1	96,7	2,5	0,1	–	–	–	100,0
Papua Barat	0,1	–	98,7	–	1,0	0,2	–	–	100,0
Papua Barat Daya	–	–	99,4	0,6	–	–	–	–	100,0
Papua	0,1	–	96,3	3,5	–	–	–	–	100,0
Papua Selatan	0,6	16,8	77,0	–	5,6	–	–	–	100,0
Papua Tengah	–	–	100,0	–	–	–	–	–	100,0
Papua Pegunungan	–	–	45,9	–	–	–	54,1	–	100,0
Indonesia	2,5	54,7	32,7	9,6	0,2	0,1	0,2	~0	100,0

Lanjutan Lampiran 25

Provinsi	Rumah Tangga Nonmigran								Jumlah
	Bahan Bangunan Utama Atap Rumah Terluas								
	Beton	Genteng	Seng	Asbes	Bambu	Kayu/ Sirap	Jerami/ Ijuk/Daun- Daunan/ Rumbia	Lainnya	
(1)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Aceh	2,2	2,7	92,4	1,2	0,2	0,3	0,9	~0	100,0
Sumatera Utara	2,1	2,2	91,7	2,2	1,2	0,1	0,5	~0	100,0
Sumatera Barat	1,1	1,8	95,6	0,8	0,2	0,1	0,3	–	100,0
Riau	1,4	2,7	93,2	2,1	0,1	0,2	0,3	~0	100,0
Jambi	1,8	17,8	77,8	2,3	0,2	0,1	0,1	~0	100,0
Sumatera Selatan	2,1	52,8	37,3	6,9	0,2	0,2	0,4	0,3	100,0
Bengkulu	1,0	4,0	92,3	1,9	0,6	0,1	–	0,1	100,0
Lampung	0,2	87,1	4,7	7,6	0,3	~0	~0	~0	100,0
Kep. Bangka Belitung	1,6	8,3	32,3	57,6	–	–	0,1	0,1	100,0
Kepulauan Riau	3,2	7,1	55,3	33,9	0,1	~0	0,2	0,2	100,0
DKI Jakarta	4,1	37,3	3,5	55,0	~0	~0	–	–	100,0
Jawa Barat	3,4	79,8	1,4	15,3	0,1	~0	~0	~0	100,0
Jawa Tengah	1,2	85,2	7,6	5,8	0,1	~0	–	0,1	100,0
DI Yogyakarta	1,4	93,3	2,5	2,7	~0	–	–	~0	100,0
Jawa Timur	2,0	90,6	1,3	5,9	~0	~0	~0	~0	100,0
Banten	2,5	77,6	1,0	18,4	0,1	~0	0,3	~0	100,0
Bali	2,1	79,6	12,5	5,7	0,1	–	~0	~0	100,0
Nusa Tenggara Barat	2,2	44,7	41,5	11,2	0,3	0,1	~0	~0	100,0
Nusa Tenggara Timur	0,2	1,0	95,0	0,1	0,2	0,1	3,1	0,2	100,0
Kalimantan Barat	0,4	2,2	95,5	0,6	0,1	0,7	0,4	–	100,0
Kalimantan Tengah	1,0	8,3	81,5	4,0	0,1	4,9	0,2	~0	100,0
Kalimantan Selatan	0,6	4,9	82,7	7,5	0,1	3,3	0,8	–	100,0
Kalimantan Timur	1,0	5,5	89,3	2,5	0,1	1,4	0,1	~0	100,0
Kalimantan Utara	1,0	2,3	96,1	0,5	–	0,1	–	–	100,0
Sulawesi Utara	1,7	2,3	94,3	1,3	0,1	0,1	0,2	~0	100,0
Sulawesi Tengah	1,4	2,1	92,5	0,6	0,4	0,4	2,5	~0	100,0
Sulawesi Selatan	1,1	2,3	94,2	1,3	0,1	0,2	0,5	0,3	100,0
Sulawesi Tenggara	0,9	2,2	92,5	3,3	0,3	0,2	0,5	0,1	100,0
Gorontalo	0,1	0,5	98,6	0,2	~0	–	0,6	~0	100,0
Sulawesi Barat	0,8	1,5	94,9	0,9	~0	0,1	1,6	0,3	100,0
Maluku	2,2	1,5	91,8	2,4	0,6	0,1	1,4	0,1	100,0
Maluku Utara	1,3	1,4	94,3	1,5	0,3	0,2	0,9	~0	100,0
Papua Barat	~0	2,5	96,7	0,2	~0	0,4	0,2	–	100,0
Papua Barat Daya	0,1	2,6	96,0	0,6	–	~0	0,8	–	100,0
Papua	1,2	2,8	93,7	1,6	0,2	0,3	0,1	–	100,0
Papua Selatan	0,1	0,6	90,0	0,8	1,6	0,5	6,2	0,2	100,0
Papua Tengah	0,3	0,6	77,9	0,1	0,4	1,7	19,0	~0	100,0
Papua Pegunungan	~0	~0	51,1	0,1	0,4	0,8	42,0	5,6	100,0
Indonesia	2,0	54,9	32,4	9,7	0,2	0,2	0,5	0,1	100,0

Lampiran 26
 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi, Status Migrasi Risen Antarprovinsi, dan Sumber Air Utama Minum Rumah Tangga, 2024

Provinsi	Rumah Tangga Migran		Rumah Tangga Nonmigran	
	Sumber Air Minum Bersih ¹	Akses Air Minum Layak ²	Sumber Air Minum Bersih ¹	Akses Air Minum Layak ²
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	79,1	87,3	74,7	90,1
Sumatera Utara	69,3	95,0	74,6	92,9
Sumatera Barat	82,3	88,0	79,6	86,8
Riau	82,3	88,7	74,9	92,3
Jambi	72,3	77,4	68,3	82,2
Sumatera Selatan	70,1	97,3	69,4	87,1
Bengkulu	65,5	84,0	57,0	71,8
Lampung	76,1	86,8	69,8	84,5
Kep. Bangka Belitung	94,2	84,4	87,5	82,9
Kepulauan Riau	99,1	98,6	94,1	94,4
DKI Jakarta	93,7	100,0	94,6	100,0
Jawa Barat	87,9	97,6	80,0	94,9
Jawa Tengah	78,4	95,0	83,4	95,4
DI Yogyakarta	93,0	98,8	76,8	96,8
Jawa Timur	85,9	96,8	81,9	96,9
Banten	87,5	96,5	78,2	94,0
Bali	97,3	100,0	88,5	98,3
Nusa Tenggara Barat	77,5	94,5	75,3	96,2
Nusa Tenggara Timur	74,9	92,3	67,8	88,4
Kalimantan Barat	49,6	98,9	40,4	82,0
Kalimantan Tengah	85,4	76,6	73,7	78,8
Kalimantan Selatan	82,2	79,3	79,9	77,3
Kalimantan Timur	99,1	97,4	95,6	88,9
Kalimantan Utara	82,6	91,3	83,6	89,4
Sulawesi Utara	88,5	94,3	83,9	94,5
Sulawesi Tengah	84,1	92,0	76,5	87,8
Sulawesi Selatan	84,1	95,3	82,4	92,2
Sulawesi Tenggara	90,7	95,1	86,7	95,3
Gorontalo	98,3	98,4	90,2	96,1
Sulawesi Barat	68,0	82,8	72,0	80,1
Maluku	83,8	94,4	74,7	93,3
Maluku Utara	71,2	90,7	70,6	88,9
Papua Barat	76,2	80,3	53,5	82,5
Papua Barat Daya	77,1	84,9	70,8	81,6
Papua	96,5	100,0	71,6	85,6
Papua Selatan	88,6	82,7	51,2	71,6
Papua Tengah	52,7	98,4	32,7	81,4
Papua Pegunungan	27,0	29,1	13,3	30,7
Indonesia	83,5	94,6	78,6	92,6

Catatan: ¹ Terdiri dari air kemasan, air isi ulang, leding, dan [(sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung) dengan jarak ke Tempat Penampungan Limbah/Kotoran/Tinja Terdekat ≥ 10 m]
² Terdiri dari leding, air hujan, sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung serta jika sumber air minum dari kemasan/air isi ulang dimana sumber air cuci/masak/mandi/dll menggunakan leding, air hujan, sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung

Lampiran 27
 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi, Status Migrasi Risen Antarprovinsi, dan Bahan Bakar Utama untuk Memasak, 2024

Provinsi	Rumah Tangga Migran							
	Bahan Bakar Utama untuk Memasak							Jumlah
	Listrik	Elpiji/ Gas Kota/ Biogas	Minyak Tanah	Arang/ Briket	Kayu Bakar	Lainnya	Tidak Memasak di Rumah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	4,2	91,8	1,9	–	1,8	~0	0,3	100,0
Sumatera Utara	0,6	94,6	–	–	4,5	–	0,2	100,0
Sumatera Barat	1,4	86,7	0,8	–	7,2	–	3,9	100,0
Riau	0,6	94,8	0,4	–	2,9	–	1,2	100,0
Jambi	–	95,7	2,8	–	1,6	–	–	100,0
Sumatera Selatan	0,2	95,2	–	–	4,5	–	–	100,0
Bengkulu	–	98,0	–	–	0,8	–	1,2	100,0
Lampung	3,0	92,7	–	–	4,4	–	–	100,0
Kep. Bangka Belitung	0,6	99,0	–	–	–	–	0,4	100,0
Kepulauan Riau	5,6	74,2	1,9	–	–	–	18,3	100,0
DKI Jakarta	1,9	96,5	–	–	–	–	1,6	100,0
Jawa Barat	1,4	92,1	–	–	0,7	–	5,8	100,0
Jawa Tengah	0,2	91,9	–	–	7,6	–	0,3	100,0
DI Yogyakarta	12,6	54,8	–	–	3,1	1,8	27,7	100,0
Jawa Timur	0,2	87,6	–	–	11,9	–	0,3	100,0
Banten	–	97,4	–	–	2,6	–	–	100,0
Bali	3,1	76,8	–	–	1,1	–	19,0	100,0
Nusa Tenggara Barat	–	94,4	1,1	–	4,5	–	0,1	100,0
Nusa Tenggara Timur	3,7	2,9	30,2	0,4	62,8	–	–	100,0
Kalimantan Barat	0,6	93,9	–	–	5,6	–	–	100,0
Kalimantan Tengah	–	98,1	~0	–	1,3	–	0,6	100,0
Kalimantan Selatan	1,0	97,2	0,2	–	1,6	–	–	100,0
Kalimantan Timur	2,4	97,6	–	–	~0	–	–	100,0
Kalimantan Utara	1,7	97,7	–	–	0,5	–	–	100,0
Sulawesi Utara	3,9	91,9	1,0	–	3,2	–	–	100,0
Sulawesi Tengah	–	83,5	7,4	0,4	6,9	–	1,8	100,0
Sulawesi Selatan	0,2	95,7	–	–	4,1	–	0,1	100,0
Sulawesi Tenggara	–	67,9	17,8	–	13,3	–	0,9	100,0
Gorontalo	1,0	97,0	–	–	2,0	–	–	100,0
Sulawesi Barat	–	79,3	–	–	20,7	–	–	100,0
Maluku	–	6,4	70,1	–	20,1	2,0	1,5	100,0
Maluku Utara	–	4,7	57,8	–	37,5	–	–	100,0
Papua Barat	–	5,2	81,2	–	13,6	–	0,1	100,0
Papua Barat Daya	0,1	10,6	67,2	–	22,1	–	–	100,0
Papua	1,7	13,0	78,0	–	7,4	–	–	100,0
Papua Selatan	–	10,7	73,4	–	11,2	–	4,8	100,0
Papua Tengah	–	22,8	39,1	–	36,4	–	1,8	100,0
Papua Pegunungan	–	–	24,7	–	75,3	–	–	100,0
Indonesia	1,8	84,2	3,1	~0	7,0	0,1	3,9	100,0

Lanjutan Lampiran 27

Provinsi	Rumah Tangga Nonmigran							
	Bahan Bakar Utama untuk Memasak							Jumlah
	Listrik	Elpiji/ Gas Kota/ Biogas	Minyak Tanah	Arang/ Briket	Kayu Bakar	Lainnya	Tidak Memasak di Rumah	
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Aceh	0,4	95,9	1,9	~0	1,5	–	0,4	100,0
Sumatera Utara	0,5	93,7	0,8	–	4,9	–	0,2	100,0
Sumatera Barat	0,3	88,3	1,6	–	9,2	–	0,6	100,0
Riau	0,1	96,7	1,0	0,5	1,6	–	0,2	100,0
Jambi	0,2	94,1	1,2	0,1	4,3	~0	0,1	100,0
Sumatera Selatan	0,3	97,2	0,2	–	2,2	–	0,1	100,0
Bengkulu	0,3	96,0	0,1	–	3,5	–	0,2	100,0
Lampung	0,5	94,0	~0	~0	5,4	~0	0,1	100,0
Kep. Bangka Belitung	0,1	97,7	0,7	–	1,4	–	0,1	100,0
Kepulauan Riau	2,4	89,8	6,5	–	0,4	0,1	0,8	100,0
DKI Jakarta	0,6	97,3	0,5	–	~0	~0	1,5	100,0
Jawa Barat	0,5	94,1	0,1	~0	4,7	~0	0,6	100,0
Jawa Tengah	0,3	91,2	~0	~0	8,2	~0	0,3	100,0
DI Yogyakarta	0,8	86,3	~0	0,1	10,8	~0	1,9	100,0
Jawa Timur	0,6	89,9	0,1	~0	9,0	~0	0,3	100,0
Banten	0,2	93,1	0,1	~0	6,4	–	0,1	100,0
Bali	0,6	90,0	~0	–	8,4	~0	0,9	100,0
Nusa Tenggara Barat	0,4	92,6	1,1	–	5,5	0,1	0,4	100,0
Nusa Tenggara Timur	1,1	1,3	29,7	~0	67,7	0,1	0,1	100,0
Kalimantan Barat	~0	97,3	0,1	–	2,5	–	0,1	100,0
Kalimantan Tengah	0,2	95,1	0,8	~0	3,9	~0	0,1	100,0
Kalimantan Selatan	0,1	92,6	0,7	–	6,3	~0	0,3	100,0
Kalimantan Timur	0,4	98,6	0,2	–	0,6	–	0,2	100,0
Kalimantan Utara	1,4	87,5	1,6	–	9,4	–	0,1	100,0
Sulawesi Utara	0,3	85,5	10,1	–	3,9	–	0,2	100,0
Sulawesi Tengah	~0	76,7	4,0	0,6	18,4	~0	0,2	100,0
Sulawesi Selatan	0,3	95,4	0,1	0,1	4,2	~0	~0	100,0
Sulawesi Tenggara	–	71,2	17,3	0,1	11,4	–	0,1	100,0
Gorontalo	0,3	97,0	0,3	–	2,3	–	0,1	100,0
Sulawesi Barat	0,5	85,3	–	0,1	13,8	–	0,2	100,0
Maluku	0,2	1,4	69,4	~0	28,7	0,1	0,1	100,0
Maluku Utara	0,3	2,2	58,2	~0	39,1	~0	0,1	100,0
Papua Barat	1,1	2,7	61,9	–	33,9	–	0,4	100,0
Papua Barat Daya	0,4	4,8	70,4	–	24,1	–	0,4	100,0
Papua	0,4	4,8	70,0	0,1	24,5	~0	0,2	100,0
Papua Selatan	–	4,0	49,5	0,2	46,3	~0	0,1	100,0
Papua Tengah	0,2	4,6	24,5	~0	70,7	~0	0,1	100,0
Papua Pegunungan	~0	0,1	4,5	0,1	95,3	–	–	100,0
Indonesia	0,4	88,7	2,4	~0	8,1	~0	0,4	100,0

Lampiran 28
 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi, Status Migrasi Risen Antarprovinsi, dan Fasilitas Tempat Buang Air Besar, 2024

Provinsi	Rumah Tangga Migran						Jumlah
	Fasilitas Tempat Buang Air Besar						
	Ada, Digunakan Hanya ART Sendiri	Ada, Digunakan Bersama ART Rumah Tangga Tertentu	Ada, di MCK Komunal	Ada, di MCK Umum/ Siapapun Menggunakan	Ada, ART Tidak Menggunakan	Tidak Ada Fasilitas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	90,6	7,0	–	1,4	–	1,0	100,0
Sumatera Utara	90,5	4,9	–	0,2	0,2	4,1	100,0
Sumatera Barat	82,9	9,4	–	3,3	–	4,5	100,0
Riau	95,2	2,7	–	2,1	–	~0	100,0
Jambi	88,2	4,9	–	0,9	–	6,0	100,0
Sumatera Selatan	95,0	1,8	–	0,1	–	3,1	100,0
Bengkulu	93,8	0,8	2,7	–	–	2,8	100,0
Lampung	97,1	2,3	–	–	–	0,6	100,0
Kep. Bangka Belitung	88,0	9,4	–	0,9	–	1,7	100,0
Kepulauan Riau	77,9	16,7	0,8	4,6	–	0,1	100,0
DKI Jakarta	95,5	4,3	–	0,1	–	0,1	100,0
Jawa Barat	93,5	5,5	–	–	0,8	0,1	100,0
Jawa Tengah	91,6	6,0	–	0,6	0,1	1,8	100,0
DI Yogyakarta	65,0	34,4	0,2	0,4	–	–	100,0
Jawa Timur	93,0	4,7	–	0,8	–	1,4	100,0
Banten	95,7	1,7	–	–	–	2,6	100,0
Bali	88,2	11,8	–	–	–	–	100,0
Nusa Tenggara Barat	83,7	11,4	0,1	0,3	1,6	3,0	100,0
Nusa Tenggara Timur	85,6	8,9	0,5	0,5	0,1	4,4	100,0
Kalimantan Barat	94,4	0,8	–	–	–	4,7	100,0
Kalimantan Tengah	90,9	7,5	–	1,6	–	–	100,0
Kalimantan Selatan	91,5	2,5	–	–	–	6,0	100,0
Kalimantan Timur	92,6	5,8	–	0,1	0,1	1,5	100,0
Kalimantan Utara	90,4	3,8	–	–	–	5,8	100,0
Sulawesi Utara	89,2	7,5	–	0,7	–	2,6	100,0
Sulawesi Tengah	85,1	6,5	–	4,3	–	4,1	100,0
Sulawesi Selatan	95,2	3,9	–	–	0,7	0,3	100,0
Sulawesi Tenggara	88,1	5,3	–	0,4	–	6,2	100,0
Gorontalo	68,2	27,8	2,0	0,6	–	1,3	100,0
Sulawesi Barat	89,7	5,3	–	2,8	1,6	0,5	100,0
Maluku	79,1	12,1	–	2,5	–	6,3	100,0
Maluku Utara	89,0	2,6	–	5,6	–	2,9	100,0
Papua Barat	83,8	3,6	2,4	6,3	1,0	2,9	100,0
Papua Barat Daya	76,7	11,8	1,7	9,6	–	0,3	100,0
Papua	96,7	1,5	1,8	–	–	–	100,0
Papua Selatan	77,9	8,6	–	0,2	–	13,2	100,0
Papua Tengah	63,7	14,8	9,3	–	–	12,1	100,0
Papua Pegunungan	100,0	–	–	–	–	–	100,0
Indonesia	89,3	7,9	0,1	0,8	0,2	1,7	100,0

Lanjutan Lampiran 28

Provinsi	Rumah Tangga Nonmigran						
	Fasilitas Tempat Buang Air Besar						Jumlah
	Ada, Digunakan Hanya ART Sendiri	Ada, Digunakan Bersama ART Rumah Tangga Tertentu	Ada, di MCK Komunal	Ada, di MCK Umum/ Siapapun Menggunakan	Ada, ART Tidak Menggunakan	Tidak Ada Fasilitas	
(1)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Aceh	86,4	4,0	0,1	1,7	0,3	7,5	100,0
Sumatera Utara	91,3	3,2	0,1	0,9	~0	4,4	100,0
Sumatera Barat	83,5	6,5	0,7	2,1	0,2	7,0	100,0
Riau	95,7	2,3	0,1	0,5	~0	1,3	100,0
Jambi	90,8	3,6	0,2	0,5	0,1	4,7	100,0
Sumatera Selatan	88,5	4,3	0,6	1,9	0,1	4,6	100,0
Bengkulu	93,2	2,1	0,1	0,2	0,1	4,3	100,0
Lampung	95,7	2,8	0,1	0,4	~0	1,0	100,0
Kep. Bangka Belitung	96,0	1,4	0,2	0,6	0,1	1,7	100,0
Kepulauan Riau	97,4	1,7	~0	0,3	~0	0,6	100,0
DKI Jakarta	89,3	9,0	0,3	1,2	~0	0,2	100,0
Jawa Barat	89,8	7,0	0,5	1,4	0,1	1,3	100,0
Jawa Tengah	91,0	6,4	0,1	0,5	0,1	1,9	100,0
DI Yogyakarta	88,2	10,1	0,6	0,5	~0	0,6	100,0
Jawa Timur	88,1	7,3	0,1	0,5	0,1	3,9	100,0
Banten	92,7	3,3	0,1	0,8	0,1	3,1	100,0
Bali	88,8	9,2	~0	0,2	0,1	1,7	100,0
Nusa Tenggara Barat	82,2	9,5	0,1	0,7	0,2	7,4	100,0
Nusa Tenggara Timur	86,3	7,2	0,4	0,5	0,1	5,4	100,0
Kalimantan Barat	90,8	3,2	0,2	0,7	–	5,1	100,0
Kalimantan Tengah	89,3	5,0	0,4	3,3	~0	1,9	100,0
Kalimantan Selatan	90,6	5,8	0,1	2,1	~0	1,4	100,0
Kalimantan Timur	96,3	2,1	0,2	0,6	~0	0,7	100,0
Kalimantan Utara	94,5	3,3	0,2	0,9	–	1,1	100,0
Sulawesi Utara	85,9	8,0	0,3	1,0	~0	4,7	100,0
Sulawesi Tengah	82,6	4,9	0,3	3,0	0,2	9,1	100,0
Sulawesi Selatan	92,7	4,7	0,1	0,7	0,1	1,7	100,0
Sulawesi Tenggara	91,2	4,1	0,3	0,4	0,1	3,8	100,0
Gorontalo	71,8	13,4	4,6	3,4	0,1	6,8	100,0
Sulawesi Barat	83,2	5,0	0,7	1,4	2,8	6,9	100,0
Maluku	81,4	5,8	0,7	3,8	0,1	8,2	100,0
Maluku Utara	82,4	5,4	1,4	4,9	0,1	5,9	100,0
Papua Barat	80,2	8,3	1,8	5,8	0,2	3,7	100,0
Papua Barat Daya	82,7	6,4	0,5	8,0	0,1	2,3	100,0
Papua	87,7	5,9	0,9	2,8	~0	2,7	100,0
Papua Selatan	73,2	6,4	0,3	2,4	0,2	17,5	100,0
Papua Tengah	58,0	11,9	0,9	5,4	0,7	23,1	100,0
Papua Pegunungan	44,1	11,0	3,4	6,4	0,5	34,7	100,0
Indonesia	89,4	6,0	0,3	1,0	0,1	3,1	100,0

Lampiran 29
 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi, Status Migrasi Risen Antarprovinsi, dan Jenis Kloset yang Digunakan, 2024

Provinsi	Rumah Tangga Migran		Rumah Tangga Nonmigran	
	Leher Angsa	Plengsengan/ Cemplung/Cubluk	Leher Angsa	Plengsengan/ Cemplung/Cubluk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	100,0	–	97.5	2.5
Sumatera Utara	96,9	3,1	96.9	3.1
Sumatera Barat	96,7	3,3	95.9	4.1
Riau	94,5	5,5	93.4	6.6
Jambi	92,3	7,7	96.7	3.3
Sumatera Selatan	94,8	5,2	93.3	6.7
Bengkulu	96,5	3,5	97.9	2.1
Lampung	98,8	1,2	97.4	2.6
Kep. Bangka Belitung	99,4	0,6	99.6	0.4
Kepulauan Riau	98,6	1,4	95.3	4.7
DKI Jakarta	100,0	~0	99.7	0.3
Jawa Barat	99,7	0,3	97.1	2.9
Jawa Tengah	98,6	1,4	98.4	1.6
DI Yogyakarta	99,4	0,6	99.2	0.8
Jawa Timur	95,5	4,5	95.6	4.4
Banten	100,0	–	99.3	0.7
Bali	100,0	–	99.3	0.7
Nusa Tenggara Barat	100,0	–	99.3	0.7
Nusa Tenggara Timur	92,5	7,5	89.8	10.2
Kalimantan Barat	94,3	5,7	96.7	3.3
Kalimantan Tengah	90,8	9,2	89.6	10.4
Kalimantan Selatan	95,7	4,3	92.3	7.7
Kalimantan Timur	96,8	3,2	96.2	3.8
Kalimantan Utara	93,2	6,8	95.2	4.8
Sulawesi Utara	100,0	–	98.6	1.4
Sulawesi Tengah	99,3	0,7	96.9	3.1
Sulawesi Selatan	98,4	1,6	98.4	1.6
Sulawesi Tenggara	99,5	0,5	97.8	2.2
Gorontalo	100,0	–	99.2	0.8
Sulawesi Barat	96,3	3,7	98.3	1.7
Maluku	99,3	0,7	96.9	3.1
Maluku Utara	96,8	3,2	96.9	3.1
Papua Barat	98,2	1,8	97.8	2.2
Papua Barat Daya	100,0	–	94.4	5.6
Papua	89,9	10,1	88.2	11.8
Papua Selatan	90,3	9,7	80.7	19.3
Papua Tengah	99,6	0,4	60.8	39.2
Papua Pegunungan	29,1	70,9	22.4	77.6
Indonesia	97,9	2,1	96.6	3.4

Lampiran 30

Persentase Rumah Tangga¹ Menurut Provinsi, Status Migrasi Risen Antarprovinsi, dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja, 2024

Provinsi	Rumah Tangga Migran		Rumah Tangga Nonmigran	
	Tangki Septik/IPAL	Selain Tangki Septik/IPAL ²	Tangki Septik/IPAL	Selain Tangki Septik/IPAL ²
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	84,4	15,6	85,4	14,6
Sumatera Utara	87,9	12,1	87,7	12,3
Sumatera Barat	77,6	22,4	72,9	27,1
Riau	89,1	10,9	81,2	18,8
Jambi	75,7	24,3	75,3	24,7
Sumatera Selatan	83,8	16,2	83,3	16,7
Bengkulu	53,6	46,4	42,7	57,3
Lampung	63,6	36,4	59,5	40,5
Kep. Bangka Belitung	98,6	1,4	96,3	3,7
Kepulauan Riau	99,5	0,5	92,2	7,8
DKI Jakarta	97,8	2,2	95,3	4,7
Jawa Barat	86,5	13,5	73,6	26,4
Jawa Tengah	82,3	17,7	82,0	18,0
DI Yogyakarta	99,6	0,4	97,1	2,9
Jawa Timur	91,3	8,7	84,2	15,8
Banten	93,1	6,9	86,8	13,2
Bali	100,0	–	99,3	0,7
Nusa Tenggara Barat	97,5	2,5	94,7	5,3
Nusa Tenggara Timur	72,0	28,0	68,5	31,5
Kalimantan Barat	78,2	21,8	63,4	36,6
Kalimantan Tengah	79,6	20,4	77,7	22,3
Kalimantan Selatan	84,9	15,1	77,1	22,9
Kalimantan Timur	91,2	8,8	90,4	9,6
Kalimantan Utara	77,9	22,1	73,2	26,8
Sulawesi Utara	90,9	9,1	91,1	8,9
Sulawesi Tengah	93,0	7,0	87,6	12,4
Sulawesi Selatan	93,3	6,7	91,1	8,9
Sulawesi Tenggara	96,6	3,4	93,2	6,8
Gorontalo	97,4	2,6	92,6	7,4
Sulawesi Barat	91,9	8,1	92,2	7,8
Maluku	90,6	9,4	90,9	9,1
Maluku Utara	91,5	8,5	91,0	9,0
Papua Barat	85,2	14,8	85,3	14,7
Papua Barat Daya	99,2	0,8	85,6	14,4
Papua	90,5	9,5	82,9	17,1
Papua Selatan	66,4	33,6	70,2	29,8
Papua Tengah	83,2	16,8	46,2	53,8
Papua Pegunungan	29,1	70,9	13,3	86,7
Indonesia	87,5	12,5	81,4	18,6

Catatan: ¹ Hanya untuk rumah tangga dengan fasilitas tempat buang air besar dengan penggunaan: Ada, digunakan hanya ART sendiri; Ada, digunakan bersama ART rumah tangga tertentu; Ada, di MCK komunal

² Terdiri dari Kolam/sawah/sungai/danau/laut, Lubang tanah, Pantai/tanah lapang/kebun, Lainnya

Lampiran 31

Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi, Status Migrasi Risen Antarprovinsi, dan Sumber Penerangan yang Digunakan, 2024

Provinsi	Rumah Tangga Migran				Rumah Tangga Nonmigran			
	Listrik PLN dengan Meteran	Listrik PLN Tanpa Meteran	Listrik Non PLN	Bukan Listrik	Listrik PLN dengan Meteran	Listrik PLN Tanpa Meteran	Listrik Non PLN	Bukan Listrik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	97,8	0,5	1,8	–	98,2	1,5	0,1	0,1
Sumatera Utara	96,1	3,2	–	0,7	97,1	2,1	0,5	0,3
Sumatera Barat	96,5	2,5	1,0	~0	94,6	4,4	0,4	0,6
Riau	90,6	3,9	4,2	1,3	93,1	3,5	2,9	0,5
Jambi	95,3	3,4	–	1,3	95,3	3,6	0,7	0,4
Sumatera Selatan	96,6	1,7	1,7	–	92,8	4,2	2,6	0,4
Bengkulu	92,2	7,8	–	–	96,8	2,9	0,1	0,1
Lampung	95,6	4,4	–	–	95,0	4,2	0,7	0,1
Kep. Bangka Belitung	93,9	3,4	2,7	–	97,7	2,0	0,2	0,1
Kepulauan Riau	97,1	2,9	–	–	94,4	3,8	1,7	0,1
DKI Jakarta	97,4	2,6	–	–	97,3	2,7	~0	–
Jawa Barat	97,0	3,0	–	–	96,0	3,9	0,1	~0
Jawa Tengah	97,7	2,3	–	–	96,7	3,2	0,1	~0
DI Yogyakarta	88,0	12,0	–	–	95,6	4,4	–	–
Jawa Timur	96,9	2,7	0,5	–	96,5	3,2	0,3	~0
Banten	96,8	3,2	–	–	97,6	2,2	~0	0,2
Bali	83,1	16,9	–	–	96,6	3,3	0,1	~0
Nusa Tenggara Barat	93,3	5,4	1,3	–	93,5	6,5	~0	~0
Nusa Tenggara Timur	86,5	5,2	6,6	1,7	85,4	5,6	5,8	3,2
Kalimantan Barat	92,1	5,6	2,3	–	90,8	2,1	6,2	0,9
Kalimantan Tengah	74,5	3,0	22,5	–	85,2	4,1	9,9	0,8
Kalimantan Selatan	97,5	0,4	2,1	–	94,5	4,4	1,0	0,1
Kalimantan Timur	89,8	5,7	4,4	0,1	94,0	2,5	3,5	~0
Kalimantan Utara	89,0	10,2	0,8	–	92,0	4,1	3,4	0,5
Sulawesi Utara	96,0	4,0	–	–	96,3	3,4	0,2	0,1
Sulawesi Tengah	91,8	8,0	0,2	–	91,4	5,1	2,7	0,7
Sulawesi Selatan	94,8	4,4	0,8	–	94,2	4,0	1,5	0,3
Sulawesi Tenggara	95,0	3,8	1,2	–	93,7	4,1	2,1	0,1
Gorontalo	93,6	4,3	2,0	–	95,2	3,8	0,7	0,3
Sulawesi Barat	89,1	10,5	0,2	0,2	87,4	7,4	4,7	0,4
Maluku	98,1	0,4	1,3	0,2	93,7	1,6	1,9	2,8
Maluku Utara	92,1	1,9	4,4	1,6	92,7	1,6	4,4	1,3
Papua Barat	85,2	3,8	8,1	2,9	78,2	3,8	14,3	3,7
Papua Barat Daya	87,9	3,6	8,5	–	86,1	1,7	10,2	2,0
Papua	96,2	2,5	1,2	0,1	88,0	2,0	5,9	4,0
Papua Selatan	92,7	2,3	5,0	–	62,7	3,5	13,8	20,0
Papua Tengah	57,6	–	15,5	26,9	32,0	3,1	20,8	44,0
Papua Pegunungan	27,0	–	54,1	18,9	12,8	1,6	59,2	26,4
Indonesia	94,8	3,9	1,1	0,2	94,8	3,5	1,2	0,5

Lampiran 32
 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi, Status Migrasi Risen Antarprovinsi, dan Kepemilikan Aset Rumah Tangga, 2024

Provinsi	Persentase Rumah Tangga Migran yang Memiliki Aset	Rumah Tangga Migran					
		Tabung Gas 5,5 Kg atau Lebih	Lemari Es/ Kulkas	AC	Pemanas Air	Telepon Rumah	Komputer/ Laptop/ Tablet
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	99,4	17,5	70,5	18,2	1,5	–	25,5
Sumatera Utara	96,4	8,1	61,3	11,3	1,0	1,6	15,8
Sumatera Barat	96,6	14,1	74,9	6,8	0,6	1,7	29,3
Riau	97,2	11,4	74,8	18,4	1,3	0,5	27,0
Jambi	96,9	16,7	83,2	11,7	5,0	1,9	28,0
Sumatera Selatan	98,2	9,6	73,5	8,7	0,2	0,5	17,8
Bengkulu	100,0	16,0	85,0	13,3	1,3	5,0	30,0
Lampung	99,8	7,7	84,6	8,8	2,3	3,9	16,0
Kep. Bangka Belitung	99,2	38,5	94,6	34,8	3,7	–	35,8
Kepulauan Riau	89,7	11,7	64,3	38,0	0,9	0,6	28,1
DKI Jakarta	99,2	26,1	96,6	59,2	10,4	13,8	51,6
Jawa Barat	98,3	12,8	82,1	32,2	3,7	2,3	38,7
Jawa Tengah	99,4	6,4	77,8	5,6	3,2	0,6	15,7
DI Yogyakarta	97,6	13,9	40,5	6,1	1,2	1,4	63,8
Jawa Timur	99,7	6,3	78,9	11,9	4,5	0,7	24,9
Banten	99,8	35,8	91,1	63,9	8,7	1,4	56,7
Bali	88,3	10,5	49,3	18,0	7,6	5,4	35,7
Nusa Tenggara Barat	98,7	5,6	59,8	5,1	–	0,5	13,5
Nusa Tenggara Timur	98,5	5,0	32,7	3,8	1,0	–	23,4
Kalimantan Barat	100,0	31,8	86,7	26,5	5,3	8,9	42,7
Kalimantan Tengah	99,3	43,1	77,5	13,9	1,8	–	26,2
Kalimantan Selatan	98,8	23,2	82,6	21,7	–	0,3	25,7
Kalimantan Timur	97,6	29,6	83,1	32,8	2,6	–	41,4
Kalimantan Utara	100,0	58,6	83,2	17,8	–	–	38,6
Sulawesi Utara	96,7	3,6	94,5	15,3	–	–	33,6
Sulawesi Tengah	100,0	16,8	76,3	13,8	1,0	–	27,2
Sulawesi Selatan	98,8	22,2	86,8	26,7	1,3	3,8	36,4
Sulawesi Tenggara	98,5	26,8	76,5	12,1	–	–	36,9
Gorontalo	95,8	27,3	76,4	34,0	5,2	–	43,6
Sulawesi Barat	99,6	5,8	55,3	9,8	2,1	2,1	19,6
Maluku	89,9	6,8	64,6	8,1	0,2	0,6	18,8
Maluku Utara	97,3	5,3	60,7	11,2	7,2	–	25,2
Papua Barat	91,8	8,2	60,8	14,9	2,7	–	34,3
Papua Barat Daya	87,7	10,7	44,7	27,8	–	–	23,2
Papua	99,8	16,4	83,6	26,6	0,2	0,2	46,3
Papua Selatan	96,0	10,7	73,3	36,8	16,6	0,6	43,6
Papua Tengah	100,0	24,3	57,6	29,9	–	–	24,9
Papua Pegunungan	28,2	–	7,6	–	–	–	–
Indonesia	98,0	13,1	74,2	19,0	3,2	2,0	30,3

Lanjutan Lampiran 32

Provinsi	Rumah Tangga Migran						
	Emas/ Perhiasan (Minimal 10 Gram)	Sepeda Motor	Perahu	Perahu Motor	Mobil	Televisi Layar Datar (Minimal 30 Inch)	Tanah/ Lahan
(1)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Aceh	25,0	94,6	0,5	0,6	22,1	24,5	63,0
Sumatera Utara	20,4	85,7	0,4	1,2	12,6	24,6	65,8
Sumatera Barat	20,7	85,7	0,2	0,3	24,3	22,4	44,5
Riau	22,8	90,2	–	3,0	17,8	27,3	54,2
Jambi	25,6	91,7	0,3	0,7	26,9	31,5	79,4
Sumatera Selatan	25,2	94,5	0,1	–	14,6	19,3	76,6
Bengkulu	29,8	88,9	1,6	–	16,8	21,1	78,9
Lampung	18,5	90,7	0,6	–	11,1	19,8	87,0
Kep. Bangka Belitung	34,8	91,9	3,2	0,8	29,6	35,3	66,9
Kepulauan Riau	21,3	84,7	0,7	2,8	16,9	25,7	13,7
DKI Jakarta	50,8	88,5	~0	0,1	31,8	70,1	53,1
Jawa Barat	28,7	86,9	0,3	–	26,1	47,7	75,2
Jawa Tengah	23,5	92,0	–	0,8	10,1	20,7	85,6
DI Yogyakarta	11,8	78,7	1,2	1,3	11,7	19,6	33,9
Jawa Timur	24,3	94,9	–	1,5	22,2	28,9	81,8
Banten	37,0	93,1	1,8	–	40,0	61,3	73,1
Bali	23,0	77,8	–	3,2	23,0	24,4	30,3
Nusa Tenggara Barat	15,5	82,6	2,8	1,6	8,5	10,5	78,8
Nusa Tenggara Timur	8,0	68,3	0,9	1,7	8,9	14,0	88,6
Kalimantan Barat	41,8	89,7	0,8	2,3	29,4	51,2	91,5
Kalimantan Tengah	32,3	92,9	1,6	1,8	15,6	21,8	79,4
Kalimantan Selatan	31,6	92,0	12,0	3,0	19,7	41,5	75,5
Kalimantan Timur	38,4	93,3	0,1	4,8	25,3	36,0	57,0
Kalimantan Utara	29,5	92,7	3,0	3,0	17,5	40,1	76,9
Sulawesi Utara	9,6	88,8	0,4	2,1	24,4	42,0	74,0
Sulawesi Tengah	12,7	89,8	1,4	–	19,6	28,2	68,4
Sulawesi Selatan	41,0	88,8	1,4	2,0	24,1	30,8	84,1
Sulawesi Tenggara	23,1	82,3	5,4	2,3	18,6	19,5	83,4
Gorontalo	25,0	79,1	1,8	5,8	25,7	28,4	71,3
Sulawesi Barat	3,8	92,7	5,8	5,8	12,7	11,3	87,5
Maluku	6,9	60,3	4,2	7,1	8,8	22,2	68,7
Maluku Utara	12,7	78,7	9,3	4,2	8,8	19,0	87,3
Papua Barat	13,0	70,1	8,4	9,9	15,0	29,2	63,6
Papua Barat Daya	19,6	50,6	3,3	21,0	11,7	29,2	69,5
Papua	23,8	75,9	3,2	9,2	28,7	42,4	57,6
Papua Selatan	31,6	79,1	0,6	0,2	20,5	43,5	67,7
Papua Tengah	17,4	73,2	9,3	–	12,7	34,4	65,6
Papua Pegunungan	4,9	10,3	1,1	–	–	5,7	19,0
Indonesia	25,0	87,7	0,9	1,2	18,6	30,4	70,3

Lanjutan Lampiran 32

Provinsi	Persentase Rumah Tangga Nonmigran yang Memiliki Aset	Rumah Tangga Nonmigran					
		Tabung Gas 5,5 Kg atau Lebih	Lemari Es/ Kulkas	AC	Pemanas Air	Telepon Rumah	Komputer/ Laptop/ Tablet
(1)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Aceh	98,8	13,1	77,1	10,8	1,5	0,4	15,4
Sumatera Utara	97,0	5,0	68,6	12,4	1,0	0,5	15,3
Sumatera Barat	96,8	8,5	71,1	5,4	0,8	0,5	20,2
Riau	99,2	7,6	81,9	14,2	1,2	0,6	17,8
Jambi	99,1	13,8	80,0	7,8	1,2	0,4	17,4
Sumatera Selatan	98,4	5,3	74,0	8,5	0,7	0,5	14,9
Bengkulu	99,3	11,5	78,2	6,0	0,8	0,4	19,5
Lampung	98,9	4,3	70,5	4,8	0,3	0,4	10,8
Kep. Bangka Belitung	99,4	33,4	91,9	15,7	0,7	0,3	18,9
Kepulauan Riau	98,3	11,7	88,5	47,4	1,7	0,7	30,6
DKI Jakarta	97,8	17,8	90,8	41,9	4,4	5,8	39,0
Jawa Barat	97,7	7,4	74,1	11,5	1,4	1,2	18,3
Jawa Tengah	98,5	5,2	70,2	4,4	2,1	0,8	14,8
DI Yogyakarta	98,3	13,1	73,0	8,2	2,9	2,6	29,0
Jawa Timur	98,3	3,4	72,5	6,0	2,2	0,7	16,6
Banten	98,1	7,2	81,9	23,9	1,6	1,3	20,4
Bali	98,6	12,4	76,7	22,6	4,4	1,6	26,5
Nusa Tenggara Barat	95,9	3,7	53,8	4,0	0,2	0,3	11,7
Nusa Tenggara Timur	95,9	2,1	29,7	3,4	1,0	0,2	13,4
Kalimantan Barat	99,3	11,3	72,2	11,0	0,4	0,4	16,3
Kalimantan Tengah	98,8	30,5	75,0	10,8	1,3	0,0	19,3
Kalimantan Selatan	98,4	13,6	77,4	11,9	0,4	0,6	18,4
Kalimantan Timur	99,3	27,7	88,0	23,5	2,3	0,7	30,3
Kalimantan Utara	99,2	39,2	82,0	19,2	0,5	0,8	24,7
Sulawesi Utara	95,6	4,7	77,6	10,0	1,6	0,3	17,6
Sulawesi Tengah	98,6	13,5	64,4	8,7	0,6	0,5	16,1
Sulawesi Selatan	98,6	11,6	82,6	14,2	1,3	0,6	21,8
Sulawesi Tenggara	98,9	7,5	73,9	8,5	0,4	–	19,3
Gorontalo	98,1	8,2	71,8	16,9	0,2	0,0	16,8
Sulawesi Barat	98,6	8,9	59,7	5,2	0,7	0,4	13,8
Maluku	92,2	2,8	57,6	7,7	1,3	0,6	17,7
Maluku Utara	98,0	3,0	52,8	10,8	2,3	0,4	16,8
Papua Barat	92,2	3,2	45,8	7,1	0,2	~0	17,6
Papua Barat Daya	92,6	8,3	59,5	18,3	0,3	–	19,5
Papua	94,2	7,7	58,1	16,4	1,7	1,3	24,1
Papua Selatan	80,6	7,0	44,4	12,7	1,8	0,4	16,2
Papua Tengah	77,4	6,0	22,1	9,1	1,0	0,1	7,8
Papua Pegunungan	47,9	0,1	2,8	~0	0,9	–	2,3
Indonesia	97,7	7,9	72,8	11,4	1,6	1,0	18,3

Lanjutan Lampiran 32

Provinsi	Rumah Tangga Nonmigran						
	Emas/ Perhiasan (Minimal 10 Gram)	Sepeda Motor	Perahu	Perahu Motor	Mobil	Televisi Layar Datar (Minimal 30 Inch)	Tanah/ Lahan
(1)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
Aceh	21,5	88,2	1,5	1,4	12,2	18,0	81,8
Sumatera Utara	16,2	85,2	1,0	0,9	12,7	22,2	63,6
Sumatera Barat	18,7	88,1	1,1	1,3	18,0	23,2	51,0
Riau	16,1	91,4	2,6	3,0	17,5	27,3	74,3
Jambi	23,1	91,6	3,0	2,2	17,8	22,1	85,4
Sumatera Selatan	17,0	88,0	3,2	2,5	13,7	22,7	78,4
Bengkulu	18,3	91,7	0,9	0,8	19,2	18,7	88,3
Lampung	11,5	91,1	0,7	0,7	11,1	13,2	86,1
Kep. Bangka Belitung	24,3	93,8	2,3	2,0	20,8	30,0	86,7
Kepulauan Riau	27,8	89,6	2,6	4,1	21,0	52,9	39,8
DKI Jakarta	30,1	85,0	~0	0,1	21,9	54,1	47,8
Jawa Barat	18,1	79,8	0,6	0,4	11,5	30,6	77,6
Jawa Tengah	19,3	86,4	0,5	0,6	12,4	19,6	84,7
DI Yogyakarta	24,3	85,1	0,6	0,6	18,4	26,3	75,7
Jawa Timur	18,1	87,4	0,8	0,9	13,6	17,7	81,1
Banten	18,2	86,0	0,7	1,1	15,2	31,6	77,0
Bali	33,4	93,1	0,9	0,4	27,1	28,4	62,4
Nusa Tenggara Barat	14,2	77,9	1,6	1,4	7,8	8,4	80,7
Nusa Tenggara Timur	5,5	61,8	2,1	1,4	6,3	10,2	85,2
Kalimantan Barat	16,4	91,9	5,4	4,6	11,0	20,3	88,9
Kalimantan Tengah	23,7	87,6	6,0	8,1	17,7	22,3	83,4
Kalimantan Selatan	26,1	86,9	4,6	4,7	16,0	22,8	79,8
Kalimantan Timur	35,9	92,6	5,4	3,9	25,4	40,1	74,6
Kalimantan Utara	20,0	88,6	11,2	12,2	12,9	30,1	78,5
Sulawesi Utara	10,9	67,9	2,9	2,2	14,9	25,7	71,5
Sulawesi Tengah	11,2	83,2	4,4	4,2	11,4	15,5	85,9
Sulawesi Selatan	30,9	86,4	2,3	2,5	18,1	23,4	78,8
Sulawesi Tenggara	17,2	83,5	5,0	6,1	15,1	17,3	88,0
Gorontalo	6,5	77,5	1,8	3,2	10,4	16,3	82,4
Sulawesi Barat	12,4	83,2	4,4	3,1	13,6	10,7	88,5
Maluku	10,3	57,3	7,9	6,5	4,8	17,6	68,9
Maluku Utara	10,8	65,8	5,9	6,5	8,2	17,7	89,9
Papua Barat	9,3	61,0	7,2	11,8	8,6	14,1	71,8
Papua Barat Daya	14,8	64,1	8,0	9,9	10,0	19,9	65,0
Papua	15,1	65,3	12,6	6,2	14,5	29,4	67,8
Papua Selatan	14,5	51,7	16,8	6,2	8,8	20,7	53,5
Papua Tengah	6,7	30,8	2,5	1,6	5,0	9,6	65,9
Papua Pegunungan	1,0	6,9	0,1	0,2	0,2	2,5	44,1
Indonesia	19,0	84,2	1,5	1,5	13,9	24,2	76,9

Lampiran 33

Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi, Status Migrasi Risen Antarprovinsi, dan Jenis Alat Komunikasi dan Informasi yang Digunakan dalam 3 Bulan Terakhir, 2024

Provinsi	Rumah Tangga Migran			Rumah Tangga Nonmigran		
	Jenis Alat Komunikasi dan Informasi			Jenis Alat Komunikasi dan Informasi		
	Telepon Seluler (HP)/ Nirkabel	Komputer ¹	Internet	Telepon Seluler (HP)/ Nirkabel	Komputer ¹	Internet
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	98,4	42,3	98,1	94,2	22,0	88,9
Sumatera Utara	98,1	22,6	95,0	96,5	22,6	92,3
Sumatera Barat	98,9	39,3	96,2	96,3	30,9	91,7
Riau	100,0	26,1	99,0	97,7	24,5	94,1
Jambi	100,0	32,5	98,6	95,5	23,4	90,4
Sumatera Selatan	95,5	24,1	91,3	95,3	20,5	90,9
Bengkulu	99,2	38,4	94,2	94,8	25,8	90,5
Lampung	98,8	28,2	97,6	95,4	19,1	91,4
Kep. Bangka Belitung	99,3	44,8	98,9	96,2	25,6	92,0
Kepulauan Riau	99,9	42,5	99,8	99,1	37,3	97,4
DKI Jakarta	99,8	54,9	99,4	98,4	44,9	98,1
Jawa Barat	98,7	45,9	98,1	92,3	29,1	90,5
Jawa Tengah	99,2	27,2	98,5	90,3	22,7	88,6
DI Yogyakarta	99,9	77,9	99,9	90,2	36,8	88,7
Jawa Timur	99,2	32,5	98,3	90,2	23,7	86,8
Banten	99,9	57,5	99,0	93,8	28,5	92,9
Bali	100,0	42,8	94,6	95,5	34,2	92,1
Nusa Tenggara Barat	99,6	28,0	97,9	91,7	22,4	86,1
Nusa Tenggara Timur	97,5	35,0	93,9	91,1	27,2	82,0
Kalimantan Barat	98,0	52,5	95,5	95,1	21,7	92,6
Kalimantan Tengah	99,9	35,1	97,8	95,9	23,3	92,0
Kalimantan Selatan	99,3	39,3	97,7	92,7	24,7	89,1
Kalimantan Timur	99,1	46,4	100,0	98,4	34,6	95,4
Kalimantan Utara	100,0	40,5	98,7	97,9	30,6	94,5
Sulawesi Utara	100,0	45,5	95,8	95,3	23,7	89,2
Sulawesi Tengah	99,1	35,3	97,3	93,3	24,7	87,8
Sulawesi Selatan	99,4	39,3	97,0	96,6	29,8	92,1
Sulawesi Tenggara	100,0	36,8	96,4	97,2	28,0	91,6
Gorontalo	97,1	56,9	97,1	95,0	30,0	90,1
Sulawesi Barat	100,0	35,3	94,2	94,8	24,4	89,6
Maluku	99,1	27,5	92,2	94,3	27,6	87,2
Maluku Utara	97,0	26,4	93,1	94,6	25,6	87,2
Papua Barat	97,4	43,5	98,0	92,3	24,3	84,9
Papua Barat Daya	99,1	40,8	95,8	93,5	24,0	88,3
Papua	96,5	52,8	96,2	90,2	28,9	81,7
Papua Selatan	100,0	52,6	91,6	72,9	24,8	64,9
Papua Tengah	73,5	49,2	73,1	48,0	9,0	35,8
Papua Pegunungan	47,7	18,2	42,6	31,6	2,9	12,0
Indonesia	99,0	39,2	97,7	92,8	26,4	89,6

Catatan: ¹ Terdiri dari PC/Desktop, Laptop/*Notebook*, dan Tablet

Lampiran 34

Persentase Rumah Tangga yang Menerima Bantuan Pangan Nontunai/Program Sembako Selama 4 Bulan Terakhir Menurut Provinsi, Status Migrasi Risen Antarprovinsi, dan Jumlah Bulan Penerimaan Bantuan, 2024

Provinsi	Rumah Tangga Migran						
	Persentase Rumah Tangga yang Menerima Bantuan Pangan	Persentase Rumah Tangga yang Menerima Bantuan Pangan 4 Bulan Terakhir	Jumlah Bulan Penerimaan				
			1	2	3	4	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	14,0	14,0	4,4	12,5	3,0	80,1	100,0
Sumatera Utara	16,0	16,0	46,7	12,4	8,3	32,6	100,0
Sumatera Barat	14,2	13,9	36,2	24,6	10,6	28,6	100,0
Riau	7,4	7,4	–	12,1	19,6	68,4	100,0
Jambi	9,7	9,7	24,7	24,4	8,3	42,5	100,0
Sumatera Selatan	9,5	9,5	39,3	5,2	9,6	45,9	100,0
Bengkulu	14,9	14,9	6,3	17,4	25,3	50,9	100,0
Lampung	19,8	19,8	16,5	15,2	34,8	33,5	100,0
Kep. Bangka Belitung	4,2	4,2	–	60,4	–	39,6	100,0
Kepulauan Riau	2,3	2,3	9,7	0,9	50,1	39,4	100,0
DKI Jakarta	0,5	0,5	38,9	5,0	–	56,1	100,0
Jawa Barat	12,4	12,4	–	17,6	43,2	39,3	100,0
Jawa Tengah	29,5	29,5	15,4	27,1	31,4	26,1	100,0
DI Yogyakarta	11,1	11,1	31,5	18,4	13,2	36,9	100,0
Jawa Timur	15,4	15,1	24,5	18,3	13,0	44,2	100,0
Banten	5,1	5,1	–	67,9	21,4	10,7	100,0
Bali	2,3	2,3	–	–	–	100,0	100,0
Nusa Tenggara Barat	27,2	27,2	22,5	42,4	8,9	26,2	100,0
Nusa Tenggara Timur	27,6	27,6	40,8	19,5	20,7	19,0	100,0
Kalimantan Barat	21,2	21,2	11,5	6,3	45,7	36,4	100,0
Kalimantan Tengah	3,8	3,8	82,4	17,6	–	–	100,0
Kalimantan Selatan	4,8	4,8	–	52,4	33,0	14,6	100,0
Kalimantan Timur	4,1	4,1	11,2	–	–	88,8	100,0
Kalimantan Utara	1,8	1,8	75,8	–	–	24,2	100,0
Sulawesi Utara	14,8	14,8	47,5	13,7	–	38,8	100,0
Sulawesi Tengah	9,4	9,4	24,2	10,1	18,6	47,1	100,0
Sulawesi Selatan	20,3	20,1	22,5	31,1	29,6	16,9	100,0
Sulawesi Tenggara	17,7	17,7	19,1	31,9	23,9	25,1	100,0
Gorontalo	20,4	20,4	9,9	43,9	27,2	18,9	100,0
Sulawesi Barat	12,3	12,3	23,1	5,8	41,4	29,7	100,0
Maluku	8,8	8,8	3,9	25,1	56,9	14,1	100,0
Maluku Utara	5,4	5,4	13,2	30,1	56,7	–	100,0
Papua Barat	7,0	7,0	59,9	40,1	–	–	100,0
Papua Barat Daya	25,6	25,6	60,6	3,4	36,1	–	100,0
Papua	9,1	9,1	32,2	37,5	–	30,3	100,0
Papua Selatan	0,7	0,7	43,1	56,9	–	–	100,0
Papua Tengah	4,9	4,9	100,0	–	–	–	100,0
Papua Pegunungan	58,1	58,1	100,0	–	–	–	100,0
Indonesia	15,8	15,8	20,0	23,9	25,2	30,8	100,0

Lanjutan Lampiran 34

Provinsi	Rumah Tangga Nonmigran						
	Persentase Rumah Tangga yang Menerima Bantuan Pangan	Persentase Rumah Tangga yang Menerima Bantuan Pangan 4 Bulan Terakhir	Jumlah Bulan Penerimaan				
			1	2	3	4	Jumlah
(1)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Aceh	32,5	32,5	20,7	12,6	20,8	45,8	100,0
Sumatera Utara	16,2	16,1	30,1	17,2	12,2	40,6	100,0
Sumatera Barat	21,2	21,0	26,6	26,4	13,5	33,6	100,0
Riau	13,8	13,6	29,6	21,4	12,8	36,2	100,0
Jambi	11,9	11,8	29,4	24,2	12,8	33,6	100,0
Sumatera Selatan	17,0	16,9	34,5	18,4	12,1	35,1	100,0
Bengkulu	22,4	22,3	18,9	21,4	20,4	39,3	100,0
Lampung	25,1	24,9	14,5	23,4	19,1	43,0	100,0
Kep. Bangka Belitung	9,0	9,0	25,9	19,0	11,6	43,5	100,0
Kepulauan Riau	8,7	8,7	33,2	18,3	12,9	35,6	100,0
DKI Jakarta	4,6	4,5	24,8	16,7	20,1	38,5	100,0
Jawa Barat	24,6	24,5	14,2	16,0	23,3	46,5	100,0
Jawa Tengah	26,2	26,1	20,3	26,6	22,7	30,4	100,0
DI Yogyakarta	29,6	29,5	9,9	19,3	27,9	42,9	100,0
Jawa Timur	23,4	23,3	17,6	20,4	18,1	43,9	100,0
Banten	13,6	13,5	28,3	14,8	14,4	42,4	100,0
Bali	6,7	6,7	25,1	18,7	16,3	39,9	100,0
Nusa Tenggara Barat	25,3	25,2	11,6	29,0	25,0	34,4	100,0
Nusa Tenggara Timur	30,4	30,2	37,4	28,7	14,2	19,7	100,0
Kalimantan Barat	14,0	13,8	31,1	21,6	15,1	32,3	100,0
Kalimantan Tengah	7,9	7,8	31,7	14,5	18,8	35,0	100,0
Kalimantan Selatan	10,3	10,2	17,3	16,2	16,1	50,5	100,0
Kalimantan Timur	6,0	5,7	36,2	10,0	9,0	44,8	100,0
Kalimantan Utara	10,9	10,6	36,2	23,3	16,9	23,5	100,0
Sulawesi Utara	14,4	14,3	18,3	16,5	15,6	49,6	100,0
Sulawesi Tengah	21,6	21,5	28,2	20,0	13,0	38,8	100,0
Sulawesi Selatan	20,1	19,9	20,7	24,5	18,7	36,1	100,0
Sulawesi Tenggara	19,9	19,8	27,8	19,3	10,9	42,0	100,0
Gorontalo	33,7	33,6	11,6	17,5	22,8	48,1	100,0
Sulawesi Barat	20,6	20,5	34,5	24,1	12,7	28,7	100,0
Maluku	12,8	12,8	43,3	20,9	11,9	23,9	100,0
Maluku Utara	8,3	8,3	45,0	19,0	7,6	28,4	100,0
Papua Barat	17,4	17,2	55,3	21,3	13,0	10,3	100,0
Papua Barat Daya	24,4	23,7	61,0	22,3	9,4	7,3	100,0
Papua	17,2	17,1	53,8	21,3	9,6	15,3	100,0
Papua Selatan	15,5	15,5	57,0	15,5	10,0	17,5	100,0
Papua Tengah	1,8	1,8	68,5	8,8	8,3	14,4	100,0
Papua Pegunungan	23,3	23,3	99,9	0,1	–	–	100,0
Indonesia	20,5	20,4	20,8	20,4	19,4	39,5	100,0

Lampiran 35

Persentase Rumah Tangga yang Menerima Program Indonesia Pintar (PIP) dalam Setahun Terakhir Menurut Provinsi dan Status Migrasi Risen Antarprovinsi, 2024

Provinsi	Status Migrasi Risen Antarprovinsi	
	Rumah Tangga Migran	Rumah Tangga Nonmigran
(1)	(2)	(3)
Aceh	14,3	17,9
Sumatera Utara	9,1	11,0
Sumatera Barat	18,9	17,2
Riau	1,8	9,0
Jambi	10,7	8,5
Sumatera Selatan	5,2	9,5
Bengkulu	8,9	13,9
Lampung	12,4	14,9
Kep. Bangka Belitung	7,2	4,7
Kepulauan Riau	2,0	7,9
DKI Jakarta	0,1	5,2
Jawa Barat	5,7	13,0
Jawa Tengah	17,4	16,8
DI Yogyakarta	8,1	15,9
Jawa Timur	9,1	11,4
Banten	4,8	9,7
Bali	0,9	4,8
Nusa Tenggara Barat	20,7	14,0
Nusa Tenggara Timur	17,9	17,6
Kalimantan Barat	10,0	9,1
Kalimantan Tengah	4,3	4,9
Kalimantan Selatan	1,8	6,6
Kalimantan Timur	15,5	9,8
Kalimantan Utara	5,4	9,1
Sulawesi Utara	13,7	10,7
Sulawesi Tengah	13,2	16,0
Sulawesi Selatan	21,1	14,1
Sulawesi Tenggara	12,7	17,3
Gorontalo	10,2	19,2
Sulawesi Barat	21,0	24,8
Maluku	8,7	8,2
Maluku Utara	6,4	4,9
Papua Barat	5,0	5,8
Papua Barat Daya	8,1	10,3
Papua	–	7,5
Papua Selatan	10,7	11,0
Papua Tengah	9,3	3,9
Papua Pegunungan	46,2	25,4
Indonesia	10,7	12,4

Lampiran 36

Persentase Rumah Tangga yang Memiliki atau Menerima Jaminan Sosial dalam Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Status Migrasi Risen Antarprovinsi, dan Jenis Jaminan Sosial, 2024

Provinsi	Rumah Tangga Migran						
	Persentase Rumah Tangga Migran Risen yang Memiliki atau Menerima Jaminan Sosial	Jenis Jaminan Sosial					
		Jaminan Pensiun/ Veteran	Jaminan Hari Tua	Asuransi Kecelakaan Kerja	Jaminan/ Asuransi Kematian	Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)	Pesangan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	29,0	25,4	19,2	21,2	18,3	1,1	1,1
Sumatera Utara	19,7	12,3	13,7	14,3	16,3	2,7	5,5
Sumatera Barat	15,6	13,8	13,1	12,5	13,8	0,5	1,8
Riau	16,6	3,0	7,0	14,2	12,2	0,6	7,2
Jambi	25,8	16,5	12,5	22,8	18,4	4,1	6,3
Sumatera Selatan	16,3	6,9	9,3	11,8	8,2	1,4	–
Bengkulu	17,1	11,5	13,6	13,4	11,4	1,0	1,3
Lampung	14,4	11,1	10,1	9,8	9,5	3,3	4,2
Kep. Bangka Belitung	30,6	17,9	25,7	30,6	27,5	4,0	7,6
Kepulauan Riau	35,0	12,7	29,4	32,5	26,6	4,6	4,5
DKI Jakarta	44,0	13,9	19,8	36,4	20,1	1,2	1,2
Jawa Barat	29,4	9,0	21,3	26,9	23,6	6,5	9,8
Jawa Tengah	13,7	5,4	9,6	11,3	8,5	2,0	2,4
DI Yogyakarta	16,8	7,7	12,2	12,6	9,3	2,2	2,2
Jawa Timur	10,2	7,1	5,2	8,8	6,5	1,8	2,0
Banten	37,6	13,7	30,5	34,5	33,6	7,4	12,9
Bali	7,8	2,9	3,8	6,2	6,2	0,9	1,3
Nusa Tenggara Barat	12,5	8,2	8,7	11,7	10,9	1,0	1,6
Nusa Tenggara Timur	23,5	14,6	12,1	11,4	11,5	0,9	2,9
Kalimantan Barat	33,7	30,8	24,4	27,6	25,8	3,2	11,2
Kalimantan Tengah	48,5	31,6	24,1	41,5	39,7	7,8	5,5
Kalimantan Selatan	34,8	19,0	18,5	27,6	22,8	1,5	2,9
Kalimantan Timur	29,6	14,0	22,9	25,5	23,0	2,7	6,1
Kalimantan Utara	32,2	20,2	23,9	31,9	30,8	2,4	8,5
Sulawesi Utara	20,6	13,7	13,8	13,0	7,8	3,1	8,7
Sulawesi Tengah	18,9	11,3	8,1	14,4	7,9	0,9	2,2
Sulawesi Selatan	19,7	13,4	9,9	14,5	13,2	0,7	1,2
Sulawesi Tenggara	20,2	15,6	16,7	17,2	16,5	1,6	1,5
Gorontalo	27,5	15,9	24,8	27,1	23,6	3,1	3,1
Sulawesi Barat	29,4	13,9	13,6	27,0	21,8	1,3	4,6
Maluku	24,7	19,6	13,5	16,0	18,0	–	–
Maluku Utara	18,1	9,6	12,4	16,2	16,1	5,3	6,9
Papua Barat	18,7	13,1	12,2	10,1	11,5	–	1,7
Papua Barat Daya	41,2	30,2	23,4	26,3	23,8	–	–
Papua	22,0	16,0	6,8	12,8	9,8	1,2	0,5
Papua Selatan	24,3	14,9	9,7	16,4	18,8	5,2	14,5
Papua Tengah	16,4	16,4	5,3	0,1	0,1	–	–
Papua Pegunungan	–	–	–	–	–	–	–
Indonesia	21,6	10,3	14,1	17,9	14,9	2,7	4,0

Lanjutan Lampiran 36

Provinsi	Rumah Tangga Nonmigran						
	Persentas Rumah Tangga Nonmigran Risen yang Memiliki atau Menerima Jaminan Sosial	Jenis Jaminan Sosial					
		Jaminan Pensiun/ Veteran	Jaminan Hari Tua	Asuransi Kecelakaan Kerja	Jaminan/ Asuransi Kematian	Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)	Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
(1)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Aceh	13,3	10,0	8,7	9,8	9,4	1,1	1,3
Sumatera Utara	15,1	9,1	8,4	11,0	9,2	1,4	3,2
Sumatera Barat	16,2	10,0	9,3	12,6	11,3	0,8	2,0
Riau	17,0	8,1	9,3	15,0	10,8	2,2	4,8
Jambi	12,0	6,8	7,3	9,2	7,8	1,3	2,0
Sumatera Selatan	18,3	6,8	7,5	10,0	14,2	1,9	3,0
Bengkulu	13,0	8,7	8,3	10,1	8,6	0,9	2,1
Lampung	7,5	4,1	3,8	5,5	3,9	0,7	1,4
Kep. Bangka Belitung	17,9	9,1	12,1	15,6	13,4	1,9	4,0
Kepulauan Riau	38,0	14,0	29,8	35,4	27,3	6,6	10,5
DKI Jakarta	21,6	8,5	12,0	16,4	11,9	2,5	3,0
Jawa Barat	17,0	7,8	11,1	13,3	10,8	2,5	4,2
Jawa Tengah	15,1	6,3	9,4	11,9	9,4	1,7	2,8
DI Yogyakarta	21,2	10,9	13,0	15,9	12,1	1,6	2,9
Jawa Timur	11,1	5,4	6,1	8,3	6,4	1,0	1,9
Banten	23,3	8,6	16,3	20,1	16,1	5,0	8,6
Bali	18,1	8,9	10,7	14,2	11,3	1,4	2,4
Nusa Tenggara Barat	9,8	6,1	5,7	7,2	7,3	1,1	1,5
Nusa Tenggara Timur	13,8	10,2	8,6	9,4	8,5	1,2	1,4
Kalimantan Barat	14,9	8,8	9,3	11,4	9,5	1,6	3,1
Kalimantan Tengah	20,7	13,6	13,4	16,1	14,2	2,8	1,2
Kalimantan Selatan	18,5	9,5	10,7	14,9	12,5	1,9	4,0
Kalimantan Timur	27,8	11,6	17,9	23,0	18,0	3,7	9,0
Kalimantan Utara	23,1	12,7	14,1	19,6	14,7	2,1	3,3
Sulawesi Utara	16,3	10,2	9,9	11,1	10,9	1,8	2,5
Sulawesi Tengah	13,5	8,6	7,2	9,7	8,8	1,5	1,9
Sulawesi Selatan	15,2	9,7	8,4	10,2	9,0	0,9	1,5
Sulawesi Tenggara	15,5	10,8	10,5	12,1	12,1	1,6	2,8
Gorontalo	19,8	10,9	10,3	15,8	16,0	1,7	1,3
Sulawesi Barat	11,0	8,4	7,8	8,9	8,5	0,8	1,5
Maluku	15,7	12,9	8,9	8,2	8,1	0,9	0,9
Maluku Utara	13,2	8,7	8,0	9,4	8,7	1,6	2,7
Papua Barat	15,6	12,3	9,3	10,5	8,9	1,5	2,8
Papua Barat Daya	18,1	11,3	11,7	12,2	11,4	1,5	3,9
Papua	21,4	18,1	12,0	12,1	10,9	1,2	1,7
Papua Selatan	12,8	10,6	9,3	9,3	9,3	1,7	1,1
Papua Tengah	7,4	5,5	4,3	5,2	4,3	0,9	2,0
Papua Pegunungan	2,1	2,0	1,8	0,5	1,3	–	–
Indonesia	15,8	7,8	9,6	12,1	10,0	1,9	3,2

Lampiran 37
 Persentase Rumah Tangga Penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Program
 Keluarga Harapan (PKH) Menurut Provinsi dan Status Migrasi Risen Antarprovinsi, 2024

Provinsi	Rumah Tangga Migran		Rumah Tangga Nonmigran	
	KKS	PKH	KKS	PKH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	11,2	7,6	16,8	20,6
Sumatera Utara	5,1	7,1	11,2	14,4
Sumatera Barat	12,7	10,3	15,8	17,2
Riau	10,9	7,9	14,8	12,8
Jambi	10,7	10,8	8,9	12,3
Sumatera Selatan	9,0	7,0	13,1	15,6
Bengkulu	13,8	11,8	15,9	17,5
Lampung	19,2	12,2	20,3	21,3
Kep. Bangka Belitung	2,5	1,5	7,2	8,3
Kepulauan Riau	0,8	2,1	8,4	8,8
DKI Jakarta	3,0	2,5	4,4	4,3
Jawa Barat	13,2	6,8	19,5	13,8
Jawa Tengah	25,2	18,4	22,3	20,2
DI Yogyakarta	8,4	5,6	25,4	20,9
Jawa Timur	17,4	12,0	17,5	16,2
Banten	4,8	3,7	10,5	11,2
Bali	2,3	–	8,6	8,0
Nusa Tenggara Barat	22,1	23,9	24,1	26,2
Nusa Tenggara Timur	21,1	36,6	19,6	33,6
Kalimantan Barat	10,4	15,6	11,6	13,4
Kalimantan Tengah	1,8	4,6	5,1	8,0
Kalimantan Selatan	6,1	1,2	8,4	9,1
Kalimantan Timur	1,1	3,1	5,9	6,2
Kalimantan Utara	1,7	5,7	8,6	10,5
Sulawesi Utara	16,8	15,9	12,5	14,3
Sulawesi Tengah	11,7	9,1	16,8	20,7
Sulawesi Selatan	16,4	17,5	17,8	17,7
Sulawesi Tenggara	16,2	16,4	18,6	22,7
Gorontalo	22,2	16,5	28,4	26,7
Sulawesi Barat	34,6	20,4	22,0	23,4
Maluku	12,6	15,6	11,6	21,4
Maluku Utara	10,5	7,1	5,4	13,8
Papua Barat	9,7	7,0	7,0	17,8
Papua Barat Daya	13,0	11,2	6,8	16,3
Papua	6,9	16,2	6,3	12,4
Papua Selatan	0,4	–	4,0	9,1
Papua Tengah	–	–	1,8	3,4
Papua Pegunungan	9,0	–	5,3	8,9
Indonesia	14,2	11,5	16,3	15,6

Lampiran 38

Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit Menurut Provinsi, Status Migrasi Risen Antarprovinsi, dan Jenis Kredit, 2024

Provinsi	Rumah Tangga Migran					
	Persentase Rumah Tangga Migran yang Menerima Kredit	Jenis Kredit				Perorangan (Dengan Bunga)
		Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Kredit dari Bank Umum Selain KUR	Kredit dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	Kredit dari Koperasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	16,0	3,1	2,6	–	–	–
Sumatera Utara	27,2	10,8	3,4	0,2	2,9	1,1
Sumatera Barat	26,4	9,7	3,4	1,6	1,1	0,6
Riau	22,9	7,3	9,6	1,4	1,6	1,4
Jambi	24,1	12,0	3,4	0,6	–	–
Sumatera Selatan	25,2	8,9	5,5	1,1	1,4	–
Bengkulu	26,1	14,5	6,1	–	1,9	–
Lampung	35,3	16,8	1,9	–	2,1	–
Kep. Bangka Belitung	21,4	2,6	9,8	–	2,5	0,6
Kepulauan Riau	6,4	0,9	1,7	0,2	0,2	–
DKI Jakarta	7,5	~0	2,0	–	–	–
Jawa Barat	20,8	7,3	5,9	1,6	1,8	0,8
Jawa Tengah	28,2	11,2	4,3	0,5	5,0	1,1
DI Yogyakarta	15,4	9,1	0,5	0,5	~0	–
Jawa Timur	25,7	8,3	3,5	1,2	1,3	0,1
Banten	17,1	2,5	5,6	–	0,8	0,8
Bali	14,6	7,7	3,2	–	1,9	–
Nusa Tenggara Barat	35,5	7,4	5,5	1,8	2,2	2,1
Nusa Tenggara Timur	46,0	4,7	11,1	0,2	12,6	2,3
Kalimantan Barat	24,7	9,4	12,3	1,9	1,5	–
Kalimantan Tengah	11,0	3,3	–	–	2,7	–
Kalimantan Selatan	28,1	8,2	9,7	0,2	–	1,1
Kalimantan Timur	20,8	7,2	5,6	–	–	1,3
Kalimantan Utara	29,1	4,7	10,3	–	1,0	–
Sulawesi Utara	46,9	16,9	5,0	–	3,2	2,4
Sulawesi Tengah	28,6	13,4	1,8	2,0	0,6	–
Sulawesi Selatan	20,4	10,3	2,5	–	4,0	–
Sulawesi Tenggara	19,4	14,2	2,9	–	1,1	–
Gorontalo	30,3	6,6	5,5	–	–	–
Sulawesi Barat	49,7	20,0	3,9	2,4	5,9	–
Maluku	13,3	3,8	7,2	0,5	1,8	–
Maluku Utara	14,5	5,4	3,6	1,2	1,2	0,1
Papua Barat	31,6	18,5	8,2	–	–	–
Papua Barat Daya	17,5	0,5	17,0	–	–	–
Papua	6,2	1,7	3,7	0,8	–	–
Papua Selatan	26,5	18,9	5,4	2,2	–	–
Papua Tengah	0,1	–	–	–	0,1	–
Papua Pegunungan	19,0	19,0	–	–	–	–
Indonesia	23,6	8,3	4,3	0,7	2,4	0,6

Lanjutan Lampiran 38

Provinsi	Rumah Tangga Migran					
	Jenis Kredit					
	Pegadaian	Perusahaan Leasing	Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	Pinjaman Online	PNM Mekaar	Lainnya
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	–	1,5	–	–	7,9	1,0
Sumatera Utara	–	0,6	0,3	–	12,4	1,3
Sumatera Barat	0,6	0,8	–	–	10,1	1,3
Riau	1,7	1,6	–	–	1,4	–
Jambi	1,4	3,6	1,4	–	1,9	1,3
Sumatera Selatan	0,1	1,9	–	–	6,9	1,8
Bengkulu	–	1,4	–	–	3,9	0,9
Lampung	0,6	3,8	–	–	8,8	2,5
Kep. Bangka Belitung	–	10,5	–	–	0,9	–
Kepulauan Riau	0,7	2,3	0,1	0,1	0,8	0,8
DKI Jakarta	0,9	1,8	–	2,0	0,9	0,8
Jawa Barat	0,6	2,6	–	0,2	2,0	3,4
Jawa Tengah	0,6	3,0	1,3	–	7,9	2,7
DI Yogyakarta	–	1,9	–	0,7	0,6	2,6
Jawa Timur	0,8	0,6	0,6	0,4	7,6	3,4
Banten	–	2,2	–	–	–	5,9
Bali	–	1,7	0,1	–	–	–
Nusa Tenggara Barat	6,5	1,5	–	–	9,2	8,3
Nusa Tenggara Timur	3,8	–	0,7	–	15,7	2,7
Kalimantan Barat	0,8	6,3	–	–	1,0	–
Kalimantan Tengah	1,4	3,6	–	–	–	–
Kalimantan Selatan	–	14,4	–	–	–	2,8
Kalimantan Timur	2,3	6,5	–	–	1,2	–
Kalimantan Utara	1,2	8,1	–	–	–	4,7
Sulawesi Utara	7,9	10,4	–	–	17,6	10,8
Sulawesi Tengah	~0	6,0	1,3	–	2,8	1,4
Sulawesi Selatan	0,4	3,0	~0	–	2,5	0,3
Sulawesi Tenggara	0,9	0,4	0,4	–	1,3	0,9
Gorontalo	–	14,6	–	–	8,7	4,5
Sulawesi Barat	–	–	–	–	18,4	5,6
Maluku	1,4	–	–	–	–	–
Maluku Utara	1,1	1,9	–	–	–	–
Papua Barat	1,9	–	–	–	1,4	1,6
Papua Barat Daya	–	–	–	–	–	–
Papua	–	–	–	–	–	–
Papua Selatan	0,1	–	–	–	–	–
Papua Tengah	–	–	–	–	–	–
Papua Pegunungan	–	–	–	–	–	–
Indonesia	1,0	2,4	0,4	0,2	5,1	2,6

Lanjutan Lampiran 38

Provinsi	Rumah Tangga Nonmigran					
	Persentase Rumah Tangga Nonmigran yang Menerima Kredit	Jenis Kredit				Perorangan (Dengan Bunga)
		Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Kredit dari Bank Umum Selain KUR	Kredit dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	Kredit dari Koperasi	
(1)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Aceh	11,0	2,4	1,6	0,5	0,6	0,1
Sumatera Utara	20,3	6,7	2,4	0,3	1,3	0,7
Sumatera Barat	27,7	11,2	3,6	0,4	1,1	0,3
Riau	20,3	7,4	3,0	0,6	1,1	0,3
Jambi	23,6	8,3	3,9	0,4	1,2	0,4
Sumatera Selatan	19,7	6,2	2,6	0,2	1,1	0,4
Bengkulu	30,3	15,5	4,7	0,3	1,8	0,4
Lampung	22,2	7,4	2,4	0,4	1,7	0,7
Kep. Bangka Belitung	15,3	5,7	2,9	0,3	0,9	0,5
Kepulauan Riau	18,9	4,2	4,1	1,4	0,9	0,4
DKI Jakarta	11,3	2,6	1,7	0,3	0,6	0,7
Jawa Barat	23,6	7,4	3,5	0,6	2,0	1,2
Jawa Tengah	30,1	12,2	4,5	1,1	4,6	0,7
DI Yogyakarta	26,7	11,4	4,2	1,1	4,1	0,5
Jawa Timur	25,7	9,3	3,3	0,8	3,1	0,5
Banten	15,1	2,6	1,6	0,9	2,1	1,4
Bali	27,0	11,8	3,7	1,1	5,3	1,0
Nusa Tenggara Barat	36,4	10,7	5,9	1,2	2,4	2,7
Nusa Tenggara Timur	34,5	8,8	3,6	0,6	11,3	1,2
Kalimantan Barat	18,9	6,6	3,2	0,4	4,8	0,2
Kalimantan Tengah	12,6	5,0	3,7	0,2	1,0	0,4
Kalimantan Selatan	12,7	5,7	2,5	0,7	0,6	0,4
Kalimantan Timur	15,2	5,8	2,4	0,3	1,0	0,2
Kalimantan Utara	16,9	6,5	5,0	0,4	0,5	0,3
Sulawesi Utara	28,6	6,5	4,4	0,9	2,2	1,1
Sulawesi Tengah	26,7	10,5	4,9	0,5	1,4	1,0
Sulawesi Selatan	22,8	12,7	2,9	0,6	1,7	0,2
Sulawesi Tenggara	19,6	10,2	3,6	0,6	1,6	0,4
Gorontalo	40,8	12,4	9,8	0,4	1,9	1,8
Sulawesi Barat	27,7	14,1	4,1	0,5	1,7	0,4
Maluku	14,4	5,7	3,8	0,8	0,9	0,1
Maluku Utara	10,9	3,3	4,0	0,4	0,7	0,3
Papua Barat	10,5	5,4	3,3	0,5	0,8	0,2
Papua Barat Daya	15,3	6,7	4,5	0,3	1,8	0,1
Papua	11,5	4,6	4,1	0,7	1,1	0,2
Papua Selatan	11,6	5,5	4,3	0,3	0,4	0,5
Papua Tengah	4,2	1,9	0,6	0,3	0,5	0,4
Papua Pegunungan	0,3	0,1	~0	–	–	0,1
Indonesia	23,1	8,2	3,3	0,7	2,5	0,8

Lanjutan Lampiran 38

Provinsi	Rumah Tangga Nonmigran					
	Jenis Kredit					
	Pegadaian	Perusahaan Leasing	Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	Pinjaman Online	PNM Mekaar	Lainnya
(1)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
Aceh	0,3	0,9	0,1	0,1	4,4	1,0
Sumatera Utara	0,5	0,9	0,1	0,1	7,9	1,5
Sumatera Barat	0,2	1,3	0,3	0,4	11,6	0,6
Riau	0,3	3,3	0,8	0,1	4,1	1,1
Jambi	0,4	2,4	0,1	0,3	7,4	1,9
Sumatera Selatan	0,1	1,6	0,1	0,2	7,6	1,8
Bengkulu	0,3	1,3	0,1	0,2	7,8	2,3
Lampung	0,1	1,4	0,1	0,2	7,1	3,1
Kep. Bangka Belitung	0,3	1,7	0,1	~0	4,1	0,7
Kepulauan Riau	3,0	4,0	0,1	0,2	2,3	1,0
DKI Jakarta	1,0	2,6	–	0,6	1,6	0,9
Jawa Barat	0,5	2,6	0,1	0,5	5,2	3,1
Jawa Tengah	0,6	1,4	0,4	0,2	5,1	3,4
DI Yogyakarta	0,2	1,4	0,6	0,3	1,5	5,4
Jawa Timur	0,9	1,7	0,3	0,2	6,2	3,1
Banten	0,2	3,4	0,1	0,3	2,7	1,9
Bali	0,3	1,3	1,2	0,1	0,4	3,5
Nusa Tenggara Barat	6,2	1,6	0,4	0,1	10,4	5,1
Nusa Tenggara Timur	2,6	0,4	0,1	0,1	11,4	2,6
Kalimantan Barat	0,6	2,1	~0	0,1	2,5	0,7
Kalimantan Tengah	0,1	1,6	0,1	0,1	0,2	1,0
Kalimantan Selatan	0,2	1,5	0,1	0,1	1,0	0,7
Kalimantan Timur	1,5	4,2	0,1	0,1	0,3	0,9
Kalimantan Utara	1,9	2,0	0,1	0,1	0,8	0,8
Sulawesi Utara	2,9	4,1	0,2	0,4	9,8	1,9
Sulawesi Tengah	1,3	2,8	0,2	0,1	6,4	1,3
Sulawesi Selatan	3,1	1,0	~0	0,1	2,5	0,8
Sulawesi Tenggara	1,0	2,0	0,2	0,1	1,1	0,8
Gorontalo	2,7	3,5	0,3	0,3	12,9	3,5
Sulawesi Barat	1,1	0,8	~0	–	5,7	2,6
Maluku	0,8	1,4	0,1	0,1	1,6	0,6
Maluku Utara	0,6	1,3	0,1	~0	~0	0,7
Papua Barat	0,2	0,0	–	–	0,2	0,4
Papua Barat Daya	1,5	0,7	–	–	1,1	0,1
Papua	0,5	0,1	–	–	0,6	0,3
Papua Selatan	0,4	0,7	–	0,2	0,2	0,9
Papua Tengah	0,1	0,6	–	–	–	0,4
Papua Pegunungan	–	–	–	–	–	~0
Indonesia	0,9	1,9	0,2	0,3	5,1	2,4

Lampiran 39

Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi, Status Migrasi Risen Antarprovinsi, dan Sumber Terbesar Pembiayaan Rumah Tangga, 2024

Provinsi	Rumah Tangga Migran					Rumah Tangga Nonmigran				
	Sumber Terbesar Pembiayaan Rumah Tangga					Sumber Terbesar Pembiayaan Rumah Tangga				
	ART yang Bekerja	Kiriman Uang/ Barang	Investasi ¹	Pensiunan	Jumlah	ART yang Bekerja	Kiriman Uang/ Barang	Investasi ¹	Pensiunan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aceh	79,6	13,3	–	7,1	100,0	92,9	5,1	0,2	1,8	100,0
Sumatera Utara	92,4	4,5	0,2	2,9	100,0	94,4	3,1	0,2	2,2	100,0
Sumatera Barat	87,5	11,0	0,4	1,0	100,0	93,7	4,2	0,2	1,9	100,0
Riau	98,0	1,2	–	0,7	100,0	96,0	2,5	0,5	1,0	100,0
Jambi	92,5	5,5	0,5	1,5	100,0	95,6	2,8	0,2	1,4	100,0
Sumatera Selatan	96,9	0,9	–	2,3	100,0	95,5	2,8	0,1	1,7	100,0
Bengkulu	88,6	5,5	1,6	4,3	100,0	96,3	2,1	~0	1,6	100,0
Lampung	95,9	0,7	0,5	2,9	100,0	95,7	3,3	0,1	0,9	100,0
Kep. Bangka Belitung	92,4	5,1	–	2,5	100,0	93,2	4,9	0,2	1,8	100,0
Kepulauan Riau	88,6	10,6	–	0,8	100,0	95,1	3,7	0,2	1,0	100,0
DKI Jakarta	94,4	3,8	–	1,8	100,0	93,5	3,9	0,3	2,3	100,0
Jawa Barat	96,1	3,6	~0	0,4	100,0	92,5	5,5	0,1	2,0	100,0
Jawa Tengah	90,6	7,3	~0	2,1	100,0	91,1	6,9	0,1	1,9	100,0
DI Yogyakarta	51,3	45,1	–	3,6	100,0	88,1	6,7	0,6	4,7	100,0
Jawa Timur	88,7	9,2	~0	2,1	100,0	92,5	5,7	0,1	1,6	100,0
Banten	98,6	–	–	1,4	100,0	94,6	3,8	0,1	1,5	100,0
Bali	88,3	10,6	–	1,1	100,0	95,1	2,8	0,2	1,9	100,0
Nusa Tenggara Barat	95,4	3,7	–	0,9	100,0	88,9	9,6	0,1	1,5	100,0
Nusa Tenggara Timur	92,3	4,8	0,4	2,4	100,0	92,7	4,7	~0	2,5	100,0
Kalimantan Barat	90,2	3,7	–	6,1	100,0	94,3	3,7	0,1	1,9	100,0
Kalimantan Tengah	96,1	1,0	0,1	2,8	100,0	95,2	2,5	0,2	2,1	100,0
Kalimantan Selatan	95,0	2,0	–	3,0	100,0	91,5	5,7	0,1	2,7	100,0
Kalimantan Timur	87,9	6,8	1,4	3,9	100,0	94,3	3,6	0,1	2,1	100,0
Kalimantan Utara	99,9	0,1	–	–	100,0	95,6	2,8	–	1,5	100,0
Sulawesi Utara	94,9	1,9	1,8	1,4	100,0	92,4	4,5	0,1	3,1	100,0
Sulawesi Tengah	96,1	3,9	–	–	100,0	94,5	3,3	0,1	2,1	100,0
Sulawesi Selatan	85,3	7,9	0,8	6,0	100,0	92,1	5,1	0,2	2,6	100,0
Sulawesi Tenggara	93,2	5,4	–	1,4	100,0	93,1	4,6	~0	2,2	100,0
Gorontalo	94,7	1,1	–	4,2	100,0	96,0	2,5	~0	1,5	100,0
Sulawesi Barat	97,7	2,3	–	–	100,0	95,5	3,1	~0	1,4	100,0
Maluku	87,1	11,5	–	1,3	100,0	92,6	3,7	~0	3,7	100,0
Maluku Utara	97,6	1,0	–	1,4	100,0	95,9	2,6	~0	1,5	100,0
Papua Barat	100,0	–	–	–	100,0	96,1	2,0	–	1,9	100,0
Papua Barat Daya	88,3	4,0	–	7,7	100,0	96,2	2,1	0,3	1,4	100,0
Papua	96,1	–	–	3,9	100,0	90,7	2,5	~0	6,8	100,0
Papua Selatan	91,6	8,4	–	–	100,0	96,0	1,5	~0	2,4	100,0
Papua Tengah	99,9	0,1	–	–	100,0	99,0	0,4	~0	0,6	100,0
Papua Pegunungan	100,0	–	–	–	100,0	99,7	0,3	–	~0	100,0
Indonesia	89,8	8,1	0,1	2,0	100,0	93,1	4,9	0,1	1,9	100,0

Catatan: ¹ deposito, royalti, saham, bunga bank, dan lainnya.

Lampiran 40
 Kesalahan *Sampling* Migran Seumur Hidup Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2024
 Berdasarkan Provinsi

Provinsi	Estimasi Persentase Migran Seumur Hidup				
	Persentase	Standard Error	RSE (%)	Selang Kepercayaan 95 %	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	3,8	0,2	5,2	3,4	4,2
Sumatera Utara	3,3	0,2	5,0	3,0	3,7
Sumatera Barat	6,9	0,3	5,0	6,3	7,6
Riau	26,7	0,8	2,9	25,2	28,2
Jambi	18,1	0,7	4,1	16,7	19,6
Sumatera Selatan	10,1	0,4	4,3	9,3	11,0
Bengkulu	15,0	0,7	4,6	13,7	16,4
Lampung	13,5	0,4	2,6	12,9	14,3
Kep. Bangka Belitung	13,7	0,8	6,0	12,2	15,4
Kepulauan Riau	42,0	1,2	2,8	39,8	44,4
DKI Jakarta	30,3	0,7	2,3	28,9	31,7
Jawa Barat	10,3	0,4	3,5	9,6	11,0
Jawa Tengah	2,7	0,1	3,2	2,6	2,9
DI Yogyakarta	14,6	0,7	4,9	13,3	16,1
Jawa Timur	2,0	0,1	4,6	1,8	2,2
Banten	19,7	0,9	4,7	17,9	21,5
Bali	7,6	0,6	8,5	6,5	9,0
Nusa Tenggara Barat	2,0	0,2	10,4	1,6	2,5
Nusa Tenggara Timur	3,5	0,2	6,8	3,0	4,0
Kalimantan Barat	5,4	0,3	6,3	4,8	6,1
Kalimantan Tengah	20,0	0,9	4,3	18,4	21,7
Kalimantan Selatan	11,1	0,5	4,7	10,1	12,2
Kalimantan Timur	30,5	0,8	2,7	28,9	32,1
Kalimantan Utara	29,2	1,4	4,8	26,5	32,0
Sulawesi Utara	7,0	0,4	6,2	6,2	7,9
Sulawesi Tengah	14,3	0,7	4,8	13,0	15,7
Sulawesi Selatan	3,6	0,2	5,9	3,2	4,0
Sulawesi Tenggara	15,9	0,6	3,9	14,7	17,2
Gorontalo	5,0	0,4	7,8	4,3	5,8
Sulawesi Barat	10,8	0,7	6,8	9,4	12,3
Maluku	6,7	0,6	9,1	5,6	8,0
Maluku Utara	8,5	0,5	6,5	7,4	9,6
Papua Barat	26,2	1,4	5,5	23,4	29,1
Papua Barat Daya	26,7	1,2	4,6	24,3	29,1
Papua	22,0	1,3	5,8	19,6	24,6
Papua Selatan	25,1	1,6	6,5	22,1	28,5
Papua Tengah	16,5	0,9	5,6	14,8	18,4
Papua Pegunungan	1,8	0,4	22,0	1,2	2,8

Lanjutan Lampiran 40

Provinsi	Estimasi Persentase Nonmigran Seumur Hidup				
	Persentase	Standard Error	RSE (%)	Selang Kepercayaan 95 %	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aceh	96,2	0,2	0,2	95,8	96,6
Sumatera Utara	96,7	0,2	0,2	96,3	97,0
Sumatera Barat	93,1	0,3	0,4	92,4	93,7
Riau	73,3	0,8	1,0	71,8	74,8
Jambi	81,9	0,7	0,9	80,4	83,3
Sumatera Selatan	89,9	0,4	0,5	89,0	90,7
Bengkulu	85,0	0,7	0,8	83,6	86,3
Lampung	86,5	0,4	0,4	85,7	87,1
Kep. Bangka Belitung	86,3	0,8	1,0	84,6	87,8
Kepulauan Riau	58,0	1,2	2,0	55,6	60,2
DKI Jakarta	69,7	0,7	1,0	68,3	71,1
Jawa Barat	89,7	0,4	0,4	89,0	90,4
Jawa Tengah	97,3	0,1	0,1	97,1	97,4
DI Yogyakarta	85,4	0,7	0,8	83,9	86,7
Jawa Timur	98,0	0,1	0,1	97,8	98,2
Banten	80,3	0,9	1,1	78,5	82,1
Bali	92,4	0,6	0,7	91,0	93,5
Nusa Tenggara Barat	98,0	0,2	0,2	97,5	98,4
Nusa Tenggara Timur	96,5	0,2	0,2	96,0	97,0
Kalimantan Barat	94,6	0,3	0,4	93,9	95,2
Kalimantan Tengah	80,0	0,9	1,1	78,3	81,6
Kalimantan Selatan	88,9	0,5	0,6	87,8	89,9
Kalimantan Timur	69,5	0,8	1,2	67,9	71,1
Kalimantan Utara	70,8	1,4	2,0	68,0	73,5
Sulawesi Utara	93,0	0,4	0,5	92,1	93,8
Sulawesi Tengah	85,7	0,7	0,8	84,3	87,0
Sulawesi Selatan	96,4	0,2	0,2	96,0	96,8
Sulawesi Tenggara	84,1	0,6	0,7	82,8	85,3
Gorontalo	95,0	0,4	0,4	94,2	95,7
Sulawesi Barat	89,2	0,7	0,8	87,7	90,6
Maluku	93,3	0,6	0,6	92,0	94,4
Maluku Utara	91,5	0,5	0,6	90,4	92,6
Papua Barat	73,8	1,4	2,0	70,9	76,6
Papua Barat Daya	73,3	1,2	1,7	70,9	75,7
Papua	78,0	1,3	1,6	75,4	80,4
Papua Selatan	74,9	1,6	2,2	71,5	77,9
Papua Tengah	83,5	0,9	1,1	81,6	85,2
Papua Pegunungan	98,2	0,4	0,4	97,2	98,8

Lampiran 41
 Kesalahan *Sampling* Migran Risen Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2024
 Berdasarkan Provinsi

Provinsi	Estimasi Persentase Migran Risen				
	Persentase	Standard Error	RSE (%)	Selang Kepercayaan 95 %	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	0,3	~0	17,1	0,2	0,4
Sumatera Utara	0,6	0,1	11,8	0,4	0,7
Sumatera Barat	1,6	0,2	9,7	1,3	1,9
Riau	0,7	0,1	13,1	0,5	0,9
Jambi	0,9	0,1	15,3	0,7	1,2
Sumatera Selatan	0,6	0,1	14,6	0,4	0,7
Bengkulu	0,9	0,1	14,2	0,7	1,1
Lampung	0,8	0,1	12,7	0,6	1,1
Kep. Bangka Belitung	1,1	0,2	16,8	0,8	1,6
Kepulauan Riau	3,7	0,8	20,7	2,5	5,6
DKI Jakarta	1,4	0,2	15,8	1,0	1,9
Jawa Barat	0,7	0,1	11,7	0,5	0,9
Jawa Tengah	1,2	0,1	5,7	1,1	1,4
DI Yogyakarta	2,8	0,4	13,0	2,2	3,6
Jawa Timur	0,5	~0	8,1	0,4	0,6
Banten	0,6	0,1	17,6	0,4	0,9
Bali	0,6	0,1	20,0	0,4	0,9
Nusa Tenggara Barat	1,5	0,2	12,0	1,2	1,9
Nusa Tenggara Timur	1,3	0,1	9,7	1,0	1,5
Kalimantan Barat	0,3	0,1	17,6	0,2	0,5
Kalimantan Tengah	1,0	0,2	16,4	0,7	1,4
Kalimantan Selatan	0,8	0,2	20,1	0,5	1,1
Kalimantan Timur	0,9	0,1	13,7	0,7	1,1
Kalimantan Utara	1,0	0,2	20,8	0,7	1,6
Sulawesi Utara	0,4	0,1	16,6	0,3	0,5
Sulawesi Tengah	0,9	0,1	16,0	0,6	1,2
Sulawesi Selatan	0,9	0,1	11,7	0,7	1,2
Sulawesi Tenggara	1,1	0,2	14,5	0,9	1,5
Gorontalo	0,5	0,1	19,7	0,4	0,8
Sulawesi Barat	1,0	0,2	17,1	0,7	1,3
Maluku	0,9	0,2	21,3	0,6	1,4
Maluku Utara	0,8	0,1	15,9	0,6	1,1
Papua Barat	1,7	0,2	14,0	1,3	2,3
Papua Barat Daya	0,8	0,2	24,4	0,5	1,3
Papua	0,9	0,3	28,0	0,5	1,5
Papua Selatan	1,5	0,4	27,8	0,9	2,6
Papua Tengah	0,5	0,2	49,1	0,2	1,3
Papua Pegunungan	0,4	0,2	41,2	0,2	0,9

Lanjutan Lampiran 41

Provinsi	Estimasi Persentase Nonmigran Risen				
	Persentase	Standard Error	RSE (%)	Selang Kepercayaan 95 %	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aceh	99,7	~0	~0	99,6	99,8
Sumatera Utara	99,4	0,1	0,1	99,3	99,6
Sumatera Barat	98,4	0,2	0,2	98,1	98,7
Riau	99,3	0,1	0,1	99,1	99,5
Jambi	99,1	0,1	0,1	98,8	99,3
Sumatera Selatan	99,4	0,1	0,1	99,3	99,6
Bengkulu	99,1	0,1	0,1	98,9	99,3
Lampung	99,2	0,1	0,1	98,9	99,4
Kep. Bangka Belitung	98,9	0,2	0,2	98,4	99,2
Kepulauan Riau	96,3	0,8	0,8	94,4	97,5
DKI Jakarta	98,6	0,2	0,2	98,1	99,0
Jawa Barat	99,3	0,1	0,1	99,1	99,5
Jawa Tengah	98,8	0,1	0,1	98,6	98,9
DI Yogyakarta	97,2	0,4	0,4	96,4	97,8
Jawa Timur	99,5	~0	~0	99,4	99,6
Banten	99,4	0,1	0,1	99,1	99,6
Bali	99,4	0,1	0,1	99,1	99,6
Nusa Tenggara Barat	98,5	0,2	0,2	98,1	98,8
Nusa Tenggara Timur	98,7	0,1	0,1	98,5	99,0
Kalimantan Barat	99,7	0,1	0,1	99,5	99,8
Kalimantan Tengah	99,0	0,2	0,2	98,6	99,3
Kalimantan Selatan	99,2	0,2	0,2	98,9	99,5
Kalimantan Timur	99,1	0,1	0,1	98,9	99,3
Kalimantan Utara	99,0	0,2	0,2	98,4	99,3
Sulawesi Utara	99,6	0,1	0,1	99,5	99,7
Sulawesi Tengah	99,1	0,1	0,1	98,8	99,4
Sulawesi Selatan	99,1	0,1	0,1	98,8	99,3
Sulawesi Tenggara	98,9	0,2	0,2	98,5	99,1
Gorontalo	99,5	0,1	0,1	99,2	99,6
Sulawesi Barat	99,0	0,2	0,2	98,7	99,3
Maluku	99,1	0,2	0,2	98,6	99,4
Maluku Utara	99,2	0,1	0,1	98,9	99,4
Papua Barat	98,3	0,2	0,2	97,7	98,7
Papua Barat Daya	99,2	0,2	0,2	98,7	99,5
Papua	99,1	0,3	0,3	98,5	99,5
Papua Selatan	98,5	0,4	0,4	97,4	99,1
Papua Tengah	99,5	0,2	0,2	98,7	99,8
Papua Pegunungan	99,6	0,2	0,2	99,1	99,8

Lampiran 42
 Kesalahan *Sampling* Migran Risen Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2024 Berdasarkan Karakteristik Demografi

Karakteristik	Estimasi Persentase Migran Risen				
	Estimasi	Standard Error	RSE (%)	Selang Kepercayaan 95 %	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jenis Kelamin					
Laki-laki	51,2	0,8	1,5	49,7	52,7
Perempuan	48,8	0,8	1,6	47,3	50,3
Kelompok Umur					
5–9	8,1	0,4	5,3	7,3	9,0
10–19	11,3	0,5	4,6	10,3	12,4
20–29	31,0	1,0	3,4	29,0	33,1
30–39	23,5	0,7	3,1	22,1	24,9
40–49	13,6	0,6	4,2	12,5	14,8
50–59	7,6	0,5	6,1	6,7	8,6
60+	4,9	0,4	7,9	4,2	5,7
Status Perkawinan					
Belum Kawin	30,9	1,0	3,2	29,0	32,9
Kawin	63,1	1,0	1,6	61,0	65,0
Cerai Hidup	2,6	0,3	10,7	2,1	3,2
Cerai Mati	3,4	0,3	9,2	2,8	4,1
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan					
Tidak Punya Ijazah SD	16,7	0,6	3,7	15,6	18,0
SD/MI/Sederajat	15,6	0,6	4,1	14,4	16,9
SMP/MTs/Sederajat	17,1	0,7	4,0	15,9	18,5
SMA/MA/Sederajat	34,8	1,0	2,9	32,9	36,8
Diploma I/II/III	3,1	0,3	11,2	2,5	3,8
Diploma IV/S1	11,4	0,6	5,1	10,4	12,6
Profesi	0,1	~0	34,2	~0	0,2
S2/S3	1,1	0,2	15,7	0,8	1,4

Lanjutan Lampiran 42

Karakteristik	Estimasi Persentase Nonmigran Risen				
	Estimasi	Standard Error	RSE (%)	Selang Kepercayaan 95 %	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Jenis Kelamin					
Laki-laki	50,1	0,1	0,1	49,9	50,2
Perempuan	49,9	0,1	0,1	49,8	50,1
Kelompok Umur					
5–9	8,6	~0	0,5	8,6	8,7
10–19	17,4	0,1	0,3	17,3	17,6
20–29	16,5	0,1	0,4	16,3	16,6
30–39	16,2	0,1	0,4	16,1	16,4
40–49	15,5	0,1	0,4	15,3	15,6
50–59	12,7	0,1	0,4	12,6	12,8
60+	13,1	0,1	0,5	12,9	13,2
Status Perkawinan					
Belum Kawin	33,7	0,1	0,2	33,5	33,8
Kawin	58,4	0,1	0,1	58,2	58,6
Cerai Hidup	1,7	~0	1,4	1,7	1,8
Cerai Mati	6,2	~0	0,6	6,1	6,3
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan					
Tidak Punya Ijazah SD	23,8	0,1	0,3	23,6	23,9
SD/MI/Sederajat	23,6	0,1	0,4	23,4	23,7
SMP/MTs/Sederajat	18,9	0,1	0,4	18,7	19,0
SMA/MA/Sederajat	25,4	0,1	0,4	25,2	25,6
Diploma I/II/III	1,6	~0	1,5	1,5	1,6
Diploma IV/S1	6,3	0,1	0,9	6,2	6,4
Profesi	~0	~0	6,9	~0	0,1
S2/S3	0,4	~0	3,1	0,4	0,4

Lampiran 43
 Kesalahan *Sampling* Migran Risen Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2024 Berdasarkan Karakteristik Lainnya

Karakteristik	Estimasi Persentase Migran Risen				
	Estimasi	Standard Error	RSE (%)	Selang Kepercayaan 95 %	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Umur Kawin Pertama					
10–15	2,1	0,3	12,8	1,6	2,7
16–18	8,2	0,6	7,3	7,1	9,5
19–24	45,0	1,1	2,5	42,8	47,2
25+	44,7	1,2	2,7	42,4	47,1
Penggunaan Alat/Cara KB					
Ya, Pernah	20,2	1,4	6,8	17,6	23,0
Ya, Sedang	40,6	1,7	4,1	37,4	43,9
Tidak	39,2	1,7	4,3	36,0	42,6
Pernah Mengalami Tindak Kejahatan					
Ya	0,9	0,2	16,7	0,7	1,3
Tidak	99,1	0,2	0,2	98,7	99,3
Pernah Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir					
Ya	87,8	0,6	0,7	86,6	89,0
Tidak	12,2	0,6	5,2	11,0	13,4

Karakteristik	Estimasi Persentase Nonmigran Risen				
	Estimasi	Standard Error	RSE (%)	Selang Kepercayaan 95 %	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Umur Kawin Pertama					
10–15	4,7	0,1	1,2	4,6	4,8
16–18	15,7	0,1	0,5	15,5	15,8
19–24	47,0	0,1	0,2	46,8	47,3
25+	32,6	0,1	0,4	32,3	32,8
Penggunaan Alat/Cara KB					
Ya, Pernah	22,0	0,2	0,8	21,6	22,3
Ya, Sedang	48,0	0,2	0,4	47,6	48,4
Tidak	30,0	0,2	0,7	29,6	30,4
Pernah Mengalami Tindak Kejahatan					
Ya	0,5	~0	2,8	0,5	0,5
Tidak	99,5	~0	~0	99,5	99,5
Pernah Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir					
Ya	72,6	0,1	0,2	72,4	72,9
Tidak	27,4	0,1	0,4	27,1	27,6

Lampiran 44

Kesalahan *Sampling* Rumah Tangga Migran Risen Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2024 Berdasarkan Provinsi

Provinsi	Estimasi Rumah Tangga Migran Risen				
	Estimasi	Standard Error	RSE (%)	Selang Kepercayaan 95 %	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	0,7	0,1	16,3	0,5	1,0
Sumatera Utara	1,2	0,1	11,2	1,0	1,5
Sumatera Barat	3,4	0,3	7,9	2,9	4,0
Riau	1,5	0,2	11,9	1,2	1,9
Jambi	1,7	0,2	12,5	1,3	2,2
Sumatera Selatan	1,4	0,2	13,5	1,1	1,8
Bengkulu	2,3	0,3	13,9	1,8	3,0
Lampung	2,0	0,2	10,9	1,6	2,4
Kep. Bangka Belitung	2,5	0,3	13,8	1,9	3,3
Kepulauan Riau	8,1	1,6	19,5	5,5	11,7
DKI Jakarta	2,8	0,4	13,3	2,2	3,6
Jawa Barat	1,3	0,1	10,3	1,1	1,6
Jawa Tengah	2,9	0,2	5,3	2,6	3,2
DI Yogyakarta	7,2	0,9	12,8	5,6	9,3
Jawa Timur	1,2	0,1	7,2	1,1	1,4
Banten	1,3	0,2	15,2	1,0	1,7
Bali	1,5	0,3	18,2	1,0	2,1
Nusa Tenggara Barat	3,9	0,4	10,3	3,2	4,8
Nusa Tenggara Timur	3,5	0,3	8,1	3,0	4,1
Kalimantan Barat	0,9	0,2	17,4	0,6	1,2
Kalimantan Tengah	2,2	0,3	12,1	1,7	2,7
Kalimantan Selatan	1,4	0,2	16,2	1,0	1,9
Kalimantan Timur	1,9	0,2	12,0	1,5	2,5
Kalimantan Utara	2,4	0,4	18,2	1,7	3,4
Sulawesi Utara	1,0	0,2	16,5	0,7	1,3
Sulawesi Tengah	1,7	0,2	13,7	1,3	2,2
Sulawesi Selatan	2,1	0,2	9,2	1,7	2,5
Sulawesi Tenggara	2,7	0,3	10,4	2,2	3,3
Gorontalo	1,6	0,3	17,4	1,1	2,2
Sulawesi Barat	2,4	0,4	17,0	1,7	3,4
Maluku	2,4	0,4	14,8	1,8	3,2
Maluku Utara	2,2	0,3	13,4	1,7	2,8
Papua Barat	4,4	0,5	12,4	3,4	5,6
Papua Barat Daya	2,2	0,5	20,8	1,4	3,3
Papua	2,0	0,5	22,9	1,3	3,1
Papua Selatan	3,0	0,8	24,9	1,8	4,9
Papua Tengah	0,7	0,3	36,5	0,3	1,4
Papua Pegunungan	0,6	0,2	37,0	0,3	1,2

Lampiran 45
 Kesalahan *Sampling* Rumah Tangga Migran Risen Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2024
 Berdasarkan Karakteristik Perumahan

Karakteristik	Estimasi Persentase Rumah Tangga Migran Risen				
	Estimasi	Standard Error	RSE (%)	Selang kepercayaan 95 %	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal					
Milik Sendiri	75,7	1,2	1,6	73,2	78,0
Kontrak/Sewa	13,4	1,1	8,5	11,3	15,8
Bebas Sewa	8,6	0,6	6,6	7,6	9,8
Dinas	2,3	0,4	16,5	1,6	3,1
Lainnya	~0	~0	100,0	~0	~0
Rata-Rata Luas Lantai Rumah Bangunan Tempat Tinggal per Kapita (m²)					
<7,2	6,1	0,7	10,8	4,9	7,5
≥7,2	93,9	0,7	0,7	92,5	95,1
Bahan Bangunan Utama Dinding Rumah Terluas					
Tembok	86,3	0,6	0,7	85,0	87,5
Plesteran Anyaman Bambu/Kawat	0,6	0,1	20,4	0,4	0,9
Kayu/Papan	10,2	0,5	5,2	9,2	11,3
Anyaman Bambu	1,4	0,3	20,8	0,9	2,1
Batang Kayu	0,2	0,1	34,5	0,1	0,5
Bambu	0,4	0,1	18,1	0,3	0,6
Lainnya	0,9	0,1	17,3	0,6	1,2
Bahan Bangunan Utama Lantai Rumah Terluas					
Marmar/Granit	3,5	0,5	13,9	2,6	4,6
Keramik	65,3	1,0	1,6	63,3	67,3
Parket/Vinil/Karpet	0,4	0,1	33,4	0,2	0,8
Ubin/Tegel/Teraso	3,6	0,4	9,9	3,0	4,4
Kayu/Papan	4,9	0,3	6,7	4,3	5,6
Semen/Bata Merah	19,8	0,8	3,8	18,4	21,4
Bambu	0,3	0,1	47,8	0,1	0,7
Tanah	2,2	0,3	14,0	1,6	2,8
Lainnya	~0	~0	64,0	~0	0,1
Bahan Bangunan Utama Atap Rumah Terluas					
Beton	2,5	0,4	15,7	1,8	3,4
Genteng	54,7	1,2	2,3	52,2	57,1
Seng	32,7	1,0	3,2	30,7	34,8
Asbes	9,6	1,0	10,9	7,7	11,9
Bambu	0,2	0,1	48,7	0,1	0,4
Kayu/Sirap	0,1	0,1	39,2	0,1	0,3
Jerami/Ijuk/Daun-Daunan/Rumbia	0,2	0,1	35,9	0,1	0,4
Lainnya	~0	~0	88,4	~0	0,2

Lampiran 46

Kesalahan *Sampling* Rumah Tangga Migran Risen Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2024 Berdasarkan Karakteristik Perumahan

Karakteristik	Estimasi Persentase Rumah Tangga Migran Risen				
	Estimasi	Standard Error	RSE (%)	Selang Kepercayaan 95 %	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sumber Air Minum					
Sumber Air Minum Bersih	83,5	0,8	0,9	81,9	85,0
Sumber Air Minum Layak	94,6	0,4	0,4	93,7	95,3
Bahan Bakar Utama untuk Memasak					
Listrik	1,8	0,3	19,1	1,2	2,6
Elpiji/Gas Kota/Biogas	84,2	1,1	1,3	82,0	86,1
Minyak Tanah	3,1	0,2	7,1	2,7	3,5
Arang/Briket	~0	~0	82,0	~0	0,1
Kayu Bakar	7,0	0,5	6,5	6,1	7,9
Lainnya	0,1	0,1	74,6	~0	0,5
Tidak Memasak	3,9	0,9	23,1	2,4	6,0
Fasilitas Tempat Buang Air Besar					
Ada, Sendiri	89,3	0,8	0,9	87,6	90,7
Ada, Bersama	7,9	0,7	8,7	6,7	9,3
Ada, Komunal	0,1	~0	36,6	0,1	0,2
Ada, Umum	0,8	0,2	27,0	0,5	1,3
Ada, ART Tidak Menggunakan	0,2	0,1	55,1	0,1	0,7
Tidak Ada	1,7	0,2	13,1	1,3	2,2
Jenis Kloset yang Digunakan					
Leher Angsa	97,9	0,3	0,3	97,3	98,3
Plengsengan/Cemplung/Cubluk	2,1	0,3	11,7	1,7	2,7
Tempat Pembuangan Akhir Tinja					
Tangki Septik/IPAL	87,5	0,7	0,8	86,1	88,8
Selain Tangki Septik/IPAL	12,5	0,7	5,7	11,2	13,9
Sumber Penerangan yang Digunakan					
Listrik PLN dengan Meteran	94,8	0,4	0,5	93,9	95,6
Listrik PLN Tanpa Meteran	3,9	0,4	10,4	3,2	4,8
Listrik Non PLN	1,1	0,1	13,9	0,8	1,4
Bukan Listrik	0,2	0,1	29,7	0,1	0,3

Lampiran 47

Kuesioner Survei Sosial Ekonomi Nasional 2024



VSEN24K
Dibuat 1 set untuk
BPS Kab/Kota

REPUBLIK INDONESIA

SURVEI SOSIAL EKONOMI NASIONAL 2024

KETERANGAN POKOK ANGGOTA RUMAH TANGGA

RAHASIA		MARET	
BLOK I. KETERANGAN TEMPAT			
101	Provinsi		
102	Kabupaten/Kota*		
103	Kecamatan		
104	Desa/Kelurahan*		
105	Klasifikasi Desa/Kelurahan	1. Perkotaan 2. Perdesaan	
106	Nomor Blok Sensus		
107	Nomor Kode Sampel		
108	Nomor Urut Bangunan Tempat Tinggal		
109	Nomor Urut Sampel Rumah Tangga		
110	Nama Kepala Rumah Tangga		
111	Alamat (Nama Jalan/Gang, RT/RW/Dusun)		
112	Koordinat Lokasi Rumah Tangga	Latitude (lintang) : ° ′ ″ Longitude (bujur) : ° ′ ″	

* Coret yang tidak perlu

SELAMAT PAGI/SIANG/SORE/MALAM. KAMI/SAYA DARI BPS SEDANG MENGUMPULKAN DATA/INFORMASI KEADAN SOSIAL EKONOMI RUMAH TANGGA SEPERTI PENDIDIKAN, KESEHATAN, PEKERJAAN, PERUMAHAN, DAN PENGELUARAN RUMAH TANGGA. UNTUK ITU KAMI/SAYA AKAN MEWAWANCARA BAPAK/IBU BESERTA ANGGOTA RUMAH TANGGA (ART) LAINNYA. SELURUH DATA YANG BAPAK/IBU BERIKAN KEPADA KAMI, AKAN DIRAHASIKAN DAN HANYA AKAN DIGUNAKAN UNTUK KEPERLUAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN. BOLEH SAYA MULAI WAWANCARA SEKARANG?

- ☐ Ya bersedia → Mulai wawancara
☐ Bersedia dengan perjanjian di lain waktu → Blok XXIV. Catatan
☐ Tidak bersedia → Lengkapi isian Blok I, Blok II, dan Blok XXIV Catatan. Lampirkan Berita Acara Nonrespon. Selesai dan segera laporkan ke pengawas.

BLOK II. KETERANGAN PENCACAHAN				
Uraian	Nama dan Kode/NIP	Jabatan	Waktu	Tanda Tangan
201. Pencacah		Staf BPS Provinsi.....1 Staf BPS Kab/Kota.....2 Mitra.....3	Tgl Bln	
202. Pengawas		Staf BPS Provinsi.....1 Staf BPS Kab/Kota.....2 Mitra.....3	Tgl Bln	
203. Hasil pencacahan rumah tangga	Terisi lengkap.....1 Terisi tidak lengkap.....2 Tidak ada ART/responden yang dapat memberi jawaban sampai akhir masa pencacahan.....3 Responden menolak.....4 Rumah tangga pindah/bangunan sensus sudah tidak ada.....5			☐ Blok XXIV. Catatan

BLOK III. RINGKASAN				
301	Banyaknya anggota rumah tangga			
302	Banyaknya anggota rumah tangga berumur 0-4 tahun			
303	Banyaknya anggota rumah tangga berumur 5 tahun ke atas			
304	Banyaknya anggota rumah tangga berumur 10 tahun ke atas			
305	Banyaknya perempuan berumur 10-54 tahun berstatus pernah kawin			

1

PETUNJUK PENGISIAN	
Dalam pengisian kuesioner, perlu diperhatikan tata tertib sebagai berikut: - Kuasai konsep, definisi, maksud, dan tujuan survei. - Tulis isian se jelas-jelasnya dengan pensil hitam pada tempat yang disediakan, agar mudah dibaca. - Gunakan blok catatan untuk mencatat hal-hal penting yang perlu diketahui oleh pengawas dan pengolah. Bagian kosong dari kuesioner juga dapat digunakan untuk mencatat hal-hal yang ditemui saat wawancara berlangsung. - Pencacah harus meneliti/memeriksa seluruh isian kuesioner dan memperbaiki setiap kesalahan, sebelum kuesioner diserahkan ke pengawas. - Perhatikan dan patuhi tanda-tanda atau alur pertanyaan yang tertera pada kuesioner. - Pertanyaan atau pilihan jawaban yang dicatat dengan huruf kapital harus dibacakan, sedangkan pertanyaan atau pilihan jawaban yang dicatat menggunakan huruf kecil tidak perlu dibacakan. - Kode pilihan jawaban yang menggunakan huruf kapital seperti A, B, C, dan seterusnya, boleh diingkari lebih dari satu pilihan jawaban. Kode pilihan jawaban yang menggunakan angka seperti 1, 2, 3, dan seterusnya, hanya boleh diingkari salah satu. - Blok I tentang keterangan tempat diisi sebelum ke lapangan. - Isikan Blok IV terlebih dahulu sampai selesai sebagai panduan untuk mengisi pertanyaan dalam format roster. Lipat bagian kertas yang ada tanda garis putus-putus dan tulisan lipit disini pada Blok IV halaman 2 sebagai panduan mengisi pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada halaman genap. Sementara itu, untuk panduan mengisi pada halaman ganjil, kertas pada halaman 2 tidak perlu dilipat (dibekalkan saja). - Pertanyaan dalam format roster (nama anggota rumah tangga (ART) per baris) seperti pada Blok IV sampai dengan Blok XII diselesaikan dahulu dalam satu roster kemudian lanjut ke roster berikutnya. - Tanda garis tebal pada pertanyaan roster menunjukkan batas pertanyaan untuk ART, isikan jawaban pertanyaan di dalam tanda garis tebal untuk seluruh ART, lalu berpindah ke pertanyaan selanjutnya. - Tanda garis dua pada pertanyaan roster menunjukkan perbedaan tema pertanyaan dari seliap blok. - Contoh cara penulisan informasi penerimaan Bantuan dari Pemerintah Daerah adalah menggunakan format rata kanan:	
Bantuan yang Diterima Setahun Terakhir (1) Bantuan Roster untuk Pengisi Roster 3 0 0 . 0 0 0 - (2) Bantuan Roster untuk Pengisi Roster 1 5 0 0 . 0 0 0 -	
14. Tabulasi umur responden yang sudah berulang tahun pada bulan Februari 2024: Tahun lahir 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Umur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tahun lahir 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 Umur 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Tahun lahir 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 Umur 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Tahun lahir 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 Umur 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60	

BLOK IV. KETERANGAN DEMOGRAFI										
(Disisi oleh pengawas)	No. urut ART	NAMA ANGGOTA RUMAH TANGGA (ART)	APAKAH HUBUNGAN (nama)	APAKAH STATUS (nama)	APAKAH LAKI-LAKI ATAU PEREMPUAN?	KAPAN (nama) DILAHIRKAN?	BERAPAKAH UMUR (nama)?	Jika berstatus kawin (40+ 2)	Jika berstatus pernah kawin (40+ 2)	No. urut ART
		DI RUMAH TANGGA INI DAN KEPENGURUSAN MAKANNYA DIBELI DARI SATU DAPUR. MULAI DARI KEPALA RUMAH TANGGA, PASANGANNYA, ANAK YANG BELUM MENIKAH, MENANTU, CUCU, ORANG TUAN/MENTUA, PEMBANTU/SOPIR, FAMILI LAIN, DAN LAINNYA.	1. Belum kawin 2. Kawin 3. Cerai hidup 4. Cerai mati	1. Laki-laki 2. Perempuan	Tgl/Bln/Thn (DD/MM/YYYY)	Umur (tahun)	Jika 29 tahun, tulis 97	Jika 29 tahun, tulis 97		
400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410
	1		1							
	2									
	3									
	4									
	5									
	6									
	7									
	8									
	9									
	10									

Pastikan seluruh anggota rumah tangga tercatat dan tidak ada yang terlewat.
 Cek sekali lagi, apakah kepengurusan makan seluruh anggota rumah tangga di kolom 402 dikoloidari satu dapur.
 Jika terdapat ART yang kepengurusan makannya tidak dari satu dapur, maka keluarkan dari daftar.

Kode 403: Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga (KRT)
 1. KRT 3. Anak kandung/lini 5. Menantu 7. Orang tua/mentua 9. Lainnya (fami lain, orang yang tidak ada 2. Istri/suami 4. Anak angkat 6. Cucu 8. Pembantu/sopir hubungan fami dengan KRT)

2

Lanjutan Lampiran 47

KONSEP DAN DEFINISI	
➤ Pertanyaan 203: Hasil Pencacahan Rumah Tangga - Terisi lengkap, apabila petugas berhasil menemui rumah tangga terpilih dan memperoleh informasi secara lengkap. - Terisi tidak lengkap, apabila petugas berhasil menemui rumah tangga terpilih, tetapi tidak dapat memperoleh informasi secara lengkap. Misalnya sampai batas akhir waktu pencacahan, informasi mengenai rumah tangga tersebut tidak diperoleh secara lengkap karena responden pergi keluar kota. - Tidak ada ART/responden yang dapat memberi jawaban sampai akhir masa pencacahan, apabila petugas berhasil menemui rumah tangga terpilih, namun tidak ada ART/responden yang dapat memberikan informasi mengenai rumah tangga sampai akhir masa pencacahan. - Responden menolak, apabila responden menolak untuk diwawancarai. - Rumah tangga pindah/bangunan sensus sudah tidak ada, apabila petugas tidak berhasil menemukan rumah tangga/bangunan sensus terpilih sampai batas akhir masa pencacahan. Misalnya: rumah tangga pindah keluar blok sensus, bangunan digusur, dan bangunan terbakar/runtuh karena gempa/banjir/bencana lain. ➤ Pertanyaan 403: Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga Kepala rumah tangga (KRT) adalah salah seorang dari anggota rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari rumah tangga. Pada kasus tertentu, misalnya beberapa anak sekolah mengontrak/menyewa rumah bersama-sama, maka KRT adalah seseorang yang ditunjuk di antara anak sekolah tersebut sebagai KRT. ➤ Pertanyaan 408: Apakah Pasangan Biasanya Tinggal di Rumah Tangga Ini? Yang dimaksud dengan pasangan biasanya tinggal di rumah tangga ini adalah jika dalam 1 tahun terakhir pasangan dari responden, tinggal di rumah lebih dari 6 bulan, meskipun tidak berturut-turut. ➤ Pertanyaan 605: Apakah Sedang/Pernah Mengikuti Pendidikan Prasekolah? Pendidikan prasekolah adalah pendidikan yang diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, baik melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal. ➤ Pertanyaan 610: Apakah Bersekolah (Termasuk Mengikuti Program Paket A/B/C)? Bersekolah: apabila seseorang terdaftar dan aktif mengikuti proses belajar baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun nonformal, khususnya program kesetaraan (Paket A/B/C) yang berada di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) maupun kementerian lainnya. ➤ Pertanyaan 612: Apa Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Sedang/Pernah Dilikuti? Jenjang pendidikan tertinggi yang sedang/pernah diduduki: jenjang pendidikan tertinggi yang sedang diduduki oleh seseorang yang masih bersekolah atau yang pernah diduduki oleh seseorang yang sudah tidak bersekolah lagi, baik jenjang pendidikan formal maupun nonformal kesetaraan (Paket A/B/C). ➤ Pertanyaan 613: Apa Tingkat/Kelas Tertinggi yang Sedang/Pernah Diduduki? Tingkat/kelas tertinggi adalah tingkatan/kelas terakhir atau paling tinggi yang diikuti seseorang pada suatu jenjang pendidikan baik formal maupun nonformal (Paket A/B/C) di sekolah negeri maupun swasta. Tamat sekolah/satuan pendidikan adalah menyelesaikan pelajaran yang ditandai dengan lulus ujian akhir pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang baik pendidikan formal maupun nonformal (Paket A/B/C) di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat belajar/ijazah. Seseorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi, tetapi sudah mengikuti ujian akhir dan lulus, dianggap tamat sekolah/satuan pendidikan.	

KONSEP DAN DEFINISI	
➤ Pertanyaan 614: Apa Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki? Ijazah/STTB adalah lembaran atau tanda bukti kelulusan yang diberikan kepada seseorang yang sudah menyelesaikan semua persyaratan akademik pada suatu jenjang pendidikan tertentu. ➤ Pertanyaan 701: Apakah (nama) memiliki rekening tabungan baik atas nama sendiri atau bersama-sama di Lembaga keuangan (perbankan, koperasi)? a. Responden dikatakan memiliki rekening tabungan di bank jika memiliki nomor rekening meskipun rekening tabungan tersebut kosong. b. Keikutsertaan tabungan tidak harus sesuai dengan wilayah tempat tinggalnya, yang penting responden masih dapat mengakses tabungannya. ➤ Pertanyaan 703: Selama Seminggu Terakhir, Apa Seja Kegiatan yang Dilakukan (nama)? Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir. Bekerja selama satu jam tersebut boleh dilakukan baik secara berturut-turut/tidak terputus maupun kumulatif satu jam dalam seminggu terakhir. <bsekolah< b=""> adalah kegiatan bersekolah di sekolah formal maupun sekolah non formal (Paket A/B/C), baik pada pendidikan dasar, pendidikan menengah, atau pendidikan tinggi. Tidak termasuk yang sedang libur/tut.</bsekolah<> Mengurus rumah tangga adalah kegiatan mengurus rumah tangga/membantu mengurus rumah tangga tanpa mendapat upah/gaji. Anggota rumah tangga yang melakukan kegiatan kerumahahtanggaan, seperti memasak, mencuci, dsb. digolongkan sebagai mengurus rumah tangga. Lainnya selain kegiatan pribadi adalah kegiatan selain bekerja, sekolah, dan mengurus rumah tangga. ➤ Pertanyaan 812: Dalam 3 bulan terakhir, berapa kali (nama) menggunakan internet? Minimal satu kali dalam sehari, yaitu setiap hari menggunakan internet, artinya orang tersebut tergolong mengakses internet yang tinggi. Minimal satu kali dalam seminggu tapi tidak setiap hari, yaitu tidak setiap hari menggunakan internet, tetapi dalam 1 minggu pernah mengakses minimal 1 kali, artinya orang tersebut tergolong jarang mengakses internet. Kurang dari satu kali dalam seminggu, yaitu pernah lebih dari 1 minggu tidak menggunakan internet, artinya orang tersebut tergolong orang yang sangat jarang mengakses internet. ➤ Pertanyaan 905: Sejak 1 Januari – 31 Desember 2023, Apakah Pernah Menjadi Korban Kejahatan Pencurian, Penganiayaan, Pencurian dengan Kekerasan, Pelecehan Seksual, atau Lainnya? Korban kejahatan adalah seseorang yang diri atau harta bendanya selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/perobaan tindak kejahatan. ➤ Pertanyaan 2301: Apakah Terdapat Mantan ART/Orang yang Sebelumnya Merupakan ART, yang Saat Ini Sedang Tinggal di Luar Negeri yang Berangkat Sejak 1 Februari 2019? Mantan ART adalah penduduk yang sedang tinggal di luar negeri lebih dari 1 tahun atau kurang dari 1 tahun tetapi bermaksud menetap yang sebelum berangkat merupakan ART di rumah tangga responden. Tinggal di luar negeri adalah tinggal atau menetap di luar negeri 1 tahun atau lebih, atau kurang dari 1 tahun tetapi bermaksud menetap. Termasuk mereka yang belum 1 tahun berada di luar negeri, tetapi telah bermaksud menetap untuk memenuhi keperluan jangka panjang seperti bekerja dan sekolah. Tidak termasuk bepergian yang sifatnya sementara seperti: rekreasi, dinas, berobat, dan ibadah/ziarah.	

3

BLOK V. KETERANGAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN																
No. Unit ART	Jika berstatus pernah kawin (404 = 2, 3, atau 4) APAKAH (nama) MEMILIKI PERNEHA MEMILIKI BUKU/AKTA NIKAH DARI KUA/KANTOR CATATAN SIPIL? BOLEH SAYA MELIHATNYA? (untuk perkawinan yang terakhir) (Kode)	No. Urut Keluarga	No. Urut Ibu Kandung Lihat Blok IV (Isikan 00 bila ibu kandung tidak tinggal di rumah tangga ini)	APAKAH (nama) MEMILIKI NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)? 1. Ya 5. Tidak 508	Nomor Induk Kependudukan (Tuliskan Nomor Induk Kependudukan setiap ART)			Kode Jenis Kelamin ART berdasarkan NIK (Cek digit ke-7 NIK pada 505) (Kode)	Sumber Data Nomor Induk Kependudukan 1. KK 2. KTP 3. Lainnya (Kode)	APAKAH (nama) MEMILIKI AKTA KELAHIRAN DARI KANTOR CATATAN SIPIL? BOLEH SAYA MELIHATNYA? (Kode)	(Disisi oleh pengawas) Apakah isian 506 sama dengan isian 405? (Cek isian 405) 1. Sama 2. Berbeda 3. Tidak relevan					
401	501	502	503	504	505			506	507	508	509					
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
Kode 501: Kepemilikan Buku/ Akta Nikah 1. Ya, dapat ditunjukkan 2. Ya, tidak dapat ditunjukkan 5. Tidak memiliki 8. Tidak tahu					Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami-istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya (UU Nomor 52 Tahun 2009). Penentuan keluarga didasarkan pada ikatan perkawinan. Termasuk keluarga apabila seseorang yang berstatus pernah kawin dan tinggal sendiri (tanpa pasangan atau anak), sedangkan yang berstatus belum kawin tidak dianggap keluarga (Supas, 2015).					Kode 506: Kode Jenis Kelamin ART berdasarkan NIK 1. Laki-laki Jika angka pada digit ke-7 NIK adalah 0, 1, 2, atau 3 2. Perempuan Jika angka pada digit ke-7 NIK adalah 4, 5, 6, atau 7 5. Tidak dapat ditentukan Jika tidak termasuk kode 1 atau 2					Kode 508: Kepemilikan Akta Kelahiran 1. Ya, dapat ditunjukkan 2. Ya, tidak dapat ditunjukkan 5. Tidak memiliki 8. Tidak tahu	

4

Lanjutan Lampiran 47

BLOK VI. KETERANGAN MIGRASI DAN PENDIDIKAN											
No. Urut ART	Untuk ART Semua Umur		Untuk ART Berumur 5 Tahun ke Atas		Untuk ART Berumur 0-10 Tahun			Untuk ART Berumur 5 Tahun ke Atas			
	Di MANAKAH TEMPAT LAHIR (nama)? Tempat lahir adalah tempat tinggal ibu (nama) ketika melahirkan (nama). Tuliskan nama tempat (Kode tempat diisi oleh pengawas)		Di MANAKAH TEMPAT TINGGAL (nama) 5 TAHUN YANG LALU (FEBRUARI 2019)? Tuliskan nama tempat (Kode tempat diisi oleh pengawas)		APAKAH (nama) SEDANG/ PERNAH MENGIKUTI PENDIDIKAN PRASEKOLAH?	Jika pernah/ nash (605= 1,2 atau 3).	Jika tidak/ belum pernah (605=4).	APAKAH (nama) DAPAT MEMBACA DAN MENULIS KALAMAT Sederhana DALAM BAHASA SEHARI-HARI DENGAN MENGGUNAKAN:			
	PROVINSI/NEGARA	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI/NEGARA	KABUPATEN/KOTA				HURUF LATIN/ ALFABET?	HURUF ARAB/ HAJIYAH?	HURUF LAINNYA? (CONTOH: JAWA, KANUL, CINA, DLL.)	
		Jika lahir di Kota, tuliskan "Kota" sebelum nama kota		Jika di Kota, tuliskan "Kota" sebelum nama kota	(Kode)	(Kode)	(Kode)	1.Ya 5.Tidak	1.Ya 5.Tidak	1.Ya 5.Tidak	
401	601	602	603	604	605	606	606.A	607	608	609	
1							A B X				
2							A B X				
3							A B X				
4							A B X				
5							A B X				
6							A B X				
7							A B X				
8							A B X				
9							A B X				
10							A B X				
Kode 605: Partisipasi Prasekolah 1. Masih mengikuti pendidikan prasekolah tahun ajaran ini (2023/2024) 2. Pernah mengikuti pendidikan prasekolah tahun ajaran ini (2023/2024) 3. Pernah mengikuti pendidikan prasekolah sebelum tahun ajaran 2023/2024 4. Tidak/belum pernah mengikuti pendidikan prasekolah					Kode 606: Jenis Prasekolah 1. Taman Kanak-kanak 2. Bustanul Athfal 3. Raudatul Athfal 4. Satuan PAUD Sejenis (PAUD terintegrasi BKB/Taman Posyandu, PAUD-TAAM, PAUD-PAK, PAUD-BIA, TKQ, dll.) 5. Kelompok Bermain 6. Taman Pentipan Anak					Kode 606.A: Kegiatan Kursus A. Ya, kursus pengembangan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung B. Ya, kursus bukan pengembangan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung X. Tidak sedang/pernah mengikuti kegiatan kursus	

5

BLOK VI. KETERANGAN MIGRASI DAN PENDIDIKAN												
No. Urut ART	Untuk ART berumur 5 tahun ke atas				Untuk ART berumur 5-30 tahun				Untuk ART berumur 5-24 tahun			
	APAKAH (nama) BERSEKOLAH? (termasuk mengikuti program paket A/B/C) (Kode)	APAKAH (nama) BERSEKOLAH DI SEKOLAH NEGERI ATAU SWASTA? (Kode)	APA JUANG PENDIDIKAN TERTINGGI KELAS TERTINGGI YANG SEDANG/ PERNAH DIKUTI (nama)? (Kode)	APA IJAZAH/ STTB TERTINGGI YANG DIMILI (nama)? (Kode)	DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH (nama) MEMILIKI KARTU INDONESIA PINTAR (KIP)?	DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH (nama) MEMPEROLEH PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP)?	SELAMA BULAN Agustus 2023-FEBRUARI 2024 BERAPA JUMLAH UANG PIP YANG DITERIMA?	Jika P.617 ≠ 0) Untuk PENERIMAAN BERAPA SEMESTER?	Untuk ART yang masih bersekolah atau tidak bersekolah lagi (810 = 2 atau 3)			
	Kode = 1 ke ART berikutnya/ Blok VII Kode = 3 → 612	1.Negeri 2.Swasta			1.Ya, dapat ditunjukkan 2.Ya, tidak dapat ditunjukkan 5.Tidak	1.Ya 5.Tidak → 619	(Rupiah)	(Semester)	APAKAH (nama) BERSEKOLAH PADA TAHUN AJARAN SEBELUMNYA (2022/2023)? (Kode)	APA JUANG PENDIDIKAN YANG DIKUTI (nama) WAKTU ITU?	APA TINGKAT/ KELAS YANG DIDUDUKI (nama) WAKTU ITU?	
										Kode = 1 atau 3 ke ART berikutnya/ Blok VII	(Kode)	(Kode)
401	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
Kode 610 dan 619: Partisipasi Sekolah 1. Tidak/belum pernah bersekolah 2. Masih bersekolah 3. Tidak bersekolah lagi					Kode 612 dan 620: Jenjang Pendidikan dan Kode 614: Ijazah/STTB 01. Paket A 02. SDLB 03. SD 04. MI 05. SPM/PDF Ula 06. Paket B 07. SMP LB 08. SMP 09. MTs 10. SPM/PDF Wustha 11. Paket C 12. SMLB 13. SMA 14. MA 15. SMK 16. MAK 17. SPM/PDF Ulya 18. D1/D2 19. D3 20. D4 21. S1 22. Profesi 23. S2 24. S3					Kode 613 dan 621: Tingkat/Kelas Kode 613: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (Tamat) Kode 621: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 • Jika pernah/sedang kuliah Profesi, kode 1 • Jika pernah/sedang kuliah S2, kode 6 • Jika pernah/sedang kuliah S3, kode 7		

6

Lanjutan Lampiran 47

BLOK VII. KETERANGAN KEPEMILIKAN TABUNGAN, INKLUSI KEUANGAN, DAN KETENAGAKERJAAN													
Untuk ART Umur 5 Tahun ke Atas				Untuk ART Umur 10 Tahun ke Atas									
No. Unit ART	Apakah (nama) memiliki rekening tabungan bank atas nama sendiri atau bersama-sama di lembaga keuangan (persamaan, koperasi)?		Dalam setahun terakhir, apakah (nama) menggunakan produk layanan jasa keuangan (persamaan, asuransi, lembaga pembiayaan, dana pensiun, fintech, lembaga keuangan mikro, perdagangan, uang elektronik, pasar modal) seperti tabungan, deposito, asuransi, pinjaman dalam, reksadana, saham, dll?		Selama seminggu terakhir, apa saja kegiatan yang dilakukan selama seminggu terakhir? (Pilih jawaban harus dibacakan)		Dari kegiatan yang dilakukan selama seminggu terakhir, kegiatan apakah yang menggunakan waktu tersenyang?		Jika tidak bekerja (703 pilihan A tidak diingkari)		Jika bekerja atau sementara tidak bekerja (703 = pilihan A terpilih atau 705 = 1)		
	1. Ya	5. Tidak	1. Ya	5. Tidak	A. Bekerja B. Sekolah C. Mengurus rumah tangga D. Lainnya selain kegiatan pribadi	1. Bekerja → 706 2. Sekolah 3. Mengurus rumah tangga 4. Lainnya selain kegiatan pribadi	1. Ya 5. Tidak → ke ART berikutnya/ Blok VIII	Tuliskan selengkap-lengkapnyanya (Kode lapangan usaha atau bidang pekerjaan utama diisi oleh pengawas) Kode dapat dilihat pada halaman terakhir VSEN24.K				Selama seminggu terakhir, apa status/kegiatan (nama)?	Selama seminggu terakhir, berapa jumlah jam kerja (nama)?
	701	702			703	704	705	706	707	708	709		
1	☐	☐			A B C D X	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
2	☐	☐			A B C D X	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
3	☐	☐			A B C D X	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
4	☐	☐			A B C D X	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
5	☐	☐			A B C D X	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
6	☐	☐			A B C D X	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
7	☐	☐			A B C D X	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
8	☐	☐			A B C D X	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
9	☐	☐			A B C D X	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
10	☐	☐			A B C D X	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
• Penjelasan 702: a. Bank: bank konvensional dan syariah. b. Pasar modal: perusahaan efek/sekuritas, manajer investasi konvensional, manajer investasi syariah, penyelenggara urun dana konvensional, dan penyelenggara urun dana syariah. c. Lembaga pembiayaan: lembaga pembiayaan konvensional dan syariah. d. Perusahaan asuransi: perusahaan asuransi konvensional dan syariah. e. Dana pensiun: dana pensiun konvensional (Tapas, DPPK, DPK) dan syariah (DPPK Syariah, DPK Syariah, Unit Syariah DPPK, Unit Syariah DPK). f. Lembaga keuangan mikro: lembaga keuangan mikro konvensional dan syariah, koperasi lembaga keuangan mikro dan syariah, BMT, Bank Wakaf Mikro. g. Perdagangan: perdagangan konvensional dan syariah yang diawasi OJK. h. Fintech: pinjaman online konvensional dan syariah. Kode 707: Status/Kedudukan dalam Pekerjaan (Jika 705=1, 707 tidak boleh berkode 5 atau 6) 1. Berusaha sendiri 2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga tidak dibayar 3. Berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar 4. Buruh/karyawan/pegawai 5. Pekerja bebas 6. Pekerja keluarga atau tidak dibayar													

7

BLOK VIII. KETERANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI																	
No. Unit ART	Dalam 3 bulan terakhir, apakah (nama) menggunakan telepon seluler (HP) untuk keperluan komunikasi?		Dalam 3 bulan terakhir, apakah (nama) memiliki/menggunakan telepon seluler (HP) Nirkabel?		Dalam 3 bulan terakhir, apakah jumlah kartu aktif yang digunakan (nama) pada HP, tablet, atau perangkat lainnya, menurut provider/operator berikut:		Dalam 3 bulan terakhir, apakah (nama) menggunakan komputer?		Dalam 3 bulan terakhir, apakah (nama) pernah menggunakan internet (perusahaan, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, WhatsApp, dll)?		Dalam 3 bulan terakhir, media apa saja yang digunakan (nama) untuk menggunakan internet?		Dalam 3 bulan terakhir, di mana saja (nama) menggunakan internet? (Pilih jawaban harus dibacakan)		Dalam 3 bulan terakhir, untuk apa saja (nama) menggunakan internet? (Pilih jawaban harus dibacakan)		Dalam 3 bulan terakhir, berapa kali (nama) menggunakan internet? (Kode)
	1. Ya	5. Tidak	1. Ya	5. Tidak	TELKOMSEL? INDOSAT? THREE? XL AXIATA? LAINNYA?	A. PC/DESKTOP B. LAPTOP/NOTEBOOK C. TABLET X. Tidak menggunakan komputer	1. Ya 5. Tidak → ART berikutnya/ Blok IX	A. RUANG RUMAH SENDIRI B. LAFOROT/NOTEBOOK C. TABLET D. HP/POKEL E. LAINNYA	A. RUANG RUMAH SENDIRI B. RUANG RUMAH SENDIRI C. TEMPAT BEKERJA/KANTOR D. GEDUNG SEKOLAH/KAMPUS E. TEMPAT UMUM F. LAINNYA	A. Mendapat informasi berita B. Mendapat informasi mengenai barang/jasa C. Mengirim/menerima e-mail D. Media sosial/jejaring sosial E. Pembelian barang/jasa F. Penjualan barang/jasa G. Fasilitas finansial (e-banking) H. Pembelajaran online I. Work From Home (WFH) bekerja online dari rumah J. Hiburan K. Pembuatan konten digital L. Lainnya	A. Mendapat informasi berita B. Mendapat informasi mengenai barang/jasa C. Mengirim/menerima e-mail D. Media sosial/jejaring sosial E. Pembelian barang/jasa F. Penjualan barang/jasa G. Fasilitas finansial (e-banking) H. Pembelajaran online I. Work From Home (WFH) bekerja online dari rumah J. Hiburan K. Pembuatan konten digital L. Lainnya						
	801	802	803	804	804A	805	806	807	808	809	810	811	812				
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	A B C X	☐	A B C D E	A B C D E F	A B C D E F G H I J K L	☐				
2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	A B C X	☐	A B C D E	A B C D E F	A B C D E F G H I J K L	☐				
3	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	A B C X	☐	A B C D E	A B C D E F	A B C D E F G H I J K L	☐				
4	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	A B C X	☐	A B C D E	A B C D E F	A B C D E F G H I J K L	☐				
5	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	A B C X	☐	A B C D E	A B C D E F	A B C D E F G H I J K L	☐				
6	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	A B C X	☐	A B C D E	A B C D E F	A B C D E F G H I J K L	☐				
7	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	A B C X	☐	A B C D E	A B C D E F	A B C D E F G H I J K L	☐				
8	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	A B C X	☐	A B C D E	A B C D E F	A B C D E F G H I J K L	☐				
9	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	A B C X	☐	A B C D E	A B C D E F	A B C D E F G H I J K L	☐				
10	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	A B C X	☐	A B C D E	A B C D E F	A B C D E F G H I J K L	☐				
• Menggunakan HP yang dimaksud tidak harus menggunakan HP yang dimiliki sendiri atau disewakan, tetapi individu yang menggunakan. • Memiliki/menggunakan HP apabila anggota rumah tangga tersebut memiliki/menggunakan HP dengan minimal 1 kartu yang aktif dalam 3 bulan terakhir. • Menggunakan internet: apabila seseorang melakukan waktu untuk menggunakan internet, sehingga ia dapat memanfaatkan atau menikmati fasilitas internet. Termasuk menggunakan internet walaupun tidak memiliki kemampuan untuk membuka dan menutup (log in dan log out) internet. Siapa saja dimaksudkan menggunakan meskipun hanya tinggal melanjutkan. • Mengakses internet untuk hiburan misalnya download main game, menonton tv, download/menonton film/video, radio, download gambar dan musik menggunakan internet. • Pembuatan konten digital misalnya mengunggah konten, menggunakan cloud storage (Google Drive, Dropbox, dll), menggunakan software yang dijalankan melalui internet untuk mengedit dokumen (teks, spreadsheet, presentasi), dll. Kode 812: 1. Minimal satu kali dalam sehari 2. Minimal satu kali dalam seminggu tapi tidak setiap hari 3. Kurang dari satu kali dalam seminggu																	

8

Lanjutan Lampiran 47

BLOK IX. KETERANGAN BEPERGIAN DAN KORBAN KEJAHATAN																
No. Urut ART	SEJAK 1 JANUARI - 31 DESEMBER 2023, APAKAH (nama) PERNAH BEPERGIAN KELUAR KADUPATEN/KOTA, BUKAN BEPERGIAN RUTIN, MINIMAL 6 JAM DI TEMPAT TUJUAN, TIDAK UNTUK SEKOLAH/ATAU BEKERJA? 1. Ya 5. Tidak → 905	Jika pernah bepergian (901=1)			SEJAK 1 JANUARI - 31 DESEMBER 2023, APAKAH (nama) PERNAH MENJADI KORBAN KEJAHATAN DENGAN PENYERAN, PENGANIAYAAN, PENGURUAN DENGAN KEKERASAN, PELECEHAN SEKSUAL, ATAU LAINNYA? 1. Ya 5. Tidak → ART berikutnya/ Blok X	BERAPA KALI (nama) MENJADI KORBAN KEJAHATAN DAN BERAPA KEJADIAN YANG LAPORKAN KE POLISI? (Jika ≥ 7 kejadian, Tulis "7")										(Jika 907, 909, 911, 913, atau 915=0) KETIKA KEJADIAN TERSEBUT DALAM PROSES LAPORAN KE POLISI, APAKAH (nama) MENDAPATKAN DIBANTU BANTUAN HUKUM? 1. Ya 5. Tidak
		BERAPA KALI (nama) BEPERGIAN SELAMA PERIODE:		PADA KONDISI TERAKHIR, APA MAKSUD UTAMA (nama) MELAKUKAN BEPERGIAN?		PENYERAN		PENGANIAYAAN		PENGURUAN DENGAN KEKERASAN		PELECEHAN SEKSUAL		LAINNYA		
		1 JANUARI 2023 SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2023? (Kali)	1 JULI 2023 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023? (Kali)	(Kode)		JUMLAH KEJADIAN	JUMLAH KEJADIAN YANG LAPORKAN KE POLISI	JUMLAH KEJADIAN	JUMLAH KEJADIAN YANG LAPORKAN KE POLISI	JUMLAH KEJADIAN	JUMLAH KEJADIAN YANG LAPORKAN KE POLISI	JUMLAH KEJADIAN	JUMLAH KEJADIAN YANG LAPORKAN KE POLISI	JUMLAH KEJADIAN	JUMLAH KEJADIAN YANG LAPORKAN KE POLISI	
401	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																

Kode 904: Maksud Utama Bepergian

01. Berburu/rekreasi	07. Mengunjungi teman/keluarga	- Bepergian rutin adalah bepergian ke tempat/tujuan utama dengan frekuensi paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan. - Laporan Kejahatan yang dimaksud adalah jika suatu kejadian kejahatan secara resmi dilaporkan melalui kanal pelaporan/Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Kepolisian
02. Profesi/bisnis	08. Mudik/ulang kampung hari raya	
03. Misi/pertemuan/kongres/seminar	09. Olahraga/kesenian	
04. Training/pendidikan/pelatihan	10. Belanja/shopping	
05. Kesehatan/berobat	11. Lainnya	
06. Berziarah/keagamaan		

Suatu peristiwa kejahatan dianggap telah dilaporkan ke polisi apabila:

- Korban kejahatan telah melaporkannya ke polisi.
- Orang lain melaporkan peristiwa kejahatan tersebut ke polisi.
- Polisi mengetahuinya sendiri atau tertangkap tangan.

9

BLOK X. KETERANGAN GANGGUAN FUNGSIONAL (UNTUK ART BERUMUR 2 TAHUN KE ATAS)											
No. Urut ART	Isikan kode 1 jika Umur ≥ 2 tahun atau kode 0 jika Umur < 2 tahun 1 → 1002 0 → ART berikutnya/ Blok XI	APAKAH (nama) MENGALAMI KESULITAN/GANGGUAN PENGLIHATAN?	APAKAH (nama) MENGALAMI KESULITAN/GANGGUAN PENDENGARAN?	APAKAH (nama) MENGALAMI KESULITAN/GANGGUAN BERJALAN/ATAU NAIK TANGGA?	APAKAH (nama) MENGALAMI KESULITAN/GANGGUAN MENGGUNAKAN/ MENGERAKKAN TANGAN/JARI?	APAKAH (nama) MENGALAMI KESULITAN/GANGGUAN DALAM HAL MENGINGAT ATAU BERKONSENTRAS?	APAKAH (nama) MENGALAMI KESULITAN/GANGGUAN PERILAKU DAN/ATAU EMOSIONAL?	APAKAH (nama) MENGALAMI KESULITAN/GANGGUAN BERBICARA DAN/ATAU MEMAHAMI/ BERKOMUNIKASI DENGAN ORANG LAIN?	APAKAH (nama) MENGALAMI KESULITAN/GANGGUAN BERKONTAK DENGAN ORANG LAIN?	APAKAH (nama) MENGALAMI KESULITAN/GANGGUAN BERKONTAK DENGAN ORANG LAIN?	DALAM SETUHAN TERAKHIR, APAKAH (nama) MENEMUKAN BANTUAN SOSIAL DARI PEMERINTAH PUSAT/BERUPA ASISTENSI REHABILITASI SOSIAL (ATENSIS) POKOKNYA DISABILITAS?
		1. Ya, sama sekali tidak bisa melihat	5. Ya, sama sekali tidak bisa mendengar	1. Ya, sama sekali tidak bisa berjalan/naik tangga	1. Ya, sama sekali tidak bisa menggunakan/ mengerakkan tangan/jari	1. Ya, selalu mengalami kesulitan	1. Ya, selalu mengalami kesulitan	1. Ya, sama sekali tidak bisa memahami/dipahami/ berkomunikasi	1. Ya, sama sekali tidak bisa mengurus diri sendiri	1. Ya, sama sekali tidak bisa mengurus diri sendiri	1. Ya, sama sekali tidak bisa mengurus diri sendiri
401	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											

• Disabilitas adalah adanya gangguan/keterbatasan fungsi yang berlangsung lama dan menyebabkan terbatasnya partisipasi di masyarakat.

• Gangguan/keterbatasan fungsi ditandai oleh kondisi ketidakmampuan atau kehilangan ataupun kelainan baik dari psikologi, fisiologi, maupun struktur atau fungsi anatomi.

• Pelugas tidak diperkenankan memutuskan bahwa responden tidak mengalami disabilitas tertentu berdasarkan apa yang dilihat secara kasat mata.

• Gangguan/keterbatasan fungsi antara lain: kesulitan melihat, kesulitan mendengar, berbicara tidak lancar, kesulitan memahami/hilang ingatan/gangguan jiwa, lambat dalam belajar/memahami pelajaran, keterbatasan berjalan, keterbatasan bergerak, kesulitan mengambil barang kecil menggunakan tangan/jari.

• Setiap orang bisa mengalami lebih dari satu jenis gangguan.

• Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSIS) yaitu layanan rehabilitasi sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas dan/atau residential melalui kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan layak, dukungan keluarga, perawatan sosial, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental, pelatihan vokasional pembinaan kewirausahaan, bantuan sosial, asistensi sosial serta dukungan aksesibilitas.

10

BLOK XI. KETERANGAN KELUHAN KESEHATAN DAN RAWAT JALAN											
No. Urut ART	JAMINAN KESEHATAN APA SAJA YANG DIMILIKI (nama)?	DALAM SEBULAN TERAKHIR, APAKAH (nama) PERNAH RAWAT INAP? 1.Ya 5.Tidak	DALAM SEBULAN TERAKHIR, APAKAH (nama) PERNAH RAWAT JALAN? 1.Ya 5.Tidak	DALAM SEBULAN TERAKHIR, APAKAH (nama) PERNAH RAWAT JALAN? 1.Ya 5.Tidak	DALAM SEBULAN TERAKHIR, APAKAH (nama) PERNAH RAWAT JALAN? 1.Ya 5.Tidak	DALAM SEBULAN TERAKHIR, APAKAH (nama) PERNAH RAWAT JALAN? 1.Ya 5.Tidak	DALAM SEBULAN TERAKHIR, APAKAH (nama) PERNAH RAWAT JALAN? 1.Ya 5.Tidak	DALAM SEBULAN TERAKHIR, APAKAH (nama) PERNAH RAWAT JALAN? 1.Ya 5.Tidak	DALAM SEBULAN TERAKHIR, APAKAH (nama) PERNAH RAWAT JALAN? 1.Ya 5.Tidak	DALAM SEBULAN TERAKHIR, APAKAH (nama) PERNAH RAWAT JALAN? 1.Ya 5.Tidak	DALAM SEBULAN TERAKHIR, APAKAH (nama) PERNAH RAWAT JALAN? 1.Ya 5.Tidak
401	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	
1	A B C D E X						A B C D E F G H		A B C D E X	A B C D E F G H I	
2	A B C D E X						A B C D E F G H		A B C D E X	A B C D E F G H I	
3	A B C D E X						A B C D E F G H		A B C D E X	A B C D E F G H I	
4	A B C D E X						A B C D E F G H		A B C D E X	A B C D E F G H I	
5	A B C D E X						A B C D E F G H		A B C D E X	A B C D E F G H I	
6	A B C D E X						A B C D E F G H		A B C D E X	A B C D E F G H I	
7	A B C D E X						A B C D E F G H		A B C D E X	A B C D E F G H I	
8	A B C D E X						A B C D E F G H		A B C D E X	A B C D E F G H I	
9	A B C D E X						A B C D E F G H		A B C D E X	A B C D E F G H I	
10	A B C D E X						A B C D E F G H		A B C D E X	A B C D E F G H I	
Kode 1106: Alasan Utama Tidak Rawat Jalan 1. Tidak punya biaya berobat 2. Tidak ada biaya transportasi 3. Tidak ada sarana transportasi 4. Waktu tunggu pelayanan lama 5. Mengobati sendiri 6. Tidak ada yang mendampingi 7. Merasa tidak perlu 8. Lainnya • Jaminan kesehatan yang dimiliki adalah jaminan dalam bentuk kartu atau apapun yang dapat digunakan untuk pembiayaan kesehatan bila nama yang tertera dalam kartu atau lainnya melakukan perawatan kesehatan seperti: ke dokter, puskesmas, rumah sakit, dan sebagainya. • Keluhan kesehatan adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena gangguan penyakit yang sedang dialami penduduk seperti panas, pilek, diare, pusing, sakit kepala, maupun karena penyakit akut, penyakit kronis (meskipun selama sebulan terakhir tidak mempunyai keluhan), kecelakaan, kriminalitas, atau keluhan lainnya. • Terganggunya pekerjaan, sekolah, atau kegiatan sehari-hari adalah tidak dapat melakukan kegiatan secara normal (bekorja, sekolah, atau kegiatan sehari-hari) sebagaimana biasanya. • Rawat jalan adalah upaya anggota rumah tangga yang mempunyai keluhan kesehatan untuk memeriksakan diri dan mendapatkan pengobatan dengan mendatangi tempat pelayanan kesehatan modern atau tradisional tanpa menginap, termasuk mendampingi petugas kesehatan ke rumah. Menggunakan jaminan kesehatan untuk rawat jalan adalah bila biaya berobat jalan anggota rumah tangga seluruhnya atau sebagian dibayai oleh penjamin kesehatan.											

BLOK XII. KETERANGAN RAWAT INAP DAN MEROKOK											
No. Urut ART	DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH (nama) PERNAH RAWAT INAP? 1.Ya 5.Tidak	DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH (nama) PERNAH RAWAT INAP? 1.Ya 5.Tidak	DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH (nama) PERNAH RAWAT INAP? 1.Ya 5.Tidak	DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH (nama) PERNAH RAWAT INAP? 1.Ya 5.Tidak	DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH (nama) PERNAH RAWAT INAP? 1.Ya 5.Tidak	DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH (nama) PERNAH RAWAT INAP? 1.Ya 5.Tidak	DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH (nama) PERNAH RAWAT INAP? 1.Ya 5.Tidak	DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH (nama) PERNAH RAWAT INAP? 1.Ya 5.Tidak	DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH (nama) PERNAH RAWAT INAP? 1.Ya 5.Tidak	DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH (nama) PERNAH RAWAT INAP? 1.Ya 5.Tidak	DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH (nama) PERNAH RAWAT INAP? 1.Ya 5.Tidak
401	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	
1	A B C D E F G						A B C D E F G H		A B C D E F G H	A B C D E F G H I	
2	A B C D E F G						A B C D E F G H		A B C D E F G H	A B C D E F G H I	
3	A B C D E F G						A B C D E F G H		A B C D E F G H	A B C D E F G H I	
4	A B C D E F G						A B C D E F G H		A B C D E F G H	A B C D E F G H I	
5	A B C D E F G						A B C D E F G H		A B C D E F G H	A B C D E F G H I	
6	A B C D E F G						A B C D E F G H		A B C D E F G H	A B C D E F G H I	
7	A B C D E F G						A B C D E F G H		A B C D E F G H	A B C D E F G H I	
8	A B C D E F G						A B C D E F G H		A B C D E F G H	A B C D E F G H I	
9	A B C D E F G						A B C D E F G H		A B C D E F G H	A B C D E F G H I	
10	A B C D E F G						A B C D E F G H		A B C D E F G H	A B C D E F G H I	
• Rawat inap adalah upaya penyembuhan keluhan kesehatan dengan menginap selama satu malam atau lebih di unit pelayanan kesehatan modern atau tradisional, termasuk rawat inap untuk persalinan. • Responden yang pernah rawat inap adalah responden yang telah selesai menjalani rawat inap, tidak termasuk bila pada saat pencacahan sedang menjalani rawat inap. • Menggunakan jaminan kesehatan untuk rawat inap adalah bila biaya rawat inap anggota rumah tangga seluruhnya atau sebagian dibayai oleh penjamin kesehatan. • Jumlah hari adalah jumlah hari rawat inap dalam satu tahun terakhir. • Merokok merupakan aktivitas membakar tembakau kemudian menghisap asapnya baik menggunakan rokok maupun pipa pada sebulan terakhir sampai saat pencacahan. • Rokok tembakau meliputi rokok putih, rokok kretek, cerutu, isron, pipa gangklong/lingkang yang diisi tembakau. Termasuk juga orang yang menghisap shisha/waterpipe. • Penghitungan jumlah batang rokok rata-rata per minggu selama sebulan terakhir adalah jumlah rokok yang dihisap selama sebulan dibagi 7 dibagi 30.											

Lanjutan Lampiran 47

PERTANYAAN	BALITA 1			BALITA 2			BALITA 3		
Nama dan No. Urut (Salin dari Blok IV 402 dan 401): Nama & No. Urut Pemberi Informasi									
BLOK XIV. KETERANGAN IMUNISASI, ASI, DAN MP-ASI (DITANYAKAN UNTUK SEMUA ANGGOTA RUMAH TANGGA UMUR 0-59 BULAN)									
1401. Umur (nama balita) dalam bulan (Hitung dari Blok IV 406)	□□ bulan			□□ bulan			□□ bulan		
IMUNISASI BALITA									
SAYA AKAN MENYANYAKAN BEBERAPA PERTANYAAN MENGENAI IMUNISASI									
1402. APAKAH BAPAK/IBU MEMILIKI BUKU KIA/KMS ATAU KARTU BEROBAT/DOKUMEN LAIN YANG TERTULIS TANGGAL IMUNISASI (nama balita)? BOLEHAH SAYA MELIHATNYA?	Ya, dapat ditunjukkan.....1→1404 Ya, tidak dapat ditunjukkan.....2→1406 Tidak ada kartu/buku.....5			Ya, dapat ditunjukkan.....1→1404 Ya, tidak dapat ditunjukkan.....2→1406 Tidak ada kartu/buku.....5			Ya, dapat ditunjukkan.....1→1404 Ya, tidak dapat ditunjukkan.....2→1406 Tidak ada kartu/buku.....5		
1403. APAKAH BAPAK/IBU PERNAH MEMILIKI BUKU KIA/KMS ATAU KARTU BEROBAT/DOKUMEN LAIN YANG TERTULIS TANGGAL IMUNISASI (nama balita)?	Ya1→1406 Tidak5→1406			Ya1→1406 Tidak5→1406			Ya1→1406 Tidak5→1406		
1404. Salin dari kartu, tanggal, bulan, dan tahun imunisasi untuk setiap jenis imunisasi. Tulis '44' di kolom tanggal, bulan, dan tahun, jika kartu menunjukkan bahwa imunisasi diberikan, tetapi tanggal, bulan, dan tahun tidak ada. Tulis '00' jika imunisasi tidak diberikan.	Tanggal	Bulan	Tahun	Tanggal	Bulan	Tahun	Tanggal	Bulan	Tahun
a. HEPATITIS B (<24 JAM)									
b. BCG									
c. POLIO TETES 1									
d. DPT-HB-Hib 1									
e. POLIO TETES 2									
f. DPT-HB-Hib 2									
g. POLIO TETES 3									
h. DPT-HB-Hib 3									
i. POLIO TETES 4									
j. POLIO SUNTIK (IPV)									
k. CAMPYLOBACTER (MR)									

13

PERTANYAAN	BALITA 1			BALITA 2			BALITA 3		
Nama dan No. Urut (Salin dari Blok IV 402 dan 401):									
	Tanggal	Bulan	Tahun	Tanggal	Bulan	Tahun	Tanggal	Bulan	Tahun
l. DPT-HB-Hib LANJUTAN									
m. CAMPYLOBACTER (MR) LANJUTAN									
n. MMR									
1405. APAKAH (nama balita) MENEMUKAN IMUNISASI DASAR, YANG TIDAK TERCATAT DALAM KARTU, TERMASUK IMUNISASI YANG DITERIMA SAAT PEKAN IMUNISASI NASIONAL? Lingkari kode 1 jika responden menyebutkan jenis imunisasi dasar (lihat pertanyaan 1404).	Ya1→1404 (Tanyakan jenis imunisasinya, tulis '66' pada kolom tanggal, bulan, dan tahun yang bersangkutan di 1404. Jika imunisasi tidak diberikan, tuliskan '00') Tidak5→1417 Tidak Tahu8→1417			Ya1→1404 (Tanyakan jenis imunisasinya, tulis '66' pada kolom tanggal, bulan, dan tahun yang bersangkutan di 1404. Jika imunisasi tidak diberikan, tuliskan '00') Tidak5→1417 Tidak Tahu8→1417			Ya1→1404 (Tanyakan jenis imunisasinya, tulis '66' pada kolom tanggal, bulan, dan tahun yang bersangkutan di 1404. Jika imunisasi tidak diberikan, tuliskan '00') Tidak5→1417 Tidak Tahu8→1417		
UNTUK BALITA YANG TIDAK MEMILIKI ATAU TIDAK DAPAT MENUNJUKKAN KARTU IMUNISASI									
1406. APAKAH (nama balita) PERNAH MENDAPAT IMUNISASI UNTUK MELINDUNGINYA DARI BERBAGAI PENYAKIT?	Ya1 Tidak5→1417 Tidak Tahu8→1417			Ya1 Tidak5→1417 Tidak Tahu8→1417			Ya1 Tidak5→1417 Tidak Tahu8→1417		
1407. APAKAH (nama balita) PERNAH MENDAPAT VAKSIN BCG UNTUK MENCEGAH PENYAKIT TBC – BIASANYA DISUNTIKAN PADA LENGAN ATAU BAHU DAN MENYEBABKAN BEKAS LUKA –?	Ya1 Tidak5 Tidak tahu8			Ya1 Tidak5 Tidak tahu8			Ya1 Tidak5 Tidak tahu8		
1408. APAKAH (nama balita) PERNAH MENDAPAT VAKSIN UNTUK MENCEGAH PENYAKIT POLIO – YANG DITETESKAN KE MULUT ATAU DISUNTIKAN PADA LENGAN/PAKA –?	Ya1 Tidak5→1411 Tidak Tahu8→1411			Ya1 Tidak5→1411 Tidak Tahu8→1411			Ya1 Tidak5→1411 Tidak Tahu8→1411		
1409. KAPAN VAKSIN POLIO PERTAMA DITERIMA (nama balita), APAKAH PADA SEBULAN PERTAMA KELAHIRAN ATAU SETELAHNYA?	Sebulan pertama1 Setelah sebulan pertama2			Sebulan pertama1 Setelah sebulan pertama2			Sebulan pertama1 Setelah sebulan pertama2		
1410. SUDAH BERAPA KALI (nama balita) MENDAPATKAN VAKSIN POLIO?	a. POLIO TETES : ____ kali b. POLIO SUNTIK (IPV) : ____ kali			a. POLIO TETES : ____ kali b. POLIO SUNTIK (IPV) : ____ kali			a. POLIO TETES : ____ kali b. POLIO SUNTIK (IPV) : ____ kali		
1411. APAKAH (nama balita) PERNAH MENDAPAT VAKSIN – YAITU SUNTIKAN DI PANGKA ATAU BOKONG – UNTUK MENCEGAH PENYAKIT TETANUS, BATUK REJAN, ATAU DIFTERI? (Probing dengan menyatakan bahwa pemberian vaksin DPT kadang-kadang bersamaan dengan vaksin Polio dan Hepatitis B)	Ya1 Tidak5→1413 Tidak Tahu8→1413			Ya1 Tidak5→1413 Tidak Tahu8→1413			Ya1 Tidak5→1413 Tidak Tahu8→1413		

14

Lanjutan Lampiran 47

PERTANYAAN	BALITA 1	BALITA 2	BALITA 3
Nama dan No. Urut (Salin dari Blok IV 402 dan 401):			
1412. SUDAH BERAPA KALI (nama balita) MENDAPATKAN VAKSIN DPT?	 kali	 kali	 kali
1413. APAKAH (nama balita) PERNAH MENDAPAT VAKSIN HEPATITIS B – YAITU SUNTIKAN DI PAHA ATAU BOKONG – UNTUK MENCEGAH PENYAKIT HEPATITIS B? (Probing dengan menyatakan bahwa pemberian vaksin Hepatitis B kadang-kadang bersamaan dengan vaksin Polio dan DPT)	Ya 1 Tidak 5 → 1416 Tidak Tahu 8 → 1416	Ya 1 Tidak 5 → 1416 Tidak Tahu 8 → 1416	Ya 1 Tidak 5 → 1416 Tidak Tahu 8 → 1416
1414. SUDAH BERAPA KALI (nama balita) MENDAPATKAN VAKSIN HEPATITIS B?	 kali	 kali	 kali
1415. KAPAN VAKSINASI HEPATITIS B PERTAMA DITERIMA (nama balita). APAKAH PADA SEMINGGU PERTAMA SETELAH KELAHIRAN ATAU SETELAHNYA?	Seminggu pertama 1 Setelah seminggu pertama 2	Seminggu pertama 1 Setelah seminggu pertama 2	Seminggu pertama 1 Setelah seminggu pertama 2
1416. APAKAH (nama balita) PERNAH MENDAPAT SUNTIKAN CAMPAK – RUBELLA (MR) ATAU MMR – YAITU PADA UMUR 9 BULAN ATAU LEBIH – UNTUK MENCEGAH PENYAKIT CAMPAK? i. CAMPAK – RUBELLA (MR)	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8
ii. MMR	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8
A SI DAN MP-ASI DITANYAKAN UNTUK BADUTA (ANGGOTA RUMAH TANGGA UMUR 0-23 BULAN)			
Cek umur balita dari 1401, berikan tanda centang (✓)			
Balita berumur 0-23 bulan	☐ → 1417 ☐ → Balita berikutnya/Blok XV	☐ → 1417 ☐ → Balita berikutnya/Blok XV	☐ → 1417 ☐ → Balita berikutnya/Blok XV
Balita berumur ≥ 24 bulan			
1417. A. APAKAH (nama baduta) PERNAH DISUSUI/DIBERI AIR SUSU IBU (ASI)?	Ya 1 Tidak 5 → 1419 Tidak tahu 8 → 1419	Ya 1 Tidak 5 → 1419 Tidak tahu 8 → 1419	Ya 1 Tidak 5 → 1419 Tidak tahu 8 → 1419
B. LAMANYA PEMBERIAN ASI: I. TANPA MAKANAN PENDAMPING II. DENGAN MAKANAN PENDAMPING	B. bulan I. bulan II. bulan	B. bulan I. bulan II. bulan	B. bulan I. bulan II. bulan

PERTANYAAN	BALITA 1	BALITA 2	BALITA 3
Nama dan No. Urut (Salin dari Blok IV 402 dan 401):			
1418. SELAMA SEHARIAN KEMARIN, APAKAH (nama baduta) DISUSUI/DIBERI ASI?	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8
1419. SELAMA SEHARIAN KEMARIN, APAKAH (nama baduta) MENERIMA CAIRAN, TERMASUK CAIRAN YANG DIKONSUMSIKAN DENGAN MAKANAN LAIN DAN CAIRAN YANG DIKONSUMSI DI LUAR RUMAH? a. SUSU SELAIN ASI (SUSU FORMULA, SUSU BUBUK, SUSU SEGAR, UHT PLAIN)? Jika “Ya”, isikan berapa kali susu selain ASI dikonsumsi baduta. b. MINUMAN LAIN TANPA GULA (AIR PUTIH, JUS TANPA GULA, SUP, KALDU, TEH/KOPI TAWAR, AIR TAJIN, DLL)? c. MINUMAN BERPEMANIS GULA (MINUMAN RINGAN, SODA, TEH/KOPI MANIS, SUSU KENTAL MANIS, DLL)?	Ya Tidak Tidak tahu a) 1 5 8 ☐ kali b) 1 5 8 c) 1 5 8	Ya Tidak Tidak tahu a) 1 5 8 ☐ kali b) 1 5 8 c) 1 5 8	Ya Tidak Tidak tahu a) 1 5 8 ☐ kali b) 1 5 8 c) 1 5 8
1420. SAYA INGIN MENANYAKAN TENTANG SEMUA YANG DIKONSUMSI OLEH (nama baduta) SEHARIAN KEMARIN, TERMASUK MAKANAN YANG DIKONSUMSI DI LUAR RUMAH ATAU JAJAN. SELAMA SEHARIAN KEMARIN, APAKAH (nama baduta) MAKAN/MINUM? a. SEREAL, AKAR, DAN UMBI (NASI, JAGUNG, GANDUM, PASTA, ROTI/PANEKUK, UBI, KENTANG, SORGHUM, DLL)? b. MAKANAN DARI KACANG-KACANGAN (KACANG TANAH, KEDELAI, TAHU, TEMPE, ATAU KACANG LAINNYA)? c. PRODUK TURUNAN SUSU (YOGURT, KEJU, DLL)? d. DAGING, IKAN (SAPI, AYAM, KAMBING, IKAN, MAKANAN LAUT, DAGING/IKAN DALAM KALENG, DLL)? e. TELUR (AYAM, ITIK, PUYUH, DLL)? f. BUAH DAN SAYUR SUMBER VITAMIN A (TERMASUK SAYURAN BERDAUN GELAP)? g. BUAH ATAU SAYURAN LAINNYA (LABU SIAI, GAMBAS, ALPUKAT, JERUK, DLL)? h. MAKANAN RINGAN YANG GURUH, GORENGAN, MAKANAN MANIS (ES KIRM, PERMEN, KUE KERING, CAKE, DLL)?	Ya Tidak Tidak tahu a) 1 5 8 b) 1 5 8 c) 1 5 8 d) 1 5 8 e) 1 5 8 f) 1 5 8 g) 1 5 8 h) 1 5 8	Ya Tidak Tidak tahu a) 1 5 8 b) 1 5 8 c) 1 5 8 d) 1 5 8 e) 1 5 8 f) 1 5 8 g) 1 5 8 h) 1 5 8	Ya Tidak Tidak tahu a) 1 5 8 b) 1 5 8 c) 1 5 8 d) 1 5 8 e) 1 5 8 f) 1 5 8 g) 1 5 8 h) 1 5 8
1421. SELAMA SEHARIAN KEMARIN, APAKAH (nama baduta) DIBERI MAKANAN BAK BERUPA MAKANAN PADAT, MAKANAN SETENGAH PADAT, ATAU MAKANAN LUNAK? Jika “Ya”, isikan berapa kali baduta diberi makanan padat, setengah padat, atau lunak.	Ya 1 ☐ kali Tidak 5 } Balita berikutnya/ Tidak tahu 8 } Blok XV	Ya 1 ☐ kali Tidak 5 } Balita berikutnya/ Tidak tahu 8 } Blok XV	Ya 1 ☐ kali Tidak 5 } Balita berikutnya/ Tidak tahu 8 } Blok XV

Lanjutan Lampiran 47

PERTANYAAN	PEREMPUAN PERNAH KAWIN (PPK) UMUR 10-54 TAHUN (1)	PEREMPUAN PERNAH KAWIN (PPK) UMUR 10-54 TAHUN (2)	PEREMPUAN PERNAH KAWIN (PPK) UMUR 10-54 TAHUN (3)
Nama dan No. Urut: Umur (Salin dari Blok IV 407): Nama & No. Urut Pemberi Informasi (Salin dari Blok IV 402 & 401):	 tahun	 tahun	 tahun
KETERANGAN TENTANG PENOLONG PERSALINAN DAN KELUARGA BERENCANA (DITANYAKAN KEPADA SEMUA PEREMPUAN PERNAH KAWIN (PPK) UMUR 10-54 TAHUN)			
BLOK XV. PENOLONG PERSALINAN			
1501. A. APAKAH (nama) PERNAH HAMIL?	A) Ya..... 1 Tidak... 5→PPK berikutnya/Blok XVI	A) Ya..... 1 Tidak... 5→PPK berikutnya/Blok XVI	A) Ya... 1 Tidak... 5→PPK berikutnya/Blok XVI
B. UMUR BERAPAKAH (nama) PADA SAAT HAMIL PERTAMA?	B) tahun	B) tahun	B) tahun
1502. A. APAKAH (nama) PERNAH MELAHIRKAN ANAK LAHIR HIDUP?	A) Ya..... 1 Tidak... 5→PPK berikutnya/Blok XVI	A) Ya..... 1 Tidak... 5→PPK berikutnya/Blok XVI	A) Ya... 1 Tidak... 5→PPK berikutnya/Blok XVI
B. UMUR BERAPAKAH (nama) PADA SAAT MELAHIRKAN ANAK LAHIR HIDUP YANG PERTAMA KALI?	B) tahun	B) tahun	B) tahun
1503. KAPAN MELAHIRKAN ANAK LAHIR HIDUP YANG TERAKHIR?	2 tahun yang lalu atau kurang... 1 Lebih dari 2 tahun yang lalu 2 PPK berikutnya/Blok XVI ←	2 tahun yang lalu atau kurang... 1 Lebih dari 2 tahun yang lalu 2 PPK berikutnya/Blok XVI ←	2 tahun yang lalu atau kurang... 1 Lebih dari 2 tahun yang lalu 2 PPK berikutnya/Blok XVI ←
1504. A. DI MANA (nama) MELAHIRKAN (nama anak lahir hidup yang terakhir)?	RS Pemerintah/RS Swasta..... 1 Rumah bersalin/Klinik..... 2 Puskesmas 3 Pustu 4 Praktik dokter/bidan/perawat ... 5 Polindes/Poskesdes 6 Rumah 7 Lainnya, tuliskan: 8	RS Pemerintah/RS Swasta..... 1 Rumah bersalin/Klinik..... 2 Puskesmas 3 Pustu 4 Praktik dokter/bidan/perawat ... 5 Polindes/Poskesdes 6 Rumah 7 Lainnya, tuliskan: 8	RS Pemerintah/RS Swasta..... 1 Rumah bersalin/Klinik..... 2 Puskesmas 3 Pustu 4 Praktik dokter/bidan/perawat ... 5 Polindes/Poskesdes 6 Rumah 7 Lainnya, tuliskan: 8

17

PERTANYAAN	PEREMPUAN PERNAH KAWIN (PPK) UMUR 10-54 TAHUN (1)	PEREMPUAN PERNAH KAWIN (PPK) UMUR 10-54 TAHUN (2)	PEREMPUAN PERNAH KAWIN (PPK) UMUR 10-54 TAHUN (3)
Nama dan No. Urut: Umur (Salin dari Blok IV 407): Nama & No. Urut Pemberi Informasi (Salin dari Blok IV 402 & 401):	 tahun	 tahun	 tahun
B. SIAPA YANG MENOLONG PROSES KELAHIRAN TERAKHIR?	Dokter kandungan 1 Dokter umum 2 Bidan 3 Perawat 4 Tenaga kesehatan lainnya 5 Dukun beranak/paraji 6 Lainnya 7 Tidak ada 8	Dokter kandungan 1 Dokter umum 2 Bidan 3 Perawat 4 Tenaga kesehatan lainnya 5 Dukun beranak/paraji 6 Lainnya 7 Tidak ada 8	Dokter kandungan 1 Dokter umum 2 Bidan 3 Perawat 4 Tenaga kesehatan lainnya 5 Dukun beranak/paraji 6 Lainnya 7 Tidak ada 8
C. BERAPA BERAT (nama anak lahir hidup yang terakhir) KETIKA DILAHIRKAN?	< 2,5 kg 1 ≥ 2,5 kg 2 Tidak ditimbang 5 Tidak tahu 8	< 2,5 kg 1 ≥ 2,5 kg 2 Tidak ditimbang 5 Tidak tahu 8	< 2,5 kg 1 ≥ 2,5 kg 2 Tidak ditimbang 5 Tidak tahu 8
1505. BERAPA LAMA SETELAH KELAHIRAN (nama anak lahir hidup yang terakhir) PERTAMA KALI DILETAKKAN DI ATAS DADA IBU DENGAN BERSENTUHAN KULIT SECARA LANGSUNG?	<1 jam setelah lahir 1 1-23 jam setelah lahir 2 ≥24 jam setelah lahir 3 Tidak pernah 5 Tidak tahu 8	<1 jam setelah lahir 1 1-23 jam setelah lahir 2 ≥24 jam setelah lahir 3 Tidak pernah 5 Tidak tahu 8	<1 jam setelah lahir 1 1-23 jam setelah lahir 2 ≥24 jam setelah lahir 3 Tidak pernah 5 Tidak tahu 8

18

Lanjutan Lampiran 47

PERTANYAAN	PEREMPUAN PERNAH KAWIN (PPK) UMUR 10-54 TAHUN (1)	PEREMPUAN PERNAH KAWIN (PPK) UMUR 10-54 TAHUN (2)	PEREMPUAN PERNAH KAWIN (PPK) UMUR 10-54 TAHUN (3)
Nama dan No. Urut: Umur (Salin dari Blok IV 407): Nama & No. Urut Pemberi Informasi (Salin dari Blok IV 402 & 401):	_____ tahun _____	_____ tahun _____	_____ tahun _____
BLOK XVI. KELUARGA BERENCANA			
1601. APAKAH (nama atau pasangan) PERNAH/SEDANG MENGGUNAKAN ALAT KB ATAU CARA TRADISIONAL UNTUK MENUNDA ATAU MENEGAH KEHAMILAN?	Ya, pernah 1 → PPK berikutnya/ Blok XVII Ya, sedang 2 Tidak 5 → PPK berikutnya/ Blok XVII	Ya, pernah 1 → PPK berikutnya/ Blok XVII Ya, sedang 2 Tidak 5 → PPK berikutnya/ Blok XVII	Ya, pernah 1 → PPK berikutnya/ Blok XVII Ya, sedang 2 Tidak 5 → PPK berikutnya/ Blok XVII
1602. ALAT KB ATAU CARA TRADISIONAL APA YANG SEDANG DIGUNAKAN? Jika (nama) menyebutkan lebih dari satu, lingkari kode terkecil.	Sterilisasi wanita/tubektomi/MOW 1 Sterilisasi pria/vasektomi/MOP 2 IUD/AKDR/spiral 3 Suntikan 4 Susuk KB/implan 5 Pil 6 Kondom pria/karet KB 7 Intravag/kondom wanita/diafragma 8 Metode menyusui alami 9 Pantang berkala/kalender 10 Lainnya 11	Sterilisasi wanita/tubektomi/MOW 1 Sterilisasi pria/vasektomi/MOP 2 IUD/AKDR/spiral 3 Suntikan 4 Susuk KB/implan 5 Pil 6 Kondom pria/karet KB 7 Intravag/kondom wanita/diafragma 8 Metode menyusui alami 9 Pantang berkala/kalender 10 Lainnya 11	Sterilisasi wanita/tubektomi/MOW 1 Sterilisasi pria/vasektomi/MOP 2 IUD/AKDR/spiral 3 Suntikan 4 Susuk KB/implan 5 Pil 6 Kondom pria/karet KB 7 Intravag/kondom wanita/diafragma 8 Metode menyusui alami 9 Pantang berkala/kalender 10 Lainnya 11
1603. JIKA MENGGUNAKAN ALAT KB MODERN (1602 = 1-8), DI MANA (nama atau pasangan) MEMPEROLEH (ALAT KB) TERAKHIR KALI?	Rumah sakit 1 Puskesmas/Pustu/Klinik 2 TKBK/TMK/MUYAN 3 Polindes/Poskesdes 4 Posyandu/Pos KB/PPKBD 5 Rumah bersalin 6 Praktik dokter umum/kandungan 7 Praktik bidan/bidan di desa/ perawat 8 Apotek/toko obat 9 Lainnya 10	Rumah sakit 1 Puskesmas/Pustu/Klinik 2 TKBK/TMK/MUYAN 3 Polindes/Poskesdes 4 Posyandu/Pos KB/PPKBD 5 Rumah bersalin 6 Praktik dokter umum/kandungan 7 Praktik bidan/bidan di desa/ perawat 8 Apotek/toko obat 9 Lainnya 10	Rumah sakit 1 Puskesmas/Pustu/Klinik 2 TKBK/TMK/MUYAN 3 Polindes/Poskesdes 4 Posyandu/Pos KB/PPKBD 5 Rumah bersalin 6 Praktik dokter umum/kandungan 7 Praktik bidan/bidan di desa/ perawat 8 Apotek/toko obat 9 Lainnya 10

19

BLOK XVII. AKSES TERHADAP MAKANAN (DITANYAKAN PADA KR/PASANGAN/ART 15 TAHUN KE ATAS)	
Nama dan No. Urut pemberi informasi: _____	☐ ☐
SEKARANG SAYA AKAN MENGAJUKAN BEBERAPA PERTANYAAN MENGENAI AKSES TERHADAP MAKANAN.	
1701. SELAMA SETAHUN TERAKHIR, APAKAH ADA SAAT DI MANA ANDA/ART LAINNYA KHAWATIR TIDAK AKAN MEMILIKI CUKUP MAKANAN UNTUK DISANTAP KARENA KURANGNYA UANG ATAU SUMBER DAYA LAINNYA?	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8 Menolak menjawab 9
1702. SELAMA SETAHUN TERAKHIR, APAKAH ADA SAAT DI MANA ANDA/ART LAINNYA TIDAK DAPAT MENYANTAP MAKANAN SEHAT DAN BERIZAT KARENA KURANGNYA UANG ATAU SUMBER DAYA LAINNYA?	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8 Menolak menjawab 9
1703. SELAMA SETAHUN TERAKHIR, APAKAH ADA SAAT DI MANA ANDA/ART LAINNYA HANYA MENYANTAP SEDIKIT JENIS MAKANAN KARENA TIDAK MEMILIKI UANG ATAU SUMBER DAYA LAINNYA?	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8 Menolak menjawab 9
1704. SELAMA SETAHUN TERAKHIR, APAKAH ADA SAAT DI MANA ANDA/ART LAINNYA MELEWATKAN SATU WAKTU MAKAN PADA SUATU HARI TERKUTU KARENA TIDAK MEMILIKI UANG ATAU SUMBER DAYA LAIN YANG CUKUP UNTUK MENDAPATKAN MAKANAN?	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8 Menolak menjawab 9
1705. SELAMA SETAHUN TERAKHIR, APAKAH ADA SAAT DI MANA ANDA/ART LAINNYA MAKAN LEBIH SEDIKIT DARIPADA SEHARUSNYA KARENA KURANGNYA UANG ATAU SUMBER DAYA LAINNYA?	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8 Menolak menjawab 9
1706. SELAMA SETAHUN TERAKHIR, APAKAH ADA SAAT DIMANA RUMAH TANGGA KEHABISAN MAKANAN KARENA KURANGNYA UANG ATAU SUMBER DAYA LAINNYA?	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8 Menolak menjawab 9
1707. SELAMA SETAHUN TERAKHIR, APAKAH ADA SAAT DI MANA ANDA/ART LAINNYA MERASA LAPAR TAPI TIDAK MAKAN KARENA KURANGNYA UANG ATAU SUMBER DAYA LAINNYA UNTUK MENDAPATKAN MAKANAN?	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8 Menolak menjawab 9
1708. SELAMA SETAHUN TERAKHIR, APAKAH ADA SAAT DI MANA ANDA/ART LAINNYA TIDAK MAKAN SEHARUSNYA KARENA KURANGNYA UANG ATAU SUMBER DAYA LAINNYA?	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8 Menolak menjawab 9
BLOK XVIII. KETERANGAN PERUMAHAN	
Nama dan No. Urut pemberi informasi: _____	☐ ☐
1801. BERAPA JUMLAH KELUARGA YANG TINGGAL DI DALAM BANGUNAN SENSUS/RUMAH INI?	☐ keluarga (Isikan 7, jika terdapat 7 keluarga atau lebih)

BLOK XVIII. KETERANGAN PERUMAHAN	
1802. APA STATUS KEPEMILIKAN BANGUNAN TEMPAT TINGGAL YANG DITEMPATI? (Pilihan jawaban boleh dibaca)	Milik sendiri 1 Kontrak/sewa 2 Bebas sewa 3 Dinas 4 Lainnya, tuliskan: 5 1804
1803. APA JENIS BUKTI KEPEMILIKAN TANAH BANGUNAN TEMPAT TINGGAL INI? (Pilihan jawaban boleh dibaca)	Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama ART 1 SHM bukan atas nama ART dengan perijinan pemanfaatan tertulis 2 SHM bukan atas nama ART tanpa perijinan pemanfaatan tertulis 3 Sertifikat selain SHM (SHGB, SHRS) 4 Surat bukti lainnya (Girik, A/B, Letter C, dll) 5 Tidak punya 6
1804. BERAPA LUAS LANTAI RUMAH BANGUNAN TEMPAT TINGGAL? ☐ ☐ ☐ m ² (Isi dalam meter persegi)	
1805. APAKAH KEPALA RUMAH TANGGA/PASANGANNYA/ANAKNYA MEMILIKI RUMAH LAIN, SELAIN RUMAH YANG DITEMPATI SAAT INI?	Ya 1 Tidak 5
1806. A. APAKAH BAHAN BANGUNAN UTAMA ATAP RUMAH TERLUAS? (Pilihan jawaban boleh dibaca)	Beton 1 Genteng 2 Seng 3 Asbes 4 Bambu 5 Kayu/sirap 6 Jerami/ijuk/dau-daunan/rumbia 7 Lainnya 8 1807
B. [Jika 1806.A = 4 (asbes)], APAKAH BAHAN BANGUNAN UTAMA PLAFON RUMAH TERLUAS?	Beton/gypsum/seng/kayu/sirap/tripleks 1 Asbes 2 Lainnya 3 Tidak ada 5
1807. APAKAH BAHAN BANGUNAN UTAMA DINDING RUMAH TERLUAS?	Tembok 1 Plesteran anyaman bambu/kawat 2 Kayu/papan 3 Anyaman bambu 4 Balang kayu 5 Bambu 6 Lainnya 7
1808. APAKAH BAHAN BANGUNAN UTAMA LANTAI RUMAH TERLUAS?	Marmmer/granit 1 Keramik 2 Parket/vinil/karpet 3 Ubin/tegel/teraso 4 Kayu/papan 5 Semen/bata merah 6 Bambu 7 Tanah 8 Lainnya 9

20

Lanjutan Lampiran 47

BLOK XVIII. KETERANGAN PERUMAHAN	
1809. A. APAKAH MEMILIKI FASILITAS TEMPAT BUANG AIR BESAR DAN SEMPAT SAJA YANG MENGGUNAKAN?	Ada, digunakan hanya ART sendiri 1 Ada, digunakan bersama ART rumah tangga tertentu 2 Ada, di MCK komunal 3 Ada, di MCK umum/ siapapun menggunakan 4 Ada, ART tidak menggunakan 5 Tidak ada fasilitas 6 } 1810.A
B. (Jika 1809.A = 1, 2, atau 3) APAKAH JENIS KLOSET YANG DIGUNAKAN?	Leher angsa 1 Pengerengan dengan tutup 2 Pengerengan tanpa tutup 3 Compling/ubuk 4
C. DI MANAKAH TEMPAT PEMBUANGAN AIR-IR TUNJA?	Tangki septik 1 IPAL 2 Kolam/sawah/sungai/danau/aut 3 Lubang tanah 4 Pantai/tanah lapang/kebun 5 Lainnya 6 } 1810.A
D. SUDAH BERAPA LAMA TANGKI SEPTIK INI DISUKATIBANGKUN?	Tidak tahu 98
E. DALAM 5 TAHUN TERAKHIR, BERAPA KALI TANGKI SEPTIK DIKROSONGKAN/DILAKUKAN PENYEDOTAN?	Tidak tahu 98
1810. A. APA SUMBER AIR UTAMA YANG DIGUNAKAN RUMAH TANGGA UNTUK MINUM?	Air kemasan bermerek 1 Air isi ulang 2 } 1811.A Leding 3 Sumur bor/pompa 4 Sumur terlindung 5 Sumur tak terlindung 6 } 1810.C Mata air terlindung 7 Mata air tak terlindung 8 Air permukaan (sungai/ danau/waduk/kolam/irigasi) 9 Air hujan 10 } 1811.A Lainnya 11
B. (Jika 1810.A = 3 (leding)). APABILA MEDIA UTAMA YANG DIGUNAKAN RUMAH TANGGA UNTUK MENGAKSES SUMBER AIR UTAMA UNTUK MINUM?	Perpipaan meteran 1 Perpipaan tanpa meteran 2 Hidran umum 3 Keran umum 4 } 1811.A Terminal air 5 Tidak ada 6 Tidak tahu 8

BLOK XVIII. KETERANGAN PERUMAHAN	
C. (Jika 1810.A = 4, 5, 6, 7, atau 8 (sumur/pompa/mata air)). BERAPA JARAK KE TEMPAT PENAMPUNGAN LIMBAH/KOTORAN/TUNJA TERDEKAT?	< 10 m 1 ≥ 10 m 2 Tidak tahu 8
1811. A. DI MANAKAH LOKASI SUMBER/FASILITAS AIR MINUM TERSEBUT?	Di rumah/kawasan dalam pagar rumah 1 → 1812 Di luar kawasan pagar rumah 2
B. BERAPA LAMA WAKTU YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENGAMBIL AIR KE SUMBER/ FASILITAS AIR SAMPAI KEMBALI LAGI KE RUMAH?	Tidak tahu 998
1812. DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH RUMAH TANGGA PERNAH MENGALAMI KEKURANGAN AIR MINUM UNTUK KEBUTUHAN RUMAH TANGGA SELAMA MINIMAL 24 JAM?	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8
1813. BAGAIMANA KONDISI FISIK SUMBER AIR UTAMA UNTUK MINUM/MENURUT ANDA?	A. KERUH 1 B. BERWARNA 5 C. BERASA 1 D. BERBUSA 5 E. BERBAU 1
1814. A. APA SUMBER AIR UTAMA YANG DIGUNAKAN RUMAH TANGGA UNTUK MANDI/CUCI/DLL?	Air kemasan bermerek 1 Air isi ulang 2 } 1815.A Leding 3 Sumur bor/pompa 4 Sumur terlindung 5 Sumur tak terlindung 6 } 1814.C Mata air terlindung 7 Mata air tak terlindung 8 Air permukaan (sungai/ danau/waduk/kolam/irigasi) 9 Air hujan 10 } 1815.A Lainnya 11
B. (Jika 1814.A = 3 (leding)). APABILA MEDIA UTAMA YANG DIGUNAKAN RUMAH TANGGA UNTUK MENGAKSES SUMBER AIR UTAMA UNTUK MANDI/CUCI/DLL?	Perpipaan meteran 1 Perpipaan tanpa meteran 2 Hidran umum 3 Keran umum 4 } 1815.A Terminal air 5 Tidak ada 6 Tidak tahu 8
C. (Jika 1814.A = 4, 5, 6, 7, atau 8 (sumur/pompa/mata air)). BERAPA JARAK KE TEMPAT PENAMPUNGAN LIMBAH/KOTORAN/TUNJA TERDEKAT?	< 10 m 1 ≥ 10 m 2 Tidak tahu 8

21

BLOK XVIII. KETERANGAN PERUMAHAN	
1815. A. BOLEHKAH SAYA MELIHAT TEMPAT DI MANA ANGGOTA RUMAH TANGGA ANDA BIASA MENCUCI TANGAN?	Ya, di dalam rumah 1 Ya, di luar rumah 2 Tidak ada tempat cuci tangan 3 Tidak diizinkan melihat 4 } 1816.A
B. AMATI Ketersediaan air di tempat mencuci tangan! Verifikasi dengan memeriksa keran/pompa atau bakom, ember, wadah air atau sejenisnya	Tersedia air 1 Tidak tersedia air 5
C. CEK ketersediaan sabun atau deterjen di tempat mencuci tangan!	Tersedia sabun/deterjen 1 Tidak tersedia sabun/deterjen 5
1816. A. APAKAH SUMBER UTAMA PENERANGAN RUMAH TANGGA INI?	Listrik PLN dengan meteran 1 Listrik PLN tanpa meteran 2 Listrik non-PLN 3 Bukan listrik 4 } 1817
B. BERAPA DAYA TERPASANG DI RUMAH INI?	Meteran 1 1 Meteran 2 2 Meteran 3 3 1. 450 Watt 2. 900 Watt 3. 1.300 Watt atau lebih (Isikan daya untuk setiap meteran yang terpasang)
1817. APAKAH JENIS BAHAN BAKAR UTAMA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMASAK?	Listrik 1 Biji 5.5 kg/blue gas 2 Biji 12 kg 3 Biji 3 kg 4 Gas kota 5 Biogas 6 Minyak tanah 7 Briket 8 Arang 9 Kayu bakar 10 Lainnya 11 Tidak memasak di rumah 0

BLOK XIX. AKSES TERHADAP LAYANAN KEUANGAN	
1901. DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH ADA ANGGOTA RUMAH TANGGA YANG MENEMERMA/MENCARIKAN KREDIT?	Ya 1 Tidak 5
(Lingkari kode 1 jika menerima, kode 5 bila tidak menerima)	A. KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) 1 B. KREDIT DARI BANK UMUM SELAIN KUR 5 C. KREDIT DARI BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) 1 D. KREDIT DARI KOPERASI 1 E. PERKREDITAN DENGAN BUNGA 1 F. PENGADAN 1 G. PERUSAHAAN LEASING 1 H. BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) 1 I. PINJAMAN ONLINE 1 J. PINJAM-MEKAR 1 K. LAINNYA 5

BLOK XIX. AKSES TERHADAP LAYANAN KEUANGAN	
1902. DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH ADA ANGGOTA RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI E-WALLET?	Ya 1 Tidak 5
(Lingkari kode 1 jika memiliki, kode 5 bila tidak memiliki)	A. Gopay 1 B. Ovo 1 C. Link Aja 1 D. Dana 1 E. ShopeePay 1 F. LAINNYA, jika ada 5

BLOK XX. KETERANGAN KEPEMILIKAN BARANG	
2001. APAKAH RUMAH TANGGA INI MEMILIKI BARANG-BARANG SEBAGAI BERIKUT?	A. TABUNG GAS 5.5 KG ATAU LEBIH 1 B. LEMARI ES/KULKAS 1 C. AC 1 D. PEMANAS AIR (WATER HEATER) 1 E. TELEPON RUMAH (PSTN) 1 F. KOMPUTER/LAPTOP/TABLET 1 G. EMAS/PERHESAN MINIMAL 10 GRAM 1 H. SEPEDA MOTOR 1 I. PERAHU 1 J. PERAHU MOTOR 1 K. MOBIL 1 L. TELEVISI LAYAR DATAR MINIMAL 30 INCH 1 M. TANAH/LAHAN 1
2002. (Jika 2001.M = 1), JIKA MEMILIKI TANAH/LAHAN, SIAPA PEMILIK TANAH/LAHAN TERSEBUT?	KRT A Pasangan KRT B Anak C ART lainnya D

BLOK XXI. KETERANGAN SUMBER PENGHASILAN RUMAH TANGGA	
2101. A. APAKAH SUMBER TERBESAR PEMBIAYAN DI RUMAH TANGGA INI?	ART YANG BEKERJA 1 → 2101.B KIRIMAN UANG/BARANG 2 → 2101.C INVESTASI (DEPOSITO, ROYALTY, SAHAM, BUNGA BANK, DAN SEJENISNYA) 3 → Blok XXII PENSIUNAN 4 → Blok XXII
B. (Jika 2101.A = 1) APABILA ART YANG MENANGGUNG PEMBIAYAN TERBESAR?	Nama ART : No Urut ART :
C. (Jika 2101.A = 2) APABILA MENEMERMA KIRIMAN UANG/BARANG DARI MANAKAH SUMBER UTAMANYA?	ORANG TUA 1 ANAK 2 FAMILI LAIN 3 LAINNYA 4

22

Lanjutan Lampiran 47

BLOK XXII. KETERANGAN PERLINDUNGAN SOSIAL			
2201. DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH ADA ANGGOTA RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI ATAU MENEMERIMA JAMINAN SOSIAL BERUPA:	Ya	Tidak	BERAPA JUMLAH ANGGOTA RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI ATAU MENEMERIMA JAMINAN SOSIAL TERSEBUT?
(i)	(ii)		(iii)
A. JAMINAN PENSUNJUTAN VETERAN	A.1 → 2201.iii.A	5 → 2201.B	A.orang
B. JAMINAN HARI TUA	B.1 → 2201.iii.B	5 → 2201.C	B.orang
C. JAMINAN ASURANSI KECELAKAAN KERJA	C.1 → 2201.iii.C	5 → 2201.D	C.orang
D. JAMINAN ASURANSI KEMATIAN	D.1 → 2201.iii.D	5 → 2201.E	D.orang
E. JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN (JKP)	E.1 → 2201.iii.E	5 → 2201.F	E.orang
F. PESANGON PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)	F.1 → 2201.iii.F	5 → 2202	F.orang
2202. APAKAH RUMAH TANGGA INI MENEMERIMA KARTU KELUARGA SEJAHTERA (KKS)?	Ya, dapat menunjukkan kartu1 Ya, tidak dapat menunjukkan kartu2 Tidak5		
2203. DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH RUMAH TANGGA ANDA PERNAH MENJADI PENERIMA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)?	Ya1 Tidak5 → 2205		
2204. A. APAKAH SAAT INI RUMAH TANGGA ANDA MASIH TERCATAT/ MENJADI PENERIMA PKH?	Ya1 Tidak8 } 2205 Tidak tahu5		
B. DI MANA RUMAH TANGGA ANDA MENEMERIMA BANTUAN PKH?	Kantor Pos1 ATM2 Kantor Bank3 Agen Bank4 Pendamping, Ketua Kelompok5		
C. DALAM SETAHUN TERAKHIR, UNTUK APA SAJA BANTUAN PKH DIPERGUNAKAN? ADA LAGI? (Pilihan jawaban boleh lebih dari satu yang dipilih)	Belanja PanganA Biaya Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga (sewa rumah/kontrak, listrik, air, telepon, bahan bakar, dll.)B Biaya PengobatanC Biaya Perawatan Ibu HamilD Biaya SekolahE Pembayaran Hutang/KreditF Lainnya, tuliskan:G		
2205. DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH TERDAPAT ANGGOTA RUMAH TANGGA LANSIA (60 TAHUN KE ATAS) YANG MENEMERIMA BANTUAN SOSIAL DARI PROGRAM ATENSI LANSIA?	Ya1 Tuliskan No. Urut ART Lansia 1) ☐ ; 2) ☐ ; 3) ☐ ; 4) ☐ Tidak5		
2207. APAKAH RUMAH TANGGA ANDA PERNAH MENJADI PENERIMA PROGRAM BPNT/PROGRAM SEMBAKO YANG DISALURKAN MELALUI BANK ATAU PT POS?	Ya1 Tidak5 → 2209		

BLOK XXII. KETERANGAN PERLINDUNGAN SOSIAL				
2208. DALAM 4 BULAN TERAKHIR, SEBUTKAN INFORMASI PEMBELAN/ PENGOLAHAN PROGRAM BPNT/PROGRAM SEMBAKO YANG DISALURKAN MELALUI BANK ATAU PT POS:	Bulan Januari 2024	Bulan Desember 2023	Bulan November 2023	Bulan Oktober 2023
A. APAKAH RUMAH TANGGA MENEMERIMA PROGRAM BPNT/ PROGRAM SEMBAKO YANG DISALURKAN MELALUI BANK ATAU PT POS PADA 4 BULAN TERAKHIR?	A) Ya1 Tidak5 → Desember '23	A) Ya1 Tidak5 → November '23	A) Ya1 Tidak5 → Oktober '23	A) Ya1 Tidak5 → 2209
B. APAKAH ANDA MENGETAHUI BERAPA NILAI YANG DITERIMA DARI PROGRAM BPNT/PROGRAM SEMBAKO YANG DISALURKAN MELALUI BANK ATAU PT POS?	B) Ya, tuliskan1 Rp. Tidak5 → 2208.D	B) Ya, tuliskan1 Rp. Tidak5 → 2208.D	B) Ya, tuliskan1 Rp. Tidak5 → 2208.D	B) Ya, tuliskan1 Rp. Tidak5 → 2208.D
C. UNTUK PENERIMAAN BERAPA BULAN?	C) .. Bulan	C) .. Bulan	C) .. Bulan	C) .. Bulan
D. DI MANA RUMAH TANGGA ANDA MENEMERIMA PROGRAM BPNT/ PROGRAM SEMBAKO YANG DISALURKAN MELALUI BANK ATAU PT POS TERSEBUT?	D) Kantor Pos1 ATM2 Kantor Bank3 Agen Bank4 Pendamping, ketua kelompok5	D) Kantor Pos1 ATM2 Kantor Bank3 Agen Bank4 Pendamping, ketua kelompok5	D) Kantor Pos1 ATM2 Kantor Bank3 Agen Bank4 Pendamping, ketua kelompok5	D) Kantor Pos1 ATM2 Kantor Bank3 Agen Bank4 Pendamping, ketua kelompok5
E. UNTUK APA SAJA PROGRAM BPNT/PROGRAM SEMBAKO YANG DISALURKAN MELALUI BANK ATAU PT POS DIPERGUNAKAN? ADA LAGI?	E) Belanja PanganA Biaya Perumahan dan Fasilitas Rumah TanggaB Biaya PengobatanC Biaya Perawatan Ibu HamilD Biaya SekolahE Pembayaran Hutang/KreditF Lainnya, tuliskan:G	E) Belanja PanganA Biaya Perumahan dan Fasilitas Rumah TanggaB Biaya PengobatanC Biaya Perawatan Ibu HamilD Biaya SekolahE Pembayaran Hutang/KreditF Lainnya, tuliskan:G	E) Belanja PanganA Biaya Perumahan dan Fasilitas Rumah TanggaB Biaya PengobatanC Biaya Perawatan Ibu HamilD Biaya SekolahE Pembayaran Hutang/KreditF Lainnya, tuliskan:G	E) Belanja PanganA Biaya Perumahan dan Fasilitas Rumah TanggaB Biaya PengobatanC Biaya Perawatan Ibu HamilD Biaya SekolahE Pembayaran Hutang/KreditF Lainnya, tuliskan:G
2209. DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH TERDAPAT ANGGOTA RUMAH TANGGA YANG MENEMERIMA BANTUAN/PROGRAM DARI PEMERINTAH SEBAGAI BERIKUT:	Ya Tidak			
(Lingkari kode 1 jika menerima, kode 5 bila tidak menerima)	A. BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)1 5 B. BANTUAN PADAT KARYA TUNAI DESA (PKTD)1 5 C. BANTUAN PANGAN PEMERINTAH (BERAS BADAN PANGAN NASIONAL/BAPANAS)1 5 D. PROGRAM BANTUAN SERTIFIKASI TANAH1 5			
2210. A. APAKAH ADA ANGGOTA RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI USAHA MIKRO ATAU KECIL?	Ya1 Tuliskan No. Urut ART 1) ☐ ; 2) ☐ ; 3) ☐ ; 4) ☐ Tidak5 Perjelasan: 1. Usaha mikro memiliki modal usaha maksimal Rp1 miliar dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan maksimal 2 miliar. 2. Usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1 miliar sampai Rp5 miliar dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2 miliar sampai Rp15 miliar.			

Lanjutan Lampiran 47

BLOK XXII. KETERANGAN PERLINDUNGAN SOSIAL							
B. DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH TERPADAT ANGGOTA RUMAH TANGGA YANG MENERIMA PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA DARI PEMERINTAH SEBAGAI BERIKUT:		Ya Tidak					
(i) PELATIHAN TEKNIK PRODUKSI		1	5				
(ii) PERIZINAN KOMERSIAL/SERTIFIKASI		1	5				
(iii) PEMASARAN/DIGITALISASI USAHA		1	5				
(iv) PELAPORAN KEUANGAN		1	5				
(v) FASILITAS PERMODALAN		1	5				
2211. A. DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH RUMAH TANGGA ANDA MENERIMA BANTUAN/BANTUAN SOSIAL/SUBSIDI DARI PEMERINTAH DAERAH BERUPA BANTUAN RUTIN?		Bantuan yang Diterima Setahun Terakhir					
Ya 1 → 2211.A. i.s.d.v		(i) BANTUAN RUTIN UNTUK PANGKAN Rp.					
Tidak 5 → 2211.B		(ii) BANTUAN RUTIN UNTUK ANAK Rp.					
		(iii) BANTUAN RUTIN UNTUK LANJIA Rp.					
		(iv) BANTUAN RUTIN UNTUK PENYANDANG DISABILITAS Rp.					
		(v) BANTUAN RUTIN LAINNYA Rp.					
B. DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH RUMAH TANGGA ANDA MENERIMA BANTUAN/BANTUAN SOSIAL/SUBSIDI DARI PEMERINTAH DAERAH BERUPA BANTUAN TIDAK RUTIN?		Bantuan yang Diterima Setahun Terakhir					
Ya 1 → 2211.B. i		(i) BANTUAN TIDAK RUTIN Rp.					
Tidak 5 → Blok XXIII							
BLOK XXIII. KETERANGAN MIGRASI KELUAR INTERNASIONAL							
2301. APAKAH TERPADAT MANTAN ART/ORGAN YANG SEBELUMNYA MERUPAKAN ART, YANG SAAT INI SEDANG TINGGAL DI LUAR NEGERI, BERANGKAT DALAM RENTANG 1 FEBRUARI 2019 SAMPAI DENGAN SEKARANG?		Ya 1 Tidak 5 → Blok XXIV					
No. Urut Mantan ART	SEBUTKAN NAMA MANTAN ART YANG TINGGAL DI LUAR NEGERI YANG BERANGKAT SEJAK 1 FEBRUARI 2019 SAMPAI DENGAN SEKARANG?	APAKAH (nama) LAKI-LAKI ATAU PEREMPUAN? 1. Laki-laki 2. Perempuan	DI MANAKAH NEGARA TEMPAT TINGGAL (nama)? Tuliskan nama negara (Kode negara diisi oleh pengawas)	TAHUN BERAPA (nama) BERANGKAT KE NEGARA TERSEBUT? (Tahun)	BERAPAKAH UMUR (nama) SAAT BERANGKAT? (Tahun)	APA PENDIDIKAN TERTINGGI YANG (nama) TAMATKAN SAAT BERANGKAT? (Kode pada halaman terakhir VSEN24.K)	APAKAH ALASAN (nama) PINDAH KE NEGARA TERSEBUT? (Kode pada halaman terakhir VSEN24.K)
2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309
1.		☐	☐	☐	☐	☐	☐
2.		☐	☐	☐	☐	☐	☐
3.		☐	☐	☐	☐	☐	☐
4.		☐	☐	☐	☐	☐	☐
5.		☐	☐	☐	☐	☐	☐

25

BLOK XXIV. CATATAN			
Kunjungan I	: Tanggal:	Mulai: ☐ : ☐	Selesai: ☐ : ☐
Kunjungan II	: Tanggal:	Mulai: ☐ : ☐	Selesai: ☐ : ☐
Kode 706: Lapangan Usaha (diisi oleh pengawas) 01. Pertanian tanaman padi dan palawija 02. Hortikultura 03. Perkebunan 04. Perikanan 05. Peternakan 06. Kehutanan dan pertanian lainnya 07. Pertambangan dan penggalian 08. Industri pengolahan 09. Perdagangan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin 10. Pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, dan aktivitas remediasi 11. Konstruksi 12. Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor 13. Pengangkutan dan pergudangan 14. Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum 15. Informasi dan komunikasi 16. Aktivitas keuangan dan asuransi 17. Real estat 18. Aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis 19. Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi, keteragakerjaan, agen perjalanan, dan penunjang usaha lainnya 20. Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 21. Pendidikan 22. Aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial 23. Kesenian, hiburan, dan rekreasi 24. Aktivitas jasa lainnya 25. Aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja 26. Aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya			
Kode 2306: Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 01. Paket A 02. SDB 03. SD 04. MI 05. SPM/PPDF Ula 06. Paket B 07. SMP LB 08. SMP 09. MTs 10. SPM/PPDF Wustha 11. Paket C 12. SMLB 13. SMA 14. MA 15. SMK 16. MAK 17. SPM/PPDF Ulya 18. D1/D2 19. D3 20. D4 21. S1 22. Profesi 23. S2 24. S3 25. Tidak Punya Ijazah SD Kode 2309: Alasan Pindah 1. Pekerjaan 2. Pendidikan 3. ikut suami/istri/orang tua/anak 4. ikut saudara/famili lain 5. Keamanan/politik 6. Bencana/kerusakan lingkungan 7. Lainnya			
Waktu selesai wawancara: ☐ : ☐			

26

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

